Bappelitbangda
pgk

PEMERINTAH KOTA
PANGKALPINANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG 2021

Pangkalpinang
kota beribu
senyuman

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);

18. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode lima (5) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

RKPDKota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan pedoman penyempurnaan Rancangan Akhir Renja PD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dan pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Penyusunan dan Pembentukan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, serta RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2021.

Pasal 4

(1) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, telah dilakukan pemetaan (*mapping*)terhadap nomenklatur program dan kegiatan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

(2) Hasil *mapping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak merubah target dan indikator sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 dan/atau dalam Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VIII Penutup

Pasal 6

(1) Usulan Program/Kegiatan dan Pagu Indikatif masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LampiranI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Hasil *mapping* terhadap nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Juli 2020

WALI KOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Di tengah “badai” pandemi COVID-19 yang terus berlanjut, Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan.

Dari aspek perencanaan dan penganggaran, Tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2020. Adanya COVID-19 yang saat ini masih melanda Indonesia terkhusus di Kota Pangkalpinang, menyebabkan segala perencanaan dan penganggaran yang sebelumnya telah kita susun dan tetapkan, mau tidak mau harus dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Perubahan yang paling signifikan dari sisi perencanaan antara lain perubahan prioritas, sasaran dan tema pembangunan berpedoman dan mengacu kepada Dokumen Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (P- RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Perubahan ini sekaligus untuk memenuhi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, juga sebagai bentuk perencanaan dan penganggaran yang akuntabilitas, adaftif dan responsif.

Adapun materi Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika Perubahan RKPD, hasil pelaksanaan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas

pembangunan daerah Tahun 2020, serta program kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2020.

Dengan segala kerendahan hati kami beritahukan bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, karena itu kami menerima kritik, saran, maupun komentar yang membangun agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Salam Sehat...dan selalu TERSENYUM.....

WALIKOTA PANGKALPINANG



H. MAULAN AKLIL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I ..... I | 1
PENDAHULUAN ..... I | 1
1.1 Latar Belakang ..... I | 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... I | 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen ..... I | 7
1.4 Maksud dan Tujuan ..... I | 10
1.5 Sistematika Dokumen RKPD ..... I | 10
BAB II ..... II | 1
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II | 1
2.1 Kondisi Umum Daerah ..... II | 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ..... II | 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... II | 20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ..... II | 53
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ..... II | 140
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..... II | 150
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..... II | 151
BAB III ..... III | 1
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ..... III | 1
3.1 Kondisi Ekonomi Daerah ..... III | 1
3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi ..... III | 5
3.1.2 Perdagangan ..... III | 9

3.1.3 Laju Inflasi ..... III | 11
3.1.4 Investasi ..... III | 19
3.2 Tantangan Perekonomian Tahun 2020 ..... III | 20
3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..... III | 33
3.3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III | 36
3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III | 39
3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III | 41
3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ..... III | 42
BAB IV ..... IV | 1
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV | 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV | 8
4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan ..... IV | 13
4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs ..... IV | 114
4.4 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Tahun 2021 ..... IV | 115
BAB V ..... V | 1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V | 1
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021 ..... V | 4
5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... V | 4
5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... V | 14
5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan ..... V | 25
5.1.4.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... V | 27
5.2 Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ..... V | 32
5.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Hasil Reses ..... V | 33
5.2.2 Aspirasi Masyarakat ..... V | 35
5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021 ..... V | 44
BAB VI ..... VI | 1
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... VI | 1
6.1 Penetapan Indikator Kinerja ..... VI | 1

6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..... VI | 1

6.1.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ..... VI | 4

BAB VII ..... VII | 1

P E N U T U P ..... VII | 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang	II | 3
Tabel 2. 2	Rata-rata Suhu Udara, Kelembapan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2019	II | 6
Tabel 2. 3	Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019	II | 7
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2018-2019	II | 8
Tabel 2. 5	Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun2019	II | 9
Tabel 2. 6	PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	II | 20
Tabel 2. 7	PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (Juta Rupiah)	II | 22
Tabel 2. 8	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 (%)	II | 23
Tabel 2. 9	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Lainnya	II | 24
Tabel 2. 10	Perkembangan Indikator Komposit IPG di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019	II | 45
Tabel 2. 11	Perkembangan Indikator Komposit IDG di Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018	II | 48
Tabel 2. 12	Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 (%)	II | 53

Tabel 2. 13 Kondisi Gedung Ruang Kelas (SD, SMP) Tahun 2015-2019 Kota Pangkalpinang ..... II | 54

Tabel 2. 14 Rasio Guru ASN dengan Jumlah Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 55

Tabel 2. 15 Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 55

Tabel 2. 16 Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 56

Tabel 2. 17 Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 56

Tabel 2. 18 Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IV Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 57

Tabel 2. 19 Perkembangan Indikator Makro Kesehatan Tahun 2015-2019 ..... II | 58

Tabel 2. 20 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017 ..... II | 61

Tabel 2. 21 Capauan Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 ..... II | 69

Tabel 2. 22 Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 71

Tabel 2. 23 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019 ..... II | 73

Tabel 2. 24 Kejadian Bencana Tahun 2015-2019 ..... II | 74

Tabel 2. 25 Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2015-2019 ..... II | 76

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019 ..... II | 77

Tabel 2. 27 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2013-2017 ..... II | 81

Tabel 2. 28 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 84

Tabel 2. 29 Capaian Indikator Urusan Pertahanan Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 II | 86

Tabel 2. 30 Capaian Target Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 ..... II | 87

Tabel 2. 31 Capaian Target Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2015-2019 ..... II | 89

Tabel 2. 32 Capaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 ..... II | 90

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017 ..... II | 91

Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2015-2019 ..... II | 94

Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2017 ..... II | 96

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019 ..... II | 100

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019 ..... II | 103

Tabel 2. 38 Capaian Indikator Urusan Perkembangan UMKM dan Koperasi Tahun 2013-2017 ..... II | 106

Tabel 2. 39 Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2015-2019 ..... II | 108

Tabel 2. 40 Peningkatan Pemuda Olahraga Tahun 2013-2017 ..... II | 110

Tabel 2. 41 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2013-2017 ..... II | 111

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perandian Tahun 2013-2017 ..... II | 112

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ..... II | 114

Tabel 2. 44 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 117

Tabel 2. 45 Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II |119

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 ..... II | 120

Tabel 2 . 47 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2019 ..... II | 121

Tabel 2. 48 Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2018 ..... II | 122

Tabel 2. 49 Jenis dan Produksi Buah-Buahan (Ton) di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019..... II | 123

Tabel 2. 50 Banyaknya Ternak di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 124

Tabel 2. 51 Banyaknya Ungga di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 ..... II | 124

Tabel 2. 52 Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2013-2017 ..... II | 127

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017 ..... II | 127

Tabel 2. 54 Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017 ..... II | 130

Tabel 2. 55 Capaian Indikator Kinerja Prencanaan Daerah Tahun 2013-2017 ..... II | 133

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2019 ..... II | 134

Tabel 2. 57	Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2015-2019	II | 135
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Sekertariat DPRD Tahun 2015-2019	II | 138
Tabel 2. 59	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019	II | 140
Tabel 2. 60	Kejadian Tindak Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017	II | 144
Tabel 2. 61	Jenis Izin dan Non Izin yang Dilayani Oleh Dina Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang	II | 146
Tabel 2. 62	Rasio Lulusan D4, S1, S2, S3 Terhadap Penduduk Kota Pangkalpinang Tahun 2019	II | 149
Tabel 3. 1	Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (peren), 2015-2019	III | 4
Tabel 3. 2	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional BrutoAtas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2016-2019	III | 6
Tabel 3. 3	Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019	III | 8
Tabel 3. 4	Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang	III | 10
Tabel 3. 5	Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang 2018-2019	III | 10
Tabel 3. 6	Ekpor dan Impor Bulanan Melalui Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang Tahun 2018	III | 11
Tabel 3. 7	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Pangkalpinang Juni 2019, Tahun Kalender 2019 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)	III | 14

Tabel 3. 8	Andil Komoditas Utama Terhadap Inflai Kota Pangkalpinang Juni 2019 (%)	III | 15
Tabel 3. 9	Andil Komoditas Utama Terhadap Deflasi Kota Pangkalpinang Juni 2019 (persen)	III | 15
Tabel 3. 10	Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalenderdan Tahun ke Tahun Kota Pangkalpinang 2017-2019 (persen)	III | 16
Tabel 3. 11	IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Juni 2019, Tahun Kalender 2019 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012=100)	III | 18
Tabel 3. 12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022	III | 44
Tabel 3. 13	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022	III | 45
Tabel 3. 14	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022	III | 47
Tabel 3. 15	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022	III | 48
Tabel 3. 16	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022	III | 50
Tabel 3. 17	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022	III | 51
Tabel 4. 1	Keterkaitan Visi RPJMD dengan RPJPD Kota Pangkalpinang	IV | 5
Tabel 4. 2	Keterkaitan Visi RPJMD Kota Pangkalpinang dengan RPJMN	IV | 5

Tabel 4. 3	Keterkaitan Misi RPJMD Kota Pangkalpinang dengan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	IV | 8
Tabel 4. 4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang	IV | 9
Tabel 4. 5	Perubahan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021	IV | 14
Tabel 4. 6	Keterkaitan Kebijakan Pembangunan dengan Perubahan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021	IV | 19
Tabel 4. 7	Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021	IV | 19
Tabel 4. 8	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota	IV | 20
Tabel 4. 9	Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kota Pangkalpinang Tahun 2021	IV | 22
Tabel 4. 10	Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 Pendukung Prioritas Nasional	IV | 68
Tabel 4. 11	Arah Kebijakan, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Sustainable Developement Goals (SDGs)	IV | 119
Tabel 5. 1	Penetapan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021	V | 7
Tabel 5. 2	Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021	V | 144
Tabel 6. 1	Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021	VI | 2
Tabel 6. 2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021	VI | 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Bagan Air Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	I | 3
Gambar 1. 2	Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya (Lampiran Permendafri No. 86/2017)	I | 8
Gambar 1. 3	Kedudukan RKPD Kota Pangkalpinang	I | 9
Gambar 2. 1	Peta Administrasi Kota Pangkalpinang	II | 2
Gambar 2. 2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2019 (%)	II | 24
Gambar 2. 3	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%)	II | 25
Gambar 2. 4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2018	II | 26
Gambar 2. 5	PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha	II | 27
Gambar 2. 6	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2019 (%)	II | 28
Gambar 2. 7	Posisi Relatif Gari Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Rupiah/kapita/bulan)	II | 29
Gambar 2. 8	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 (%)	II | 30
Gambar 2. 9	Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Th. 2019 (%)	II | 31
Gambar 2. 10	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019 (Ribu Orang)	II | 32

Gambar 2. 11 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Ribu) ..... II | 32

Gambar 2. 12 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019 ..... II | 33

Gambar 2. 13 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%) ..... II | 34

Gambar 2. 14 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019 (Ribu Orang) ..... II | 35

Gambar 2. 15 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%) ..... II | 35

Gambar 2. 16 Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (%) ..... II | 36

Gambar 2. 17 Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%) ..... II | 37

Gambar 2. 18 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun) ..... II | 38

Gambar 2. 19 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun) ..... II | 39

Gambar 2. 20 Perkembangan Rata-rata Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun) ..... II | 40

Gambar 2. 21 Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun) ..... II | 41

Gambar 2. 22 Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun) ..... II | 42

Gambar 2. 23 Posisi Relatif AHH Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun) ..... II | 43

Gambar 2. 24 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun) ..... II | 44

Gambar 2. 25 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun) ..... II | 44

Gambar 2. 26 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018 (Tahun) ..... II | 46

Gambar 2. 27 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 (Tahun) ..... II | 47

Gambar 2. 28 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang Dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun2017-2019 (%) ..... II | 49

Gambar 2. 29 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%) ..... II | 50

Gambar 2. 30 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 (%) ..... II | 51

Gambar 2. 31 Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%) ..... II | 51

Gambar 2. 32 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga PerKapita Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 (Juta Ruipiah) ..... II | 142

Gambar 2. 33 Perbandingan NTP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018 ..... II | 143

Gambar 2. 34	Kasus Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019	II | 144
Gambar 2. 35	Kejadian Demonstasi di Kota Pangkalpinang Tahun2014-2018	II | 145
Gambar 3. 1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	III | 7
Gambar 3.2	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun Kota Pangkalpinang 2017-2019 (%)	III | 17
Gambar 3. 3	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020	III | 23
Gambar 3. 4	Andil Pertumbuhan Dari Sektor Lapangan Usaha (%)	III | 24
Gambar 3. 5	Andil Pertumbuhan Dari Sisi Pengeluaran (%)	III | 25
Gambar 3. 6	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan II Tahuun 2020	III | 26
Gambar 3. 7	Indeks Keyakinan Konsumen	III | 27
Gambar 3. 8	Laju Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan dan Babel Juni 2020	III | 30
Gambar 3. 9	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2019 (%)	III | 32
Gambar 3. 10	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 (%)	III | 33
Gambar 4. 1	Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	IV | 15
Gambar 4. 2	Pengembangan Wilayah Untuk Mengyrangi Kesenjangan	IV | 16

Gambar 4. 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing ..... IV | 16

Gambar 4. 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan ..... IV | 17

Gambar 4. 5 Insfrastruktur Untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar ..... IV | 17

Gambar 4. 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim ..... IV | 18

Gambar 4. 7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik ..... IV | 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima belas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2007-2025 dan merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Bagi Perangkat Daerah (PD), RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2021.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2021 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJPN, RPJMN, RKP Tahun 2021, RPJP Provinsi Kep. Bangka Belitung, RPJPD Kota Pangkalpinang, RPJMD Kota Pangkalpinang, dan RKPD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2021 terutama

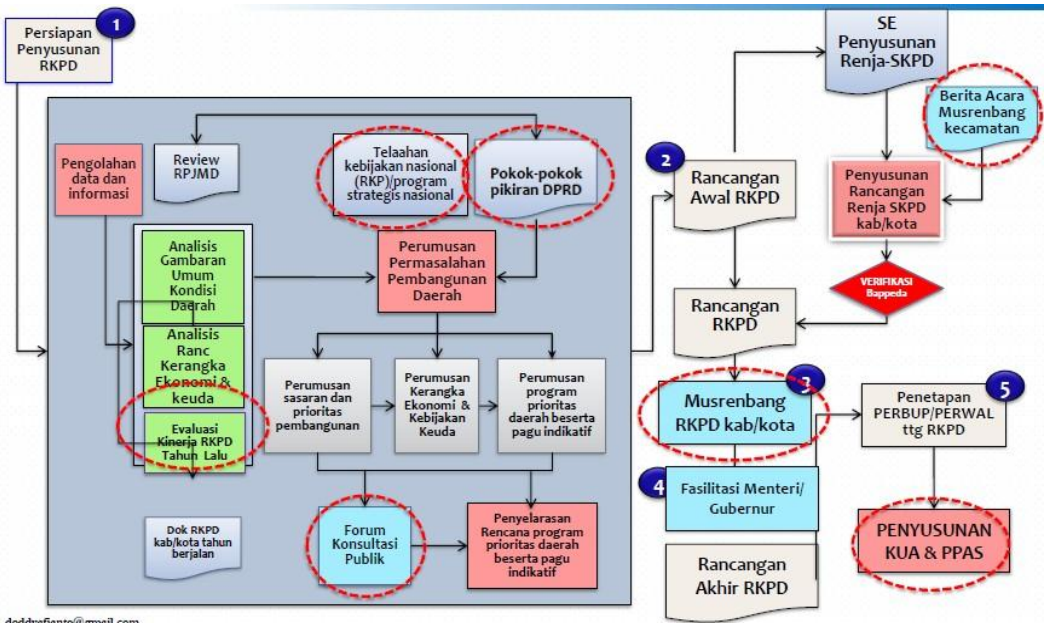
dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2021.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Pada orientasi substansi, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Secara diagramatis, skema alur penyusunan RKPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 No. 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8);

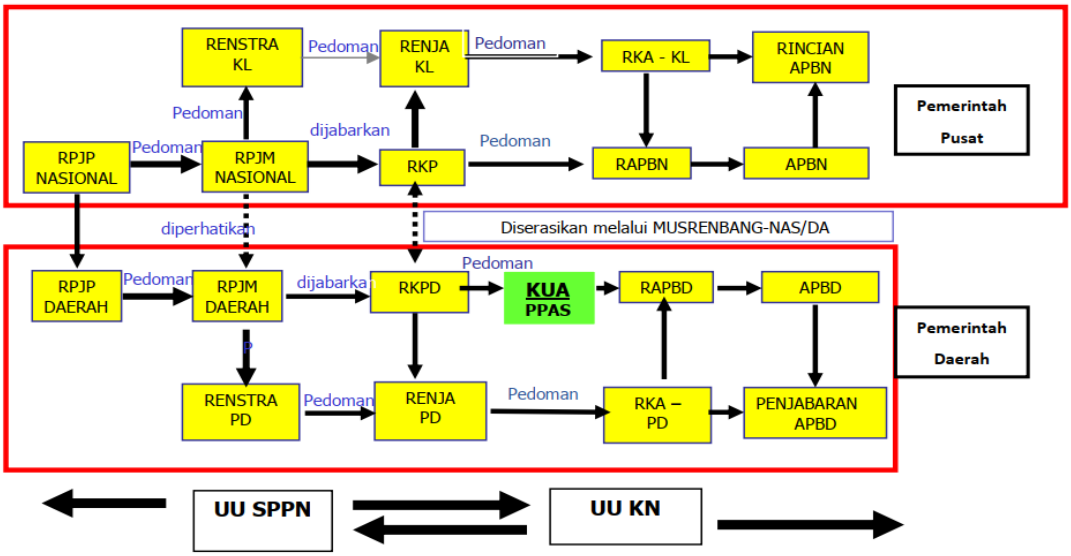
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD merupakan acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat daerah maupun nasional.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1. 2
Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya (Lampiran Permendagri No. 86/2017)



Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

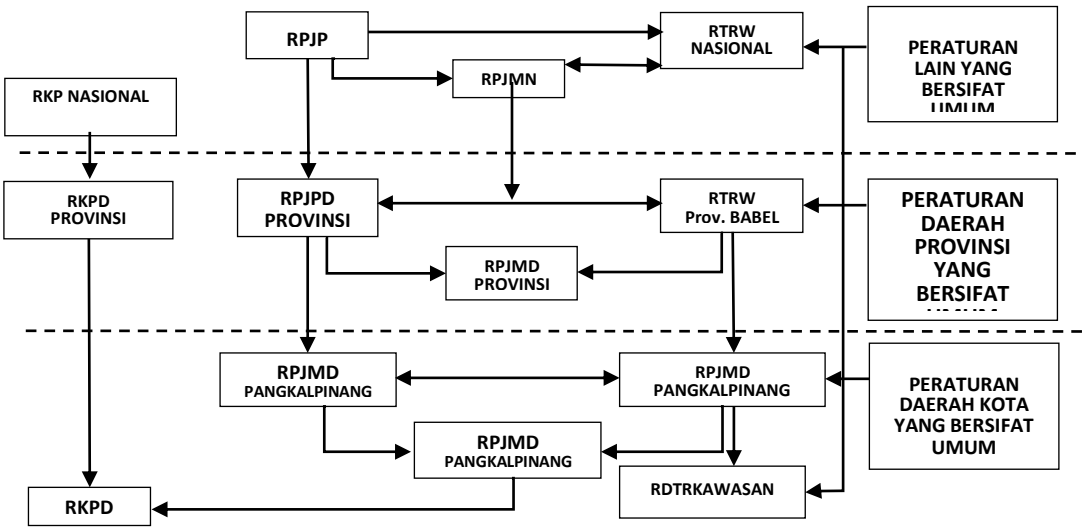
Mengacu pada Gambar 1.2 di atas dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut:

1. RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.

2. RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
3. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
4. RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 harus mengacu dan berpedoman pada dokumen RKP Nasional Tahun 2021, RKPD Pemerintah Daerah Bangka Belitung Tahun 2021, RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026, dan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Selain itu kedudukan RKPD tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. Kedudukan RKPD Kota Pangkalpinang secara lebih jelas dapat dilihat dalam Gambar 1.3.

Gambar 1. 3
Kedudukan RKPD Kota Pangkalpinang



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah untuk memberikan arah pembangunan tahunan Kota Pangkalpinang dan sinergitas program dan kegiatan di daerah, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung, dan Kota Pangkalpinang maupun yang dilaksanakan bersama-sama masyarakat. Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai:

1. Pedoman bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2021;
2. Kerangka acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja-PD;dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan

dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Kota Pangkalpinang, RKP/program strategis nasional, dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang.

1.4 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan

1.5 Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

Memberikan gambaran kondisi umum daerah meliputi aspek geografi, demografi, potensi sumber daya, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Menggambarkan tentang kondisi ekonomi daerah secara makro meliputi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, laju inflasi, dan investasi.

3.2 Tantangan Perekonomian Tahun 2020

Menggambarkan dan memproyeksikan kondisi perekonomian di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2020 secara makro meliputi laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan tenaga kerja.

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menggambarkan perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian makro Kota Pangkalpinang tahun 2021-2022 meliputi arah kebijakan keuangan daerah, pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang.

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Berisi Tema, Tematik, Prioritas, Sasaran, Indikator sasaran dan interkoneksi diantaranya. Disajikan pula interkoneksi dengan RPJMD BANGKA BELITUNG dan RPJMN Republik Indonesia.

4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

Menggambarkan Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian *Sustainabel Developement Goals* (SDGs)

4.4 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Tahun 2021

Menjelaskan tentang beberapa isu strategis dan tantangan yang akan dihadapi pelaksanaan pembangunan pada tahun 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

Memuat beberapa isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan urusan, pagu indikatif yang disediakan guna mendukung program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan serta target yang akan dicapai pada tahun 2021.

5.2 Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Memuat saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota untuk Perencanaan Tahun 2021. Selanjutnya, Walikota memberikan telaahan terkait dengan arah kebijakan dan program yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud.

5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021

Berisi gambaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII P E N U T U P

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

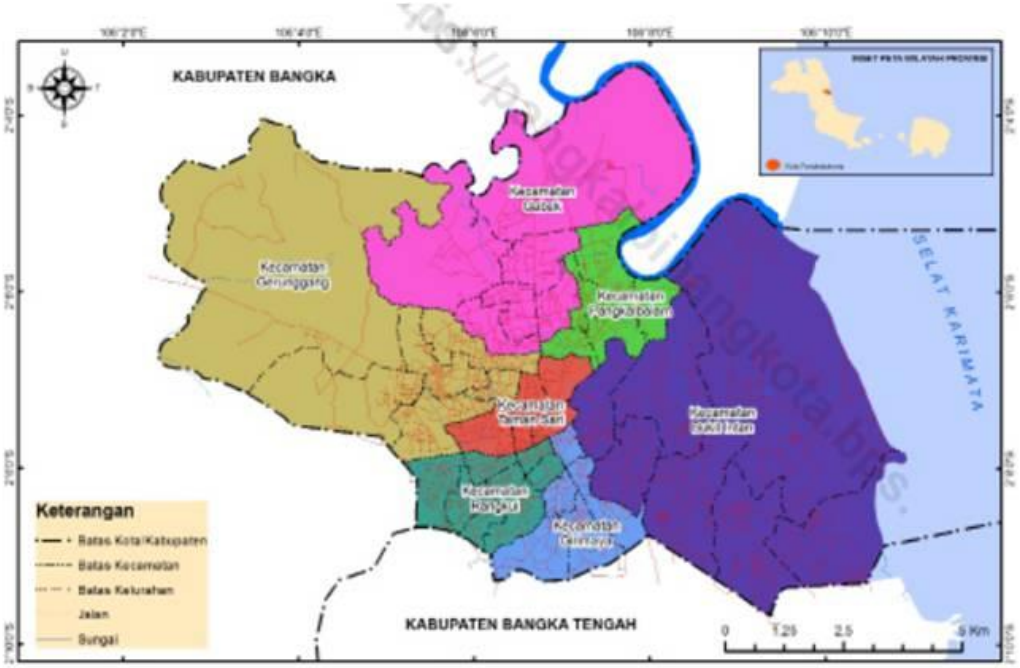
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Pangkalpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas wilayah Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka dan antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah ±104,67 km² atau 10.467 hektar. Luasan Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,64 persen dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas-batas wilayah Kota Pangkalpinang Sebelah Utara Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka), sebelah timur Selat Karimata, sebelah selatan Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah), dan sebelah barat Mendo Barat (Kabupaten Bangka) seperti terlihat pada Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2. 1
Peta Administrasi Kota Pangkalpinang



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2020, BPS Kota Pangkalpinang

Pembentukan Kota Pangkalpinang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan wilayah administrasi meliputi 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan demikian wilayah administrasi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi menjadi 6 (enam) kabupaten dan 1 (satu) kota, dengan ibukota provinsi adalah Kota Pangkalpinang. Wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 kecamatan dan 42 kelurahan, rincian kecamatan dan kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Banyaknya Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km²)	Persentase (%)	Jumlah Kelurahan
1.	Rangkui	5,02	4,24	8
2.	Bukit Intan	35,66	35,66	7
3.	Girimaya	4,74	4,00	5
4.	Pangkalbalam	4,68	3,95	5
5.	Gabek	34,21	28,89	6
6.	Tamansari	3,18	2,68	5
7.	Gerunggang	30,93	26,12	6
Total		**118,41**	**100**	**42**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2020

b. Letak Astronomis dan Geografis

Berdasarkan kondisi geografisnya, wilayah Kota Pangkalpinang terbagi menjadi wilayah daratan dan wilayah lautan. Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2000 yang telah di sahkan secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk atas dua pulau besar dan ratusan pulau kecil. Kota Pangkalpinang yang merupakan kota dengan luasan terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak di Pulau Bangka. Secara astronomis, Kota Pangkalpinang terletak antara 02°04' – 02°10' LS dan 106°04' – 106°07' BT.

Bila ditinjau dari sudut geografisnya Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis, jika dikaitkan dengan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai pusat pengembangan wilayah bagi Provinsi Bangka Belitung dalam perkembangannya selama beberapa tahapan pembangunan, Kota

Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan pertumbuhan fisik Kota Pangkalpinang.

c. Kondisi Topografi

Kota Pangkalpinang secara umum mempunyai ketinggian antara 0 hingga 70 meter dari permukaan laut (m DPL), yang terbagai ke dalam lima kelas yaitu: 0-5 m DPL, 5-15 m DPL, 15-30 m DPL, 30-45 m DPL, dan 45–70 m DPL. Ketinggian tempat yang paling tinggi adalah Bukit Jurumudi dengan ketinggian 69 m DPL. Sebagian besar Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang bergelombang sampai dengan datar yakni berkisar dari 0-30 m DPL. Sedangkan ketinggian 30-70 m DPL terletak di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Bukit Intan. Kelerengan Kota Pangkalpinang dibagi menjadi enam kelas lereng, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kelas lereng 0-2 % (topografi sangat datar hingga cekungan), tersusun atas batuan endapan dan bukan endapan, berupa daerah pantai, rawa, danau dan bantaran sungai. Wilayah dengan kelerengan ini terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang.
2. Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), lokasinya mulai dari pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
3. Kelas lereng 8–15 % (topografi landai agak miring), merupakan kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil, dataran berombak, yang terdapat di

Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.

4. Kelas lereng 15–25 % (topografi agak curam), terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang.
5. Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang.
6. Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

d. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda. Struktur geologi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa formasi batuan antara lain batuan malihan (*metamorf*) yang terdiri dari *sekis* dan *gneis* sebagai batuan tertua.

Struktur geologi di Kota Pangkalpinang secara umum terdiri dari formasi tertua berupa batu kapur berumur *Permo Karbon*, menyusul *Slate* berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granis hingga dioditik dengan inklusi mineral berwarna yaitu Biotit, dan ada kalanya Amfibol Hijau.

Jika dilihat secara morfologi, wilayah Kota Pangkalpinang berbentuk cekung dimana pusat kota berada di daerah rendah. Daerah-daerah yang

berbukit mengelompok pada bagian Barat hingga Selatan Kota Pangkalpinang. Salah satunya terletak di Bukit Girimaya. Morfologi Kota Pangkalpinang pada dasarnya berbentuk cekung, dimana bagian pusat kota lebih rendah. Keadaan ini memberikan dampak negatif, seperti wilayah Kota Pangkalpinang menjadi rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang.

e. Kondisi Klimatologi

Kota Pangkalpinang memiliki iklim tropis kering selama 3 bulan berturut-turut, dimana iklim basah mencapai 7 bulan sampai dengan 9 bulan. Secara umum, kondisi klimatologi di Kota Pangkalpinang berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan di Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2019 ditampilkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2
Rata-Rata Suhu Udara, Kelembapan Udara, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG Kota Pangkalpinang Tahun 2019

No	Uraian	Keterangan	Kondisi
1	Suhu (°C)	Maksimum	34,9
		Minimum	22,5
		Rata-Rata	27,3
2	Kelembaban Udara (%)	Maksimum	99
		Minimum	32
		Rata-Rata	80,3
3	Tekanan Udara (mb)	Rata-Rata	1.010.1
4	Penyinaran Matahari (%)	Rata-Rata	58,9
5	Kecepatan Angin (knots)	Maksimum	11,4
		Minimum	0,0
		Rata-Rata	2,8
6	Curah Hujan	Intensitas (mm)	2.073,3
		Hari	196

Kondisi klimatologi berdasarkan tabel tersebut, dapat digambarkan kelembaban udara di wilayah Pangkalpinang rata-rata berkisar antara 57%

hingga 97% dengan kelembapan udara rata-rata adalah 81,9%. Temperatur udara rata-rata di wilayah sekitar Stasiun Pangkalpinang berkisar antara 23,5°C hingga 32,4°C. sehingga temperatur udara rata-rata sebesar 27°C. Kecepatan angin rata-rata 4,8 knot. Lama penyinaran matahari di wilayah Pangkalpinang adalah 54,3%. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 249 hari, dengan intensitas 2.099,6 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 210 hari.

B. Kondisi Demografis

Gambaran Demografi di suatu wilayah dapat dilihat dari jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk yang terdapat di dalamnya. Perkembangan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2017-2019 ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 3
Jumlah Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2019

No	Kecamatan	2017			2018			2019		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Rangkui	20.242	19.069	39.311	20.616	19.486	40.102	19.527	19.197	38.724
2.	Bukit Intan	19.017	18.433	37.450	19.376	18.835	38.211	19.544	18.774	38.318
3.	Girimaya	10.493	10.221	20.714	10.695	10.446	21.141	9.694	9.543	19.237
4.	Pangkalbalam	11.510	10.722	22.232	11.728	10.956	22.684	11.508	11.059	22.567
5.	Gabek	13.156	12.607	25.763	13.402	12.882	26.284	15.939	15.543	31.482
6.	Tamansari	11.866	11.230	23.096	12.080	11.475	23.555	10.732	10.551	21.283
7.	Gerunggang	18.643	17.183	35.826	18.982	17.561	36.543	22.138	21.630	43.768
Total		104.927	99.465	204.392	106.879	101.641	208.520	109.082	106.297	215.379

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Berdasarkan Tabel 2.3, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebanyak 215.379 jiwa, terdiri dari 109.082 jiwa laki-laki dan 106.297 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah

penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Pangkalpinang. Adapun jumlah penduduk terbanyak menurut Kecamatan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 berada di Kecamatan Gerunggang sebanyak 43.768 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Girimaya sebanyak 19.237 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang pada tahun 2018-2019 mencapai 0,85% (Tabel 2.4). Apabila melihat dari data per kecamatan, maka terlihat bahwa terdapat 3 kecamatan yang menunjukan laju pertumbuhan yang positif, sedangkan 4 kecamatan lainnya menunjukan laju pertumbuhan negatif.

Tabel 2. 4
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan
Tahun 2018-2019

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan (%)
1.	Rangkui	-1,61
2.	Bukit Intan	1,64
3.	Girimaya	-1,9
4.	Pangkalbalam	-1,58
5.	Gabek	3,54
6.	Tamansari	-2,43
7.	Gerunggang	4,81
Pangkalpinang		**0,85**

Sumber: BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Ketiga kecamatan yang menunjukan pertumbuhan positif, diurut dari yang terbesar adalah Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek dan Kecamatan Bukit Intan. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah pengembangan perumahan dan pemukiman baru di wilayah Kota Pangkalpinang. Sedangkan Kecamatan-kecamatan Girimaya, Pangkalbalam, Rangkui, dan Tamansari merupakan daerah-daerah yang berdekatan dengan pusat kota yang merupakan daerah perumahan dan pemukiman lama.

Kepadatan penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 1.819 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui sebesar 7.714 jiwa per km² sedangkan kepadatan terkecil berada di Kecamatan Gabek yang hanya mencapai 920 jiwa per km², secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5
Kepadatan Penduduk Kota Pangkalpinang Per Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah *(Km²)*	Kepadatan Penduduk *(Per km²)*
1.	Rangkui	5,02	7.714
2.	Bukit Intan	35,66	1.075
3.	Girimaya	4,74	4.058
4.	Pangkalbalam	4,68	4.822
5.	Gabek	34,20	920
6.	Tamansari	3,18	6.693
7.	Gerunggang	30,93	1.415
Kota Pangkalpinang		**118,41**	**1.819**

Sumber: BPS, buku Kota Pangkalpinang dalam Angka, 2019

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2019 sebanyak 161.114 orang (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2019). Sebesar 68,35 penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja).

C. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan arahan rencana kawasan budidaya yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 maka, pengembangan wilayah budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai berikut:

a. Kawasan Perumahan dan Permukiman

Kawasan perumahan dan permukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian. Dengan asumsi setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK, maka berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, dapat diprediksi kebutuhan rumah di Kota Pangkalpinang pada tahun 2030 sebanyak 60.678 unit rumah.

Adapun arahan tingkat kepadatan perumahan dan permukiman di Kota Pangkalpinang dibagi menjadi:

1. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan tinggi, dengan jumlah 54-97 rumah/ha, dikembangkan di pusat kota seluas kurang lebih 1.300 ha meliputi Kecamatan Tamansari, Kecamatan Rangkui, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
2. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan sedang, dengan jumlah 24-53 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 2.550 ha meliputi sebagian Kecamatan Gabek, sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Bukit Intan, sebagian Kecamatan Girimaya dan sebagian Kecamatan Pangkalbalam.
3. kawasan perumahan dan permukiman kepadatan rendah, dengan jumlah 0-23 rumah/ha, dikembangkan seluas kurang lebih 1.800 ha meliputi sebagian Kecamatan Gerunggang, sebagian Kecamatan Gabek dan sebagian Kecamatan Bukit Intan.

b. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa adalah lokasi yang ditetapkan untuk transaksi langsung antara pembeli dan pedagang atau kegiatan pelayanan yang wadah fisiknya antara lain berupa pertokoan, pasar, pusat belanja dan perkantoran. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ditujukan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Kawasan perdagangan dan jasa memiliki fungsi antara lain:

1. memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan (sisi permintaan) dan masyarakat yang menjual jasa (sisi penawaran); dan
2. menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang dominan terhadap PDRB.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Pangkalpinang direncanakan berdasarkan skala pelayanannya, yang secara umum terdiri dari:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional.

   Mencakup kegiatan perdagangan antar kota antarpulau yang lebih berorientasi ke arah luar kota, yang meliputi komoditas hasil perikanan, perkebunan serta komoditas lainnya termasuk barang-barang untuk keperluan rumah tangga. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional diarahkan pada kawasan pusat kota yaitu di sekitar Kelurahan Pasar Padi (Kecamatan Girimaya), Kelurahan Bintang dan Kelurahan Masjid Jamik (Kecamatan Rangkui), koridor jalan kolektor primer 1, pasar modern di Kelurahan Semabung Lama (Kecamatan Bukit Intan) kawasan Teluk Bayur CBD (*Central Business District*) di Kelurahan Pasir Putih (Kecamatan

Bukit Intan) serta kawasan Air Mawar CBD di Kelurahan Air Mawar (Kecamatan Bukit Intan).

2. Pusat perdagangan dan jasa skala kota.

   Meliputi pengembangan kawasan Pasar Inpres di Kelurahan Batin Tikal (Kecamatan Tamansari) dan Kelurahan Bukit Sari (Kecamatan Gerunggang), koridor jalan kolektor primer 2, Jalan Batin Tikal dan Jalan Kampung Melayu. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa pada kawasan ini adalah perdagangan dan jasa modern, pertokoan, dengan skala pelayanan wilayah kota.

3. Perdagangan dan jasa skala kecamatan.

   Meliputi pengembangan kawasan Pasar Rumput di Kelurahan Ketapang (Kecamatan Pangkalbalam), kawasan Pasar Parit Lalang di Kelurahan Parit Lalang (Kecamatan Rangkui) dan rencana pengembangan pasar kecamatan di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek dan Kecamatan Girimaya.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk semua skala pelayanan di atas, dilakukan dengan upaya penataan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan seperti bangunan pertokoan, kawasan parkir, jaringan jalan, sarana angkutan umum, jalur pejalan kaki, serta kualitas bangunan.

c. Kawasan Perkantoran Pemerintah

Bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan pemerintahan tingkat kota maupun provinsi. Adapun untuk perkembangan perkantoran swasta dan

jasa komersial diarahkan pada kawasan perdagangan dan jasa. Untuk mencapai kebijakan tersebut, strategi yang akan ditempuh, meliputi:

1. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kawasan sekitar kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kelurahan Air Itam dan Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan; dan
2. memusatkan kantor-kantor di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang di kawasan sekitar kantor Walikota Pangkalpinang di Kelurahan Sriwijaya dan Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya.

d. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan kawasan peruntukan industri ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing industri serta menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha industri pengolahan dan industri pergudangan. Kawasan peruntukan industri memiliki fungsi antara lain:

1. memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan PDRB di wilayah yang bersangkutan; dan
4. mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Kegiatan industri yang ada saat ini di Kota Pangkalpinang tersebar di berbagai kelurahan yang sebagian berada pada kawasan perumahan dan permukiman. Untuk pengembangan lebih lanjut kegiatan industri di Kota Pangkalpinang dipusatkan di Kawasan Peruntukan Industri Ketapang Kecamatan Pangkalbalam seluas 825 ha.

e. Kawasan Pergudangan

Kawasan pergudangan adalah kawasan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gudang, yang meliputi kegiatan perpindahan dan penyimpanan barang. Berdasarkan pertimbangan aspek aksesibilitas terhadap kawasan pelabuhan dan industri, maka kawasan pergudangan di wilayah Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek serta sebagian di Kecamatan Pangkalbalam yang merupakan salah satu kawasan strategis di Kota Pangkalpinang.

f. Kawasan Pelabuhan

Kota Pangkalpinang memiliki pelabuhan laut dan pelabuhan pendukung kegiatan perikanan. Pelabuhan laut terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan inter dan antarmoda transportasi. Pelabuhan perikanan terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai

tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Kawasan pelabuhan di Kota Pangkalpinang akan diarahkan pengembangannya di sekitar Jembatan Emas Pangkalpinang muara Sungai Baturusa sebagai Kawasan *New Port* Pangkalbalam.

g. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata adalah wilayah yang secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dengan bidang tersebut dan tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan. Jenis objek wisata yang diusahakan dan dikembangkan di kawasan pariwisata dapat berupa wisata alam, wisata sejarah dan konservasi budaya. Pengembangan kawasan pariwisata ditujukan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan objek, daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, serta usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Kawasan pariwisata memiliki fungsi antara lain:

1. memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan nilai-nilai sejarah/budaya lokal dan keindahan alam; dan
2. mendukung upaya penyediaan lapangan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai berikut:

(a) kawasan pariwisata alam:

(1) Pantai Pasir Padi dan Pantai Tanjung Bunga

(2) Hutan kota

(b) kawasan pariwisata budaya, yang akan dikembangkan di ruang cagar budaya.

(c) kawasan pariwisata buatan, yang akan dikembangkan pada:

(1) ATM (Alun-Alun Taman Merdeka) di Kecamatan Tamansari;

(2) BBG (*Bangka Botanical Garden*) di Kecamatan Bukit Intan;

(3) Wisata Kuliner Pasar Mambo di Kecamatan Rangkui;

(4) Stadion Aquatic di Kecamatan Gerunggang;

(5) Wisata Air di Kolam Retensi Kacang Pedang di Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Rangkui;

(6) Waterpark di Kecamatan Tamansari;

(7) Wisata Kolong Teluk Bayur, Kolong Kepuh, Kolong Akit; dan

(8) Lapangan golf Girimaya di Kecamatan Girimaya.

D. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau

Ruang terbuka non hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, ruang terbuka yang diperkeras (*paved*) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, kolong/danau, maupun area-area yang diperuntukkan khusus sebagai area genangan (retensi). Pengembangan kawasan RTNH ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan kepemerintahan dan kegiatan permukiman, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial. Penyediaan dan pemanfaatan RTNH secara langsung membentuk keindahan dan kenyamanan, maka bila ditinjau dari segi-segi sosial-politik dan ekonomi, dapat berfungsi penting bagi perkembangan pariwisata yang pada

saatnya juga akan kembali berpengaruh terhadap kesehatan perkembangan sosial, politik dan ekonomi suatu hubungan antara wilayah perdesaan-perkotaan tertentu.

Adapun rencana pengembangan RTNH di Kota Pangkalpinang terdiri atas seluruh kolong yang ada di Kota Pangkalpinang, Plaza Gedung Tudung Saji, halaman dan tempat parkir fasilitas umum, serta jalur-jalur trotoar dan pedestrian.

E. Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Kawasan peruntukan sektor informal ditujukan untuk memberikan ruang yang khusus disediakan untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) berupa pelataran dan ruang-ruang di pinggir jalan di pusat-pusat perdagangan (pasar) atau keramaian dengan lokasi yang sesuai dengan karakteristik kaki lima. Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha informal yang dilakukan oleh seorang/badan/lembaga dengan menjual barang atau produk dagangan yang tidak memiliki tempat usaha permanen dan sewaktu-waktu dapat berpindah-pindah tempat untuk menjajakan barang dagangannya. Berdagang secara informal merupakan solusi termudah bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya di tengah kesempatan kerja formal yang terbatas.

Berdasarkan pertimbangan kondisi kota, konsep dan prinsip penataan, maka rencana pengembangan kawasan peruntukan sektor informal di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

a. kawasan peruntukan sektor informal yang direncanakan pada waktu tertentu yang terdiri atas kuliner malam di Jalan Kapten Munzir Thalib dan Jalan Ican

Saleh, serta Pasar Ramadhan di Jalan Batin Tikal, Jalan Masjid Jamik dan Jalan Depati Hamzah; dan

b. kawasan peruntukan sektor informal yang terintegrasi dengan kawasan perdagangan dan jasa.

F. Kawasan Pendidikan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana pendidikan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor pendidikan. Pengembangan kawasan pendidikan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan sebagai kawasan pengembangan untuk pendidikan tinggi, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Gabek. Adapun untuk pengembangan pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan tingkat menengah atas maupun kejuruan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman yang disesuaikan dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

G. Kawasan Kesehatan

Ditujukan untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk menunjang kegiatan pelayanan masyarakat di sektor kesehatan. Pengembangan kawasan kesehatan di wilayah Kota Pangkalpinang ditujukan untuk pengembangan prasarana rumah sakit umum daerah dengan skala regional, yang akan diarahkan pengembangannya di Kecamatan Girimaya. Adapun untuk pengembangan prasarana dan sarana kesehatan lingkungan dapat diarahkan menyatu pada lingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standar kebutuhan prasarana dan sarana kawasan.

H. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Strategi secara umum untuk meningkatkan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan antara lain:

a. mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan;
b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan kemanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kondisi *eksisting* serta perkembangan kebutuhan, maka rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kota Pangkalpinang terdiri atas wilayah:

a. Kepolisian Daerah (POLDA) Kepulauan Bangka Belitung di Kecamatan Bukit Intan;
b. Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Pangkalpinang di Kecamatan Tamansari; dan
c. Komando Resort Militer (KOREM) 045 Garuda Jaya / Komando Distrik Militer (KODIM) 0413 Bangka di Kecamatan Rangkui dan rencana pengembangannya di Kecamatan Gerunggang.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kota Pangkalpinang Atas Harga Berlaku pada tahun 2015 hingga 2019 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 tercatat PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan harga berlaku sebesar 13.703.254 juta rupiah. Perkembangan ini dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2. 6
PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2014-2018 (Juta rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017r	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	510.788	554.263	559.351	635.921	676.109
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.949.887	1.984.236	2.086.418	2.051.152	1.805.255
Pengadaan Listrik dan Gas	6.297	8.256	9.726	10.522	14.285
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.412	3.740	4.223	4.227	4.436

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017r	2018*	2019**
Konstruksi	1.097.449	1.198.149	1.332.758	1.465.231	1.678.788
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.700.983	3.003.108	3.334.508	3.611.769	3.718.789
Transportasi dan Pergudangan	636.498	684.665	761.854	808.753	896.255
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	349.273	384.813	417.933	450.193	534.765
Informasi dan Komunikasi	287.429	315.383	347.249	385.252	459.379
Jasa Keuangan dan Asuransi	464.569	516.446	551.580	624.277	669.962
Real Estate	548.373	587.474	640.907	712.428	744.523
Jasa Perusahaan	52.959	54.770	59.979	66.479	71.727
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	713.466	786.266	862.495	927.196	1.035.367
Jasa Pendidikan	534.775	615.686	668.254	722.732	809.576
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	199.884	211.944	233.161	249.362	282.595
Jasa lainnya	178.630	207.294	238.170	262.244	301.437
Produk Domestik Regional Bruto	**10.234.632**	**11.116.493**	**12.108.566**	**12.987.788**	**13.703.254**

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pangkalpinang juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2015-2019 seperti halnya PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kota Pangkalpinang. PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2018 sebesar 9.076.276 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kota Pangkalpinang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 7
PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)

Sektor PDRB	PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017r	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	373.010	384.696	365.452	397.178	409.678
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	1.553.673	1.615.042	1.671.151	1.596.407	1.43.632
Pengadaan Listrik dan Gas	4.855	5.552	5.791	6.166	8.094
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.244	2.358	2.538	2.447	2.537
Konstruksi	766.416	819.009	873.932	929.509	1.033.399
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.018.656	2.111.081	2.250.878	2.408.775	2.424.986
Transportasi dan Pergudangan	447.872	470.604	510.771	544.553	573.855
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	250.327	262.199	278.720	293.279	331.455
Informasi dan Komunikasi	265.440	289.701	316.080	351.214	416.905
Jasa Keuangan dan Asuransi	342.870	368.711	378.248	413.923	437.848
Real Estate	390.064	403.162	422.097	461.322	471.300
Jasa Perusahaan	37.566	37.596	38.378	41.020	41.949
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	484.736	516.157	541.873	592.696	654.869
Jasa Pendidikan	340.486	366.604	383.361	415.952	456.480
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	148.626	152.559	164.894	172.575	191.157
Jasa lainnya	128.175	140.985	154.318	166.808	185.125
Produk Domestik Regional Bruto	**7.555.016**	**7.945.986**	**8.358.482**	**8.793.824**	**9.076.276**

Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2015-2019 kondisinya fluktuatif. Dari 4,24% pada tahun 2015 terjadi penurunan menjadi 3,34% tahun 2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan paling

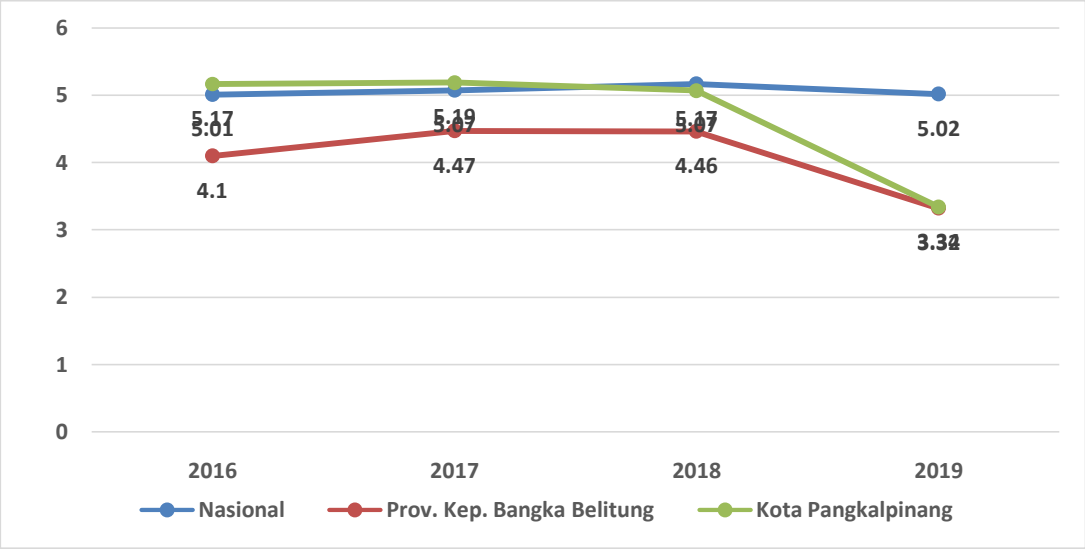
tinggi adalah di pengadaan listrik dan gas, yakni sebesar 31,28%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 (%)

Sektor PDRB	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK (Juta Rupiah)				
	2015	2016	2017r	2018*	2019**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,67	3,13	-5,00	8,86	3,15
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	0,94	3,95	3,47	-4,47	-10,85
Pengadaan Listrik dan Gas	9,25	13,74	4,88	6,47	31.28
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,01	5,07	7,61	-3,57	3,71
Konstruksi	3,43	6,86	6,71	6,36	11,18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,12	4,58	6,62	7,01	2,63
Transportasi dan Pergudangan	6,21	5,08	8,54	6,61	4,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,59	4,74	6,30	5,22	12,85
Informasi dan Komunikasi	6,58	9,14	9,11	13,42	16,3
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	7,54	2,59	9,97	5,26
Real Estate	4,11	3,36	4,70	9,29	2,16
Jasa Perusahaan	3,30	0,08	2,08	6,89	2,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,57	6,48	4,98	9,38	9,99
Jasa Pendidikan	9,04	7,67	4,57	8,50	8,74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,73	2,65	8,08	4,66	10,77
Jasa lainnya	7,06	9,99	9,46	8,09	10,98
Produk Domestik Regional Bruto	**4,24**	**5,17**	**5,19**	**5,07**	**3,34**

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang kembali mengalami penurunan pada tahun 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang selalu menunjukkan perlambatan dari tahun ke tahun setelah sempat meningkat di tahun 2016-2017. Berbeda dengan capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami penurunan pada tahun 2019. Secara rinci bisa dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2. 2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2016-2019 (%)



Sumber: BPS, 2020

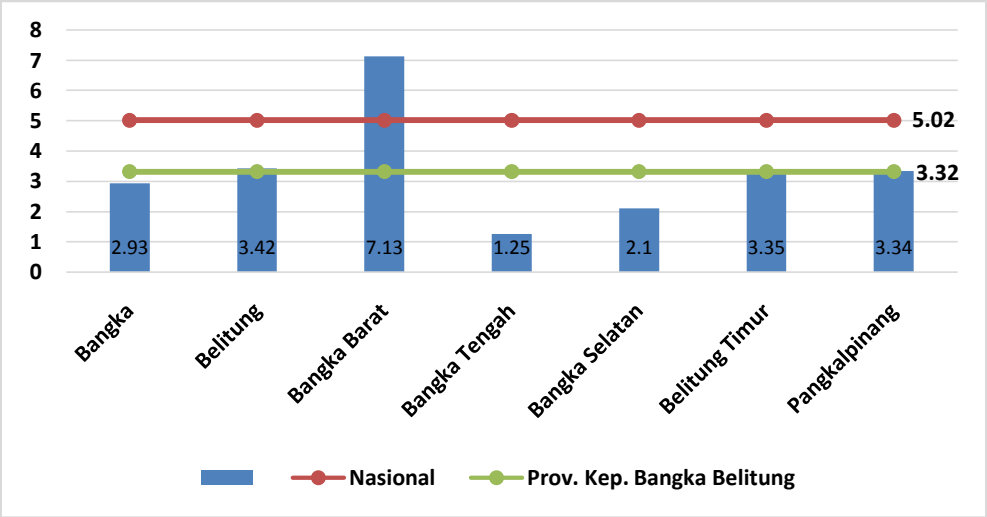
Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang sebesar 3,31 menurun sebesar 1.73% dari tahun 2018, dan berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 3,32% di tahun 2019, turun dari angka 4,46 di tahun 2018. Jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar yang terdapat di Provinsi. Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2019 menempati posisi ke-4 di bawah Kabupaten Bangka barat, Belitung dan Belitung Timur.

Tabel 2. 9
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Lainnya

Kab/Kota	Pertumbuhan th 2019
Bangka	2,93 %
Belitung	3,42 %
Bangka Barat	7,13 %
Bangka Tengah	1,25 %
Bangka Selatan	2,1 %
Belitung Timur	3,35 %
Pangkalpinang	3,34 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Gambar 2. 3
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%)

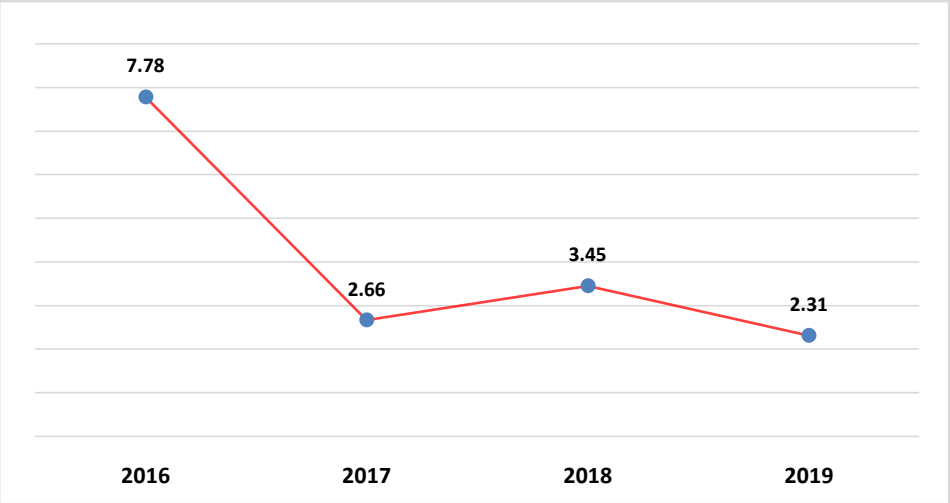


Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka 2020, BPS

b. Laju Inflasi

Inflasi yang terjadi di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 4 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 (Januari tahun n terhadap Januari tahun (n-1)) menunjukan nilai yang fluktuatif. Nilai inflasi tertinggi yang dialami oleh Kota Pangkalpinang mencapai 7,78% pada tahun 2016. Kemudian tahun 2019 inflasi mencapai 2,31% . Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2. 4
Laju Inflasi Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2018



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka 2020, BPS

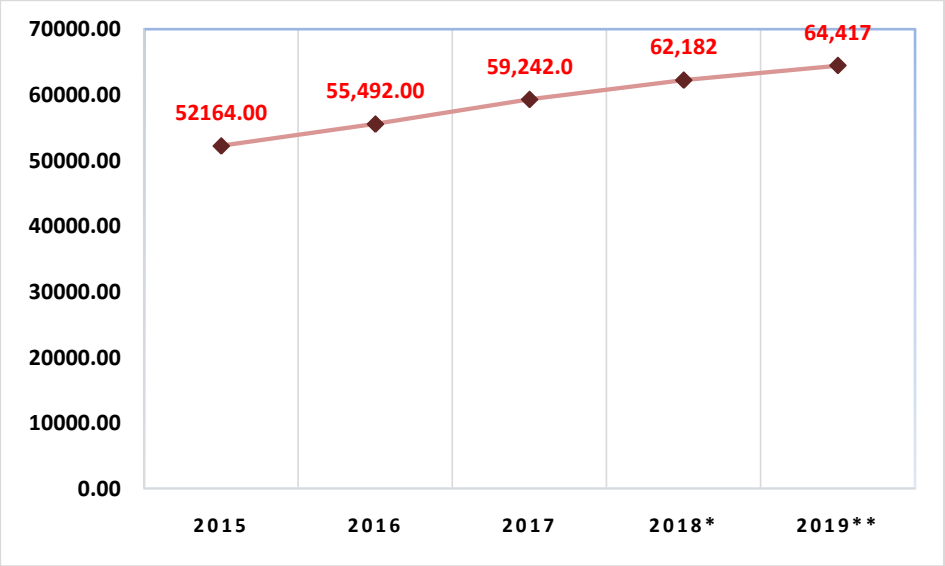
c. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kota Pangkalpinang menurut dasar harga berlaku dalam kurun 2015-2019 naik dari Rp 52.164 menjadi Rp 64.417 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk.

Gambar 2. 5
PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha



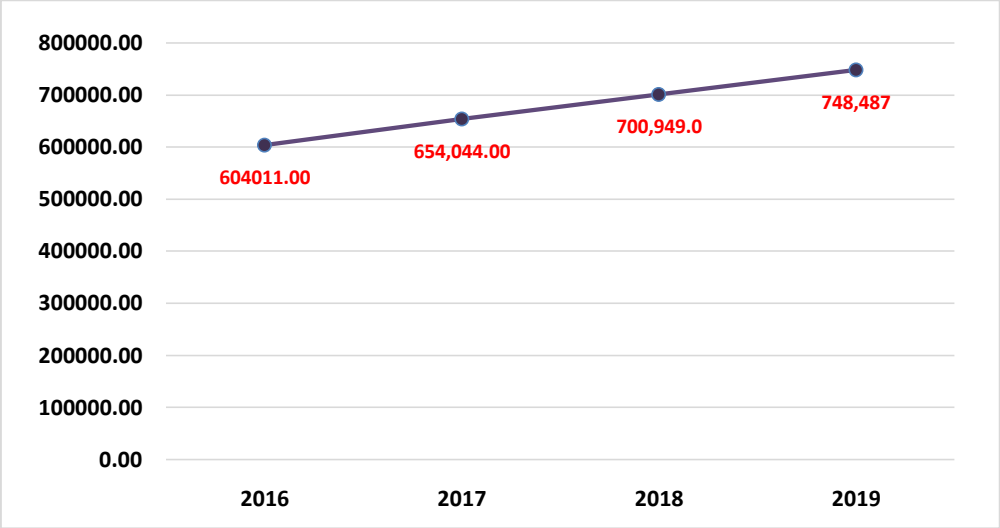
Sumber: BPS, PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha 2015-2019

d. Persentase Penduduk Miskin

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 persebarannya memiliki nilai yang berbeda-beda. Tingkat kemiskinan yang terdapat di Kota Pangkalpinang dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan. Pada tahun 2019 posisi garis kemiskinan Kota Pangkalpinang mencapai Rp. 748.487.

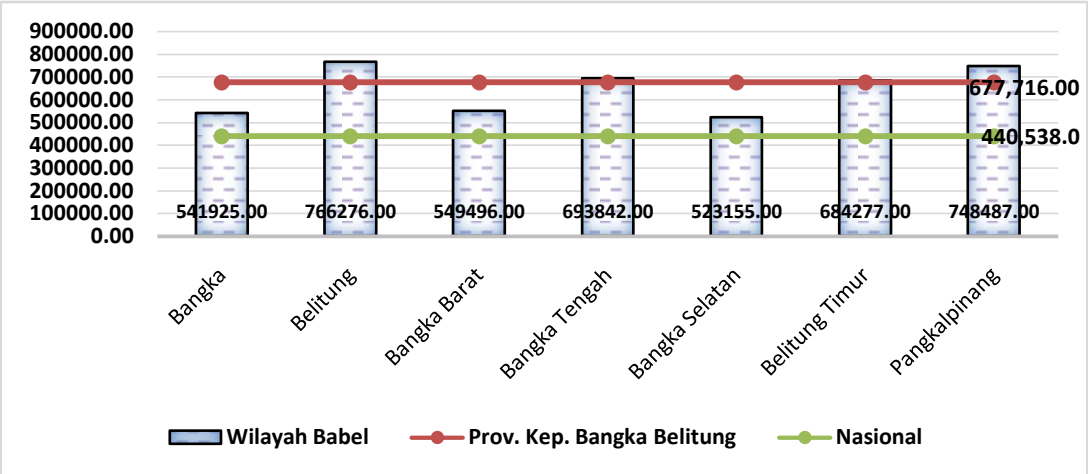
Gambar 2. 6
Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2016-2019 (%)



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2020, BPS

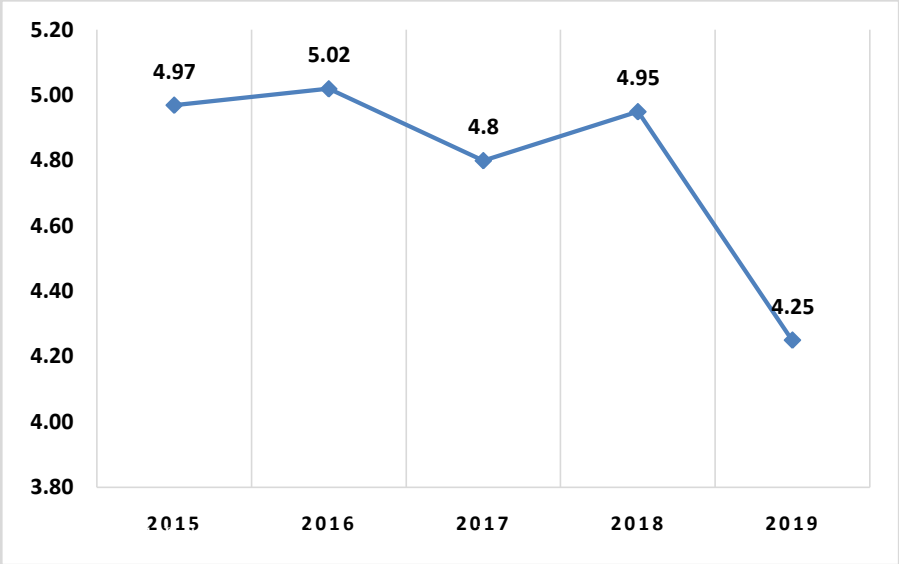
Jika dilihat per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Kota Pangkalpinang memiliki nilai garis kemiskinan tertinggi ke-2 diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di Kota Pangkalpinang jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Bangka Belitung.

Gambar 2. 7
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2019
(Rupiah/kapita/bulan)



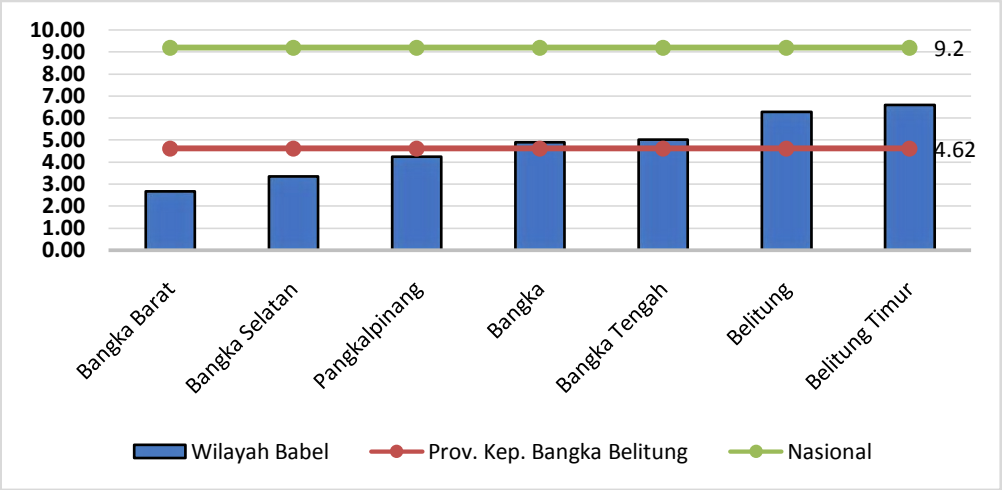
Persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun (tahun 2015-2019) mengalami kondisi yang fluktuatif, yaitu dari tahun 2015 sebesar 4,97% naik menjadi 5,02% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 turun menjadi 4,80%. Penurunan terjadi pada tahun 2018 yaitu 4,95% kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 4,25%,. Hal ini memberikan kontribusi terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung menurun menjadi sebesar 4,62%.

Gambar 2. 8
Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2019 (%)



Sedangkan posisi relatif persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebesar 4,25% berada di bawah Provinsi Bangka Belitung (4,62%) dan Nasional (9,2%). Dibandingkan dengan kabupaten se Bangka Belitung pada tahun 2019, persentase penduduk miskin Kota Pangkalpinang menempati peringkat ketiga terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan sebesar 3,36%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

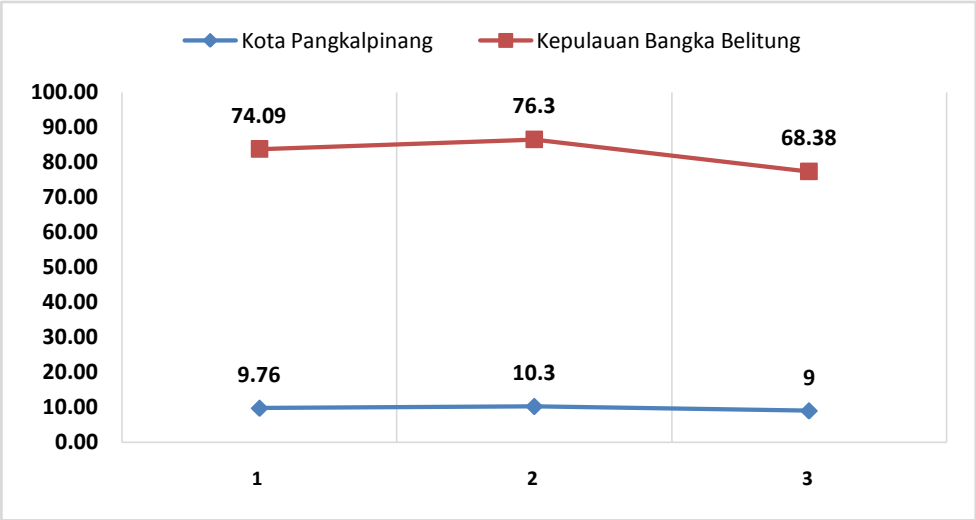
Gambar 2. 9
Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Th. 2019 (%)



Sumber: BPS Provnsi Kepulauan Bangka Belitung dalam angka, 2020

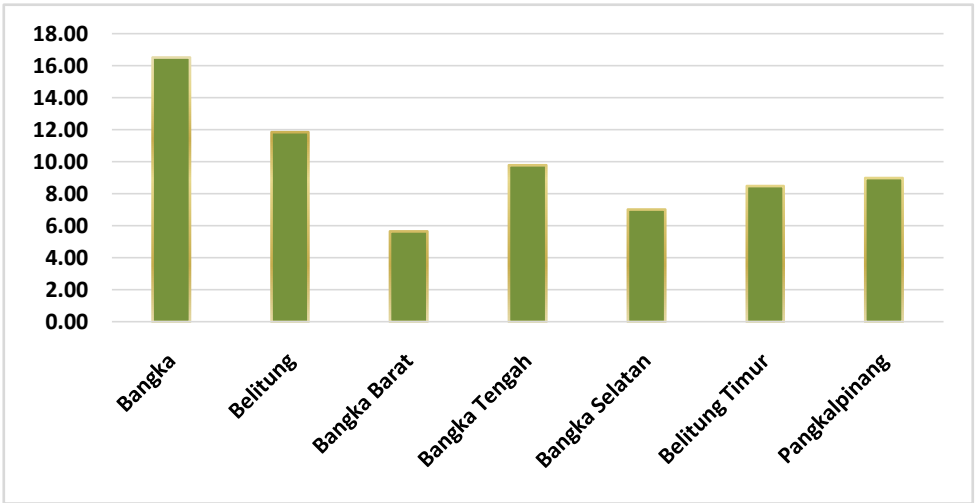
Sejalan dengan capaian persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami jumlah yang fluktuatif, yaitu pada tahun 2016 sebesar 9.76 ribu orang dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 10.3 ribu orang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 9 ribu orang, secara rinci terlihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 10
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pangkalpinang
Tahun 2017-2019 (Ribu Orang)



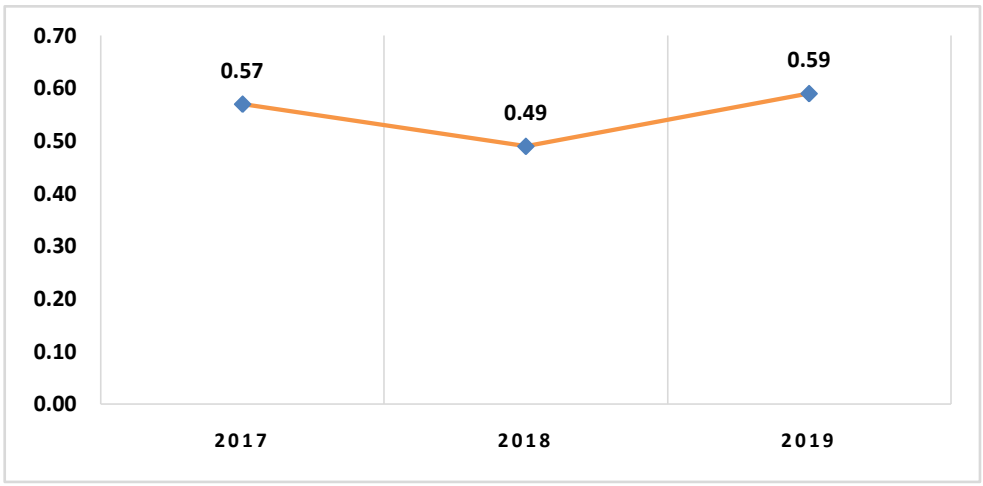
Sedangkan posisi relatif jumlah penduduk miskin Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 9 ribu orang berada menempati posisi keempat terendah setelah Kabupaten Bangka Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 11
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Ribu)



Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tiga tahun (2017-2019) mengalami instabilitas, yaitu pada tahun 2017 ke tahun 2018 turun dari 0,57 menjadi 0,49, kemudian kembali meningkat 0,59 , secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

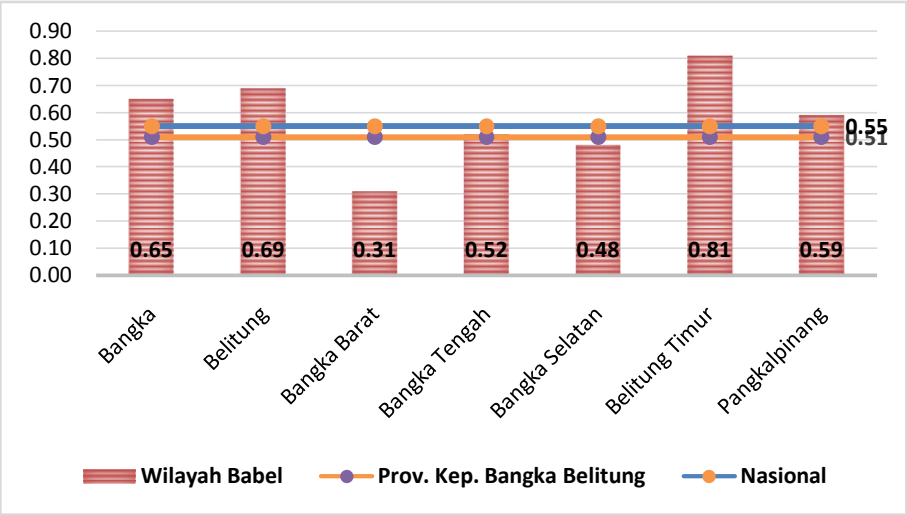
Gambar 2. 12
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan (P1) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 0,59 berada menempati posisi keempat tertinggi setelah Kabupaten Bangka, dapat dilihat pada gambar 2.13.

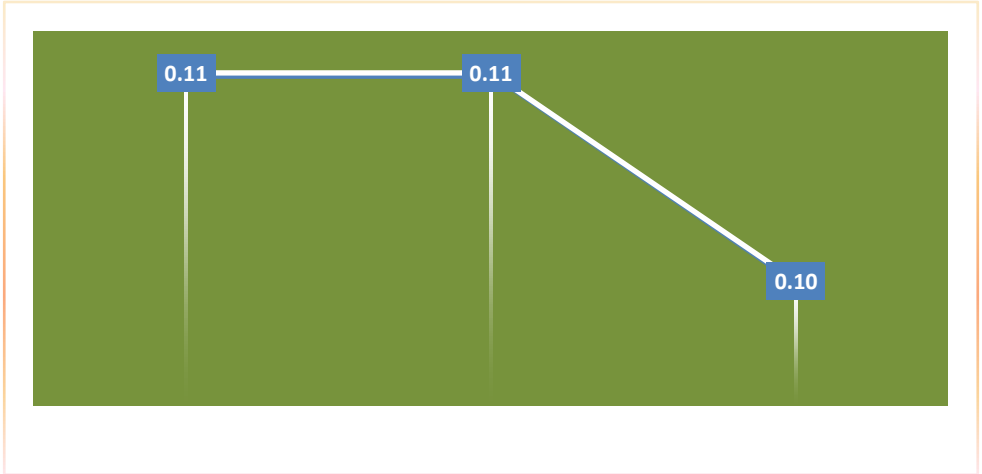
Gambar 2. 13
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu tiga tahun (2017-2019), indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Pangkalpinang kembali mengalami instabilitas setelah tahun 2017-2018 dengan tetap diangka 0,11. Tahun 2019 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun menjadi 0,10 , selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

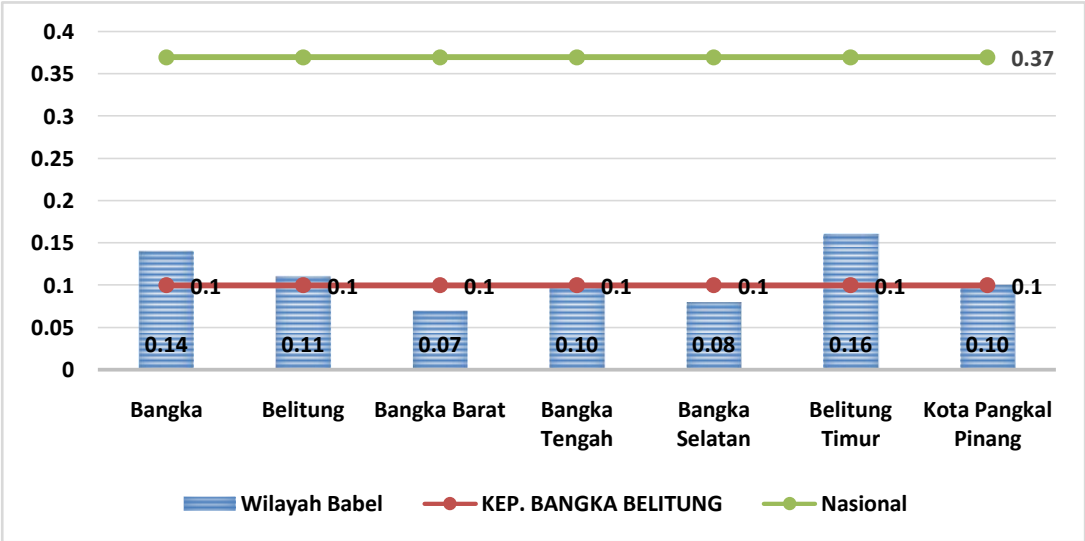
Gambar 2. 14
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang Tahun 2017-2019 (Ribu Orang)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

Sedangkan posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 0,10 berada menempati posisi keempat tertinggi sama dengan Kabupaten Bangka Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 15
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%)

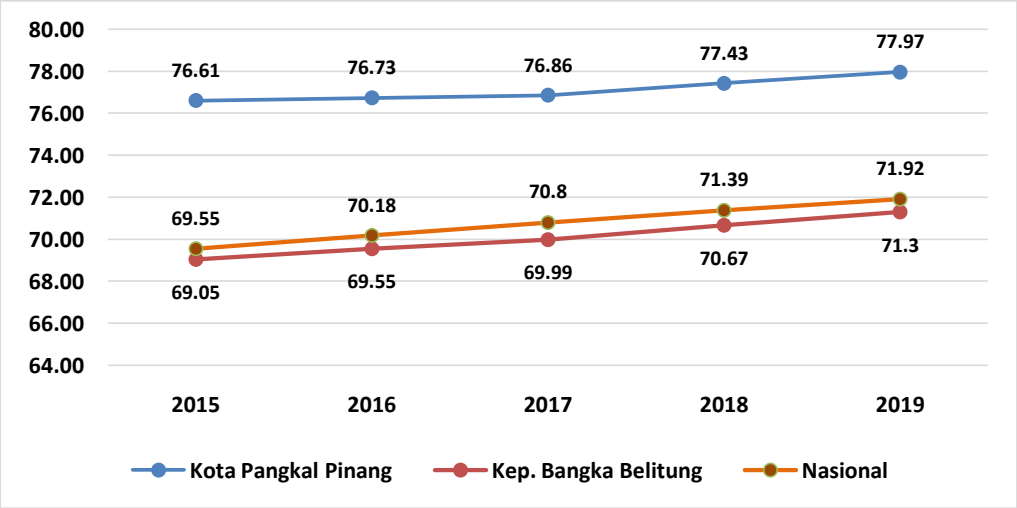


B. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 IPM Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 76,61 meningkat menjadi 77,97 pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2.16.

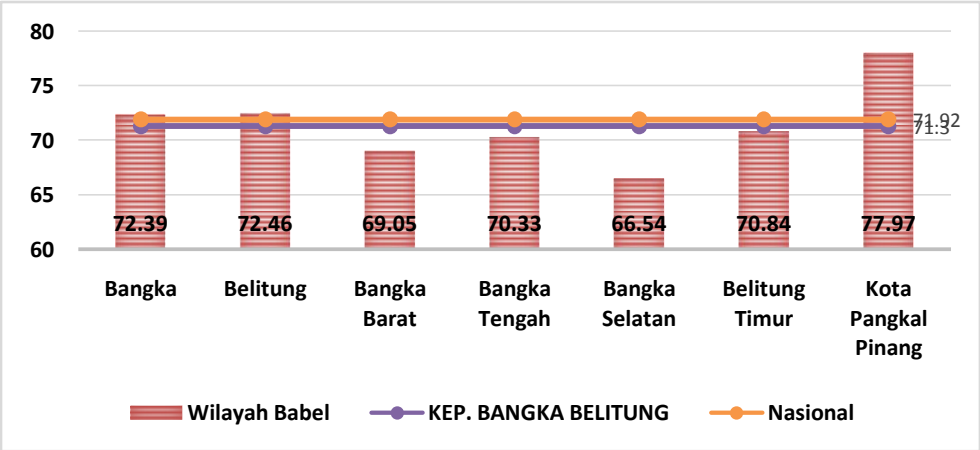
Gambar 2. 16
Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2020

IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 77,97 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 71,30 dan Nasional sebesar 71,92. Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang menunjukkan posisi tertinggi. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 17
Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%)

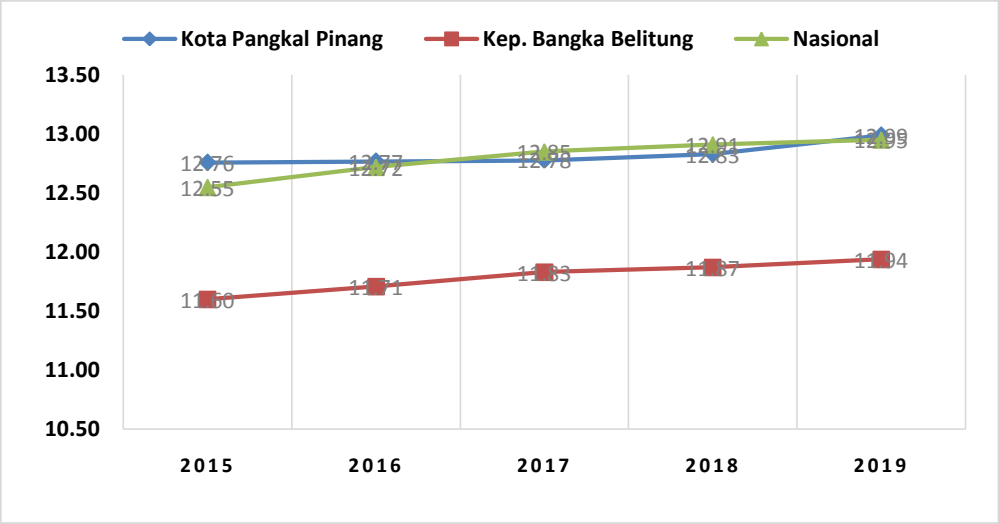


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2020

1). Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah yang merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

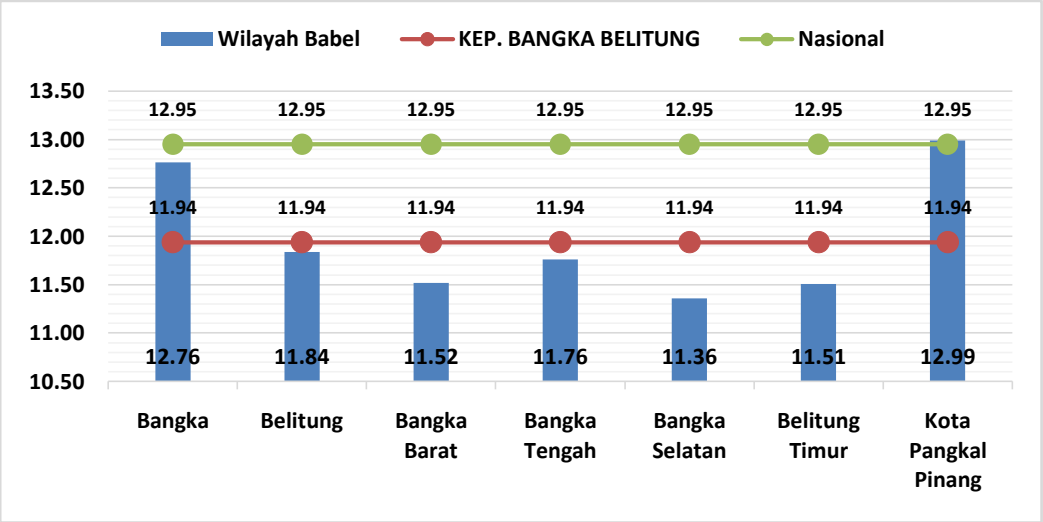
Gambar 2. 18
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun)



Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 12,76 tahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 12,99 tahun Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun terakhir tersebut, relevan terhadap peningkatan Harapan Lama Sekolah Provinsi Bangka Belitung dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 12,99 tahun berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan selisih 1,05 tahun lebih besar Kota Pangkalpinang dan Nasional 12,95 tahun. Dibandingkan dengan capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten sekitar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

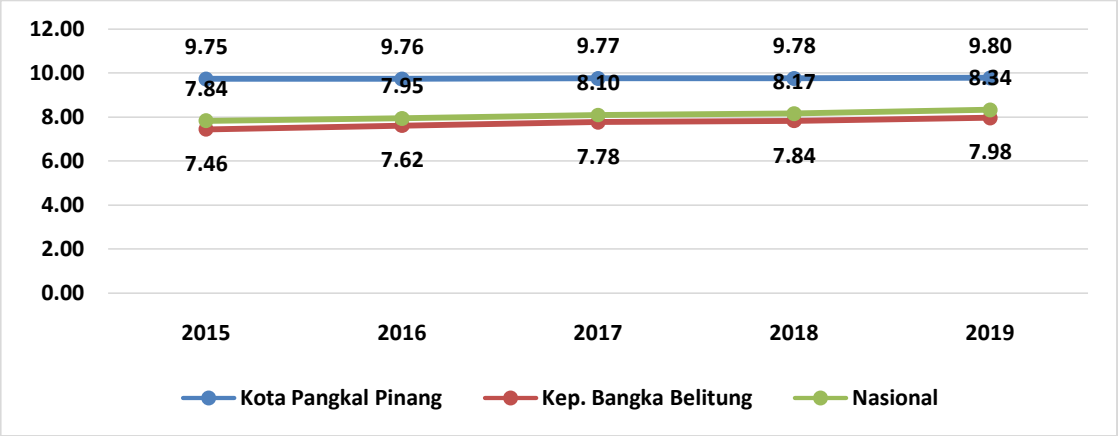
Gambar 2. 19
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun)



2). Rata-rata lama sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan namun tidak begitu siginifikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 9,75 tahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 9,80 tahun meningkat 0,02 dari tahun 2018. Meskipun demikian perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Pangkalpinang selama kurun waktu lima tahun tersebut, relevan terhadap perkembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional yang sama-sama mengalami penigkatan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

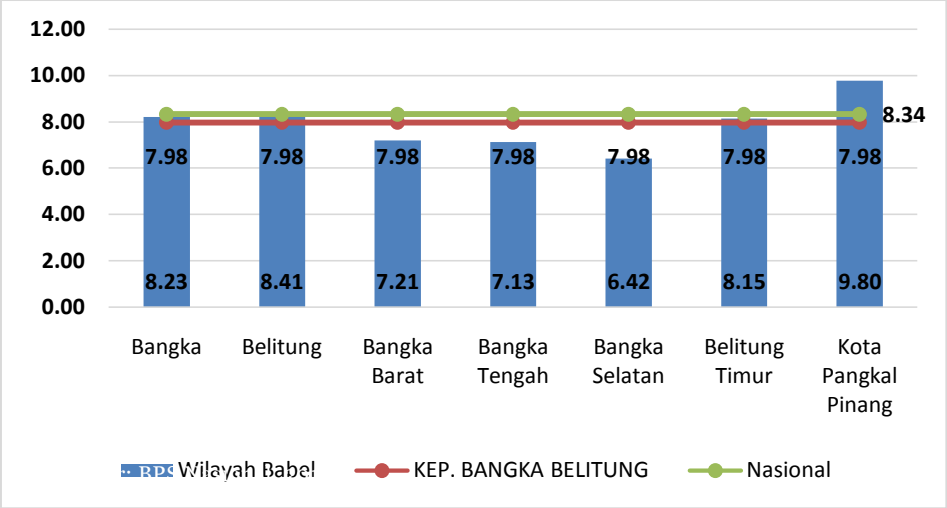
Gambar 2. 20
Perkembangan Rata-Rata Sekolah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun)



Sumber: BPS Nasional, 2019

Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebesar 9,80 tahun masih di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 7,98 tahun dan Nasional sebesar 8,34 tahun. Dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya di Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2018, Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi, secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

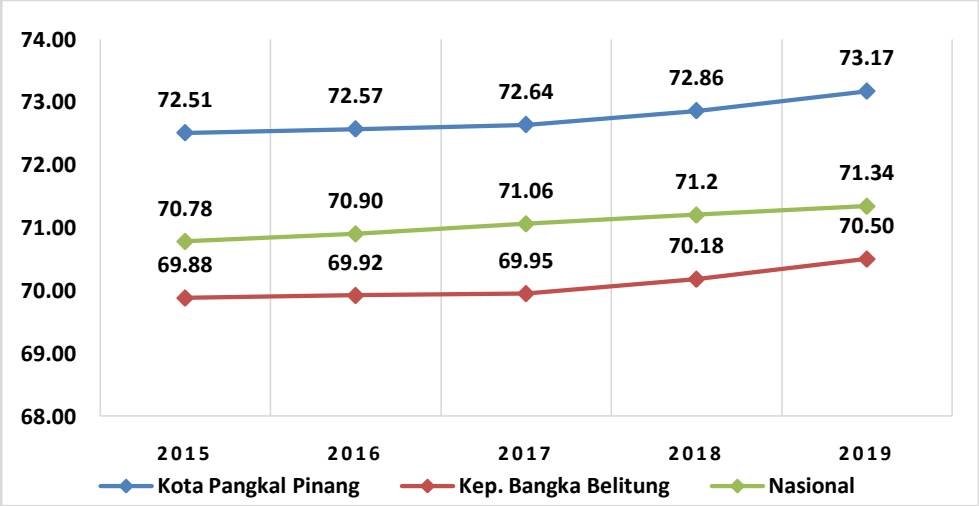
Gambar 2. 21
Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pangkalpinang
Tahun 2019 (Tahun)



3) Angka Harapan Hidup

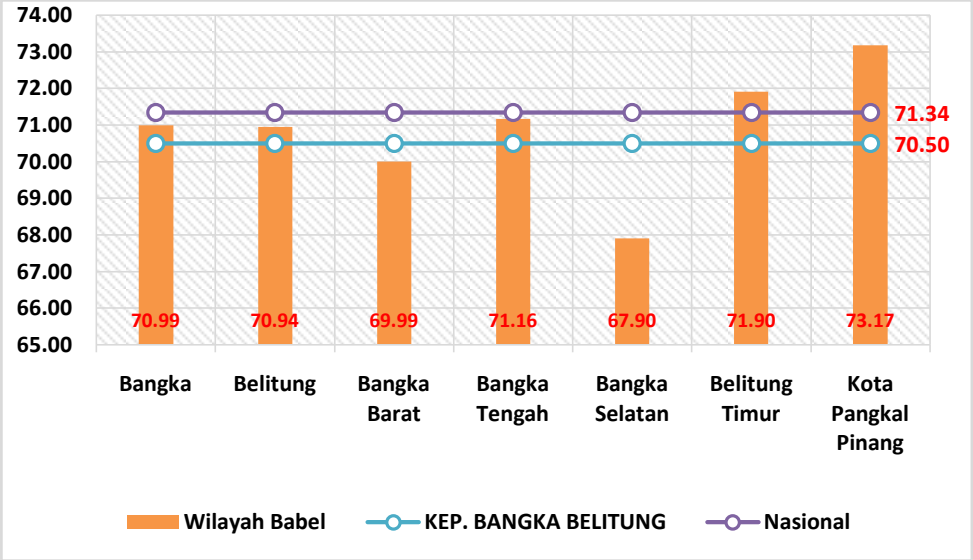
Angka harapan hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang pada tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2015 sebesar 72,51 tahun dan pada tahun 2019 menjadi sebesar 73,17 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 22
Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun)



Posisi relatif Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 73,17 tahun berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 70,50 tahun dan Nasional sebesar 71,34 tahun, serta menempati posisi tertinggi jika dibandingkan kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

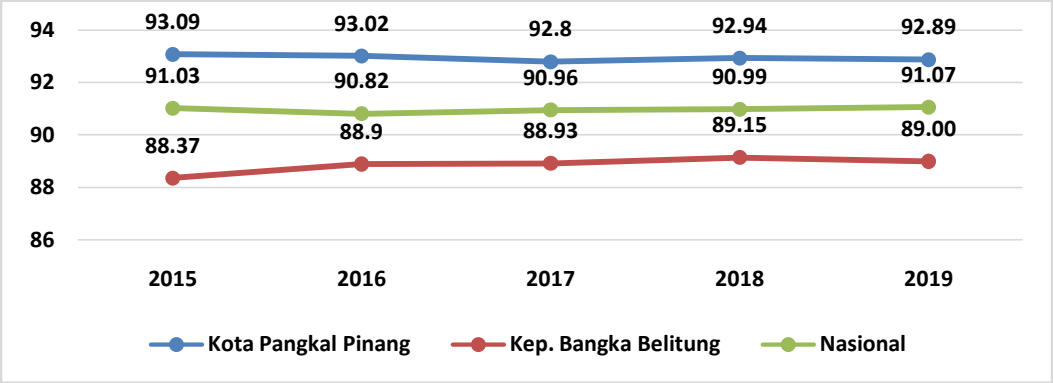
Gambar 2. 23
Posisi Relatif AHH Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun)



b. Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

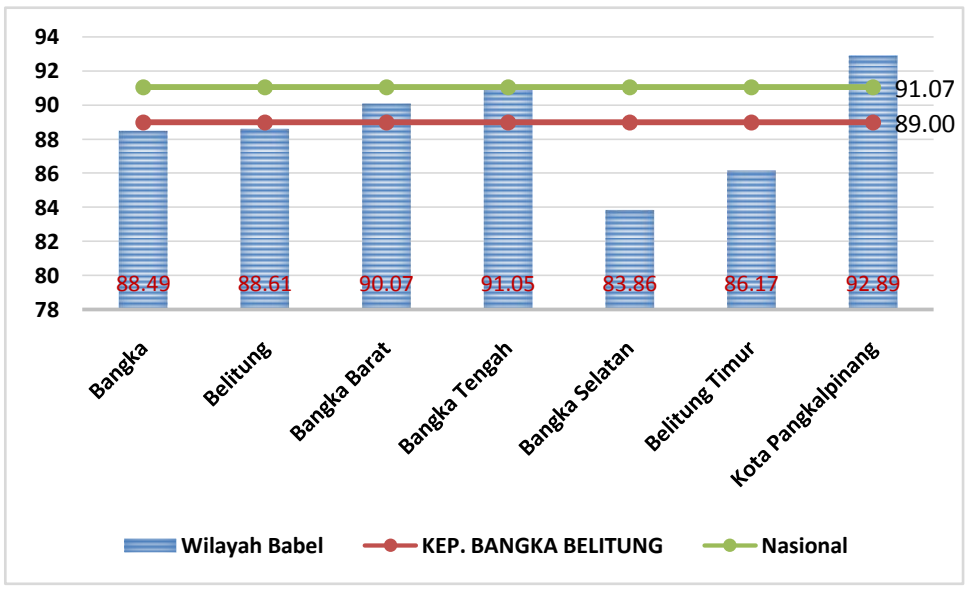
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang periode tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan fluktuatif. Pada tahun 2019 nilai IPG Kota Pangkalpinang mencapai 92,89. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan nilai Provinsi Bangka Belitung dan Nasional, nilai IPG Kota Pangkalpinang memiliki capaian di atas rata-rata IPG Prov. Kep. Bangka Belitung maupun Nasional. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.24.

Gambar 2. 24
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2015-2019 (Tahun)



Capaian IPG Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 sebesar 92,89 berada di atas Provinsi Bangka Belitung sebesar 89 dan di atas capaian Nasional sebesar 91,07. Jika dibandingkan dengan capaian IPG kabupaten sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019, Kota Pangkalpinang menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.25

Gambar 2. 25
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (Tahun)



Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) tidak berbeda dengan komponen pembentuk IPM hanya terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dilihat pada Tabel 2.10, Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebesar 75,01 tahun lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang hanya mencapai 71,22 tahun.

Harapan lama sekolah Kota Pangkalpinang tahun 2019 didominasi oleh laki-laki sebesar 13,14 tahun sedangkan perempuan berada pada 12,98 tahun. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah dan Besarnya Sumbangan Pendapatan Kota Pangkalpinang tahun 2019, laki-laki juga lebih mendominasi dibandingkan perempuan. Adapun rincian data komponen pembentuk IPG Kota Pangkalpinang tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

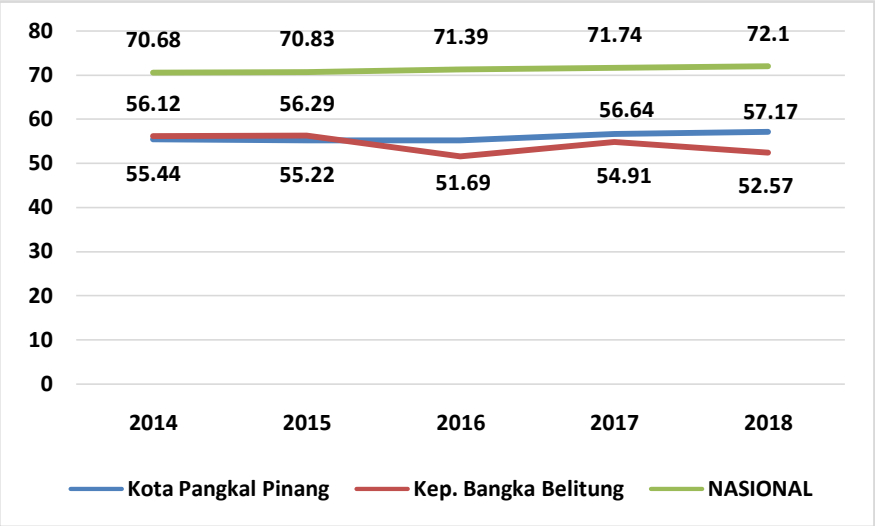
Tabel 2. 10
Perkembangan Indikator Komposit IPG di Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2019

Tahun	AHH		HLS		RLS		Pengeluaran Per Kapita	
	L	P	L	P	L	P	L	P
2015	70,49	74,41	13	12,75	10,11	9,38	20.194	13.345
2016	70,60	74,43	13,01	12,76	10,12	9,39	20.368	13.430
2017	70,67	74,50	13,02	12,77	10,22	9,40	20.692	13.520
2018	70,89	74,72	13,03	12,82	10,23	9,41	21.596	14.117
2019	71,22	75,01	13,14	12,98	10,25	9,42	22.169	14.344

Sumber: BPS, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020

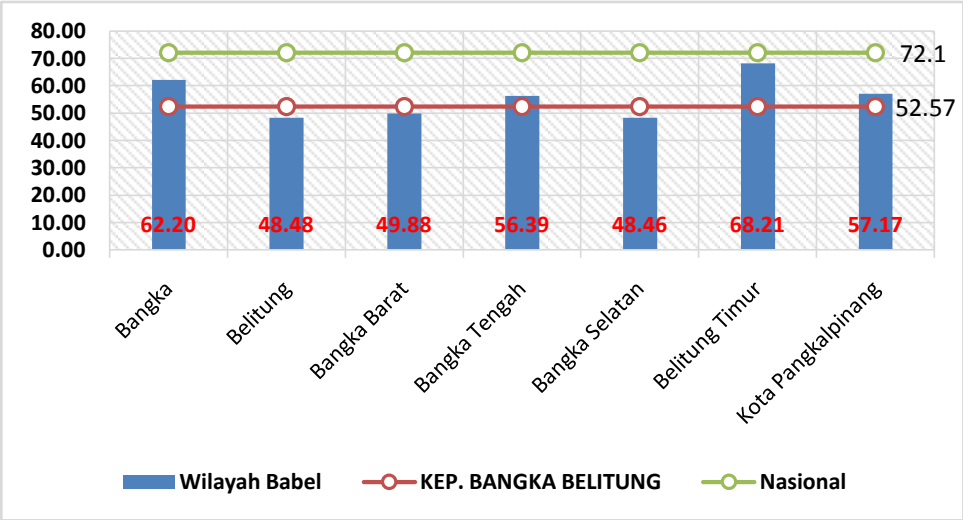
Perkembangan IDG Kota Pangkalpinang pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan dari 55,44 menjadi 57,17. Capaian IDG Kota Pangkalpinang di atas capaian IDG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun masih di bawah capaian IDG Nasional. Secara rinci bisa dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 26
Perkembangan Indeks Peemberdayaan Gender (IPG) Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2014-2018 (Tahun)



Capaian IDG Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 sebesar 57,17 berada di atas capaian Provinsi Bangka Belitung namun dibawah Nasional. Dibandingkan dengan capaian IDG kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, Kota Pangkalpinang menempati posisi pertengahan yaitu peringkat ketiga di bawah Belitung Timur dan Bangka. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 27
Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)Kota Pangkalpinang Tahun 2018 (Tahun)



Komponen pembentuk Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pangkalpinang tahun 2014-2018, dilihat dari perkembangan keterlibatan perempuan di parlemen dari tahun 2014 hingga tahun 2015 yang cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 6,67.

Kondisi perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi periode 2014 hingga 2018 di Kota Pangkalpinang mengalami nilai yang fluktuatif. Berbeda dengan kondisi indikator komposit IDG lainnya, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kota Pangkalpinang terus mengalami kenaikan tiap tahun, yaitu dari 22,98% pada tahun 2014 menjadi 29,29% pada tahun 2018. Secara rinci perkembangan komponen pembentuk IDG Kota Pangkalpinang dapat kita lihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2. 11
Perkembangan Indikator Komposit IDG di Kota Pangkalpinang
Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	6,67	8,89	NA	6,67	6,67
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	48,33	36,38	NA	43,35	45,7
3	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)	22,98	23,80	NA	29,24	29,29

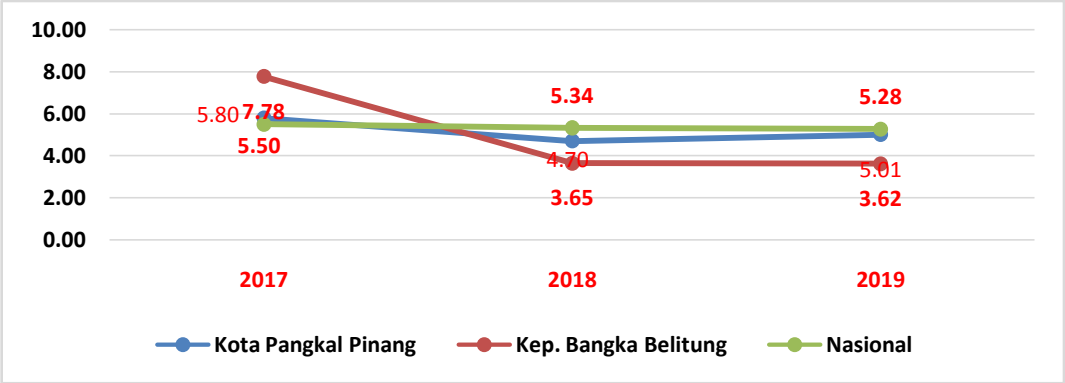
c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang mencapai 5,80%, dan turun menjadi 4,7% pada tahun 2018 namun kembali naik di tahun 2019 5,01%. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.

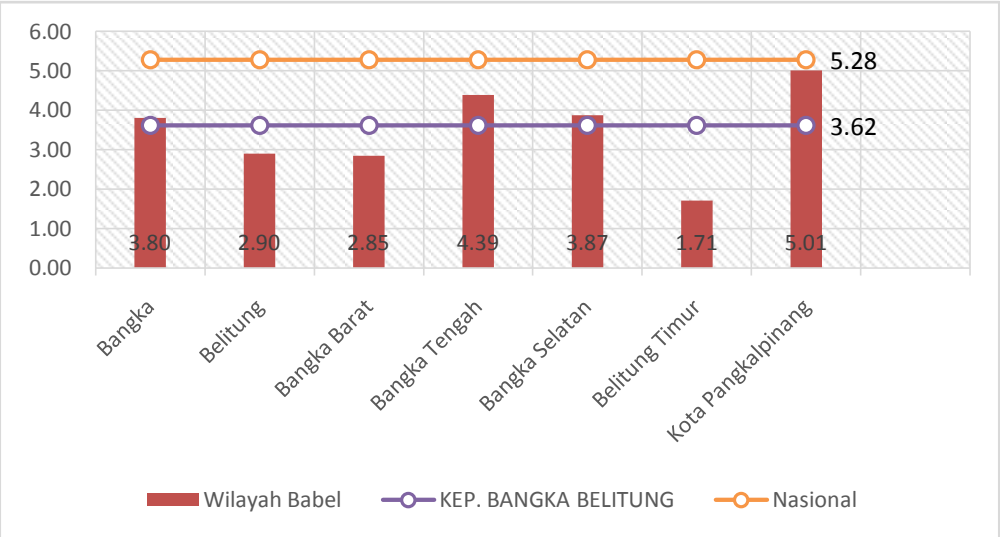
Gambar 2. 28

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang Dibandingkan Dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2019 (%)



Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang tahun 2019 sebesar 5,01%, berada di atas rata-rata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3,62%) dan Nasional (5,28%). Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang merupakan yang tertinggi diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 29
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pangkalpinang
Tahun 2019 (%)



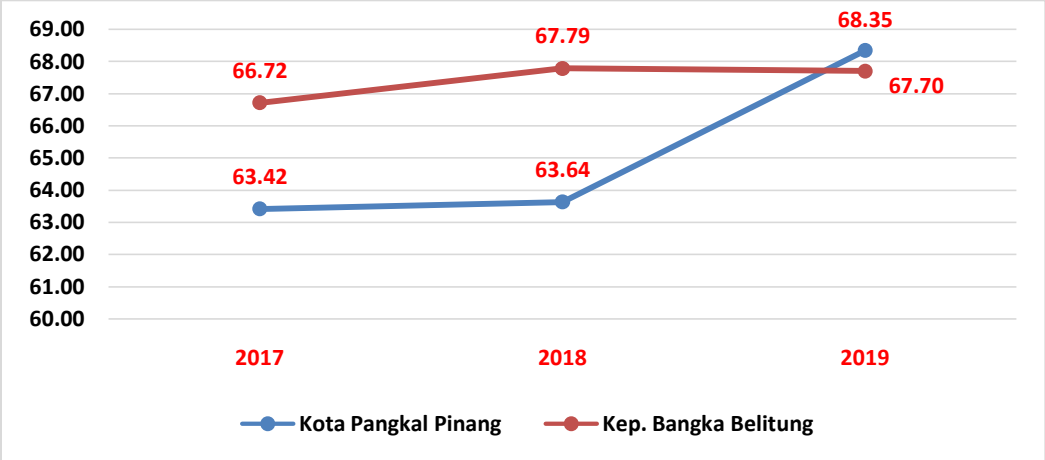
Sumber: BPS, buku Prov. Kep. Bangka Belitung dalam Angka Tahun 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang terus meningkat, dimana pada tahun 2017 sebesar 63,42% hingga pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 63,64%, kemudian hingga tahun 2019terjadi peningkatan yang cukup signfikan mencapai 68,35%. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi yang mengalami penurunan menjadi 67,70%.

Gambar 2. 30

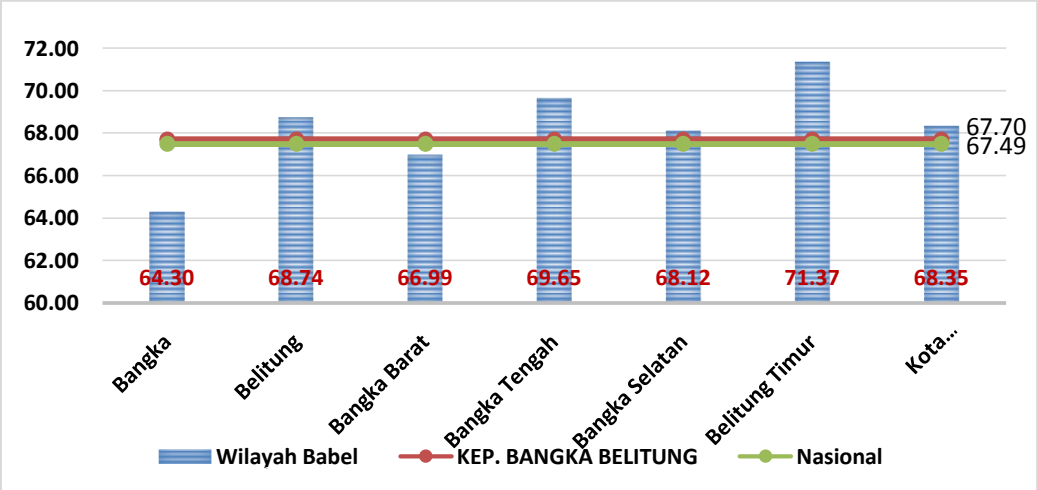
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 (%)



Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kota Pangkalpinang menempati urutan ke 4 diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 301

Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang Tahun 2019 (%)



C. Fokus Seni Budaya

a. Kebudayaan

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh multi etnis. Keragaman etnis tersebut berdampak pada keberagaman seni budaya yang ada. Beberapa tradisi yang ada di Kota Pangkalpinang antara lain tradisi Nganggung, Ceng Beng, dan juga Perayaan hari-hari besar keagamaan.

Kelompok seni di Kota Pangkalpinang jumlahnya cukup banyak, jumlahnya pada tahun 2018 sebanyak 32 kelompok. Jumlah kelompok seni yang begitu banyak belum didukung dengan sarana prasarana yang memadahi, khususnya adalah tersedianya gedung kesenian untuk penyelenggaraan kegiatan–kegiatan kesenian seperti pameran, kajian, pagelaran, festival dan lainnya, sektor kebudayaan sudah didukung dengan keberadaan gedung kesenian yang ada. Jumlah gedung kesenian di Kota Pangkalpinang hanya ada 1 unit.

b. Pemuda dan Olahraga

Prestasi keolahragaan di Kota Pangkalpinang cukup membanggakan, terbukti dari perolehan medali emas pada Kejurda pelajar ke-9 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkalpinang mendominasi hasil akhir. Hasil ini sekaligus menobatkan Pangkalpinang sebagai juara umum. Kontingen Kota Pangkalpinang berhasil mengumpulkan 23 medali emas, 28 medali perak dan 14 medali perunggu yang selanjutnya akan mewakili Babel ke Kejurnas Pelajar di Papua.

Pembinaan olahraga di Kota Pangkalpinang dilakukan oleh klub dan perkumpulan olahraga yang ada. Tahun 2017 organisasi olahraga yang ada di

Kota Pangkalpinang sebanyak 28. Sedangkan sarana prasarana gedung olahraga maupun lapangan yang ada sebanyak 16 unit.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Aspek pelayanan pendidikan diukur melalui beberapa indikaotr selain indikator yang sudah diuraikan pada fokus kesejaheraan. Keberhasilan pembangunan pendidikan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Ketersediaan fasilitas pendidikan, rasio guru murid, Angka Putus Sekolah, angka melanjutkan dan kualifikasi guru.

1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah mengindikasikan seberapa besar akses (keterjangkauan) dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Sebagai gambaran APS pada kelompok umur yang lebih tua akan cenderung menurun. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. APS Kota Pangkalpinang secara rinci ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12
Angka Partisipasi Sekolah Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 (%)

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Usia 7 – 12	%	116,89	117,04	121,82	112,19	99,73
Usia 13 – 15	%	102,25	112,96	113,01	102,96	103,3
Usia 16 – 18	%	63,48	66,71	80,23	100,30	69,12

Sumber : Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2019.

2). Ketersediaan Fasilitas Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana Sekolah adalah persentase ruang kelas kondisi bangunan untuk jenjang pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yaitu: 1) persentase ruang kelas SD/MI kondisi bangunan baik. Perkembangan kondisi ruang kelas selama kurun waktu 2015-2019 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 13
Kondisi Gedung Ruang Kelas (SD,SMP) Tahun 2015-2019 Kota Pangkalpinang

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah ruang kelas	Unit	886	934	987	1094	1052
2.	Jumlah ruang kelas baik	unit	656	814	866	963	981
3.	Jumlah ruang kelas rusak ringan	unit	103	107	99	98	42
4.	Jumlah ruang kelas rusak berat	unit	127	13	22	33	29

Sumber : Data verifikasi PDSPK 2019

3). Rasio Guru Terhadap Murid

Untuk menunjang pendidikan di Kota Pangkalpinang selain ketersediaan fasilitas pendidikan hal penting lainnya adalah peran guru. Rasio guru terhadap murid di Kota Pangkalpinang pada semua jenjang pendidikan cukup baik. Namun demikian dengan banyaknya guru yang memasuki masa pensiun pada sampai dengan tahun 2019 perlu menjadi perhatian agar jumlah guru tetap memadai untuk pendidikan di berbagai jenjang. Perkembangan kondisi Rasio guru terhadap murid selama kurun waktu 2015-2019 terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 14
Rasio Guru ASN dengan Jumlah Guru Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts di Kota Pangkalpinang Tahun 2015–2019

No.	Jenjang Pendidikan	Rasio Guru ASN terhadap Murid				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI	84,38	82,23	78,35	53,51	55,93
2.	SMP/MTs	94,43	91,23	84,91	52,94	50,24

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2019.

4.) Angka Putus Sekolah (APS)

Angka Putus Sekolah (APS) pada akhir 2019 pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,02% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,28% untuk jenjang SMP/MTs. Angka Putus Sekolah pada semua jenjang pendidikan perlu diupayakan untuk terus turun sampai dengan 0%. Angka Putus yang cukup tinggi dan cenderung meningkat memerlukan perhatian khusus agar mereka yang putus sekolah dapat kembali sekolah, mengikuti pendidikan non formal, atau bekerja, sehingga tidak membebani angka pengangguran. Perkembangan kondisi Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2019 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 15
Capaian Indikator Angka Putus Sekolah Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Capaian Indikator				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,0007	0,0003	0,0004	0,02	0,02
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,0026	0,0015	0,0020	0,23	0,28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2019.

5). Angka Kelulusan

Angka Kelulusan menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian angka Kelulusan SD/MI

dan SMP/MTs Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019 mencapai hampir semuanya 100%, Capaian indikator Angka Kelulusan bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 16
Capaian Indikator Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2015 – 2019

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kelulusan SD/MI (%)	97,07	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	97,67	100,00	99,99	100,00	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, 2019

6.) Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjeng pendidikan berikutnya selama kurun waktu 2015-2019 mengalami penurunan untuk SD/MI ke SMP/MTs dari 100% di tahun 2015 menjadi 90,4% di tahun 2019 sedangkan untuk jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 92,19% di tahun 2015 menjadi 94,88% di tahun 2019.

Tabel 2. 17
Capaian Indikator Angka Melanjutkan Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2015–2019

No.	Indikator	Capaian Kinerja Setiap Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	100	102,18	104,39	99,11	90,4
2	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	92,19	104,51	92,47	95,3	94,88

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang , 2019.

7). Kualitas Pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Kualitas guru di Kota Pangkalpinang dari tahun 2018 ke tahun 2019 menunjukkan kecenderungan meningkat. Persentase guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2019 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 66,82%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 87,20%. Kualifikasi guru tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum memiliki motivasi ataupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Secara rinci perkembangan indikator angka kelulusan dan kualifikasi pendidik terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 18
Capaian Indikator Kualitas Pendidikan Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D.IVJenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pangkalpinang Tahun 2015 – 2019

No.	Indikator	Capaian Setiap Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kualitas Pendidikan Guru TK (Guru PAUD) yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	29,51	48,19	51,77	65,10	66,82
2.	Kualitas Pendidikan Guru SD, SMP (Guru Dikdas) yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV (%)	86,59	96.40	94,48	87,20	89,41

Sumber : Data verifikasi PDSPK, 2019

b. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan diarahkan pada perwujudan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan, menurunnya kematian ibu, kematian bayi, balita dan gizi buruk. Usia Harapan Hidup di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan dari 72,51 tahun di tahun 2015 meningkat menjadi 73,17 tahun di tahun 2019. Kondisi ini menujukkan bahwa kesehatan di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan. AKI, AKB, AKABA dan balita gizi buruk juga mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 116,2 pada tahun 2018 menjadi 22,9 per 100.000 kelahiran hidup pada

tahun 2019. Jumlah kasus kematian 1 ibu hamil. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari 3,3 pada tahun 2018 menjadi 3,2 pada tahun 2019. Prevalensi balita gizi buruk mengalami kecenderungan penurunan dari 0,78 pada tahun 2016 menjadi 0,75 pada tahun 2019. Penyebab gizi buruk sangat komplek, diantaranya factor ekonomi/kemiskinan, penyakit penyerta (seperti *labioschisis*, bocor jantung, kelainan bawaan pada anak dll), pola asuh anak yang kurang optimal setelah 6 bulan yaitu pada saat pemberian makan bayi dan anak (PMBA), karena pada masa usia lebih 6 bulan anak harus sudah mendapatkan PMBA selain ASI.

Tabel 2. 19
Perkembangan Indikator Makro Kesehatan Tahun 2015-2019

NO	INDIKATOR MAKRO	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Usia harapan hidup	Tahun	72,51	72,57	72,65	72,86	73,17
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran hidup	3	6,3	3,11	3,3	3,2
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	3	6,3	3,59	3,7	NA
4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 1000 Kelahiran Hidup	97	121,7	95,72	116,2	22,9
5.	Jumlah kasus kematian ibu	Kasus	4	5	4	5	1
6.	Prevalensi balita gizi buruk	%	NA	0,78	1,60	2,72	0,75

Sumber: Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang 2019

Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan; meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat; menurunnya kasus penyakit menular; penanganan balita gizi buruk yang baik dan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Namun demikian kondisi ini belum optimal karena beberapa masih perlu mendapat perhatian seperti meningkatnya kasus penyakit tidak menular. Jaminan pemeliharaan kesehatan harus dimiliki oleh setiap warga negara. Berdasarkan data yang ada penduduk miskin telah memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan.

Prevalensi balita pendek dan sangat pendek *(stunting)* mengalami kecenderungan penurunan dari 19,50% pada tahun 2015 menjadi 8,01% pada tahun 2018. Penurunan ini menunjukkan telah optimalnya peran serta lintas program dan lintas sektoral. Stunting adalah kondisi dimana tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan pada umumnya, yang disebabkan kurangnya asupan asupan gizi pada masa janin/bayi (dalam kandungan) dan saat anak sudah lahir, tetapi anak baru nampak stunting pada usia 2 tahun. Hal ini berdampak adanya gagal tumbuh kembang koknitif berkurang, beresiko sakit, fungsi tubuh tidak seimbang, postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. Berdasarkan indikator Tinggi Badan/Panjang Badan dibandingkan Umur (TB/U, PB/U), dimana TB anak -<3 SD (sangat pendek), dan -3 SD sampai < -2 SD (pendek).

Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif mengalami kecenderungan peningkatan dari 54,7% pada tahun 2015 menjadi 67,02% pada tahun 2019. Belum optimalnya pencapaian ASI Eksklusif dikarenakan oleh keyakinan ibu untuk memberikan ASI masih perlu ditingkatkan, ketelatenan

untuk mengatasi masalah menyusui seperti putting masuk, ASI sedikit, bingung putting, dan lain-lain, sehingga ibu mengambil jalan dengan memberikan susu formula. Selain itu ibu bekerja/mencari nafkah ke luar kota sehingga tidak memberikan ASI Ekslusif.

Case Notificatian Rate TBC (CNR) adalah jumlah kasus TBC baru yang ditemukan dan ditindaklanjuti dengan pengobatan. Pada tahun 2015 CNR Kota Pangkalpinang sebesar 115,19 meningkat menjadi 223,60 per 100.000 penduduk pada tahun 2019. Kasus TBC di Kota Pangkalpinang telah dilakukan pengobatan dengan DOTs (100%). Kematian TBC sebesar 2,1 per 100.000 penduduk.

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi telah mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai 2019. Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat *antiretroviral* telah mencapai 100%.

Angka kesakitan DBD Fluktuatif cenderung naik turun karena :

1. Kasus DBD sangat dipengaruhi oleh iklim/cuaca
2. Berbanding lurus dengan curah hujan
3. Kegiatan Pembrantasan Sarang Nyamuk (PSN) mandiri oleh masyarakat belum optimal/belum jadi budaya

Sedangkan Angka kematian DBD Fluktuatif cenderung naik karena :

1. Indikator tata laksana di rumah sakit terhadap penderita DBD yang belum merata
2. Ada keterlambatan rujukan masyarakat, sudah fase kritis baru dirujuk

Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan turunannya dan pelayanan rujuan yang

dilaksanakan oleh rumah sakit. Berdasarkan data dibawah ini dapat dilihat bahwa pelayanan kesehatan sudah mencukupi secara kuantitas.

Tabel 2. 20

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2013-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase ketersediaan obat kesehatan sesuai dengan kebutuhan	%	100	90,48	100	100	100
2.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	96	9,18	17,41	18,09	13,62
3.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	0	151,96	336,98	194,11	154,04
4.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	73,1	72,4	72,3	69,1	68,3
5.	Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	71,43	78,57	90,48	88,1	90,5
6.	Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD (setingkat) dan SMP (setingkat)	%	98,49	99,70	99,80	96,6	98,6
7.	Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (*stunting*)	%	19,50	-	12,70	8,0	
8.	Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi-	%	8,28	4,62	10,05	2,8	3,0
9.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase Bayi 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	%	54,7	59,3	63,6	63,9	67,02

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
11.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	117	-	-	-	-
12.	Cakupan RT mengkonsumsi garam beryodium	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase Balita usia 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	%	87,3	91,2	88,7	92,8	93,4
14.	Persentase Ibu hamil mendapat 90 tablet besi	%	94,55	88,74	94,41	93,9	93
15.	Persentase ibu hamil mengalami KEK	%	2,12	1,29	4,4	0,0	0,0
16. 4	Persentase Ibu hamil yang anemia	%	5,3	2,2	3,1	0,0	0,0
17.	Cakupan Rumah Sehat	%	93,73	93,85	0,0	0,0	98,72
18.	Cakupan Kualitas air bersih yang memenuhi syarat kesehatan	%	93,11	72,44	94,47	91,8	96,4
19.	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (Hotel, Taman, rekreasi dan tempat hiburan, dll)	%	97,59	99	97,93	97,00	98,02
20.	Cakupan Desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	%	100	100	100	100	100
21.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	0	100	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
22.	Angka kejadian tuberkulosis (insiden *semua* kasu (CNR)	Per 100.000 penduduk	115,19	88,36	96,42	213,69	229,19
23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	4,08	4,99	5	1,41	0,0
24.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (CDR)	%	100	100	100	100	100
25.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang berhasil diobati dalam program DOTS (*Succes rate*)	%	100	100	100	88,26	94,10
26.	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi	%	0,00028	0,00022	0,000386	0,017	0,032
27.	Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral	%	100	100	100	100	100
28.	Angka kejadian malaria	Per 1.000 penduduk	0,12	0,015	0,010	0,00	0,009
29.	Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)	Per 100.000 penduduk	39,2	25,46	25,07	76,2	74,07
30.	Persentase kematian DBD	%	0	0	0	0	0
31.	Non Polio usia 15 tahun ke atas *(Acute Flaccid Paralysis* (AFP))	%	0	0,00	3,39	2,6	0,7
32.	Cakupan kanker serviks	Kasus	5,46	5,42	5,06	0,6	0,3
33.	Cakupan DM	kasus	0,00	41,73	0,00	74,83	97,37
34.	Cakupan hipertensi	%	20,37	50,73	100	81	86,69
35.	Persentase Pos Binaan Terpadu (Posbindu)	%	41	74	74	42	45

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
36.	Persentase puskesmas yang telah terakreditasi	%	0	0,22	0,0	0,0	0,0
37.	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	36,69	37,44	40,98	77,19	92,80
38.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	Rasio	0,02	0,02	0,02	0,09	0,09
39.	Persentase puskesmas; puskesmas pembantu dan puskesmas keliling dengan kondisi sarana dan prasarana memadai	%	100	100	100	100	100
40.	Persentase penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	%	370,33	73,52	79,46	84,4	84,9
41.	Cakupan pelayanan anak balita	%	100	91,8	89,4	94,1	92,9
42.	Proporsi cakupan pemeriksaaan usila	%	10,24	23,74	43,34	45,3	90,67
43.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95,4	94,50	96,8	97,9	96,1
44.	Cakupan kunjungan bayi	%	100	99,90	96,2	96,6	43,6
45.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	94,74	88,74	94,41	93,9	92,9
46.	Cakupan pelayanan nifas	%	91,74	90,2	96,1	95,1	94,8
47.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	98,39	80,58	105,9	92,7	105,1
48.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	81,17	71,10	88,1	85,1	88,74

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
49.	Cakupan desa bebas buang air besar (ODF)	%	16,6	21,42	26,19	38	57,14
50.	Rasio rumah sakit	Per 10.000 penduduk	0,015	0,002	0,002	0,003	0,003
51.	Cakupan Puskesmas Rawat Inap	Unit	1	1	1	1	1
52.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	92,1	99,9	96,2	96,4	96,6
53.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	%			100	100	90,6
54.	Masyarakat terlindungi dari produk farmasi, makanan minuman yang tidak memenuhi syarat	%	100	100	100	100	100
55.	Cakupan penderita HIV AIDS	kasus	55	44	80	45	67
56.	Rasio posyandu per satuan balita	%	0,64	0,61	5,68	0,7	6,9
57.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
58.	Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	%	59,12	59,90	54,48	77,19	92,80
59.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC (persen)	%	69,56	137,83	139,86	100	100
60.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
61.	Cakupan Puskesmas	%	9	9	9	9	9
62.	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang 2019

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Sumber Daya Air (SDA)
   (a) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota;
   (b) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota.
2. Air Minum

   Pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah kabupaten/ kota
3. Persampahan

   Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten/ kota.
4. Air Limbah

   Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
5. Drainase

   Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/ kota.
6. Permukiman

   Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah kabupaten/kota.

7. Bangunan Gedung

   Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya

   Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/ kota.

9. Jalan

   Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

10. Jasa Konstruksi

    a) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
    b) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/ kota;
    c) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil).
    d) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

11. Penataan Ruang

    Penyelenggaraan penataan ruang Daerah kabupaten/ kota.

Berdasarkan tabel 2.21 dapat dilihat bahwa capaian indikator rasio panjang jalan dengan kondisi baik terhadap total panjang jalan pada tahun 2016, capaian selama 5 tahun terakhir menunjukkan adanya tren menurun. Rasio panjang jalan dengan kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 72,32 % menurun menjadi 52,16 pada tahun 2017. Berkurangnya capaian tersebut disebabkan karena adanya penambahan ruas jalan sehingga mengakibatkan

capain pada tahun 2017 menurun. Untuk rasio panjang jalan dengan kondisi sedang terhadap total panjang jalan menunjukkan tren yang fluktuatif, pada tahun tahun 2016 tercatat sebesar 19,89% meningkat menjadi 27,00 % pada tahun 2017. Hal ini berarti masih ada 20,84 % jaringan jalan kota dalam kondisi rusak (ringan atau berat).

Untuk rasio panjang jembatan dengan kondisi baik terhadap total panjang jembatan kondisinya cenderung tetap dari tahun 2015-2017 yaitu sebesar 71,43%. Begitu juga dengan rasio panjang jembatan dengan kondisi rusak dengan capaian sebesar 28,57% dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Capaian tingkat ketersediaan data jalan dan jembatan cenderung tetap dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yaitu sebesar 100%, akan tetapi meskipun begitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang belum mempunyai sistem data yang *up to date*.

Persentase pengoperasian sampah di TPA selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat dari 3,54% pada tahun 2014 menjadi 50% pada tahun 2015 dan cenderung tetap sampai dengan tahun 2017, hal ini menandakan bahwa pengembangan sistem pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang semakin baik setiap tahunnya meskipun belum optimal.

Capaian indikator persentase realisasi rumah tinggal bersanitasi selama tahun 2013-2017 mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 persentase realisasi rumah tinggal bersanitasi tercatat sebesar 13,10% meningkat menjadi 48% ditahun 2015 dan menjadi 60% pada tahun 2017. Capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 21

Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
	PEKERJAAN UMUM						
1	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jalan	%	65	65	65,2	72,32	52,16
2	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Sedang tehadap Total Panjang Jalan	%	27	27,4	26,8	19,89	27,00
3	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak tehadap Total Panjang Jalan	%	6,1	5,9	6,23	5,44	18,03
4	Rasio Panjang Jalan dengan Kondisi Rusak Berat tehadap Total Panjang Jalan	%	1,9	1,7	1,77	2,35	2,81
5	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Baik tehadap Total Panjang Jembatan	%	NA	NA	71,43	71,43	71,43
6	Rasio Panjang Jembatan dengan Kondisi Rusak tehadap Total Panjang Jembatan	%	NA	NA	28,57	28,57	28,57
7	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk	%	NA	NA	NA	NA	0,001
8	Tingkat Ketersediaan data jalan dan jembatan up to date	%	NA	NA	100	100	100
9	*Drainase* dalam kondisi baik pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	4.065	2.637,2	NA	NA	NA
10	Persentase pengoperasian TPA	%	7,1	3,54	50	50	50
11	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK)	%	NA	NA	66,35	66,4	NA
12	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	%	1,17	1,13	1,31	NA	NA
19	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	114	140	148	97,24	97,24
	PENATAAN RUANG						
20	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	NA	NA	NA	NA	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
21	Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	0	NA	NA	NA	NA
22	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	%	NA	NA	NA	NA	NA
23	Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pangkalpinang, 2018

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Perumahan
   - Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
   - Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
   - Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
   - Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).
2. Kawasan Permukiman
   a) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
   b) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

   Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.

4. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

   Penyelenggaraan PSU perumahan

5. Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

   Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU dari tahun 2015-2019 semakin baik dan terus meningkat, pada tahun 2015 tercatat sebesar 75% menjadi 80% pada tahun 2019. Persentase kawasan kumuh di Kota Pangkalpinang setiap tahunnya terus menurun, dari 0,1657 pada tahun 2015 menjadi 0,001849 pada tahun 2019.

Tabel 2. 22
Capaian Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,79	87,98	93	NA	NA
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	64	65	87,1	NA	NA
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	75	77	78	79	80
4	Rasio pemakaman penduduk per satuan penduduk	%	NA	NA	NA	0,44%	0,43%
5	Penyediaan rumah layak huni sebagai tempat tinggal bagi korban bencana kab/kota yang mengalami kerusakan	%	NA	NA	0	0	0
6	Persentase kawasan kumuh	%	0,1657	0,1657	0,1586	0,1586	0,001849
7	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Pangkalpinang	%	87,68	89	28	NA	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
8	Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Kota Pangkalpinang	KWH	NA	NA	NA	NA	NA
9	Lingkungan pemukiman kumuh		196,2	196,2	187,9	187,89	21,90
10	Rumah layak huni	%	64	65	65		
11	Ketersediaan RTH	%	NA	NA	11,8	NA	NA

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, 2020

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat memiliki 11 (sebelas) indikator kinerja. Capaian indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu pada tahun 2015 sebesar 79% menjadi sebesar 95% pada tahun 2019. Sedangkan indikator Persentase Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat mengalami penurunan dalam kurun waktu yaitu pada tahun 2017 sebesar 5 kali/hari menjadi 3 kali/hari pada tahun 2019. Capaian Cakupan Patroli Petugas Satpol PP memiliki perkembangan yang sama sejak tahun 2015-2019 sebesar 99,90%.

Capaian rasio jumlah Polisi Pamong Praja tahun 2015-2019 mengalami perkembangan fluktuatif, yaitu tahun 2015 capaian sebesar 10%, tahun 2019 meningkat menjadi 200% per 10.000 penduduk. Cakupan Penegakkan Perda dan Perkada di Kota Pangkalpinang mengalami perkembangan capaian yang stabil. Indikator jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk di Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang flukuatif cenderung menurun yaitu capaian pada tahun

2013 sebesar 2,29%, tahun 2015 sebesar 8% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,5%. Permasalahan yang dialami berkaitan dengan kebutuhan jumlah linmas yang belum sesuai kebutuhan. Sehingga di tahun mendatang perlu ada penambahan dan pengembangan SDM Linmas.

Capaian rasio petugas Linmas dalam jangka waktu tahun 2013-2017 mengalami perkembangan yang stabil yaitu 1 orang Per 10.000 penduduk. Indikator tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Pangkalpinang juga mengalami perkembangan stabil yaitu sebesar 15 menit serta capaian cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 sebesar 100%. Adapun rincian capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pangkalpinang dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 23
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	%	79	NA	80	83	95
2	Presentase Patroli siaga Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat	Kali/hari	3	3	5	3	3
3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	Kali	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90
4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja	Per 10.000 penduduk	10,00	20	4,60	200	200
5	Jumlah penyelesaian Penegakkan Perda dan Perkada	tindakan	82	73	78	83	118
6	Jumlah Pelanggaran Perda	Kasus	91	81	84	83	120
7	Jumlah Linmas Per jumlah 10.000 Penduduk	Per 10.000 penduduk	8,00	7,76	5,5	NA	NA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
8	Rasio Pos Siskamling Per jumlah desa/Kelurahan	%	NA	NA	NA	NA	NA
9	Rasio petugas Linmas	Per 10.000 penduduk	1	1	1	NA	NA
10	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	NA	NA
11	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	100	100	NA	NA

Sumber: Satpol PP dan Kesbangpol Kota Pangkalpinang 2020

Kejadian bencana dari tahun 2015-2019 yang terjadi di Kota Pangkalpinang antara lain bencana banjir, kebakaran, dan angin puting beliung. Jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2019 sebesar 36 kejadian meningkat dari tahun 2018 sebesar 10 kejadian. Sedangkan kejadian bencana angin puting beliung meningkat dari tahun 2018 sebesar 3 kejadian menjadi sebesar 6 kejadian pada tahun 2019. Kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang terdata pada tahun 2019 sebesar 88 kejadian. Berdasarkan data tersebut, maka kejadian bencana perlu mendapatkan perhatian dan ditangani oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan membangun kawasan tanggap bencana untuk meminimalisir dampak dan juga terutama korban jiwa. Adapun data kejadian bencana di Kota Pangkalpinang dari tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 24
Kejadian Bencana Tahun 2015-2019

No	Jenis Bencana	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Banjir/Genangan	kejadian	NA	26	2	10	36
3	Kebakaran	kejadian	NA	NA	138	2	88
4	Angin puting beliung	kejadian	NA	2	4	0	1
Jumlah				**28**	**144**	**12**	**125**

Sumber: BPBD Kota Pangkalpinang 2020

f. Sosial

Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah urusan sosial. Pada RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 urusan sosial memiliki sembilan indikator kinerja. Indikator RPJMD Kota Pangkalpinang yang mengalami peningkatan antara lain pertama, indikator jumlah PMKS mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2016-2018 yaitu pada tahun 2016 sebanyak 7636 orang menjadi sebanyak 11109 orang pada tahun 2018. Kedua, Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 73% menjadi sebesar 40% pada tahun 2019. Ketiga, Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 100%. Selanjutnya mulai tahun 2016 indikator persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial menjadi kewenangan provinsi. Keempat, Capaian indikator jumlah TKSK, PSM, Orsos dan lembaga dibawah binaan dinsos mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2018 yaitu pada tahun 2015 sebesar 49 orang menjadi 99 orang pada tahun 2018.

Rincian pencapaian indikator urusan sosial di Kota Pangkalpinang tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 25

Capaian Indikator Urusan Sosial Tahun 2015-2019

NO	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah PMKS	orang	13265	7636	7624	11109	NA
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	83	83	74,5	53	53
3	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi lainnya	%	73	100	19	104	40
4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100
5	Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima bantuan sosial	%	23	67	20,06	20	20
6	Persentase korban bencana yang menerima bantuan kebutuhan dasar saat tanggap darurat	%	100	80	70	87	90
7	Jumlah TKSK, PSM, Orsos dan lembaga dibawah binaan dinsos	orang	49	57	99	99	99
8	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	unit	6	6	26	26	26
9	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	51,72	64,82	74,5	85,6	87,5

Sumber: Dinas Sosial, PPPPA Kota Pangkalpinang 2020

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Kondisi ketenagakerjaan di Kota Pangkalpinang secara makro dapat dilihat dari rasio angkatan kerja yang bekerja dan tingkat pengangguran. Data menunjukkan bahwa rasio angkatan kerja yang telah bekerja menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2015 terdapat 100% angkatan kerja yang telah bekerja kemudian tahun 2018

menjadi 94,20% angkatan kerja yang bekerja. Meskipun mengalami peningkatan namun data tingkat pengangguran di tahun 2015 hingga 2019 juga menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan, pada tahun 2015 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang mencapai 10,64% kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 3,80%. Pada tahun 2019 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang kembali menunjukkan peningkatan menjadi 5,01%.

Indikator lainnya seperti cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan terus menunjukkan penurunan dari 2,09 pada tahun 2015 menjadi 73,91% pada tahun 2017 namun kembali turun di tahun 2019 menjadi 53,58%. Selain itu, terdapat 56 kasus konflik industrial di tahun 2019.

Jika ditinjau dari penjaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja yang digambarkan oleh indikator Cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan dan cakupan pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan maka terlihat adanya peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 26

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Angkatan Kerja yang Bekerja	%	100	NA	NA	94,20	NA
2.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	54,1	100	76,19	NA	5,93
3.	Cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	-	100	61,54	NA	NA
4.	Tingkat Pengangguran (%)	%	10,64	NA	3,80	4,70	5,01

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
5.	Cakupan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	2,09	1,17	36,57	73,91	53,58
6.	Jumlah Kasus Konflik Industrial	Kasus	NA	NA	43	42	56
7.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	45	NA	77,52	77.7	77,9
8.	Cakupan pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS Kesehatan	%	98	90	77,52	77,7	77,9

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, 2020

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menetapkan kewenangan konkuren bagi pemerintah daerah. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memilki sub kewenangan yaitu:

1) Kualitas hidup perempuan yang kewenangannya meliputi : (a) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota, (b) Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota, dan (c)Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota. (2) Perlindungan Perempuan yang kewenangannya meliputi : (a) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota,
2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota dan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

3) Kualitas Keluarga yang kewenangannya meliputi : (a) Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota, (b) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota dan (c) Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah.
4) Sistem Data Gender dan Anak yang kewenangannya meliputi : (a) Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota, (b) Pemenuhan Hak Anak (PHA), (c) Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota dan (d) Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.
5) Perlindungan Khusus Anak yang kewenangannya meliputi : (a) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota (b) Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota dan (c) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.

Implementasi PUG di dalam proses pembangunan antara lain dilihat dari tersedianya anggaran *responsive gender*. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG sudah mencapai 80% sejak tahun 2013 hingga tahun

2017. Persentase perempuan yang menjadi anggota legislatif selama kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2016 masih sebesar 6%.

Terkait dengan kualitas hidup perempuan, dapat dililihat dari capaian beberapa indikator. Persentase sumbangan pendapatan perempuan dalam rumah tangga di Kota Pangkalpinang terus meningkat dari tahun 2013 sebesar 29,55% dan pada tahun 2017 menjadi sebesar 30,41%. Persentase Perempuan di lembaga legistatif sejak 2014 adalah 8%, artinya masih jauh dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Persentase perempuan yang bekerja di lingkungan pemerintah kota sebesar 39,98%, menurun dari 55,04% di tahun 2013. Sedangkan perempuan di lembaga swasta meningkat dari 44,96% di tahun 2013 menjadi 60,18% di tahun 2017.

Terkait dengan perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) cenderung menurun, pada tahun 2017 sebesar 0,012 per 1.000 rumah tangga dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 0,077 per 1.000 rumah tangga. Namun demikian komitmen pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak termasuk TPPO tinggi, dilihat dari pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan. Salah satunya adalah Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu tiap tahun hingga tahun 2017 sebesar 100%.

Berkaitan dengan pengarusutamaan hak anak, Kota Pangkalpinang masih harus melakukan kerja keras, meskipun demikian Kota Pangkalpinang dalam tahap awal telah memperoleh pengakuan menuju Kota Layak Anak melalui penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama pada tahun 2019, namun

masih banyak indikator yang belum dilaksanakan. Kondisi lain kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari dan Juli 2020 terdapat 23 kasus terdiri atas 10 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 13 kasus kekerasan terhadap anak. Selengkapnya data dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2. 27
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	55,04	57	58	NA	39,98
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	NA	8	8	8	8
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	44,96	43,00	42,00	NA	60,18
~~4~~	Perempuan di eksekutif	~~%~~	NA	NA	7.617	7.732	6.882
5	Sumbangan Pendapatan Perempuan terhadap pendapatan Keluarga	%	29,55	29,65	30,29	NA	30,41
6	Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan Penganggaran Responsif Gender)	%	40	60	70	80	80
7	Skor Kabupaten Layak Anak	skor	NA	NA	NA	NA	407
8	Rasio KDRT	%	0	0,077	0,031	0,019	0,012
9	Kekerasan terhadap Anak	kasus	NA	NA	NA	NA	21
10	Persentase korban kekerasan dalam rumah tangga	%	NA	0,77	0,31	0,19	0,12
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	106	115	118	100	100
12	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	104	114	115	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2013	2014	2015	2016	2017
13	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	70	73	74	100	100
14	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	73	79	80	100	100
15	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	33	47	48	100	21
16	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	33	48	48	NA	NA
17	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	75	80	97	98	NA
18	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	NA
19	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	51,86	53,32	54,78	56,24	39,55

Sumber: Dinas Sosial, PPPPA Kota Pangkalpinang 2018

c. Pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 mengamanatkan pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Konsep

ketahanan pangan komponen serta pihak yang berperan serta dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Ketersediaan pangan utama di Kota Pangkalpinang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Ketersediaan diharapkan sampai tingkat rumah tangga minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan adalah dengan penganekaragaman pangan. Penganekaragaman pangan adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan mutu gizi makanan dengan pola konsumsi yang lebih beragam atau usaha untuk lebih menganekaragamkan jenis konsumsi dan meningkatkan mutu gizi makanan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, penganekaragaman horizontal, yaitu upaya untuk menganekaragamkan konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan; kedua upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut.

Pola pangan harapan merupakan suatu metode yang digunakan untuk , menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Pola pangan harapan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan wilayah. Dalam menentukan PPH ada beberapa komponen yang harus diketahui diantaranya yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi.

Skor pola pangan harapan di Kota Pangkalpinang menunjukkan tren naik turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017 tercatat skor PPH sebesar 87,3

menurun menjadi 84,1 pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 86 pada tahun 2019. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 2. 28
Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	Ada	Ada	Ada	NA	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama	Ton	129,41	133,27	NA	93,23	96,97
3.	Ketersediaan energi per kapita	(kkal/ kapita/ hari)	2.593	2.592	2.400	2.471,45	2499
4.	Ketersediaan protein perkapita	(kkal/ kapita/ hari)	89,9	88,9	83,3	63,8	86,7
5	Ketersediaan energi per kapita	%	108,0	108,0	108,04	102,9	104,12
6.	Penguatan cadangan pangan	(%)	0	17	10	25	25
7.	Ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	%	94,44	83,33	NA	100	100
8.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	NA	100	100
9.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	92,10	89,30	87,3	84,1	86
10.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	100	100	NA	100	100
11.	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	100	100	NA	100	100

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2020

d. Pertanahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perpustakaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Izin Lokasi:

Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

2. Sengketa Tanah Garapan

   Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota.

3. Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

   Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

4. Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah *Absentee*.

   Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah kabupaten/kota.

5. Tanah Ulayat

   Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota.

6. Tanah Kosong

   a) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota;

   b) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota.

7. Izin Membuka Tanah

   Penerbitan izin membuka tanah.

8. Penggunaan Tanah

   Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan pertanahan di Kota Pangkalpinang ditunjukkan melalui 2 indikator. Penyelesaian kasus tanah negara pada tahun 2013-2017 telah dapat ditangani 100 % begitu juga dengan penyelesaian izin lokasi juga dapat ditangani 100%

selama kurun waktu tahun 2013-2017. Capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 29
Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	100	100	100	100	100
2	Penyelesaian izin lokasi	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR Kota Pangkalpinang, 2018

e. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup yang terdapat di Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari kinerja lingkungan hidup serta kinerja pengelolaan persampahan. Kinerja lingkungan hidup ditandai dengan kontrol baik dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup baik dalam pencemaran air, udara, maupun ijin AMDAL. Sedangkan kinerja pengelolaan sampah ditunjukkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan proses daur ulang.

Jika ditinjau dari segi administratif, usaha yang dikelola mewajibkan pemiliknya untuk memiliki izin perlindungan dan pengeolaan lingkungan hidup sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu persyaratan administratif adalah perusahaan harus memiliki persyaratan administrasi dan teknis pencegahan dalam pencemaran air maupun udara. Presentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air serta persentase usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara merupaka dua indikator kinerja lingkungan

hidup yang berkaitan denga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada indikator kinerja lainnya dalam lingkungan hidup yaitu persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti mencapai 100% pada tahun 2019 dan rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya. Kinerja dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 30
Capaian Target Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	%	90	80	100	NA	NA
2	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%	90	100	100	NA	100
3	Rasio luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	%	100	100	100	NA	100
4	Persentase Usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	%	100	95	100	NA	NA

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2020

Kinerja urusan lingkungan hidup juga digambarkan melalui kinerja pengelolaan sampah yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Adapun indikator kinerja yang terdapat pada kinerja pengelolaan sampah antara lain adalah persentase pengurangan sampah perkotaan, persentase pengangkutan sampah,

persentase sampah yang tertangani, persentase pengoprasian TPA, persentase penanganan sampah, dan tempat pembuangan sampah per satuan penduduk.

Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 persentase pengurangan sampah perkotaan hanya menunjukkan nilai 0,35%, dimana nilai tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,28. Peningkatan kinerja pengelolaan sampah juga ditunjukkan oleh indikator kinerja lainnya seperti persentase pengangkutan sampah dan persentase sampah yang tertangani. Kedua indikator tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Realisasi capaian pada tahun 2019 menunjukkan nilai 93% baik untuk persentase pengangkutan sampah maupun persentase sampah yang tertangani. Selain ketiga indikator tersebut, persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk juga menunjukkan peningkatan pada realisasi kinerjanya. Hal tersebut terlihat dari realisasi kinerja pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,8% meningkat dari tahun sebelumnya yang mecapai 2,1%.

Berbeda dengan empat indikator kinerja pengelolaan sampah lainnya, persentase pengoperasian TPA dan persentase penanganan sampah menunjukkan peningkatan pada realisasi capaian kinerjanya. Sampai pada tahun 2019, baik persentase sampah yang tertangani dan persentase pengoprasian TPA sudah dapat mencapai 100%. Kinerja pengelolaan sampah pada tahun 2015 hingga 2019 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 31

Capaian Target Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	0,22	0,24	0,28	NA	0,35
2.	Persentase pengangkutan sampah	%	82	81	78	92	93
3.	Persentase sampah yang tertangani	%	82	81	78	92	93
4.	Persentase pengoperasian TPA	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Penanganan Sampah	%	99,20	100	100	NA	NA
6	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	%	4,1	2,425	NA	2,1	3,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2020

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan kota merupakan salah satu indikator kinerja dalam urusan lingkungan hidup. AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pasal 48 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menyebutkan bahwa dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin lingkungan. Kinerja pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang sangat baik karena mencapai 100% setiap tahunnya dari tahun 2015 hingga 2019.

Kota Pangkalpinang juga turut berupaya dalam memberikan ruang gerak kepada masyarakat untuk beraktivitas, bersosialisasi dan saling berinteraksi dalam bentuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Definisi Ruang

Terbuka Hijau (RTH) pada dasarnya merupakan kawasan atau areal permukaan tanah yang didominasi oleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan atau budidaya pertanian. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat publik dan 10% di antaranya bersifat privat.

Presentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang hingga tahun 2019 mencapai 18% meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,8. Kondisi tersebut menunjukkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pangkalpinang masih rendah karena masih berada jauh di bawah standar yang ditetapkan dalam SPM. Pemerintah Kota Pangkalpinang telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan membangun taman-taman baru. Kinerja indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32
Capaian Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL yang menjadi kewenangan Kota.	%	100	100	100	NA	100
2.	Rasio penyelesaian dan atau penegakan hukum lingkungan	%	100	100	100	NA	NA
3.	Persentase luasan RTH publik kawasan perkotaan	%	11,31	11,31	11,8	18	18

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, 2020

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pemerintahan dalam negeri meliputi (1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga; (2) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk; (3) Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran; dan (4) Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian. Adapun indikator kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 namun terdapat beberapa indikator tambahan diantaranya adalah kepemilikan akta kelahiran, rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil, kemudian penerapan KTP Nasional berbasis NIK. Berikut merupakan capaian kinerja masing-masing indikator urusan kependudukan dan pencatatan sipil yang terdapat di Kota Pangkalpinang:

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Penduduk ber-KTP persatuan Penduduk	%	81,30	99,9	99,9	100	67,62
2	Rasio Bayi Ber-akta kelahiran	%	67,55	98,66	100	100	98,88
3	Kepemilikan akta kelahiran	Per 10.000 penduduk	47	44	48	87,41	87,41
4	Rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil	%	89,69	100	100	100	65,25
5	Cakupan Akta Kematian	%	58	63	71	54,37	57,26
6	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	%	90	97	99	99,5	99,41
7	Kepemilikan KTP	%	93,95	99,97	100	100	97,02
8	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, 2018

Kondisi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Pangkalpinang dalam jangka waktu 2013-2017 berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari capaian rasio bayi ber-akta kelahiran yang mencapai 98,88% pada tahun 2017. Kemudian cakupan penerbitan kartu keluarga yang mencapai 99,41%. Meskipun terlihat cukup baik namun kedua indikator tersebut mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya. Kemudian jika dilihat dari rasio penduduk ber-KTP terlihat adanya penurunan dari tahun 2016 yang telah mencapai 100% menjadi 67,62% pada tahun 2017. Hal ini juga ditunjukkan oleh kepemilikan KTP yang juga mengalami penurunan dari 100% di tahun 2016 menjadi 97,02% pada tahun 2017. Namun, jika dilihat dari penerapan KTP Nasional berbasis NIK maka capaian Kota Pangkalpinang menunjukkan capaian yang sempurna yaitu 100%.

Jika dilihat dari kepemilikan akta kelahiran terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 48/10.000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 8741/10.000 penduduk pada tahun 2017. Indikator lainnya yaiu rasio perkawinan yang dicatat di catatan sipil hingga tahun 2017 hanya mencapai 65,25%, menurun dari tahun 2016 yang mencapai 100%. Kemudian untuk cakupan akta kematian mencapai 57,26% pada tahun 2017 mengalami fluktuasi dari tahun-tahun sebelumnya dimana tahun 2013 mencapai 58% meningkat di tahun 2015 menjadi 71% dan menurun kembali di tahun 2016 menjadi 54,37%.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang mendorong masyarakat untuk berinsiatif dalam memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Parisipasi masyarakat

merupakan salah satu syarat dari kegiatan pemberdayaan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Pengertian subjek disini adalah motor penggerak, bukan hanya sebagai peneria manfaat atau objek semata. Dalam hal ini subjek dari pemberdayaan masyarakat biasanya merupakan sebuah lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, LPM, Posyandu, PKK, dan LSM.

Kinerja urusan pemberdayaan masyakat di Kota Pangkalpinang kemudian digambarkan dari presentase PKK aktif, rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, Posyandu aktif, LPM berprestasi, jumlah kelompok binaan LPM, swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat dari persetase PKK yang aktif maka telihat kinerja yang sangat baik karena setiap tahun dapat mencapai 100%. Capaian yang baik juga terdapat pada jumlah Posyandu aktif yang mencapai 100 unit pada tahun 2013 hingga 2016.

Kemudian, jika dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan PKK menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 50 kelompok pada tahun 2013 menjadi 75,5 pada tahun 2016. Jika dilihat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berprestasi di Kota Tanjungpinang setiap tahunnya juga menunjukkan peningkatan yaitu dari 11,36% pada tahun 2013 menjadi 15,17% pada tahun 2016. Hal tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kelompok binaan LPM dimana pada tahun 2013 mencapai 43 unit kemudian meningkat menjadi 64,5 unit pada tahun 2016.

Selain beberapa indikator di atas, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat juga dinilai melalui swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat, serta jumlah LSM. Jika dilihat, swadaya Masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat menunjukkan angka yang stagnan dan terlihat belum optimal yaitu 57,14% dari tahun 2013 hingga 2016. Hal tersebut juga terjadi pada pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat yang memiliki capaian kinerja stagnan pada posisi 33,33% di tahun 2013 hingga 2016. Sedangkan untuk jumlah LSM yang terdapat di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari 50% pada tahun 2013 menjadi 75,5% pada tahun 2016. Secara lebih rinci kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 34
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2015 – 2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	66	75,5	75,5	75,5	75,5
3	Posyandu aktif	Unit	100	100	100	76,7	76,7
4	LPM Berprestasi	Unit	15,00	15,17	15,17	15,17	15,17
5	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Unit	58	64,5	64,5	64,5	64,5
6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	%	57,14	57,14	58	58	58
7	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	%	33,33	33,33	33,33	33,33	34
8	Jumlah LSM	%	50	55	66	75,5	75,5

Sumber: Dinas Sosial PPPA Kota Pangkalpinang, 2020

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk secara alami di Kota Pangkalpinang kondisinya fluktuatif dari tahun 2013-2017 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Pangkalpinang belum dapat dikendalikan secara optimal. Sampai dengan tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 5%, kebijakan dan pemetaan pertumbuhan penduduk serta pengembangan keluarga belum disusun.

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak yang dimiliki perempuan selama masa reproduksinya, di Kota Pangkalpinang dari tahun 2013 sampai 2017 cenderung meningkat. Sampai dengan tahun 2017 TFR Kota Pangkalpinang mencapai 2,56. Hal ini berarti jumlah anak yang dimiliki perempuan Kota Pangkalpinang antara 2-3 anak. Kondisi ini masih diatas capaian dan target nasional sebesar 2,1. Hal ini sejalan dengan capaian *unmetneed* (persentase perempuan usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB) yang masih mencapai 12,78% di tahun 2017. Target nasional capaian *unmetneed* adalah sebesar 5%.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB antara lain didukung dengan penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 sudah mencapai 100%. Penggunaan alat kontrasepsi masih didominasi penggunaan alat kontrasepsi hormonal sedangkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sampai dengan 2017 baru mencapai 26,93% sementara itu laki-laki yang menggunakan alat kontrasepsi masih belum optimal yaitu 3,77% tahun 2017.

Upaya lainnya untuk mensukseskan program KB adalah melalui peningkatan peran masyarakat dalam mensosialisasikan program KB. Peran masyarakat tersebut antara lain melalui kelompok Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera Bina Keluarga Balita (UPPKS- BKB), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), dan pembentukan kader. Peningkatan peran UPPKS-BKB dengan mengikutsertakan anggota yang masih usia subur dalam program KB. Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB sampai dengan tahun 2017 sebesar 54,73%. Kondisi ini masih dibawah target nasional yaitu 80%. Gambaran mengenai capaian kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 35
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,5	0,26	0,35	0,33	0,5
2	Total Fertility Rate (TFR)	Per 1.000 perempuan	2,54	2,35	2,35	2,76	2,56
3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	Per 1.000 perempuan	35	33	32	29,42	33
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	2,07	2	2,62	2,65	2,62
5	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*)	%	15,70	13	12,72	14,12	12,78

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100
7	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	%	100	100	100	100	100
8	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	%	100	100	100	100	100
9	Rasio Akseptor KB	%	73,39	74,15	75,86	72,00	72,21
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR (*Contraceptive Prevalence Rate)* bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	73,39	74,15	75,86	72,00	72,21
11	Persentase Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	20,27	22,64	24,6	24,74	26,93
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Pria	%	4,56	3,82	3,89	3,86	3,77
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	0	8,3	8,3	8,3	8,3
14	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa per desa	%	10	12	13	15	16,9
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	71	74,15	71,66	71,65	54,73

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
16	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100
17	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga	%	1,5	1,6	1,6	1,7	1,7

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang 2018

i. Perhubungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan perhubungan untuk Pemerintah Daerah meliputi 4 sub urusan antara lain : 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretaapian. Berdasarkan kondisi wilayahnya, Pemerintah Kota Pangkalpinang hanya melaksanakan sub urusan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kondisi kinerja urusan perhubungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ketersedian Kelengkapan Jalan

   Persentase ketersedian perlengkapan jalan di Kota Pangkalpinang menunjukan peningkatan selama 5 tahun terakhir, pada tahun 2015 sebesar 70% meningkat menjadi 93% di tahun 2019. Jika dilihat kondisi perlengkapan jalan yang tersedia di tahun 2019 menunjukan sebesar 60% dalam kondisi baik, sebesar 24% dalam kondisi sedang dan sebesar 16% dalam kondisi rusak.

2. Angkutan Umum

   Angkutan merupakan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan,

sedangkan kendaraan bermotor umum merupakan setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran (Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Jumlah angkutan umum di Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari 547 unit di tahun 2015 menjadi 73 unit di tahun 2019. Sementara itu jika dilihat kepemilikan KIR Angkutan Umum sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 54%. Untuk rasio ijin trayek juga masih sangat rendah tahun 2017 sebesar 25%.

3. Penerangan Jalan Umum

Penerangan jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan dapat melihat dengan lebih jelas jalan/medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan dari kegiatan/aksi kriminal. Saat ini berkaitan dengan pengelolaan PJU menjadi kewenangan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang. Berdasarkan data rilis dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, untuk menerangi jalan di Kota Pangkalpinang butuh 11.961 lampu, sedangkan yang sudah terealisasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2.611 lampu. Pada tahun 2019 telah dipasang sebanyak 115 unit tiang serta total lampu 273 lampu kiri dan kanan sepanjang Jalan Sudirman. Secara total pada tahun 2019 telah dilakukan pemasangan sebanyak 230 titik yang dipasangi lampu jalan. Saat ini baru ada 2.650 titik yang terpasang lampu jalan. Sedangkan

target keseluruhan sebanyak 10.961 titik, sehingga perlu dilakukan secara bertahap.

Perkembangan kondisi kinerja urusan perhubungan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 36
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, *traffic light*, *warning light*)	%	70	80	85	88	93
	a. Rambu jalan	unit	766	632	507	100	230
	b. Marka jalan	m^2	DPU			100	200
	c. Traffic light	unit	6	4	3	-	-
	d. Warning light	unit	2	2	2	8	-
	e. Guardrail	M	-	-	-	-	200
	f. Deliniator	Unit	-	-	-	-	-
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	NA	50%	55 %	57%	60%
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi sedang	%	NA	30%	27 %	26%	24%
	Fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi rusak	%	NA	20%	18 %	17%	16%
2.	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	%	55	65	65	80	80
3.	Jumlah angkutan umum	Unit	547	172	188	NA	73
4.	Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	46	55	63	NA	54
5.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	15	15	15	15	15
6.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	rupiah	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7.	Rasio ijin trayek	%	0,00099566 3	0,00080213 8	NA	NA	25
8.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Unit	6.489	7.211	7.425	NA	6.837

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
9.	Terminal Bus	Unit	3	3	3	3	3
10.	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	%	56 %	79 %	87 %	NA	NA
11	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan	Unit	6.489	7.211	7.425	7.300	6.873
12	Jumlah arus keluar penumpang Angkutan Darat	%	NA	NA	NA	NA	248.859

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, 2020

j. Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditandai melalui pengembangan komunikasi, informatika, media massa, serta peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informatika.

Percepatan pembangunan urusan komunikasi dan informatika yang telah dilakukan oleh Kota Pangkalpinang beberapa diantaranya adalah diijinkannya 100 BTS dari tahun 2015 ingga 2017 guna mendukung kualitas jaringan telekomunikasi di Kota Pangkalpinang. Selain itu, cakupan layanan komunikasi juga menunjukkan capaian yang sangat baik setiap tahunnya yaitu 100% pada tahun 2015 hingga 2019. Cakupan layanan komunikasi yang baik kemudian juga didukung dengan prsentase pengaduan informasi publik yang terus dapat ditangani 100% setiap tahunnya di Kota Pangkalpinang.

Pembangunan urusan komunikasi dan informatika juga dilakukan di lingkungan perangkat daerah yaitu dengan pembuatan dan penggunaan website. Tujuan pembangunan website bagi perangkat daerah adalah untuk mempermudah komunikasi antar lembaga dengan masyarakat ataupun pihak-pihak terkait yang berusaha menjalin komunikasi untuk mendapatkan informasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 telah terdapat 5 perangkat daerah yang telah memiliki *website* dan aktif melakukan *update*, jumlahnya meningkat hingga pada tahun 2019 terdapat 18 perangkat daerah yang telah memiliki dan aktif menggunakan *website*.

Sementara itu, dilihat dari sisi jumlah surat kabar dan jumlah penyiaran radio/TV yang terdapat di Kota Pangkalpinang terlihat masih pada angka yang stagnan atau tidak ada perubahan. Kemudian untuk jumlah pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi di Kota Pangkalpinang dapat dilakukan dengan lima media yaitu melalui media massa (majalah, radio, dan televisi); media baru (*website, online*); media tradisional (pertunjukan seni); media interpersonal (sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya); media luar ruang (buletin, *leaflet, booklet*, brosur, spanduk, baliho). Berdasarkan data setiap tahunnya terdapat adanya peningkatan pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi melalui berbagai media, dan media yang paling banyak digunakan adalah media baru seperti website atau media *online* karena dinilai lebih efisien dan mudah dalam penyalurannya kepada masyarakat.

Presentase penduduk yang menggunakan HP atau telepon di Kota Pangkalpinang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pameran dan Expo juga dilaksanakan satu kali setiap tahunnya guna mendukung pembangunan komunikasi dan informatika di Kota Pangkalpinang. Kinerja

pelaksanaan pengembangan komunikasi dan informatika selama tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 37
Capaian Kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase BTS yang memilikiijin dan perpanjangan	%	100	100	100	NA	NA
2	Website Perangkat Daerah	Website	5	5	10	15	18
3	Website PD yang aktif	Website	5	5	10	15	18
4	Jumlah surat kabar nasional/ lokal		6	6	6	6	6
5	Jumlah penyiaran radio/ TV	Radio/ TV	7	7	7	7	7
6	Persentase PD Pelayanan Publik yang memiliki portal *website*	%	1	1	1	1	1
7	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	14	14	43	10	25
8	Persentase SDM yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang TIK	%	80	100	100	NA	NA
9	Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui :						
	- Media massa seperti majalah, radio dan televisi	%	8	17	25	25	25
	- Media baru seperti *website* (media *online*)	%	100	100	100	100	100
	- Media tradisonal seperti pertunjukan rakyat	%	8	17	25	NA	NA
	- Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	%	8	17	25	25	25
	- Media luar ruang seperti media buletin, *leaflet, booklet*, brosur, spaduk dan baliho	%	8	17	25	30	40
10	Persenta sepengaduan informasi publik yang tertangani	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
11	Cakupan layanan telekomunikasi	%	100	100	100	100	100
12	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	%	70	75	80	NA	NA
13	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses internet	%	50	55	60	NA	NA
14	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	Rasio	1:160.000 14	1:150.000 14	1:150.000 15	NA	NA
15	Jumlah *Provider* Telekomunikasi Yang Ada di Pangkalpinang	Jumlah	6	6	6	6	6
16	Jumlah Jaringan Komunikasi	Jumlah	6	6	6	6	6
17	Pameran/expo	Jumlah	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang, 2020

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang koperasi dan UMKM untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Izin Usaha Simpan Pinjam
   a) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.
   b) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota

2. Pengawasan dan pemeriksaan

   a) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

   b) Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

3. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

   Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

   Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah kabupaten/kota.

5. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

   Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah kabupaten/kota.

6. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

   Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.

7. Pengembangan UMKM

   Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian indikator usaha mikro dan kecil pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun 2013, jumlah UKM yang ada di Kota

Pangkalpinang sebanyak 24.680 unit meningkat menjadi 26.787 unit pada tahun 2017. Untuk perkembangan koperasi yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Persentase koperasi aktif sampai dengan tahun 2017 sebesar 66,39% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 73,33%.

Jumlah KSP / USP yang masuk kategori sehat selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, terlihat dari tahun 2013 jumlah KSP/USP yang masuk kategori sehat sebanyak 9 unit meningkat menjadi 16 unit pada tahun 2017. Hal ini mengakibatkan banyaknya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Kota Pangkalpinang, menjadikan meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada UMKM. Terlihat dari jumlah penyerapan tenaga kerja pada UMKM di tahun 2013 sebesar 64.406 orang meningkat menjadi 70.985 orang pada tahun 2016. Capaian indikator urusan perkembangan UMKM dan koperasi daritahun 2013 sampai tahun 2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 38
Capaian Indikator Urusan Perkembangan UMKM dan Koperasi
Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Usaha Mikro dan Kecil	Unit	24.680	25.447	26.080	26.747	26.787
2	Jumlah Koperasi	Unit	210	211	201	203	119
3	Persentase Koperasi Aktif	%	73,33	73,93	73,13	60,59	67,22
4	Jumlah KSP / USP yang masuk kategori sehat	Unit	9	16	16	16	16
5	Ijin Simpan Pinjam yang Diterbitkan	Ijin	0	0	0	1	3

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
6	Persentase UMK (Usaha Mikro Kecil) dari UMKM	%	99,03	99,00	99,00	98,97	97,39
7	Konstribusi sub sektor industri Kecil dan Menengah dalam penyerapan tenaga kerja	%	NA	NA	NA	6,754	NA
8	Penyerapan tenaga kerja pada UMKM	Orang	64.406	NA	NA	70.985	NA
9	Persentase UMKM yg mendapat kredit dari lembaga keuangan	%	NA	NA	NA	NA	NA
10	*One vilage one product*	produk	1	1	1	1	1
11	Jumlah outlet / *showroom* produk umkm	outlet	0	0	0	1	1

Sumber: Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

l. Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 meliputi 4 sub urusan antara lain 1) Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 2) Kerja Sama Penanaman Modal; 3) Promosi Penanaman Modal; 4) dan Pelayanan Penanaman Modal.

Total Nilai investasi (PMA/PMDN) Tahun 2019 yang masuk ke Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 368 Milyar. Untuk promosi Penanaman Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan kegiatan promosi peluang penanaman modal yang dilaksanakan setahun sekali. Berkaitan dengan peningkatan pelayanan penanaman modal Pemerintah Kota Pangkalpinang telah mengembangkan pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sampai dengan tahun 2017 telah berjalan 100%, sementara itu untuk mendukung kemudahan pelayanan telah tersedia Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Skor kepuasan masyarakat akan pelayanan investasi sangat baik di

tahun 2019 sebesar 85,15. Perkembangan selengkapnya kinerja urusan penanaman modal dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 39
Peningkatan Penanaman Modal Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan usaha besar dan UMKM (jumlah MoU peminatan kerjasama kemitraan)	MoU	NA	1	NA	NA	NA
2	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	keg	NA	NA	1	NA	1
3	Terselengaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat	keg	NA	NA	NA	NA	NA
4	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	milyar rupiah	NA	NA	880 M	258 M	368 M
5	Terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	%	%	%	%	NA	NA
6	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	keg	NA	NA	NA	NA	1
9	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah ijin	0	0	0	0	0
10	Terselenggarakannya pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	keg	NA	NA	NA	NA	NA
11	Tersedianya data dan informasi peluang usaha	Paket	NA	NA	Paket	1	1
12	Penyusunan Kajian Kebijakan bidang Penanaman Modal	Paket	Paket	Paket	Paket	NA	NA
13	*Survey* Kepuasan Masyarakat	skor	skor	skor	82,91	84,36	85,15

Sumber: Dinas Penenaman Modal, PTSP dan tenaga Kerja Kota Pangkalpinang 2020

m. Kepemudaan dan Olahraga

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut :

1. Kepemudaan
   a) Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota.
   b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten/kota.
2. Keolahragaan
   a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
   b) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
   c) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
   d) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
   e) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3. Kepramukaan

   Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten/kota

Kondisi organisasi kepemudaan di Kota Pangkalpinang belum banyak berkembang, jumlah organisasi pemuda sebanyak 32 organisasi di tahun 2017, dengan rasio organisasi pemuda dan olahraga terhadap penduduk (per 10.000) baru mencapai 0,0059 di tahun 2017. Jumlah kegiatan kepemudaan selama setahun di tahun 2017 hanya terdapat 3 kegiatan. Sementara itu untuk jumlah organisasi olahraga sebanyak 27 organisasi, prestasi yang diraih dibidang

olahraga cukup baik untuk Prestasi Popda/Kejurda Provinsi sebanyak 47 prestasi diraih di tahun 2013 meningkat menjadi 77 prestasi di tahun 2016 namun menurun menjadi 61 prestasi di tahun 2017. Untuk mendukung pengembangan olahraga diperlukan sarana dan prasarana olahraga namun saat ini untuk gedung olahraga di Kota Pangkalpinang baru ada 1 sejak tahun 2013-3017, sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung lainnya juga masih terbatas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 40
Peningkatan Pemuda Olahraga Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Organisasi Pemuda	Unit	32	32	32	32	32
2	Jumlah Organisasi Olahraga	Unit	27	27	27	27	27
3	Jumlah Gedung Olahraga	Unit	1	1	1	1	1
4	Rasio Gelanggang/Balai Remaja per 10.000	Per 10.000	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
5	Rasio organisasi pemuda dan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059
6	Rasio Lapangan Olahraga terhadap penduduk (per 10.000)	Per 10.000	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056	0,0056
7	Jumlah Cabang Olahraga	Unit	27	27	27	27	27
8	Prestasi Popda/Kejurda Provinsi	Unit	47	32	58	77	61
9	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	Keg	6	4	3	3	3
10	Jumlah Kegiatan Olahraga	keg	6	9	6	5	3

Sumber: Dinas Pariwisata, PPPPA Kota Pangkalpinang 2018

n. Statistik

Statistik, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Dalam statistik, kegiatan yang dilakukan adalah menyediakan, menyebarluaskan data, mengembangkan ilmu statistik dan upaya berkembangnya Sistim Statistik Nasional. Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional, mengembangkan Sistim Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan dari kegiatan statistik adalah untuk menyediakan data statistik yeng lengkap, akurat, dan mutakhir, oleh karena itu, diperlukan adanya penyediaan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga dapat memudahkan bagi perencana untuk menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah. Data yang tersedia secara berkesinambungan harus selalu diperbaharui demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang tepat. Capaian indikator urusan statistik Kota Pangkalpinang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 41
Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Buku Kota Pangkalpinang Dalam Angka	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku PDRB Kota Pangkalpinang	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
3	Buku Data Dasar Kota Pangkalpinang	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/ tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Diskominfo Kota Pangkalpinang 2018

o. Persandian

Persandian merupakan salah satu urusan pemerintahan yang konkuren dan bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan fungsi persandian bukan hanya sebatas kirim terima surat/berita sandi, akan tetapi diperluas sebagai pengamanan informasi. Kinerja urusan persandian menunjukkan nilai yang fluktuatif, dimana pada tahun 2015 terdapat 2 surat yang menggunakan persandian. Kemudian tahun 2016 hanya terdapat 1 surat yang menggunakan persandian, dan pada tahun 2017 terdapat 2 surat yang menggunakan persandian. Berdasarkan capaian kinerja tersebut dapat terlihat bahwa jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian masih sangat minim.

Tabel 2. 42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah surat menyurat yang menggunakan persandian	Surat	NA	NA	222	187	238

Sumber: Diskominfo Kota Pangkalpinang, 2018

p. Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Kebudayaan untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Kebudayaan, dengan lingkup:
   a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
   b) Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
   c) Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten/kota.
2. Kesenian Tradisional;

   Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
3. Sejarah ;

   Pembinaan sejarah lokal kabupaten/kota.
4. Cagar Budaya;
   a) Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
   b) Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota.
   c) Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
5. Permuseuman;

   Pengelolaan museum kabupaten/kota.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan Kebudayaan dapat dilihat dari 9 indikator, yaitu Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar 100%, Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebanyak 2 kegiatan, jumlah misi kesenian pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2 kegiatan. Jumlah grup kesenian pada tahun 2019 sebesar 37 grup, cakupan kajian seni TAD (tidak ada data), cakupan fasilitasi seni pada tahun 2015 sebesar 39 paket menurun menjadi sebesar 1 paket pada tahun 2019, Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya) pada tahun 2015 sebesar 125 orang menurun menjadi sebesar 1 orang pada tahun 2019, cakupan organisasi seni pada tahun 2015 sebanyak 120 namun tahun 2019 (tidak ada data), dan cakupan gelar seni pada tahun 2015 sebesar 140% kemudian menurun pada tahun 2019 menjadi 4% dan pada tahun 2019. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 43
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	100	100	-	100	100
2.	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	2	1	1	2	2
3.	Jumlah Misi Kesenian	kali	50	13	1	2	2
4.	Jumlah grup kesenian	grup	NA	NA	30	34	37
5.	Cakupan Kajian Seni	Paket	NA	NA	NA	NA	NA
6.	Cakupan Fasilitas Seni	Paket	39	NA	NA	NA	1

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
7.	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (pamong budaya)	Orang	125	NA	NA	NA	1
8.	Cakupan Organisasi seni	Organisasi	120	NA	NA	NA	NA
9.	Cakupan Gelar Seni	%	140	100	NA	NA	1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang 2020

q. Perpustakaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembagian urusan bidang perpustakaan dalam Pemerintah Daerah terdiri dari 2 aspek sebagai berikut:

1. Pembinaan perpustakaan, dengan lingkup;
   a) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   b) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
   a) Pelestarian naskah kuno milik Daerah Kabupaten/Kota
   b) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 6 (enam

indikator) urusan pemerintahan yakni jumlah pengunjung perpustakaan per tahun; Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan; Rasio perpustakaan persatuan penduduk; Jumlah rata-rata pengunjung/tahun; Jumlah koleksi judul buku perpustakaan; dan jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki setifikat.

Sedangkan indikator Urusan perpustakaan Kota Pangkalpinang pada tahun tahun 2015-2019 terdapat sebanyak 7 (tujuh) indikator. Indikator peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun setiap tahunnya mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2019, dimana tahun 2015 sebesar 0,86 secara namun menurun menjadi 0,43 pada tahun 2019. Jumlah rata-rata pengunjung per-perpustakaan/tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2015 jumlah pengunjung terhitung sebanyak 159.101 orang naik menjadi 166.749 orang pengunjung perpustakaan pada tahun 2019.

Dilihat dari jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2015 sebanyak 19.875 judul buku koleksi naik secara signifikan menjadi 46.952 judul buku di tahun 2019. Jika dilihat dari rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah mengalami penurunan, dimana tahun 2015 sebesar 0,64 menjadi 0,52 pada tahun 2019.

Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat di Kota Pangkalpinang cukup sedikit. Sejak tahun 2015-2016 tidak terdapat pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, namun pada tahun 2017 sudah terdapat 1 orang pustakawan, teknis dan penilai yang telah memiliki sertifikat dan meningkat di tahun 2019 menjadi 6 orang yang memiliki sertfikat.

Sementara jumlah perpustakaan di Kota Pangkalpinang dari tahun 2015-2019 memiliki tren perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah perpustakaan tahun 2015 sebanyak 109 perpustakaan, kemudian naik menjadi 111 perpustakaan pada tahun 2019. Secara lebih rinci capaian kinerja urusan perpustakaan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 44
Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1)	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,86	0,78	0,90	NA	0,43
2)	Rasio koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	%	0,64	0,54	0,54	0,53	0,52
3)	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	0,59	0,51	0,59	0,19	0,27
4)	Jumlah rata-rata pengunjung per-pustakaan / tahun	Orang	159.101	168.878	168.388	152.142	166.749
5)	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	19.875	21.410	23.284	46.952	46.952
6)	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang	0	0	1	6	6
7)	Jumlah Perpustakaan		109	111	111	111	111

Sumber:Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, 2020

r. Kearsipan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) indikator urusan pemerintahan yakni persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, dan peningkatan SDM.

Kota Pangkalpinang memiliki 5 (lima) indikator kinerja pada tahun 2015-2019 urusan bidang kearsipan. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku memiliki tren perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sebesar 51,52% meningkat menjadi 87,10% pada tahun 2019. Sementara peningkatan SDM pengelola kearsipan mengalami kenaikan yang cukup besar dari tahun 2015 hanya sebanyak 43 orang kemudian naik menjadi 90 orang pada tahun 2019.

Jumlah arsip in aktif yang dikelola mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, dari tahun 2015 sebesar 888 dokumen meningkat menjadi 4.469 dokumen pada tahun 2019. Dilihat dari cakupan cakupan sarana dan prasarana (sarpras) arsip terpelihara juga mengalami perkembangan yang meningkat. Pada tahun 2015 cakupan sarana dan prasarana (sarpras) arsip yang terpelihara sebanyak 0 $M^{3,}$ naik menjadi 155 M^3 pada tahun 2019. Capaian kinerja urusan kearsipan Kota Pangkalpinang dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 45
Capaian Indikator Urusan Kearsipan Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capain Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Presentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	51,52	63,64	80,65	80,65	87,10
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	orang	43	45	120	121	90
3	Jumlah Arsip in aktif yang berhasil dikelola	Dok	888	4.826	2.208	3.278	4.469
4	Cakupan sarpras arsip terpelihara	M^3	0	48	155	155	155
5	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	100	100	100	NA	NA

Sumber:Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Kota Pangkalpinang, 2020

C. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja indikator produksi perikanan tangkap di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 mengalami penurunan produksi. Hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan tangkap tahun 2015 sebesar 1.896 ton/tahun menurun menjadi 930,08 ton/tahun pada 2019. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah Kota Pangkalpinang melalui kebijakan-kebijakan yang membantu para nelayan.

Peningkatan capaian angka konsumsi ikan di Kota Pangkalpinang yang meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan konsumsi protein hewani dari ikan. Selanjutnya cakupan bina kelompok pembudidaya ikan juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu capaian pada tahun 2015 26,26% meningkat menjadi sebesar 31,82 pada

tahun 2019. Rincian realisasi dan pencapaian indikator fokus urusan pilihan kelautan dan perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 46
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton / tahun	1.896	2.089	2.941	3.088	930,08
2	Cakupan bina kelompok nelayan	%	9,85	25,07	40,60	NA	NA
3	Produksi Perikanan budidaya	Ton	6.626	7.519	8.126	5.795,21	2.457
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kapita/ tahun	44,08	41,41	38,94	41,16	44,72
5	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	26,26	28,08	29,45	30,65	31,82

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2020

b. Pariwisata

Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan urusan pariwisata sebagai berikut :

1. Destinasi Pariwisata
   a) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.
   b) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
   c) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
   d) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
2. Pemasaran Pariwisata
   Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

3. Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

   Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

4. Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Jumlah obyek wisata di Kota Pangkalpinang menunjukan peningkatan, tahun 2015 sebanyak 38 obyek meningkat menjadi 45 obyek. Pengelolaan obyek wisata di Kota Pangkalpinang masih belum optimal, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung juga relatif rendah. Perkembangan selengkapnya urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 47
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2015-2019

NO	Indiktor	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Obyek Wisata	%	38	40	45	45	45
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) :						
	1. Mancanegara	orang	1.052	1.009	1.663	3.159	1.755
	2. Nusantara (Domestik)	orang	192.206	196.999	213.793	225.314	866.897
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	1,20	1,04	1,33	NA	NA

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Pangkalpinang, 2020

c. Pertanian

1). Produksi Tanaman Pangan

Produksi pangan utama di Kota Pangkalpinang adalah Ubi Jalar, Ketela Pohon dan Jagung. Luas Panen ketela pohon pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami fluktuasi namun trennya menurun. Pada tahun 2015 produksi ketela pohon sebesar 164,5 ton, turun menjadi 98 ton pada tahun 2018 yang merupakan produksi terendah dalam kurun waktu 5 tahun. Produksi ubi jalar dari 20 ton pada 2015 menjadi 30 ton pada 2018. Sedangkan untuk produksi jagung mengalami peningkatan dari 68,8 ton pada tahun 2015 menjadi hanya 84 ton pada tahun 2018. Secara rinci dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2. 48
Luas Panen dan Produksi Tanaman Palawija Menurut Jenis Komoditas Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2018

No	Jenis Komoditas	2015	2016	2017	2018
1	**Ketela Pohon**				
	✓ **Luas Panen (ha)**	11	11	10	7
	✓ produksi (ton)	164,5	105,7	376	98
2	**Ubi Jalar**				
	✓ **Luas Panen (ha)**	1	4	5	2
	✓ produksi (ton)	20	53	174	30
3	**Jagung**				
	✓ **Luas Panen (ha)**	18	32,4	21,5	17,9
	✓ produksi (ton)	68,8	154,1	383,79	84

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

2). Produksi Tanaman Buah-Buahan

Beberapa komoditas buah yang produksinya mengalami tren meningkat dari tahun 2015 sampai 2019 yaitu rambutan, pepaya, pisang, salak, manggis, jambu biji nangka dan belimbing. Sedangkan yang trennya menurun yaitu alpukat, mangga, duku/langsat, jeruk, durian dan nanas. Selengkapnya tentang produksi buah-buahan di Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49
Jenis dan Produksi Buah-Buahan (Ton) di Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2019

Jenis Buah-buahan	2015	2016	2017	2018	2019
1) Alpukat	23,8	16,9	21,2	190	178
2) Mangga	19,3	26,2	21,7	240	199
3) Rambutan	402,6	36,4	584,7	4.005	4.602
4) Duku/Langsat	0,6	3,2	3,1	63	43
5) Jeruk	1,9	12,7	2,9	16	5
6) Durian	21,8	6,2	25,2	421	269
7) Pepaya	47,1	46,4	98,4	647	651
8) Pisang	136,3	153,8	188,8	1.901	2.047
9) Nanas	836,8	3.707,8	395,3	26.816	10.267
10) Salak	2,8	18,8	15	34	42
11) Manggis	25,2	18,7	14,2	115	269
12) Jambu Biji	11,1	14,9	19	50	79
13) Nangka	23,7	0	23,7	59	123
14) Belimbing	4,2	4,7	6,2	70	80

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

3). Produksi Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Kota Pangkalpinang, adalah ternak besar berupa sapi, sedangkan ternak kecil terdiri dari kambing dan babi. Disamping itu juga diusahakan aneka ternak, termasuk unggas (ayam, itik dan burung puyuh).

Populasi ternak di Kota Pangkalpinang kondisinya fluktuatif, dengan tren meningkat. Populasi sapi yang semula 807 ekor pada 2015 naik menjadi 1270 ekor di tahun 2019. Jumlah kambing dari 503 ekor di tahun 2015 menurun menjadi 373 ekor di tahun 2019. Dan terakhir babi meningkat dari semula 1551 ekor pada 2015 menjadi 1.832 ekor di tahun 2019.

Tabel 2. 50
Banyaknya Ternak di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Jenis Ternak	2015	2016	2017	2018	2019
Sapi	807	986	962	1363	1270
Kambing	503	599	607	350	373
Babi	1.551	1.678	1.399	2.142	1.832

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

Sedangkan untuk ternak unggas, di Kota Pangkalpinang terdiri dari itik, ayam petelur, ayam kampung, dan ayam pedaging. Populasi unggas yang mengalami tren kenaikan jumlahnya adalah ayam petelur dan ayam pedaging, sedangkan lainnya mengalami penurunan.

Tabel 2. 51
Banyaknya Unggas di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019

Jenis Unggas	2015	2016	2017	2018	2019
Itik	21.656	21.026	23.570	29.087	28.342
Ayam Petelur	5.387	5.387	5.387	5.387	35.770

Jenis Unggas	2015	2016	2017	2018	2019
Ayam Pedaging	281.456	360.000	527.000	1.928.500	2.165.100
Ayam Kampung	160.647	146.604	74.763	33.602	32.574

Sumber : BPS, Kota Pangkalpinang Dalam Angka Series (diolah)

d. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan lingkup:
   a) Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota.
   b) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
   c) Penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).
   d) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
   e) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
   f) Penerima waralaba lanjutan dari warlaba dalam negeri; dan
   g) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
   h) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
   i) Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota.
   j) Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.

k) Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).

2. Sarana Distribusi Perdagangan
   a) Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
   b) Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   a) Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota.
   b) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota.
   c) Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam Daerah kabupaten/kota.
   d) Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah kabupaten/Kota dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4. Pengembangan Ekspor
   a) Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
   b) Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala Daerah provinsi (lintas Daerah kabupaten/kota).
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

   Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah pasar di Kota Pangkalpinang sebanyak 9 pasar yang terbagi menjadi 4 Toko modern dan 5 pasar rakyat, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52
Jumlah dan Jenis Pasar Tahun 2013-2017

No	Jenis Pasar	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Toko modern	unit	4	4	4	4	4
2	Pasar rakyat	unit	5	5	5	5	5
	Jumlah	**unit**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa capaian kinerja urusan Perdagangan dapat dilihat dari 6 indikator yaitu, cakupan ukur alat takar dan perlengkapannya, produk pasar yang diterima pasar internasional, nilai bersih ekspor perdagangan pada tahun 2013 sebesar $1.033 meningkat menjadi sebesar $1.763,895 pada tahun 2016, kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2013 sebesar 38,31% menurun menjadi 37,73% pada tahun 2016, pasar rakyat yang memenuhi persyaratan pada tahun 2013 sebesar 60% meningkat menjadi sebesar 90%, ketersediaan informasi dan harga dari tahun 2013 hingga tahun 2107 sebesar 264 kali. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 53
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2013-2017

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Cakupan Ukur alat takar dan perlengkapannya	%	NA	NA	NA	NA	NA
2	Produk pasar yang diterima pasar internasional	Jenis	NA	NA	NA	NA	NA
3	Nilai bersih ekspor perdagangan	($)	1.033	1.837,67	1.680,56	1.763,895	NA

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
4	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	%	38,31	38,12	37,93	37,74	NA
5	Pasar rakyat yang memenuhi persyaratan	%	60	70	80	80	90
6	Ketersediaan Informasi dan Harga	Kali	264	264	264	264	264

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

e. Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Kota Surakarta (MEA). Keempat sektor tersebut meliputi industri tekstil dan produk tekstil, batik, mebel kayu, rotan dan metal, serta kerajinan kayu dan rotan. Keempat sektor itu memiliki potensi tinggi untuk menembus pasar baru di kawasan negara-negara ASEAN, dan juga negara-negara Masyarakat Ekonomi Eropa.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang perindustrian untuk Pemerintah Daerah adalah:

1. Perencanaan Pembangunan Industri

   Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota

2. Perijinan

   a) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.

   b) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah.

c) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

3. Sistem Informasi Industri Nasional

Penyampaian laporan informasi industri untuk:

- IUI Kecil dan Izin Perluasannya;
- IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan
- IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Sektor industri mempunyai pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2013 jumlah IKM yang ada di Kota Pangkalpinang sebesar 1206 unit meningkat menjadi 2045 unit pada Tahun 2017. Persentase pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan selama 5 tahun terakhir relatif kecil setiap tahunnya, pada tahun 2017 hanya sebesar 5,87%. Begitu pula peresntase IKM yang memiliki penunjang usaha, pada tahun 2017 hanya sebesar 6,85%. Sementara itu pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir menurun, terlihat dari pada tahun 2013 sebesar 27,45% menurun menjadi 13, 45 pada tahun 2017. Capaian indikator urusan perindustrian Kota Pangkalpinang dari tahun 2013-2017 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 54
Capaian Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertumbuhan Jumlah Industri	%	27,45	0	19,92	14,92	13,45
2	Jumlah IKM	unit	1206	1206	1506	1770	2045
3	Jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Unit	115	29	35	94	0
4	Persentase Pengusaha Industri Kecil yang telah mengikuti Pelatihan	%	3,32	2,57	6,97	18,81	5,87
5	Persentase IKM yang memiliki Penunjang Usaha	%	5,39	8,13	11,55	15,54	6,85
6	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	7,52	7,36	7,2	7,04	NA

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang 2018

D. Urusan Penunjang

a. Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamantkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Fungsi kelitbangan ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Peran kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah membagi lingkup kelitbangan menjadi dua, yakni kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung. Kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Sedangkan Kelitbangan Pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.

Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan. Yang termasuk dalam lingkup kelitbangan utama adalah:

1. penelitian;
2. pengkajian;
3. pengembangan;
4. perekayasaan;
5. penerapan;
6. pengoperasian; dan
7. evaluasi kebijakan.

Sedangkan lingkup dari kelitbangan pendukung meliputi:

1. peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. penguatan ketatalaksanaan;
3. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
4. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;

5. fasilitasi inovasi daerah;
6. pengembangan basis data kelitbangan;
7. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
8. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Kinerja kelitbangan di Kota Pangkalpinang selama ini belum begitu optimal. Hal ini dikarenakan salah satunya karena belum membudayanya budaya kelitbangan di Kota Pangkalpinang. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri, khususnya setelah adanya kebijakan nasional yang mewajibkan daerah untuk melaksanakan kegiatan kelitbangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

b. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan Teknokratik, Politik, Partisipatif, *Top-down* & *Bottom-up*. Di Kota

Pangkalpinang dokumen perencanaan yang telah dimiliki yaitu: RPJPD tahun 2007-2026, RPJMD tahun 2018-2023, dan RKPD yang disusun setiap tahun.

Penyusunan rencana pembangunan didahului dengan evaluasi pembangunan daerah agar rencana yang disusun dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Evaluasi kinerja pembangunan dilaksanakan dengan menyusun laporan evaluasi hasil RPJMD dan evaluasi RKPD setiap tahun sebagai dasar dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya. Sinkronisasi program Antara RKPD dengan RPJMD mencapai 93,41% pada 2017. Sedangkan kesesuaian antara kegiatan RKPD dengan APBD mencapai 82,80%.

Tabel 2. 55
Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Daerah Tahun 2013-2017

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Terkelolanya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Jenis	-	2	2	2	2
2	Fasilitasi keterlibatan Pemkot Pangkalpinang dalam Kerja Sama Pembangunan.	Jenis kerjasama	2	2	2	2	2
3	Dokumen RPJMD	dokumen	1	1	1	1	1
4	Dokumen RKPD	dokumen	1	1	1	1	1
5	Dokumen evaluasi pelaksanaan Perencana pembangunan	Jenis	1	1	1	1	1
6	Persentase program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	%	91,82	91,95	93,41	93,41	99
7	Presentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD	%	80,21	81,55	82,80	82,80	99
8	Persentase usulan kegiatan musrenbang Tingkat Kota dalam RKPD	%	20,00	20,76	20,32	20,32	85,5
9	Nilai AKIP Berkategori B *(indikator bersama Bappelitbangda)*	kategori	CC	CC	B	B	B

Sumber : Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang 2020

c. Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah terutama dilihat dari pendapatan asli daerah yang menunjukkan tingkat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2015-2019, persentase kontribusi PAD terhadap total APBD dari sebesar 15,84% pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 17,40% pada taun 2019. Rasio realisasi pendapatan cenderung stabil, dengan capaian terakhir di tahun 2019 adalah 102,77%. Sedangkan rasio realisasi belanja juga stabil, dengan capaian terakhir di tahun 2019 adalah 89,12%.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan pemerintah daerah Kota Pangkalpinang memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Gambaran capaian indikator keuangan daerah Kota pangkalpinang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56
Capaian Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi PAD terhadap APBD	%	15,84	13,18	20,02	18,31	17,40
2	Rasio realisasi pendapatan	%	93,43	94,67	99,99	100,34	102,77
3	Rasio realisasi belanja	%	81,29	86,99	84,42	83,24	89,12
4	APBD tepat waktu	%	100	100	100	100	100
5	Tersusunnya laporan keuangan daerah yang tepat waktu dan *akuntable*	%	70	100	95	100	100
6	Cakupan SKPD/UPB yang terinventarisir dan tersinkronisasi asetnya	%	100	100	100	100	100
7	Bidang Tanah yang bersertifikat	bidang	116	143	246	246	246

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang 2020

d. Kepegawaian dan Diklat

Kepegawaian berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah termasuk fungsi penunjang urusan pemerintahan. Dalam rangka tertib Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil aktif dan upaya peningkatan pelayanan terhadap Pegawai Negeri Sipil, dilakukan pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik rnaupun *image document*, sehingga pengelolaan tata naskah kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Persentase tata naskah pegawai digital yang tersimpan menunjukan peningkatan dari 38,94% di tahun 2015 menjadi 79,3% ditahun 2019. Untuk kedisiplinan ASN cukup baik dimana ASN tidak ada yang melakukan pelanggaran 2019. Jika dilihat berdasarkan kompetensi jabatan di Kota Pangkalpinang yang terisi saat ini baru mencapai 60,54%.

Dalam rangka peningkatan kapasitas ASN di Kota Pangkalpinang dilakukan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun struktural. Tidak ada ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di tahun 2019. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 57
Capaian Kinerja Kepegawaian Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase tata naskah pegawai digital yang tersimpan	%	38,94	45,63	69,44	73,6	79,3
2	Persentase aparatur PNS yang melakukan pelanggaran Disiplin	%	NA	NA	0,3	0,2	NA
3	Persentase PNS penerima penghargaan satyalancana karya satya	%	5,16	7,30	6,94	3,26	3,56

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
4	Persentase PNS yang terpenuhi kelengkapan administrasi perceraian dan ijin beristri lebih dari serorang bagi PNS Pria	%	100	100	100	100	100
5	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	%	NA	6,36	47,76	50,34	60,54
6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	0,26	0,05	0,57	0,20	NA
7	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	%	0,13	0,86	NA	0,68	0,54
8	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Orang	29	29	29	29	29
9	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	132	125	118	116	116
10	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2063	2032	1593	1558	1732
11	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	%	100	100	100	100	100
12	Persentase pensiun pegawai tepat waktu	%	100	100	100	100	100
13	Persentase data penyusunan kebutuhan pegawai yang valid dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100
14	Persentase kepatuhan laporan pejabat penyelenggara negara wajib LHKPN	%	92,68	100	100	100	100
15	Persentase data pegawai yang uptodate	%	100	100	100	100	100
16	Persentase kesesuaian kompetensi ASN dengan persyaratan/ standar jabatan	%	70	70	80	80	80
17	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	%	80	85	99	100	100
18	Persentase kepatuhan ASN terhadap peraturan prundangan dibidang kepegawaian	%	80	85	98	100	100
19	Jumlah sistem kepegawaian terintegrasi/ online *) Sistem Kepegawain *) SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	%	2	2	2	2	2
20	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai melalui rekrutmen calon ASN	%	NA	NA	NA	100	100

Sumber : BKPSDMD Kota Pangkalpinang 2020

e. Sekretariat Dewan

Sekretariat DPRD Kota merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD adalah (1) menyelenggarakan administrasi kesektretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah: (2) penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, prestasi Sekretariat telah mampu menyelesaikan penetapan 18 perda pada tahun 2019. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota pasal 8 (1) masa reses paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan: a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda. Masa reses anggota

DPRD telah dilaksanakan dengan baik oleh DPRD dan sesuai ketentuan, hanya saja hasil atas reses belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan daerah.

Tugas sekretariat DPRD salah satunya pelayanan rapat-rapat dan persidangan. Hasil yang dicapai menunjukan peningkatan, yaitu capaiannya 90% di tahun 2019, yang berarti sebagian besar agenda yang terjadwal dapat dilaksnakan dengan baik. Sayangnya upaya pelayanan kepada anggota DPRD belum terukur sehingga capaian IKM belum dapat diketahui. Selengkapnya capaian kinerja tersebut dapat disimak pada table berikut:

Tabel 2. 58
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	PERDA yang ditetapkan	perda	15	19	10	16	18
2.	Jumlah kegiatan Reses tiap pimpinan/anggota DPRD (x masa sidang/tahun)	Keg	3	3	3	2	1
3.	Presentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	85	90	90	90	90
4.	Nilai IKM/SKM bidang pelayanan Setwan terhadap DPRD	Nilai	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2020

f. Pengawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akutanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi

hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang secara berkala dan menginformasikan hasilnya kepada publik.

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat internal dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pangkalpinang, objek pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dilakukan dengan pemeriksaan terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah dan tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

Salah satu tugas dan fungsi lain dari pelaksanaan pengawasan di daerah adalah menindak lanjuti hasil temuan dari instansi pemeriksa dari tingkat pusat, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK salah satunya akan menghasilkan temuan-temuan atas tindakan pengelolaan keuangan di daerah. Dari hasil pelaporan tersebut kemudian BPK mengeluarkan penilaian, dan pada tahun 2019 penilaian/opini BPK atas LKPD Kota Pangkalpinang meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), sedangkan tahun 2015-2016 opininya masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Sedangkan tingkat maturiti SPIP Inspektorat Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 telah mencapai level 3, meningkat dari tahun 2018 yang berada di level 2. Terkait dengan penilaian AKIP, Kota Pangkalpinang telah meraih kategori B. Selengkapnya kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 59
Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini BPK RI atas LKPD	Status	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase Nilai AKIP PD Berkategori B	kategori	CC	CC	B	B	B
3	Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	Level	1	2	2	2	3

Sumber : Inspektorat Kota Pangkalpinang Tahun 2020

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rumah tangga merupakan konsumen atau pemakai barang dan jasa sekaligus juga pemilik faktor-faktor produksi tenaga kerja, lahan, modal dan kewirausahaan. Rumah tangga menjual atau mengelola faktor-faktor produksi tersebut untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa atau imbalan tersebut adalah upah, sewa, bunga dividen, dan laba yang merupakan komponen penerimaan atau pendapatan rumah tangga.

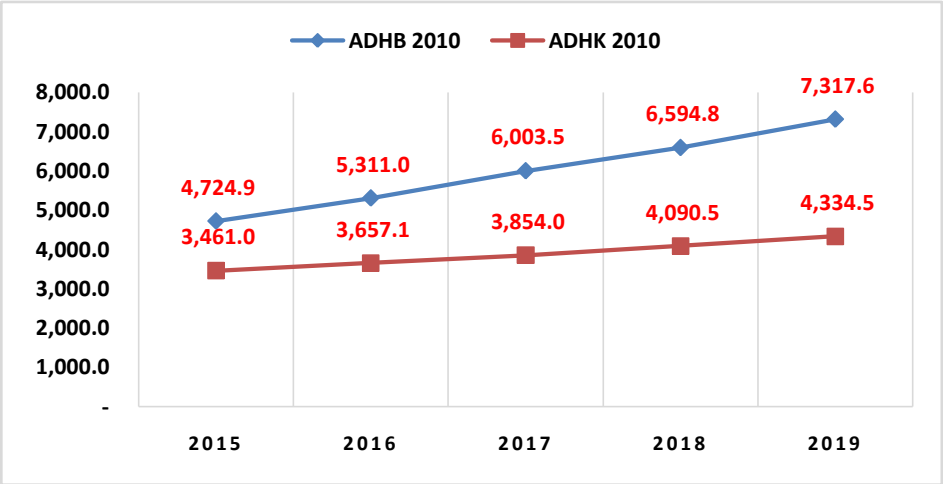
Penerimaan lain yang mungkin diperoleh rumah tangga adalah transfer (pemberian cuma-cuma), perkiraan pendapatan (imputasi) dari rumah milik

rumah tangga tersebut yang ditempati sendiri atau ditempati pihak lain dengan bebas sewa, dan hasil produksi barang/jasa dari kegiatan yang tidak digolongkan sebagai kegiatan usaha rumah tangga. Transfer yang diterima berasal dari pemerintah, badan usaha, lembaga nirlaba, rumah tangga lain, maupun dari luar negeri.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama seminggu/sebulan/setahun baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita berdasarkan atas harga berlaku mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Pada tahun 2015 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp 4.724.925,97, meningkat menjadi Rp 7.317.601,08 pada tahun 2019. Sedangkan jika dilihat atas dasar harga konstan 2010, maka pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga mengalami peningkatan dari Rp 3.461.089,23 menjadi Rp 4.334.577,20.

Gambar 2. 32
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)



b. Nilai Tukar Petani

Penghitungan NTP ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar *(term of trade)* antara produk pertanian yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya. Atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani.

Nilai Tukar Petani secara umum tercatat sebesar 85,87 atau mengalami kenaikan sebesar 1,56 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai

84,55. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang mengalami kenaikan sebesar 1,05 persen dan turunnya Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,50 persen.

Gambar 2. 33
Perbandingan NTP Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017 dan 2018



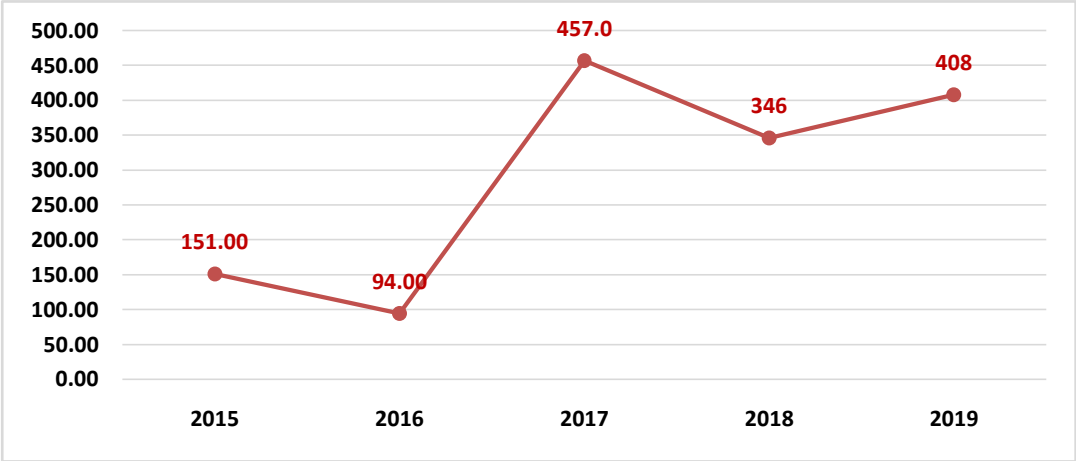
B. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Angka Kriminalitas

Kasus kriminal yang terjadi di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun kondisinya fluktuatif, sempat menurun dari tahun 2015-2016 dan tahun 2017-2018, namun tahun 2016-2017 justru mengalami kenaikan. Kasus kriminal yang paling menonjol terjadi di wilayah Kota Pangkalpinang adalah pencurian dan penyalahgunaan narkotika. Kedua kasus tersebut di setiap tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 2017 selalu tertinggi kejadiannya. Selengkapnya data kasus kejahatan di Kota pangkalpinang dapat dilihat dalam gambar dan tabel berikut.

Gambar 2. 34

Kasus Kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2015-2019



Tabel 2. 60

Kejadian Tindak kejahatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2013-2017

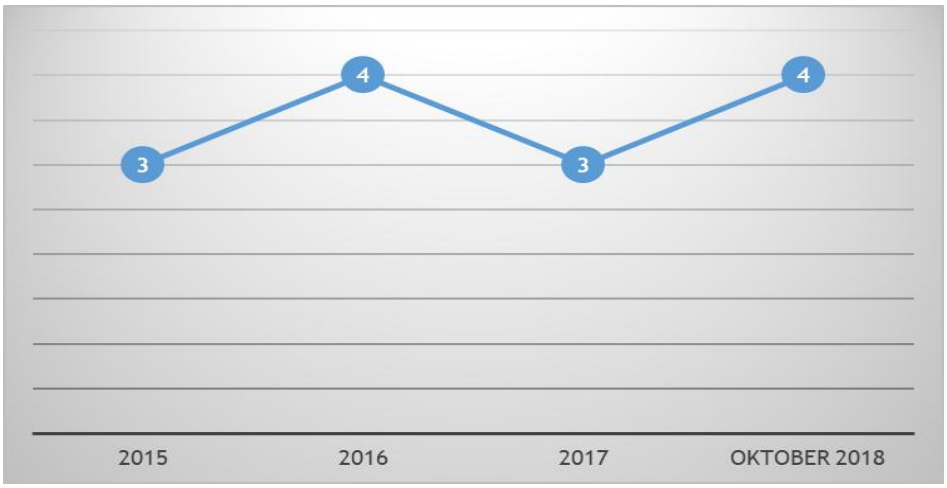
No	Jenis Kejahatan	2013	2014	2015	2016	2017
1	ketertiban umum	0	0	17	0	0
2	perkosaan	0	0	2	8	3
3	perjudian	13	1	9	14	0
4	kejahatan terhadap nyawa	4	0	0	0	0
5	penganiayaan berat	7	19	7	19	51
6	pencurian dengan pemberatan	41	46	33	28	5
7	pencurian dengan kekerasan	6	0	1	9	0
8	pemerasan dengan ancaman	1	1	0	0	1
9	penggelapan	5	17	13	2	1
10	senjata api	0	0	2	9	7
11	narkotika	23	31	65	1	151
12	penipuan	5	14	0	0	0
13	pencurian biasa	18	14	0	0	0
14	perkara kehutanan	0	2	0	0	2
15	pengeroyokan	10	11	0	0	0
16	perlindungan anak	13	16	0	0	0

No	Jenis Kejahatan	2013	2014	2015	2016	2017
17	laka lantas	11	8	0	0	0
18	senjata tajam	1	0	0	0	0
19	KDRT	6	8	2	0	0
20	perdagangan orang	2	0	0	4	0
	Jumlah	**166**	**188**	**151**	**94**	**221**

b. Jumlah Demonstrasi

Kejadian gangguan ketertiban lainnya yang terjadi di Kota Pangkalpinang adalah demonstrasi/unjuk rasa. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang, kasus demonstrasi tidak sering terjadi di Kota Pangkalpinang. Dari tahun 2015 rata-rata setiap tahunnya hanya terjadi demonstrasi sebanyak 3-4 kali saja.

Gambar 2. 35
Kejadian Demonstrasi di Kota Pangkalpinang Tahun 2014-2018



c. Perizinan

Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perijinan

usaha. Pelayanan perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi urusan penanaman modal, pelayanan bidang lingkungan, perdagangan, perindustrian, konstruksi, penataan ruang, kesehatan dan ketenagakerjaan serta pemberian layanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas yang meliputi pemberian, penolakan, pengeluaran dan pencabutan izin.

Saat ini Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melayani pengurusan 61 jenis izin dan 14 non izin. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 61
Jenis Izin dan Non Izin yang Dilayani Oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Pangkalpinang

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
1	Izin Mendirikan Bangunan	Tanda Daftar Perusahaan
2	Izin Lokasi	Tanda Daftar Gudang
3	Izin Penggunaan Peruntukan Lahan	Tanda Daftar Industri
4	Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5	Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3	Pengesahan Site Plan Perumahan
6	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	Penerbitan Kartu AK/1
7	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	Surat Persetujuan/Rekomendasi Pameran Kesempatan Kerja *(Job Fair)*
8	Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air	Surat Persetujuan Bursa Kerja Khusus
9	Izin Lingkungan (Amdal Atau Ukl-Upl) Sppl	Pendaftaran Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
10	Surat Izin Usaha Pedagangan	Penerbitan SIU LPTKS AKL
11	Surat Izin Usaha Sarang Burung Walet	Penerbitan SIU LPTKS AKL Perpanjangan

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
12	Surat Izin Usaha Industri	Penerbitan SIU LPTKS AKL Perubahan
13	Surat Izin Jasa Usaha Konstruksi	Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional PPTKIS
14	Izin Trayek Angkutan Kota	Rekomendasi Pembuatan Pasport Calon TKI dan Verifikasi Calon TKI
15	Izin Pendirian Operasional Pendidikan Dasar	
16	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan PAUD	
17	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak	
18	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasiona Tempat Penitipan Anak (TPA)	
19	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasiona Pos PAUD	
20	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan	
21	Izin Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	
22	Surat Izin Apotik	
23	Surat Izin Klinik	
24	Surat Izin Laboratorium Klinik	
25	Surat Izin Optik	
26	Surat Izin Pelayanan Radiologi	
27	Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit	
28	Surat Izin Operasional Rumah Sakit	
29	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional	
30	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional	
31	Surat Izin Toko Alat Kesehatan	
32	Surat Izin Toko Obat	
33	Surat Izin Tukang Gigi	
34	Surat Izin Puskesmas	
35	Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	
36	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi	
37	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	

NO.	JENIS IZIN	JENIS NON IZIN
38	Surat Izin Kerja Bidan	
39	Surat Izin Praktik Bidan	
40	Surat Izin Praktik Dokter	
41	Surat Izin Praktik Apoteker	
42	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	
43	Surat Izin Kerja Fisioterapis	
44	Surat Izin Praktik Fisioterapis	
45	Surat Izin Kerja Perawat	
46	Surat Izin Kerja Perekam Medis	
47	Surat Izin Kerja Radiografer	
48	Surat Izin Kerja Refraksionis Oftisien	
49	Surat Izin Kerja Tenaga Kerja Sanitarian	
50	Surat Izin Kerja Tenaga Teknisi Gigi	
51	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
52	Surat Izin Kerja Tenaga Tehnik Elektrommedik	
53	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	
54	Surat Izin Kerja Terapis Wicara	
55	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	
56	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis	
57	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis	
58	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	
59	Surat Izin Tenaga Fisikawan Prostetik	
60	Surat Izin Tenaga Akupuntur	
61	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	

Sumber : Dinas PMPTSP Kota Pangkalpinang

C. Fokus Sumber daya Manusia

a. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D4, S1, S2 dan S3.

Tabel 2.62
Rasio Lulusan D4, S1, S2, S3 Terhadap Penduduk
Kota Pangkalpinang Tahun 2019

	JENIS KELAMIN	DIP_III	STR_I	STR_II	STR_III	JUMLAH PENDUDUK
JUMLAH	L	133	408	32	1	646
	P	138	373	22	2	535
	L+P	271	781	54	3	1.181
PANGKALPINANG	L	2.479	6.764	598	43	9.884
	P	3.224	6.502	399	11	10.136
	L+P	5.703	13.266	1.097	54	20.120
PROSENTASE	L	2,27%	6,20%	0,64%	0,04%	2,29%
	P	3,03%	6,12%	0,38%	0,01%	2,39%
	L+P	2,65%	6,16%	0,51%	0,03%	2,34%

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk satu tahun yang diarahkan untuk memuat rumusan program/kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tahun 2019 merupakan tahun pertama periode RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 atau tahapan lima tahunan ke-3 dalam RPJPD Tahun 2007-2025. Evaluasi terhadap hasil RKPD tahun 2019 dijabarkan dalam tabel berikut ini.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan Tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sehingga perlu mendapat perhatian khusus untuk pelaksanaan penuntasan dalam target misi RPJMD. Permasalahan-permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi pada saat ini dan diperkirakan dihadapi juga pada masa yang akan datang oleh Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

1) Masih adanya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang kondisinya tidak baik, baik kerusakan berat maupun ringan.

2) Masih ditemukannya kasus anak tidak melanjutkan sekolah karena putus di masa studi, hal ini dilihat dari masih adanya angka putus sekolah di jenjang pendidikan dasar. Angka Putus Sekolah (APS) pada akhir 2019 pada semua jenjang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 0,02% untuk jenjang SD/MI, sebesar 0,28% untuk jenjang SMP/MTs.

3) Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan selama kurun waktu 2015-2019, dari 100% di tahun 2015 menjadi 90,4% di tahun 2019.

4) Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2019 pada jenjang pendidikan TK/PAUD sebesar 66,82%, sedang pada jenjang SD/SMP sebesar 87,20%. Kualifikasi guru tampaknya masih sulit untuk bisa mencapai 100%, sebab masih ada guru yang belum

memiliki motivasi ataupun kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1.

b. Kesehatan

1) Berfluktuasinya kasus Covid 19 di Kota Pangkalpinang memerlukan perhatian dan penanganan kesehatan yang serius dan sungguh-sungguh agar kasus penularannya tidak mengalami kenaikan dan tingkat kesembuhan dapat meningkat.
2) Masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan bayi dan balita.
3) Masih adanya prevalensi balita pendek dan sangat pendek *(stunting)*. Prevalensi *stunting* mengalami kecenderungan penurunan dari 19,50% pada tahun 2015 menjadi 8,01% pada tahun 2018.
4) Masih berfluktuasinya angka kesakitan dan angka kematian DBD dikarenakan kasus DBD sangat dipengaruhi oleh iklim/cuaca, kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) mandiri oleh masyarakat belum optimal/belum jadi budaya, indikator tata laksana di rumah sakit terhadap penderita DBD yang belum merata, serta ada keterlambatan rujukan masyarakat, sudah fase kritis baru dirujuk.
5) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), hal ini dapat dilihat dari rumah tangga ber PHBS, dan rumah sehat. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2018 sebesar 69,1 % turun menjadi 68,3 % pada tahun 2019.
6) Masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum. Hal ini

dapat dilihat dari cakupan Desa ODF masih kurang pada tahun 2018 sebesar 38 persen dan sebesar 57,14 % pada tahun 2019.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK) masih rendah.
2) Secara umum ruas jalan di Kota Pangkalpinang sudah dalam kondisi baik, namun masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkalpinang dalam kondisi rusak.
3) Masih terdapat jembatan di Kota Pangkalpinang dalam kondisi yang memerlukan peningkatan.
4) Belum adanya rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang yang *up to date* yang sesuai dengan kondisi perkembangan kota saat ini

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Masih terbatasnya lahan yang tersedia untuk pemakaman. Pada tahun 2018 rasio pemakaman penduduk per satuan penduduk sebesar 0,44% menurun menjadi 0,43% pada tahun 2019.
2) Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan dan permukiman.
3) Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak, pada tahun 2017 sebesar 93%, hal ini berarti masih ada 7% yang belum bersanitasi.
4) Masih ada rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum mendapatkan penanganan.

5) Belum semua wilayah permukiman memiliki PSU (Prasarana Sarana Utilitas) (cakupan tahun 2019 sebesar 80%).

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah. Pada tahun 2018 jumlah penyelesaian penegakan perda sebesar 83 tindakan meningkat menjadi sebanyak 118 tindakan pada tahun 2019. Sedangkan jumlah pelanggaran terhadap peraturan daerah pada tahun 2018 sebanyak 83 kasus meningkat menjadi 120 kasus pada tahun 2019.

2) Perlunya perhatian yang serius terhadap bencana yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Jumlah kejadian bencana banjir pada tahun 2019 sebesar 36 kejadian meningkat dari tahun 2018 sebesar 10 kejadian. Sedangkan kejadian bencana angin puting beliung meningkat dari tahun 2018 sebesar 3 kejadian menjadi sebesar 6 kejadian pada tahun 2019. Kejadian bencana kebakaran di Kota Pangkalpinang terdata pada tahun 2019 sebesar 88 kejadian.

3) Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pangkalpinang. Rilis Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang yang dilaksanakan pada tahun 2019, Badan Narkotika Kota Pangkalpinang dari 3 pengungkapan kasus, berhasil mengamankan sebanyak 7.999,39 gram narkoba.

f. Sosial

1) Tingginya PMKS Kota Pangkalpinang sebanyak 11.109 orang pada tahun 2018.

2) Meningkatnya angka kemiskinan Kota Pangkalpinang karena terjadinya Covid 19. Berdasarkan rilis dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang, jumlah warga miskin di Kota Pangkalpinang meningkat sekitar 7,3 persen sejak pandemi Covid 19. Angka tersebut berdasarkan data pengajuan warga yang mengajukan keterangan tidak mampu di kelurahan.

3) Masih ada keluarga miskin di Kota Pangkalpinang yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan data DTKS jumlah keluarga miskin dan kurang mampu di Kota Pangkalpinang kurang lebih berjumlah 10.566 keluarga. Dari jumlah tersebut, hanya 6.367 keluarga yang mendapatkan bantuan sosial Program Sembako PKH Reguler dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Sedangkan sisanya sebanyak 4.199 keluarga belum mendapatkan bantuan.

B. Urusan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

1) Meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang. Meskipun mengalami peningkatan namun data tingkat pengangguran di tahun 2015 hingga 2019 juga menunjukkan adanya peningkatan maupun penurunan, pada tahun 2015 tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang mencapai 10,64% kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi 3,80%. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 4,70% dan terus menunjukkan peningkatan menjadi 5,01% pada tahun 2019.

2) Cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan berfluktuatif dari 2,09 pada tahun 2015 menjadi 73,91% pada tahun 2017 namun kembali turun di tahun 2019 menjadi 53,58%.
3) Tingginya kasus konflik industrial yang terjadi di Kota Pangkalpinang mencapai 56 kasus pada tahun 2019.
4) Masih minimnya anggaran untuk pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan. Hal ini terlihat dari angka cakupan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2019 hanya 5,93 %.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan *responsive gender* sebagai bentuk implementasi PUG di daerah. Tahun 2017 masih ada 20% OPD yang menyusun PPRG.
2) Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yakni hanya 10% atau 3 orang dari 30 anggota legislatif yang ada di Kota Pangkalpinang periode 2019-2024.
3) Menurunnya persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan, tahun 2017 menurun menjadi 39,98% dari 55,04%.
4) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rasio KDRT tahun 2017 masih 0,012 per 1.000 rumah tangga, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak periode Januari s/d Juli 2020 sebanyak 23 kasus.
5) Kota Pangkalpinang belum mencapai predikat Kota Layak Anak, namun tahun 2019 telah mencapai predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama Tahun 2019.

c. Pangan

a. Belum optimalnya penganekaragaman pangan masyarakat Kota Pangkalpinang, hal ini terlihat dari skor pola pangan harapan (PPH) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tren naik turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017 tercatat skor PPH sebesar 87,3% menurun menjadi 84,1% pada tahun 2018, dan meningkat kembali menjadi 86% pada tahun 2019.

b. Pertanahan

1) Masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat, pada awal pendataan tahun 2020 jumlahnya mencapai lebih dari 378 bidang lahan, yang sudah disertifikasi sebanyak 278 aset.

c. Lingkungan Hidup

1) Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2019 persentase pengurangan sampah perkotaan hanya menunjukkan nilai 0,35%, dimana nilai tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 sebesar 0,28.

2) Presentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang masih rendah. Hingga tahun 2019 mencapai 18% meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 11,8%. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah sebesar 30% dari seluruh luas wilayah

perkotaan yang terdiri dari 20% peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat publik dan 10% di antaranya bersifat privat.

3) Tingginya volume sampah yang menyebabkan TPA di Kota Pangkalpinang tidak dapat lagi menampung sampah dari masyarakat.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP, hal tersebut dibuktikan dengan adanya penurunan rasio penduduk yang ber-KTP pada tahun 2016 ke 2017 dari 100% menjadi 67,62%. Hal ini juga ditunjukkan oleh kepemilikan KTP yang juga mengalami penurunan dari 100% di tahun 2016 menjadi 97,02% pada tahun 2017.

2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran yang dibuktikan dengan angka rasio kepemilikan akta kelahiran yang masih mecapai 8.741/10.000 penduduk.

3) Masih minimnya penduduk yang mengurus akta kematian dimana cakupannya hanya mencapai 57,26% pada tahun 2017.

4) Masih minimnya penduduk yang mengurus akta perkawinan dimana cakupannya pada tahun 2017 hanya mencapai 65,25%, menurun dari tahun 2016 yang mencapai 100%.

e. Pemberdayaan Masyarakat

a. Jumlah Pos Yandu aktif belum optimal yaitu 76,7 % pada tahun 2019.

b. Tingkat prestasi LPM di Kota Pangkalpinang yang masih tergolong rendah yaitu 15,17% pada tahun 2019.

c. Jumlah kelompok binaan LPM yang masih mencapai angka 64,5% pada tahun 2019.

d. Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat masih belum mencapai angka yang optimal yaitu sebesar 58 % pada tahun 2019.

e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pasca program pemberdayaan maasyarakat yaitu sebesar 34%.

f. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran dilihat dari tingginya *unmetneed* (tahun 2017 sebesar 12,78), persentase peserta KB baru sebesar 72,21, cakupan KB pria masih rendah yaitu 3,77%, penggunaan alat Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) relatif rendah yaitu 26,93 pada tahun 2017.

2) Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB sampai dengan tahun 2017 sebesar 54,73%, masih dibawah target nasional yaitu 80%. Ini menunjukkan kecilnya keikutsertaan masyarakat (pasangan usia subur) dalam program KB.

3) Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga.

4) Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL dan BKR).

g. Perhubungan

1) Masih adanya kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang dalam kondisi rusak, tahun 2019 sebesar 16 %.

2) Masih ada jaringan jalan yang belum terlayani angkutan umum tahun 2019 sebesar 20%.

3) Kondisi angkutan umum (angkot) di Kota Pangkalpinang sebagian besar sudah terlalu lama dan memerlukan peremajaan.

4) Menurunnya jumlah angkutan umum, dikarenakan perkembangan angkutan *online* seperti *Grab*. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, jumlah angkutan umum (angkot) yang masih beroperasi sebanyak 73 unit angkot.

5) Masih banyak lampu penerangan jalan di Kota Pangkalpinang yang belum terpasang. Saat ini baru ada 2.650 titik (24,2 %) yang terpasang lampu jalan, sedangkan target keseluruhan sebanyak 10.961 titik

6) Tidak berfungsinya terminal antar kota seperti di terminal Selindung, akibatnya para sopir angkutan umum tidak masuk terminal dan lebih memilih menunggu penumpang di tepi jalan.

h. Komunikasi dan Informatika

1) Belum terkelola dan terpadunya sistem informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik di Kota Pangkalpinang.

2) Belum semua OPD di Kota Pangkalpinang yang memiliki *website* aktif dan *update*. Dari 33 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang , baru 18 OPD (54,5 %) yang memiliki *website* yang aktif di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3) Kurangnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan *website* di masing-masing OPD.

4) Aplikasi pengaduan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah pusat (lapor.id) masih belum dapat beroperasi secara optimal.

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Semakin menurunnya jumlah koperasi di Kota Pangkalpinang, dari 210 pada tahun 2013 menjadi 119 koperasi di 2017.
2) Masih ditemukan koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat. Terdapat 119 koperasi di Kota Pangkalpinang, sebanyak 80 koperasi atau 67,22% di antaranya adalah koperasi yang aktif.
3) Masih rendahnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang masuk dalam kategori sehat, yakni hanya 16 koperasi di tahun 2017.
4) Lambatnya peningkatan status usaha mikro ke posisi usaha kecil.

j. Penanaman Modal

1) Masih rendahnya promosi investasi di Kota Pangkalpinang, kegiatan promosi investasi hanya di lakukan 1 tahun sekali.
2) Belum optimalnya kerjasama penanaman modal, sampai dengan tahun 2016 baru ada 1 MoU dengan kemitraan usaha besar dan UMKM.

k. Kepemudaan dan Olahraga

1) Kurangnya sarana dan prasarana olahraga, jumlah gedung olahraga sampai dengan tahun 2017 baru tersedia 1 gedung.
2) Belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga
3) Kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kompetisi , hal ini terlihat rendahnya kepesertaan pemuda dalam kegiatan-kegiatan kompetensi

l. Statistik

1) Ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat. Hal tersebut menjadikan kesulitan dalam mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

m. Persandian

1) Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal.
2) Pemanfaatan persandian dalam penyelengggaraan pemerintahan daerah belum optimal, hal ini selain karena masalah internal, secara eksternal banyak OPD yang belum memahami manfaat persandian.

n. Kebudayaan

1) Minimnya gelaran festival seni dan budaya yang diselenggarakan dimana pada tahun 2018 dan 2019 diselenggarakan 2 kegiatan.
2) Minimnya jumlah misi kesenian pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 2 kegiatan

o. Perpustakaan

1) Belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah, data tahun 2019 menunjukkan peningkatan hanya 9,6%.
2) Koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas belum 100% mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Rasio koleksi buku yang tersedia hanya 0,52%.
3) Rasio perpustakaan persatuan penduduk masih kurang hanya 0,27 pada tahun 2019.

p. Kearsipan

1) Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku. Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebesar hanya 87,10 % namun belum mencakup keseluruhan.

2) Jumlah arsip aktif yang berhasil dikelola mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 4.469 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 4.826 cenderung mengalami penurunan.
3) Ketersediaan SDM arsiparis yang masih sangat terbatas. Pada tahun 2019 menurun menjadi 90 orang.

C. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

1) Menurunnya produksi perikanan tangkap, dari 3.088 ton pada tahun 2018 menjadi 930,08 ton per tahun pada tahun 2019.
2) Menurunnya produksi perikanan budidaya, dari 5.795,21 ton pada tahun 2018 menjadi2.457 ton pada tahun 2019.
3) Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Cakupan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2019 sebesar 31,82%.

b. Pariwisata

1) Terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan, kondisi ini terlihat dari menurunnya kontribusi pariwisata terhadap PDRB dari 1,20 % tahun 2015 menjadi 1,33% di tahun 2017.
2) Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara dari 3.159 orang pada tahun 2018 menjadi 1.755 orang pada tahun 2019.
3) Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata, sampai dengan tahun 2019 potensi wisata belum banyak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

4) Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

c. Pertanian

1) Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan. Pada tahun 2015 produksi ketela pohon sebesar 164,5 ton, turun menjadi 98 ton pada tahun 2018. Produksi alpukat, mangga, duku/langsat, jeruk, durian dan nanas pada tahun 2018 juga mengalami penurunan. Jumlah kambing dari 503 ekor di tahun 2015 menurun menjadi 373 ekor di tahun 2019. Begitu juga dengan produksi unggas seperti itik dan ayam kampung mengalami penurunan pada tahun 2019.

2) Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

d. Perdagangan

1) Menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB yang dapat dilihat dari capaian kinerja dari tahun 2013 sebesar 38,31% dan di tahun 2016 menjadi 37,74% pada tahun 2016.

2) Belum semua pasar memenuhi syarat, terdapat 10% dari total pasar yang ada belum memenuhi syarat.

e. Perindustrian

1) Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku industri kecil. Pada tahun 2017 hanya sebesar 5,87% pengusaha industri kecil yang telah mengikuti pelatihan.

2) Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri yang bisa dilihat dari kecilnya persentase IKM yang memiliki penunjang usaha, pada tahun 2017 hanya sebesar 6,85%.
3) Pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir menurun, pada tahun 2013 sebesar 27,45% menurun menjadi 13, 45 pada tahun 2017.
4) Belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM, terlihat dari jumlah IKM yang dikembangkan melalui Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pada tahun 2017 hanya sebesar 94 unit dari total 1770 unit.

D. Urusan Penunjang

a. Penelitian dan pengembangan
   1) Minimnya inovasi di Kota Pangkalpinang dikarenakan tidak terdata dan terdokumentasinya inovasi yang ada di OPD.
   2) Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
b. Perencanaan Pembangunan Daerah
   1) Masih adanya ketidak sinkronan antara program di dalam dokumen RPJMD dan program dalam RKPD, tahun 2019 masih ditemukan 1% program RKPD yang tidak sesuai dengan RPJMD.
   2) Masih adanya ketidak sinkronan antara kegiatan di dalam dokumen APBD dan kegiatan dalam RKPD, tahun 2017 masih ditemukan 1% kegiatan APBD yang tidak sesuai dengan RKPD.

c. Keuangan Daerah

1) Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang, tahun 2019 capaiannya sebesar 17,40%.
2) Anggaran belanja APBD belum terserap secara optimal, rata-rata realisasi anggaran belanja periode 2015-2018 sebesar 85%.

d. Kepegawaian dan Diklat

1) Belum optimalnya penyimpanan arsip digital pegawai dikarenakan belum lengkapnya data pegawai yang masuk dari ASN, tahun 2019 baru mencapai 79,3%.
2) Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi, tahun 2019 baru mencapai 60,54%.
3) Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat (struktural dan managerial) peningkatan kompetensi, tahun 2018 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sampai baru mencapai 0,20%. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural sebesar 0,54% di tahun 2019.

e. Sekretariat Dewan

1) Belum optimalnya Raperda yang disiapkan OPD sehingga memperlambat pembahasan;
2) Belum semua agenda terjadwal secara resmi dalam pembahasan Bamus;
3) Beberapa penyelenggaraan rapat-rapat dewan belum tepat waktu;
4) Belum pernah dilakukan penilaian pelayanan Setwan terhadap DPRD.

f. Pengawasan

1) Respon OPD terhadap Rekomendasi BPK kurang Optimal.
2) Respon OPD terhadap hasil reviu yang dilakukan inspektorat kurang optimal.
3) OPD kurang kooperatif dalam merespon kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pengendalian internal.
4) Perubahan ketentuan untuk evaluasi sehingga menyulitkan melakukan penyesuaian.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kota Pangkalpinang atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai 13,70 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 5,69 persen dibanding tahun 2018 yang mencapai 12,97 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya kenaikan harga.

Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kota Pangkalpinang, yang dihitung dengan harga konstan (PDRB ADHK), tahun 2019 mencapai 9,08 triliun rupiah atau meningkat sebesar 3,34 persen dibanding tahun 2018. Pertumbuhan PDRB ADHK biasa disebut dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kenaikan produksi riil tanpa dipengaruhi inflasi Kota Pangkalpinang. Selama dua tahun terakhir yakni tahun dari 2018 dan 2019, perekonomian Kota Pangkalpinang mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya.

Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha

unggulan yang menggerakan perekonomian dalam satu wilayah. Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Lapangan usaha industri Pengolahan; Lapangan usaha konstruksi; Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor; Lapangan usaha transportasi dan pergudangan; serta Lapangan usaha administrasi pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 27,81%. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 15,79%, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,28%. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,14% dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,23%.

Selama periode 2015-2019, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2015 kontribusinya mencapai 20,89% dan terus turun hingga pada tahun 2017 kontribusinya hanya sebesar 17,23%. Pada tahun 2019 peranan lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan yang cukup tajam yakni menjadi 15,79%.

Sementara itu, kondisi yang sebaliknya terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dimana selama tahun 2015 hingga 2019 peranannya setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; terhadap total PDRB Kota Pangkalpinang sebesar 25,64%, kemudian meningkat terus hingga tahun 2019 menjadi sebesar 27,81%. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari serta *outlet* produk utama lainnya berada di Kota Pangkalpinang. Demikian halnya dengan kegiatan ekspor barang juga dilakukan di Kota Pangkalpinang. Jadi wajar bila lapangan usaha ini memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkalpinang. Struktur ekonomi Kota Pangkalpinang dari tahun 2015 hingga 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1. pada tabel tersebut menyajikan 17 kategori lapangan usaha yang memiliki Kontribusi terhadap pembentukan PDRB. Besar kecilnya kontribusi lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB dapat dilihat dari distribusi persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB) masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB ADHB.

Tabel 3.1
Distribusi Persentase PDRB Kota Pangkalpinang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	*4,99*	*4,99*	*4,62*	*4,91*	*4,94*
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	*19,05*	*17,85*	*17,23*	*15,99*	*13,17*
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,08	0,08	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F.	Konstruksi	10,72	10,78	11,01	11,3	12,25
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	26,39	27,02	27,54	27,32	27,14
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,22	6,16	6,29	6,27	6,54
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,41	3,46	3,45	3,48	3,90
J.	Informasi dan Komunikasi	2,81	2,84	2,87	3,03	3,35
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,54	4,65	4,56	4,83	4,89
L.	Real Estate	5,36	5,28	5,29	5,5	5,43
M, N.	Jasa Perusahaan	0,52	0,49	0,50	0,51	0,52
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,97	7,07	7,12	7,18	7,56
P.	Jasa Pendidikan	5,23	5,54	5,52	5,63	5,91
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,95	1,91	1,92	1,92	2,06
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,75	1,86	1,97	2,02	2,20
Produk Domestik Regional Bruto		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Berdasarkan Tabel 3.1, selama periode 2015 – 2019, terdapat 17 lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kota Pangkalpinang. Dilihat dari kontribusi lapangan usaha tersebut, sebanyak 12 kategori lapangan usaha yang mempunyai kontribusi terhadap penyusun perekonomian yang meningkat, 3 kategori lapangan usaha yang mempunyai kontribusi yang konstan, yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Jasa Perusahaan. 2 lapangan usaha yang mempunyai kontribusi yang semakin

berkurang, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Dan 1 lapangan usaha yang tidak mempunyai kontribusi terhadap penyusun perekonomian di Kota Pangkalpinang, yaitu Pertambangan dan Penggalian.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 mengalami perlambatan dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 3,34%, lebih rendah 1,73% dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2018 yang mencapai 5,07%. Perlambatan ekonomi ini terjadi di hampir semua kabupaten/kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung kecuali Kabupaten Bangka Barat yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Kinerja perekonomian di Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung, berada di posisi keempat dari 7 kabupaten/kota. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di

Provinsi Kep. Bangka Belitung periode tahun 2016-2019, disajikan pada Tabel 3.2.

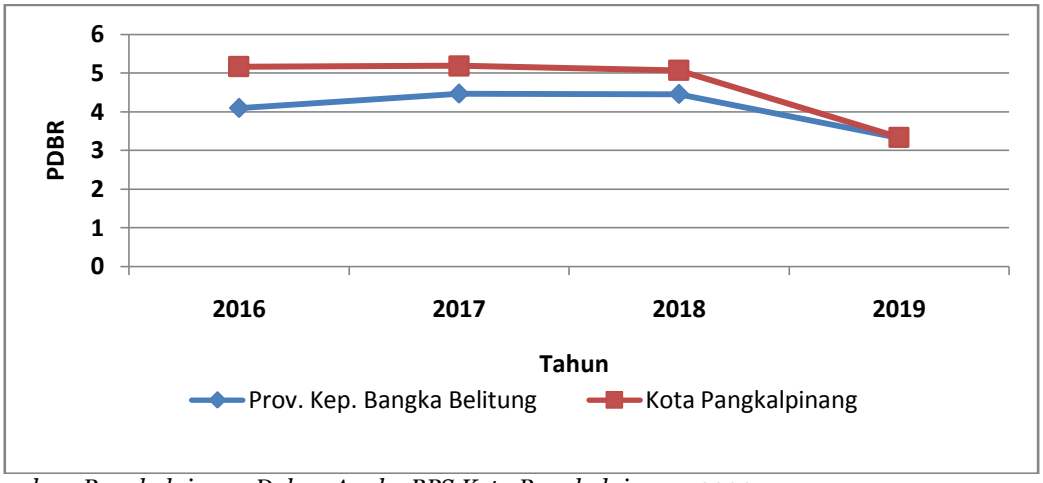
Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2016-2019

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (Tahun)			
	2016	2017	2018	2019
Bangka Barat	4,80	5,26	5,19	7,13
Belitung	4,96	5,30	5,37	3,42
Belitung Timur	4,25	4,85	4,21	3,35
Pangkalpinang	5,17	5,19	5,07	3,34
Bangka	4,63	5,04	4,51	2,93
Bangka Selatan	4,30	4,57	4,52	2,61
Bangka Tengah	3,05	3,46	3,41	1,25

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan tren yang cenderung melambat. Namun apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Prov. Kep. Bangka Belitung, pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang relatif lebih tinggi. Secara grafis, tren pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2016 sampai dengan 2019 disajikan pada Gambar 3.1. Dalam gambar tersebut menunjukan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik di Kota Pangkalpinang maupun di Provinsi Kep. Bangka Belitung, terjadi selama 2 tahun terakhir, yaitu 2018 dan 2019.

Gambar 3.1.
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Tingkat Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK dari waktu ke waktu. Apabila kontribusi masing-masing lapangan usaha dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada satu waktu, maka dapat diketahui lapangan usaha mana saja yang menjadi sumber pertumbuhan suatu wilayah. Kondisi ini digambarkan pada Tabel 3.3 yang memperlihatkan bahwa sumber pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang menurut lapangan usaha selama periode 2015-2019. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor selalu menjadi sumber pertumbuhan utama PDRB Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2015 sumber pertumbuhannya sebesar 1,10% kemudian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga akhirnya di tahun 2018 mencapai 1,34%. Namun pada tahun 2019, lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu Konstruksi sebesar 1,18%.

Pada tahun 2019 lima kategori lapangan usaha yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar yaitu Konstruksi sebesar 1,18% diikuti oleh

lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,71%, kemudian diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 0,68%, kemudian lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,66%, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 0,43%.

Tabel 3.3
Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,18	0,15	-0,24	0,38	0,14
B.	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Industri Pengolahan	0,2	0,81	0,71	-0,71	-1,99
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Konstruksi	0,35	0,7	0,69	0,66	1,18
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,1	1,22	1,76	1,34	0,71
H.	Transportasi dan Pergudangan	0,36	0,3	0,51	0,44	0,3
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,16	0,21	0,18	0,43
J.	Informasi dan Komunikasi	0,23	0,32	0,33	0,51	0,66
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,14	0,34	0,12	0,45	0,25
L.	*Real Estate*	0,21	0,17	0,24	0,47	0,11
M, N.	Jasa Perusahaan	0,02	0	0,01	0,03	0,01
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,53	0,42	0,32	0,64	0,68
P.	Jasa Pendidikan	0,39	0,35	0,21	0,44	0,42
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16	0,05	0,16	0,09	0,21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,12	0,17	0,17	0,15	0,21
Produk Domestik Regional Bruto		**4,24**	**5,17**	**5,2**	**5,07**	**3,34**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Selama periode 2015-2019, terdapat 6 lapangan usaha yang menjadi sumber perlambatan pertumbuhan. Pada periode 2015-2019, Enam lapangan usaha tersebut mengalami pertumbuhan negatif. Bila diurutkan dari tingkat pertumbuhan negatif terbesar ke yang terkecil adalah Industri pengolahan sebesar (-2,19%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar (-0,39%), Transportasi dan Pergudangan sebesar (-0,06%), Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar (-0,04%), *Real Estate* sebesar (-0,1%), dan Jasa Perusahaan sebesar (-0,01%). Hampir semua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif merupakan lapangan usaha yang mempunyai peranan terbesar dalam pembentukan PDRB di Kota Pangkalpinang. Sementara itu, terdapat 9 jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, dan hanya 2 lapangan usaha yang tidak berpengaruh terhadap pembentukan PDRB.

3.1.2 Perdagangan

Pasar tradisional atau disebut sebagai pasar rakyat merupakan wadah yang secara langsung dapat dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memasarkan hasil pertanian, perkebunan, maupun industri rumah tangga lainnya sehingga dapat memaksimalkan potensi wilayah terkait. Jumlah pasar tradisional yang dikelola oleh UPT. Pasar Kota Pangkalpinang sebanyak 4 pasar, yaitu Pasar Pembangunan, Pasar Pagi, Pasar Rumput, dan Pasar Paritlalang.

Seiring berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko swalayan, pasar rakyat menghadapi tantangan terutama dari sisi sarana dan prasarana. Hal ini terlihat dari jumlah pasar modern semakin meningkat dibandingkan pasar

tradisional. Tentu saja ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor pusat perbelanjaan dan toko swalayan, yang menawarkan kenyamanan fasilitas.

Di Kota Pangkalpinang, secara umum lebih banyak usaha mikro yang berkembang dibandingkan usaha kecil maupun menengah. Persentase usaha mikro pada tahun 2019 sebanyak 66,40%, usaha kecil sebanyak 31,77% dan usaha menengah hanya 1,83%.

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya
di Kota Pangkalpinang

JENIS SARANA PERDAGANGAN	2018	2019
Pasar Tradisional	4	4
Pasar swalayan/supermarket/ toserba	19	20
Hypermarket	0	0
Mall/Plaza/Dept. Store	3	3
Pasar hewan	0	0
JUMLAH	**26**	**27**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Tabel 3.5
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut jenisnya
di Kota Pangkalpinang, 2018–2019

JENIS SARANA PERDAGANGAN	2018	2019
Mikro	2.725	2.725
Kecil	1.304	1.304
Menengah	75	75
JUMLAH	4.104	4.104

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Komoditas ekspor Kota Pangkalpinang dilakukan melalui pelabuhan laut Pangkalbalam. Volume ekspor Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 adalah sebesar 69.818 ton. Volume ekspor terbesar dari pelabuhan Pangkalbalam terjadi pada Bulan Mei, yakni sebesar 9.914 ton, sedangkan volume ekspor

terendah pada Bulan November sebesar 1.516 ton. Impor Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 adalah sebesar 28.466 ton. Volume impor tertinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 6.254 ton. Sedangkan volume Impor terendah terjadi pada bulan Maret sebesar 210 ton.

Tabel 3.6
Ekspor dan Impor Bulanan Melalui Pelabuhan Pangkalbalam di Kota Pangkalpinang Tahun 2018

BULAN	EKSPOR (ton)	IMPOR (ton)
Januari	3,778	428
Februari	7,777	3,933
Maret	7,546	210
April	6,483	2,064
Mei	9,914	2,464
Juni	5,537	1,890
Juli	6,070	2,116
Agustus	7,272	6,254
September	7,328	1,853
Oktober	4,299	2,456
November	1,516	3,300
Desember	2,289	1,498
JUMLAH	**69,809**	**28,466**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

3.1.3 Laju Inflasi

Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Pangkalpinang berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pangkalpinang. Pada Juni 2019 terjadi inflasi sebesar 0,99% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 146,22. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 3,89%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,03%; kelompok sandang sebesar 0,26%; kelompok kesehatan sebesar 0,11%.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,01% serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,95%. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2019 sebesar 3,21% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2019 terhadap Juni 2018) sebesar 4,12%. Komponen inti pada Juni 2019 mengalami inflasi sebesar 2,10%. Sementara komponen bergejolak deflasi sebesar 0,35% dan komponen yang diatur pemerintah juga mengalami deflasi sebesar 0,64%. Dari 82 kota IHK, 76 kota mengalami inflasi dan hanya 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Manado sebesar 1,30% dengan IHK sebesar 137,66 dan terendah terjadi di Singaraja sebesar 0,02% dengan IHK sebesar 144,11. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Tanjungpandan sebesar 0,41% dengan IHK sebesar 145,67.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Juni 2019 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS baik di pasar tradisional maupun modern, pada Juni 2019 terjadi inflasi sebesar 0,99%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 144,79 pada Mei 2019 menjadi 146,22 pada Juni 2019. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Juni) 2019 sebesar 3,21% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2019 terhadap Juni 2018) sebesar 4,12%.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 3,89%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,10 %; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,03%; kelompok sandang sebesar 0,26%; kelompok kesehatan sebesar 0,11%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan

indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,01% serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,95%.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada Juni 2019, antara lain: ikan segar (kerisi, hapau, tenggiri, bulat, singkur, bawal, selar, manyung, dan tongkol), cabai merah, jeruk dan sayuran (bayam, kacang panjang, dan sawi putih). Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga, antara lain: angkutan udara, daging ayam ras, sayuran (kangkung, sawi hijau, dan keladi sayur), ikan segar (dencis, cumi-cumi, dan udang basah), bawang putih, angkutan laut, bawang merah, dan minyak goreng.

Pada Juni 2019 dari 7 kelompok pengeluaran, 5 kelompok memberikan andil/sumbangan inflasi dan 2 kelompok tidak memberikan andil/sumbangan terhadap deflasi. kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok bahan makanan sebesar 1,09%; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,02%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 0,01%; kelompok sandang sebesar 0,01%; kelompok kesehatan sebesar 0,004%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,001% serta kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,14%.

Tabel 3.7

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Pangkalpinang Juni 2019,Tahun Kalender 2019, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2018	IHK Desember 2018	IHK Juni 2019	Tingkat Inflasi Juni 2019 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)	Andil Inflasi Juni 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	**140,44**	**141,67**	**146,22**	**0,99**	**3,21**	**4,12**	**0,99**
Bahan Makanan	152,23	151,72	164,10	3,89	8,16	7,80	1,09
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	138,04	141,84	145,17	0,10	2,35	5,17	0,02
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	135,37	137,72	137,72	0,03	0,00	1,74	0,01
Sandang	129,36	130,14	132,58	0,26	1,87	2,49	0,01
Kesehatan	131,40	131,97	134,10	0,11	1,61	2,05	0,004
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	136,74	139,92	139,94	-0,01	0,01	2,34	-0,001
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	139,14	137,95	141,44	-0,95	2,53	1,65	-0,14

[1] Persentase perubahan IHK Juni 2019 terhadap IHK Mei 2019.
[2] Persentase perubahan IHK Juni 2019 terhadap IHK Desember 2018.
[3] Persentase perubahan IHK Juni 2019 terhadap IHK Juni 2018.

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Tabel 3.8
Andil Komoditas Utama Terhadap Inflasi Kota Pangkalpinang
Juni 2019 (%)

No	Komoditas	Perubahan Harga (persen)	Andil Inflasi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikan Kerisi	84,0468	0,7655
2.	Ikan Hapau	53,3377	0,2061
3.	Ikan Tenggiri	22,2146	0,1531
4.	Ikan Bulat	46,6299	0,0884
5.	Cabai Merah	38,3519	0,0775
6.	Ikan Singkur	20,032	0,0728
7.	Jeruk	4,5511	0,0494
8.	Ikan Bawal	37,418	0,0396
9.	Ikan Selar	4,8055	0,0390
10.	Bayam	6,3829	0,0249

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Tabel 3.9
Andil Komoditas Utama Terhadap Deflasi Kota Pangkalpinang
Juni 2019 (persen)

No	Komoditas	Perubahan Harga (persen)	Andil Deflasi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Angkutan Udara	-4,1128	-0,1291
2.	Daging Ayam Ras	-6,6057	-0,1167
3.	Kangkung	-30,4348	-0,1005
4.	Bawang Putih	-22,4187	-0,0919
5.	Ikan Dencis	-22,0396	-0,0877
6.	Sawi Hijau	-19,2167	-0,0687
7.	Cumi-Cumi	-5,7427	-0,0412
8.	Aangkutan Laut	-7,8572	-0,0181
9.	Bawang Merah	-1,5695	-0,0176
10.	Rampela Hati Ayam	-10,1011	-0,0151

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Perbandingan Inflasi Tahunan tahun kalender (Januari–Juni) 2019 sebesar 3,21% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2019 terhadap Juni 2018) sebesar 4,12%. Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 2,55% dan 2,23% dan tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Juni 2018 terhadap Juni 2017 dan Juni 2017 terhadap Juni 2016 masing-masing sebesar 2,98% dan 7,33%. Tingkat tahun kalender Kota Pangkalpinang Tahun 2017–2019 disajikan pada Tabel 3.10

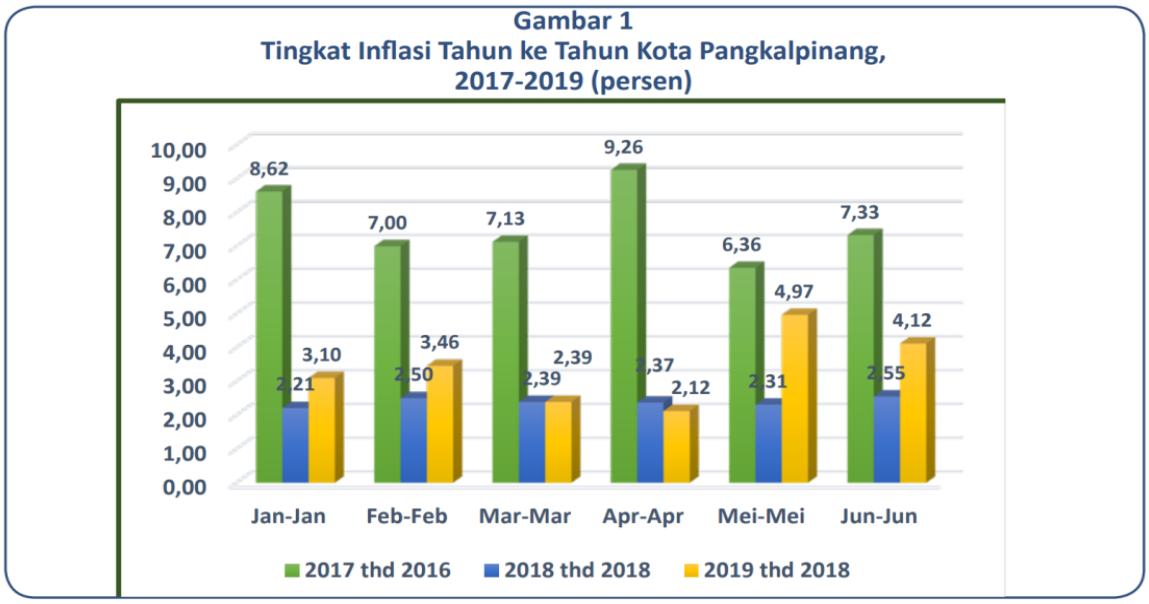
Inflasi Komponen Pada Juni 2019 hanya satu komponen memberikan andil/sumbangan inflasi terhadap laju inflasi umum yakni komponen inti yang memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 1,20% dengan laju inflasi sebesar 2,10%. Sementara komponen yang harganya diatur pemerintah memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,13% dengan laju deflasi sebesar 0,64% dan komponen yang harganya bergejolak memberikan andil/sumbangan deflasi sebesar 0,08% dengan laju deflasi sebesar 0,35%.

Tabel 3.10
Tingkat Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kota Pangkalpinang 2017–2019 (Persen)

Tingkat Inflasi	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
Juni	1,16	1,82	0,99
Tahun Kalender (Januari-Juni)	2,23	2,55	3,21
Tahun ke Tahun (Juni tahun n terhadap Juni tahun n-1)	7,33	2,98	4,12

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Gambar 3.2
Tingkat Inflasi Tahun Ke Tahun Kota Pangkalpinang 2017-2019 (%)



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 2 kota pantuan IHK yakni Kota Pangkalpinang dengan inflasi sebesar 0,99% dan Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) dengan deflasi sebesar 0,41%, maka pada Juni 2019 ini gabungan 2 kota mengalami inflasi sebesar 0,50% atau terjadi peningkatan indeks dari 145,31 pada Mei 2019 menjadi 146,03 pada Juni 2019. Inflasi untuk tahun kalender (Januari–Juni) 2019 sebesar 2,65% dan inflasi tahun ke tahun (Juni 2019 terhadap Juni 2018) sebesar 3,69%. Kelompok Bahan Makanan memberikan andil/sumbangan inflasi tertinggi sebesar 1,06%.

Tabel 3.11
IHK dan Tingkat Inflasi Gabungan 2 Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung Juni 2019, Tahun Kalender 2019, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juni 2018	IHK Desember 2018	IHK Juni 2019	Tingkat Inflasi Juni 2019 [1] (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019 [2] (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun [3] (%)	Andil Inflasi Juni 2019 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	**140,83**	**142,26**	**146,03**	**0,50**	**2,65**	**3,69**	**0,50**
Bahan Makanan	149,42	148,58	157,96	2,23	6,31	5,72	0,62
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	141,24	144,92	147,26	0,10	1,61	4,26	0,01
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	136,08	138,07	138,75	0,03	0,49	1,96	0,01
Sandang	129,81	131,18	132,97	0,19	1,36	2,43	0,01
Kesehatan	133,72	136,00	137,75	0,15	1,29	3,01	0,01
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	138,94	143,77	144,41	-0,01	0,45	3,94	-0,001
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	139,91	140,18	143,99	-1,13	2,72	2,92	-0,16

[1] Persentase perubahan IHK Juni 2019 terhadap IHK Mei 2019.
[2] Persentase perubahan IHK Juni 2019 terhadap IHK Desember 2018.
[3] Persentase perubahan IHK Juni 2019 terhadap IHK Juni 2018.

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka,BPS Kota Pangkalpinang, 2020

Indikator pembangunan ekonomi yang baik tidak hanya diiukur dengan besaran PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, dan transformasi struktural perekonomian, namun juga dapat disinergikan dengan besaran perkembangan harga di tingkat konsumen yang diindikasikan dengan laju inflasi. Kajian terhadap perkembangan laju inflasi cukup penting mengingat tingkat inflasi mempengaruhi daya beli (*purchashing power*) masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan membawa dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kalau tingkat kenaikan harga tinggi. Bila daya beli masyarakat meningkat berarti terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan berkembangnya sektor produksi dan distribusi barang dan

jasa. Selanjutnya kondisi tersebut akan mendorong (*feedback linkage*) pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, inflasi sesungguhnya merupakan gabungan dari sumbangan beberapa jenis barang dan jasa yang mengalami fluktuasi harga. Laju Inflasi menggambarkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus menerus pada periode tertentu.

Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia bisnis maupun konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan indeks harga konsumen/inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak investor dan akan mengurangi daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah akan merangsang dunia usaha untuk melakukan investasi.

Inflasi Kota Pangkalpinang mencapai 3,45% pada tahun 2018, lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 2,66%. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok bahan makanan sebesar 5.74% sebesar 5.74%.

Tingkat inflasi untuk Kota Pangkalpinang sangat berfluktuasi. Nilai inflasi Kota Pangkalpinang untuk tahun 2015 mencapai 4,66% dan mengalami kenaikan di tahun 2016 menjadi sebesar 5,26 %. Angka inflasi diestimasikan turun pada tahun 2017 adalah sebesar 4,80% dan diharapkan kembali menurun pada tahun 2018 sebesar 4,35%.

3.1.4 Investasi

Berdasarkan Laporan Kinerja Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2020, menunjukkan bahwa realisasi investasi PMA dan PMDN pada tahun

2017 sebesar Rp 880.241.353.176. Sedangkan realisasi investasi periode 2018-2019 secara berturut-turut adalah sebesar Rp 259.289.557.336; dan Rp 368.638.115.109. Nilai ini jauh di atas target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD ditetapkan target investasi tahun 2018 sebesar 1.900.000.000,00 dan 30.000.000.000 di tahun 2019.

3.2 Tantangan Perekonomian Tahun 2020

Tantangan yang sangat berat yang dihadapi hampir semua negara di seluruh dunia saat ini pada tahun 2020 ini adalah wabah pandemi Covid-19. Semua level pemerintahan berupaya untuk mencurahkan energi dan sumber daya nya untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19. Faktor yang membuat kita berada dalam kesulitan dan tekanan berat adalah kecepatan penyebaran penyakit menular ini, sementara kita semua belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perilaku virus penyebabnya. Secara nasional, sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 jumlah total kasus infeksi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 66.226 kasus dengan grafik jumlah kasus harian yang masih menanjak. Penyebaran Covid-19 telah menjangkau semua 34 provinsi.

Kondisi terkini terkait perkembangan Kasus Covid-19 di Provinsi Kep. Bangka Belitung belum menunjukan perkembangan yang membaik, dimana masih terdapat penambahan kasus yang terkonfirmasi positif. Adapun jumlah kasus di Bangka Belitung sampai dengan tanggal 7 Juli 2020 terdapat 171 orang positif, 2 orang meninggal dan 133 orang sembuh. Dengan demikian, masih terdapat 38 orang pasien yang masih menjalani perawatan. Kondisi di Kota Pangkalpinang sendiri, terdapat 49 kasus positif dengan 32 diantaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 1 orang pasien yang meninggal. Maka tantangan saat

ini adalah mempercepat penyembuhan/penanganan pasien positif dan mencegah terjadinya kasus positif baru. Dengan belum ditemukannya vaksin virus *Corona* jenis baru ini, terdapat konsensus bahwa langkah terbaik adalah memutus rantai penularan dan penyebaran penyakit ini dengan membatasi kontak fisik dan pergerakan penduduk. Namun demikian, permasalahannya tidak hanya selesai pada tahap pencegahan dan menanganan pandeminya saja. Aspek sosial ekonomi masyarakat merupakan dampak jangka panjang yang diakibatkan oleh pandemi ini yang perlu segera diantisipasi. Adapun dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19 adalah:

Pertama, tentu dampak di bidang kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penderita terinfeksi virus corona dalam waktu singkat telah meningkatkan tekanan yang luar biasa pada sistem pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengambil langkah-langkah cepat dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan masyarakat.

Berikutnya, dampak sosial ekonomi. Di tingkat domestik, dampak pandemi ini dirasakan di berbagai lini perekonomian. Rumah tangga menghadapi risiko kehilangan pendapatan karena PHK atau pembatasan kegiatan, dan juga risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Dunia usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (*durable*), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Sektor-sektor yang diperkirakan paling terpukul di antaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-

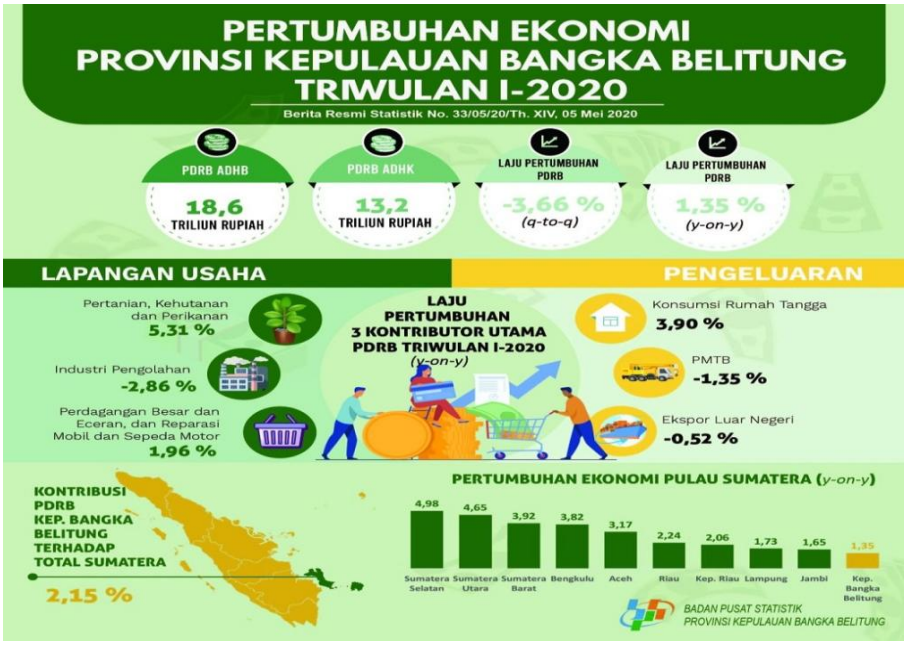
impor, sektor perdagangan, dan sektor konstruksi. Bagi UMKM dan pelaku ekonomi informal yang pendapatan usahanya berputar secara harian dampaknya sungguh berat, dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Peranan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan terhadap peningkatan tingkat inflasi dan peningkatan jumlah pengangguran serta terhambatnya investasi di Kota Pangkalpinang.

Berikut digambarkan kondisi ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 berdasarkan sumber dari BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Edisi Mei 2020 yang dipublikasikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disajikannya data kondisi perekonomian daerah pada tingkat regional ini selain didasari pertimbangan belum ada/belum dipublikasikannya data kondisi ekonomi Makro Kota Pangkalpinang Tahun 2020, juga mempertimbangkan kondisi ekonomi tahun 2020 akibat wabah Covid-19 yang sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Perekonomian Bangka Belitung Triwulan I Tahun 2020 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp. 18.630,61 milyar atau tumbuh sebesar 1,35 % (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,99 % (yoy).

Gambar 3.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan I Tahun 2020



Struktur perekonomian Bangka Belitung pada triwulan I 2020 masih didominasi oleh empat LU utama yaitu industri pengolahan (18,38%), pertanian, kehutanan dan perikanan (19,07%), perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, sepeda motor (15,82%) dan pertambangan dan penggalian (8,55%). Sementara itu sektor perdagangan tercatat mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,30% dalam empat tahun terakhir sejalan dengan dukungan pemerintah daerah yang menciptakan iklim usaha yang baik, serta mempermudah perdagangan antar daerah dan ekspor impor. Sektor konstruksi juga mengalami peningkatan sebesar 1,51% sejalan dengan program peningkatan investasi.

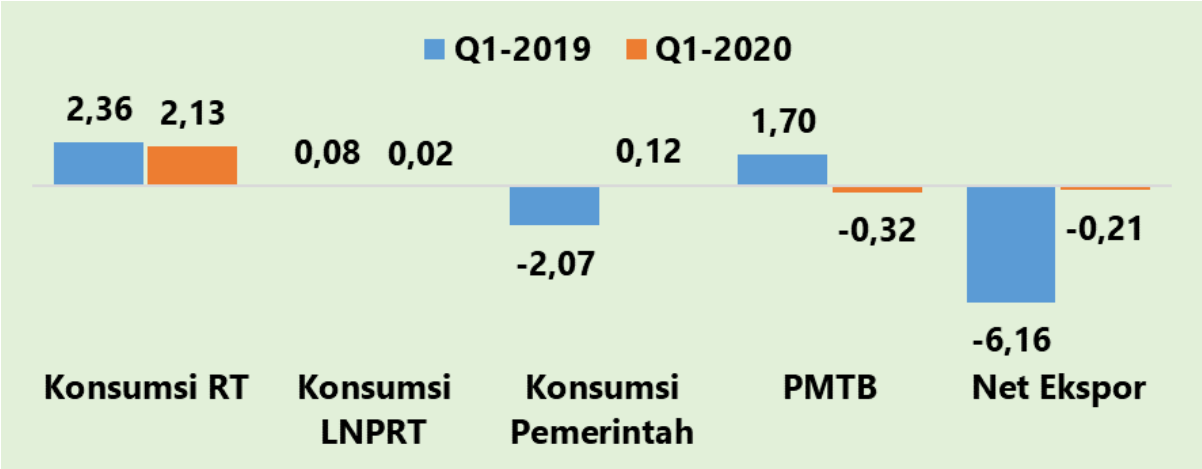
Gambar 3.4
Andil Pertumbuhan Dari Sektor Lapangan Usaha (%)



Sumber : Diseminasi Inflasi Update Triwulan I 2020, Bank Indonesia

Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi pemerintah dan konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh melambat, sementara pada kinerja investasi dan perubahan inventori terkontraksi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Babel didorong oleh masih kuatnya konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah yang tercatat tumbuh sebesar 2,13% dan 0.12%, tumbuh stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 2,36% dan -2,07% . Disamping itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh kinerja ekspor luar negeri meskipun masih dalam rentang terkontraksi sebesar 0,52% (yoy), namun menunjukkan perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat terkontraksi sebesar 2,28% (yoy).

Gambar 3.5
Andil Pertumbuhan Dari Sisi Pengeluaran (%)



Sumber : Diseminasi Inflasi Update Triwulan I 2020, Bank Indonesia

Pada triwulan II 2020, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan I 2020. Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp. 17,84 milyar atau terkontraksi sebesar 1,88%.

Gambar 3.6
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Triwulan II Tahun 2020

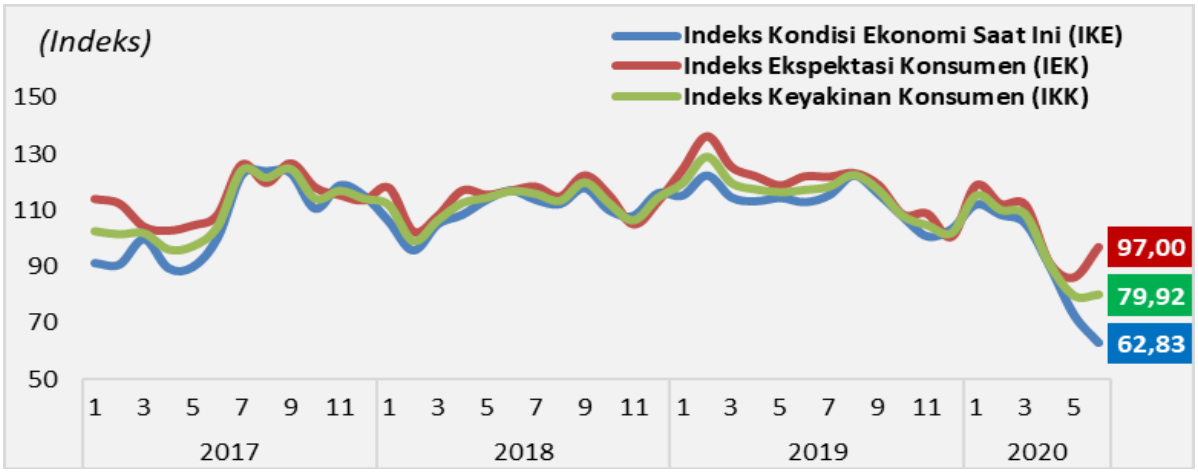


Tiga LU utama pendukung Struktur perekonomian Bangka Belitung pada triwulan II 2020 yaitu industri pengolahan (18,57%), pertanian, kehutanan dan perikanan (21,13%), perdagangan besar, dan eceran dan reparasi mobil, sepeda motor (15,58%). Dari sisi pengeluaran, kinerja konsumsi masyarakat yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,25%. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontraksi sebesar 9,94% dan kinerja ekspor luar negeri terkontraksi sebesar 41,84% (yoy).

Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan melambat pada triwulan II 2020 tercermin dari hasil survei konsumen yang menunjukkan semakin menurunnya optimisme keyakinan konsumen hingga bulan Mei 2020 sejalan dengan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Indeks

keyakinan konsumen masih berada pada level pesimis di bulan Juni 2020 didorong ketidakpastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir.

Gambar 3.7
Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber : Diseminasi Inflasi Update Triwulan I 2020, Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2020 diperkirakan akan tumbuh menguat dibandingkan dengan triwulan II 2020. Beberapa indikator yang diperkirakan akan membaik dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran antara lain dari semakin menguatnya konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh menguat didorong oleh membaiknya permintaan masyarakat pasca kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat dalam konsep *Adaptasi Kebiasaan Baru*. Investasi juga diperkirakan akan semakin membaik didorong oleh investasi sektor swasta.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung tahun 2020 diperkirakan melambat dari tahun 2019 akibat adanya tekanan ekonomi global maupun domestik karena pandemi Covid 19. Mewabahnya virus Covid 19 telah mempengaruhi terhadap seluruh sektor perekonomian secara keseluruhan. Kebijakan pembatasan sosial yang berskala besar, bekerja dari rumah,

pembatasan operasional kegiatan usaha (hotel, restoran, tempat hiburan, destinasi wisata, maskapai penerbangan dan sebagainya) mempengaruhi terhadap konsumsi domestik, kegiatan investasi maupun kegiatan ekspor dan impor. Namun demikian berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat menahan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung. Oleh sebab itu, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung diperkirakan tumbuh pada rentang 0.75% - 1.75% (yoy). Beberapa asumsi yang mendasari perkiraan pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain :

1. Penyebaran virus COVID-19 berlangsung dalam Triwulan I dan II 2020 dan akan mulai menurun di triwulan III 2020.
2. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian Babel terjadi pada Semester I 2020 dan akan kembali pulih pada Semester II 2020.
3. Pertumbuhan ekonomi Nasional 0,9 - 1,9% pada tahun 2020.
4. Inflasi masih terkendali pada rentang 2-3% (yoy) pada tahun 2020.
5. Konsumsi rumah tangga terdampak signifikan dengan menurunnya kinerja lapangan usaha utama, penurunan pariwisata, penundaan Pilkada, dan terbatasnya aktivitas masyarakat.

Beberapa resiko yang mungkin dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung Tahun 2020 antara lain :

1. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang terdampak signfikan terhadap mewabahnya virus Covid 19 . Jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Bangka Belitung menurun drastis baik dari manca negara maupun domestik yang berdampak pada penutupan sementara hotel, restoran dan penginapan. Sektor pariwisata ini memerlukan waktu pemulihan yang lebih

lama dibandingkan sektor lainnya. Lambatnya pemulihan sektor pariwisata akan berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan investasi sektor pariwisata.

2. Kembali aktivitas ekonomi masyarakat perlu disertai dengan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penularan virus Covid 19. Dalam konsep Adaptasi Kebiasaan Baru, kegiatan ekonomi dapat berlangsung secara normal namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Apabila kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan rendah dan tidak ada tindakan tegas untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi maka dapat beresiko dapat meningkatkan jumlah penyebaran Covid 19.
3. Tekanan resiko eksternal masih tinggi seiring dengan ketidakpastian kapan berakhirnya wabah virus Covid 19 dan kekhawatiran terhadap gelombang kedua wabah Covid 19. Hal ini beresiko terhadap ketidakpastian kegiatan ekonomi.

3.2.2 Perkembangan Inflasi Daerah Tahun 2020

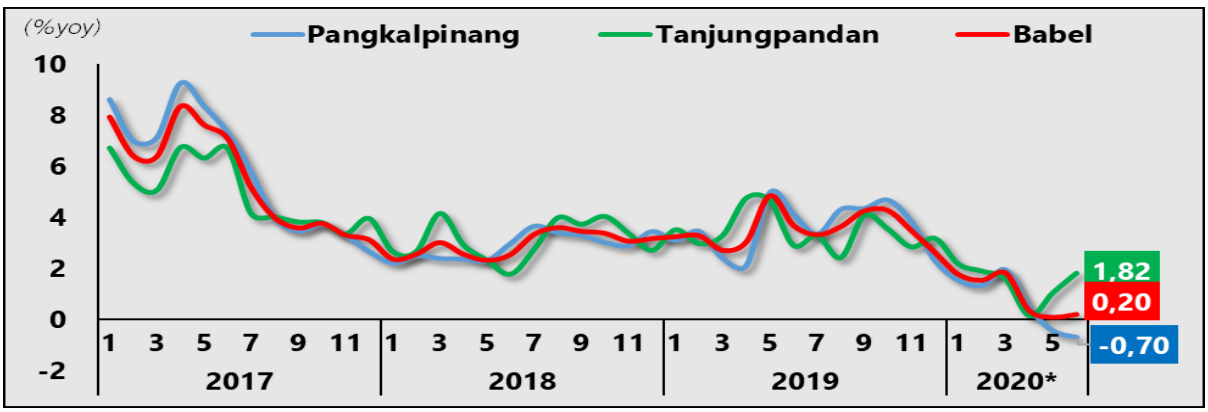
Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I Tahun 2020 sebesar 1,82% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2019 yang tercatat sebesar 2,62%. Andil Inflasi terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,558%. Kelompok pengeluaran lain masing-masing menyumbang andil inflasi antara lain pakaian dan alas kaki 0,064%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,04%, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,157%, kesehatan 0,033%, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,02%, rekreasi, olahraga dan budaya 0027%, pendidikan 0,200%, penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,168%, perawatan pribadi dan jasa lainnya

0,155%, dan kelompok transportasi -0,517 %. Secara spesial, Kota Pangkalpinang pada triwulan I Tahun 2020 tercatat mengalami inflasi sebesar 1,95% (yoy) menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada bulan Juni 2020, tekanan inflasi Bangka Belitung relatif masih rendah karena adanya penurunan permintaan masyarakat akibat terbatasnya aktivitas masyarakat di tengah kondisi pasokan yang terjaga dan distribusi yang lancar. Secara kumulatif dari Januari-Juni 2020 Bangka Belitung mengalami inflasi sebesar 0,22% (ytd), lebih rendah dari Jan-Juni 2019 sebesar 2,65% (ytd).

Gambar 3.8

Laju Inflasi Pangkalpinang, Tanjung Pandan dan Babel Juni 2020



Sumber : Diseminasi Inflasi Update Triwulan I 2020, Bank Indonesia

Tekanan inflasi pada triwulan III 2020 diperkirakan akan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh menurunnya tekanan inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau karena pasokan yang terjaga dan menurunnya tekanan inflasi kelompok transportasi karena permintaan masyarakat yang masih terbatas.

Secara keseluruhan tahun 2020, Inflasi Bangka Belitung diproyeksikan masih berada pada rentang target inflasi Nasional 3,0 ± 1% dengan tekanan

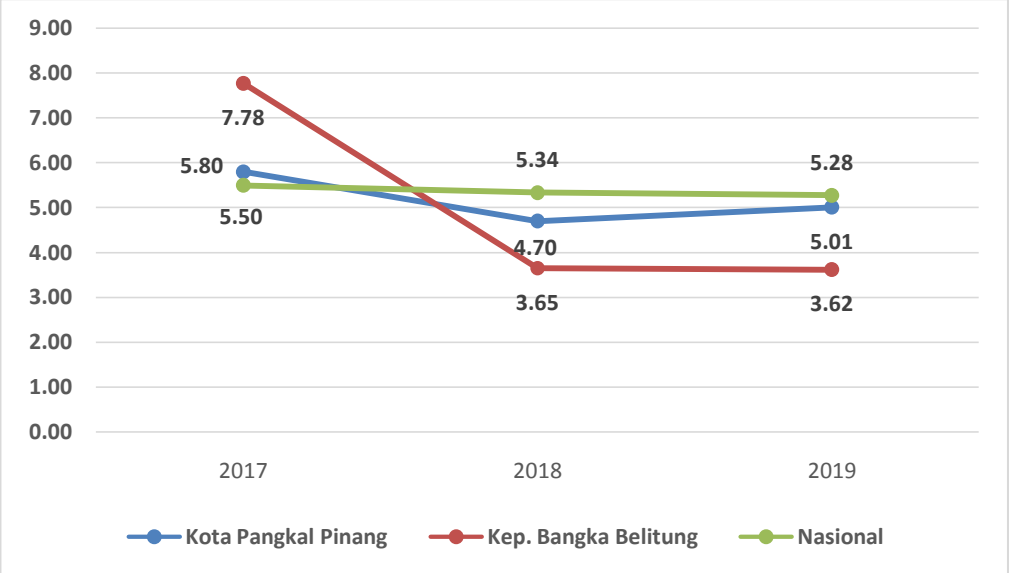
bias ke bawah yang cenderung menurun dari 2019. Menurunnya tekanan inflasi disebabkan oleh adanya penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak adanya wabah COVID-19 yang mempengaruhi seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021, tekanan inflasi diperkirakan akan meningkat dari tahun 2020 sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 di tahun 2020.

3.2.3 Kondisi Ketenagakerjaan Tahun 2020

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terus mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kota Pangkalpinang mencapai 5,80%, dan turun menjadi 4,7% pada tahun 2018 namun kembali naik d tahun 2019 5,01%. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut:

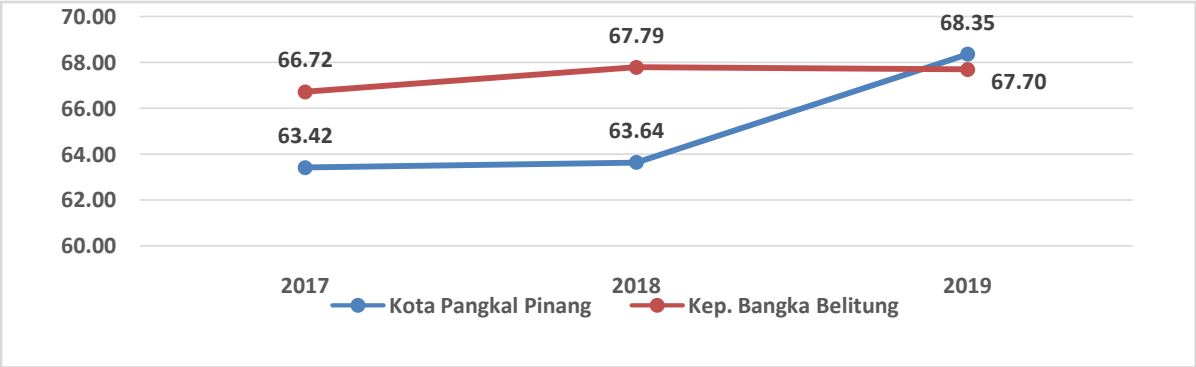
Gambar 3.9
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2017-2019 (%)



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja *(labour supply)* yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Perkembangan TPAK Kota Pangkalpinang menunjukkan kondisi yang terus meningkat, dimana pada tahun 2017 sebesar 63,42% hingga pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 63,64%, kemudian hingga tahun 2019 terjadi peningkatan yang cukup signfikan mencapai 68,35%. Namun hal ini berbanding terbalik dengan Provinsi yang mengalami penurunan menjadi 67,70%.

Gambar 3. 10
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2019 (%)



Sumber : BPS Kep . Bangka Belitung dalam Angka 2020

Struktur ketenagakerjaan di Bangka Belitung periode februari 2020 mengalami kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), meski demikian Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT) juga mengalami kenaikan dibandingkan periode februari tahun 2019. Nilai TPAK meningkat menjadi 69,93% pada februari 2020 dari 67,89% pada Februari 2019 dan nilai TPT sedikit naik dari 3,39% pada februari 2019 menjadi 3,41% pada februari 2020.

Berdasarkan indikator *survey* konsumen yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa indikator ketenagakerjaan di Bangka Belitung diperkirakan menurun pada enam bulan mendatang dibandingkan saat ini sejalan dengan dampak pandemi Covid 19 yang mulai dirasakan pada Maret 2020.

3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Berdasarkan gambaran perkembangan, tantangan dan prospek perekonomian makro Kota Pangkalpinang ada, beberapa poin yang menjadi arah kebijakan perekomian pada tahun 2021-2022 yaitu:

1. Meningkatkan peran UMKM dan Koperasi untuk menggeliatkan ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif dan berorientasi pariwisata, dan industri pengolahan.
2. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan baik lokal, regional maupun nasional.
3. Memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal.
4. Meningkatakan daya saing daerah terutama peningkatan sumber daya manusia melalui pengembangan, pelatihan dan pendidikan terhadap angkatan kerja, meningkatkan program pendidikan dan kesehatan.
5. Memperluas lapangan pekerjaan, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui inovasi daerah, regulasi di bidang investasi, peningkatan pelayanan perizinan, meningkatkan peran lembaga yang berhubungan dengan investasi.
6. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta melalui program CSR.
7. Meningkatkan belanja pemerintah di bidang infrastruktur dan fasilitas publik.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek keuangan. Aspek ekonomi salah satunya dapat dilihat dari kondisi ekonomi makro suatu daerah. Kebijakan ekonomi makro ini akan

mempengaruhi arah pembangunan sehingga perlu adanya sinergisitas antara kebijakan ekonomi makro pemerintah daerah dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah pusat.

Pengelolaan keuangan pemerintah Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
6. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan perundangan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut memberikan tekanan perlunya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah

Daerah Kota Pangkalpinang secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban yang kesemuanya mengacu pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas seperti yang dimaksud dalam peraturan di atas. Sedangkan, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pangkalpinang akan difokuskan pada:

1. Daya dukung utilitas
2. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran
3. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan
4. Penanganan lingkungan hidup.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan pondasi dalam membangun kemandirian dan mengurangi ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat. Kebijakan ekonomi daerah dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek keuangan.

3.3.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu:

1. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya;
2. meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijaka n fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif

dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian.

Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

3.3.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2021, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan transfer terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; 3)

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Pemerintah Provinsi, Dana Insentif Daerah dan dana desa dari APBN. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat *"limitative"*. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah, diharapkan naik sebesar 5%.
2. Pendapatan transfer diasumsikan naik sebesar 5% dari tahun 2020.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan dan diasumsikan naik sebesar 5% dari tahun 2020.

Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kota Pangkalpinang dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
3. Pendayagunaan asset daerah.

3.3.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah pada Tahun 2021 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 6,3 persen dari tahun 2020;
2. Perhitungan gaji menggunakan basis data tahun 2020.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

a. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga *(standby budget)* terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

d. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2021.

e. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

3.3.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2020. Adapun pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah serta pembayaran pokok hutang.

Kebijakan pembiayaan daerah di Kota Pangkalpinang diarahkan untuk:

1. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun lalu;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Realisasi dan proyeksi pendapatan, pembiayaan, dan belanja daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022 dibuat dalam 2 (dua) versi, yaitu: berdasarkan format Permendagri 86 tahun 2017, dan berdasarkan PP 12 tahun:

a. Realisasi Dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

Tabel 3.12
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PENDAPATAN**					
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**167.131.991.665,98**	**155.116.318.111,20**	**158.172.599.063,13**	**164.499.503.025,66**	**171.079.483.146,68**
1.1.1	Pajak Daerah	85.749.357.042,60	90.644.297.458,15	95.000.000.000,00	98.800.000.000,00	102.752.000.000,00
1.1.2	Restribusi daerah	13.217.373.724,86	12.004.674.648,32	20.680.544.463,13	21.507.766.241,66	22.368.076.891,32
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.727.025.648,94	5.932.828.425,98	6.000.000.000,00	6.240.000.000,00	6.489.600.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	62.438.235.249,58	46.534.517.578,75	36.492.054.600,00	37.951.736.784,00	39.469.806.255,36
1.2	**DANA PERIMBANGAN**	**665.149.903.809,00**	**631.622.884.858,00**	**524.822.297.000,00**	**545.815.188.880,00**	**567.647.796.435,20**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	64.726.596.449,00	67.239.489.658,00	46.310.199.000,00	48.162.606.960,00	50.089.111.238,40
1.2.2	Dana alokasi umum	442.796.605.000,00	476.256.559.000,00	478.512.098.000,00	497.652.581.920,00	517.558.685.196,80
1.2.3	Dana alokasi khusus	157.626.702.360,00	88.126.836.200,00	-	-	-
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**83.247.410.109,75**	**129.651.136.788,05**	**91.407.291.000,00**	**94.327.291.000,00**	**97.364.091.000,00**
1.3.1	Hibah		22.509.840.000,00			
1.3.2	Dana darurat					

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah yang lainnya	60.256.391.109,75	85.592.851.788,05	59.000.000.000,00	61.360.000.000,00	63.814.400.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		10.240.398.000,00	18.407.291.000,00	18.407.291.000,00	18.407.291.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	22.991.019.000,00	11.308.047.000,00	14.000.000.000,00	14.560.000.000,00	15.142.400.000,00
A.	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)**	**915.529.305.584,73**	**916.390.339.757,25**	**774.402.187.063,13**	**804.641.982.905,66**	**836.091.370.581,88**

Tabel 3.13
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2.	**BELANJA**					
2.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**357.878.923.666,30**	**346.365.622.344,00**	**384.824.456.664,13**	**392.026.009.987,41**	**399.371.594.377,16**
2.1.1	Belanja Pegawai	321.323.686.127,30	331.870.488.500,00	360.077.666.164,13	367.279.219.487,41	374.624.803.877,16
2.1.2	Belanja bunga					
2.1.3	Belanja subsudi					
2.1.4	Belanja hibah	33.606.072.432,00	11.759.163.915,00	18.390.000.000,00	18.390.000.000,00	18.390.000.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.5	Belanja bantuan sosial	2.065.928.000,00	1.937.720.710,00	215.230.000,00	215.230.000,00	215.230.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa					
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	883.237.107,00	797.705.631,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00	2.020.000.000,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	-	543.588,00	4.121.560.500,00	4.121.560.500,00	4.121.560.500,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**525.665.504.307,68**	**608.361.801.470,72**	**486.295.721.948,00**	**534.223.526.166**	**548.712.107.051**
2.2.1	Belanja pegawai	98.389.177.734,00	132.844.647.370,00	52.637.920.599,00	79.377.897.218	80.171.676.191
2.2.2	Belanja barang dan jasa	199.447.656.738,68	224.401.565.526,69	279.291.178.562,00	302.328.853.833	315.053.143.518
2.2.3	Belanja modal	227.828.669.835,00	251.115.588.574,03	154.366.622.787,00	152.516.775.115	153.487.287.342
B.	**TOTAL JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)**	**883.544.427.973,98**	**954.727.423.814,72**	**871.120.178.612,13**	**926,249.536.153,41**	**948.083.701.428,16**

Tabel 3.14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d 2022

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**150.617.501.793,30**	**179.832.042.244,05**	**139.994.958.186,58**	**122.607.553.247,75**	**114.215.696.484,28**
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	150.617.501.793,30	179.832.042.244,05	139.994.958.186,58	122.607.553.247,75	114.215.696.484,28
3.1.2	Pencairan dana cadangan					
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan					
3.1.4	Penerima pinjaman daerah					
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman					
3.1.6	Penerimaan piutang daerah					
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00-**	**1.000.000.000,00-**	**1.000.000.000,00-**
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00-
	Pembayaran pokok utang					
	Pemberian pinjaman daerah					
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1-3.2)		**149.117.501.793,30**	**178.332.042.244,05**	**138.994.958.186,58**	**121.607.553.247,75**	**113.215.696.484,28**

b. Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Berdasarkan PP 12 Tahun 2012

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d Tahun 2022

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN**					
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**167.131.991.665,98**	**155.116.318.111,20**	**158.172.599.063,13**	**164.499.503.025,66**	**171.079.483.146,68**
1.1.1	Pajak Daerah	85.749.357.042,60	90.644.297.458,15	95.000.000.000,00	98.800.000.000,00	102.752.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	13.217.373.724,86	12.004.674.648,32	20.680.544.463,13	21.507.766.241,66	22.368.076.891,32
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.727.025.648,94	5.932.828.425,98	6.000.000.000,00	6.240.000.000,00	6.489.600.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	62.438.235.249,58	46.534.517.578,75	36.492.054.600,00	37.951.736.784,00	39.469.806.255,36
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**748.397.313.918,75**	**728.523.783.646,05**	**597.822.297.000**	**621.735.188.880,00**	**646.604.596.435,20**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	665.149.903.809,00	631.622.884.858,00	524.822.297.000,00	545.815.188.880,00	**567.647.796.435,20**
1.2.1.1	Bagi Hasil PajaK	22.358.726.468,00	16.761.709.652,00	17.320.813.000,00	18.013.645.520,00	18.734.191.340,80
1.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	42.367.869.981,00	50.477.780.006,00	28.989.386.000,00	30.148.961.440,00	31.354.919.897,60
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	442.796.605.000,00	476.256.559.000,00	478.512.098.000,00	497.652.581.920,00	517.558.685.196,80
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	23.799.316.016,00	43.594.345.541,00	-	-	-
1.2.1.7	Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA	45.212.529.344,00	43.674.578.778,00	-	-	-
1.2.1.8	Dana Alokasi Khusus (Dak Penugasan)-LRA	88.614.857.000,00	857.911.881,00	-	-	-

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.2.2.1	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1.2.3	**Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**60.256.391.109,75**	**85.592.851.788,05**	**59.000.000.000**	**61,360,000,000.00**	**63.814.400.000,00**
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	60.256.391.109,75	85.592.851.788,05	59.000.000.000	61,360,000,000.00	63.814.400.000,00
1.2.4	**Bantuan Keuangan**	**22.991.019.000,00**	**11.308.047.000,00**	**14.000.000.000,00**	**14.560.000.000,00**	**15.142.400.000,00**
1.2.4.1	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	22.991.019.000,00	11.308.047.000,00	14.000.000.000,00	14.560.000.000,00	15.142.400.000,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**-**	**32.750.238.000,00**	**18.407.291.000,00**	**18.407.291.000,00**	**18.407.291.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	-	22.509.840.000,00	-		
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	10.240.398.000,00	18.407.291.000,00	18.407.291.000,00	18.407.291.000,00
A.	**JUMLAH PENDAPATAN**	**915.529.305.584,73**	**916.390.339.757,25**	**774.402.187.063,13**	**804.641.982.905,66**	**836.091.370.581,88**

Tabel 3.16

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d 2022

NO	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
2	**BELANJA**					
2.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**654.832.521.031,98**	**702.813.586.021,69**	**710.611.995.325,13**	**763.644.586.787,41**	**778.545.373.877,16**
2.1.1	Belanja Pegawai	321.323.686.127,30	331.870.488.500,00	360.077.666.164,13	367.279.219.487,41	374.624.803.877,16
2.1.2	Belanja barang dan jasa	297.836.834.472,68	357.246.212.896,69	331.929.099.161,00	377.760.137.300,00	385.315.340.000,00
2.1.5	Belanja Hibah	33.606.072.432,00	11.759.163.915,00	18.390.000.000,00	18.390.000.000,00	18.390.000.000,00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	2.065.928.000,00	1.937.720.710,00	215.230.000,00	215.230.000,00	215.230.000,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**227.828.669.835,00**	**251.115.588.574,03**	**154.366.622.787,00**	**147.527.188.866,00**	**150.477.732.689,00**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	6.510.889.502,00	9.022.733.858,00	11.343.575.000,00	10.840.981.700,00	11.057.801.300,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.391.818.061,24	58.137.022.241,83	12.890.284.062,00	12.319.161.600,00	12.565.544.800,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.880.085.401,93	28.130.467.214,86	11.565.918.691,00	11.053.474.100,00	11.274.543.550,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.313.720.058,83	133.812.881.438,34	101.969.020.370,00	97.451.137.141,00	99.400.160.039,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	19.732.156.811,00	12.288.583.315,00	15.218.659.714,00	14.544.375.250,00	14.835.262.750,00
2.2.6	Belanja Modal BLUD	-	797.892.999,00	736.764.950,00	704.121.525,00	718.203.950,00
2.2.7	Belanja Modal Bersumber dari Dana KAPITASI	-	1.307.095.300,00	642.400.000,00	613.937.550,00	626.216.300,00
2.2.8	Belanja Modal BOS	-	7.618.912.207,00	-	-	-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**-**	**543.588,00**	**4.121.560.500,00**	**4.121.560.500,00**	**4.121.560.500,00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-	543.588,00	4.121.560.500,00	4.121.560.500,00	4.121.560.500,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**883.237.107**	**797.705.631**	**2.020.000.000**	**2.020.000.000**	**2.020.000.000**
	JUMLAH BELANJA	**883.544.427.973,98**	**954.727.423.814,72**	**871.120.178.612,13**	**926.249.536.153,41**	**948.083.701.428,16**

Tabel 3.17

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 s.d 2022

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun (n-3)	Realisasi Tahun (n-2)	Tahun Berjalan (n-1)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana (n)	Proyeksi/Target pada Tahun (n+1)
1	2	3	4	5	6	7
4	**PEMBIAYAAN**					
4.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**150.617.501.793,30**	**179.832.042.244,05**	**139.994.958.186,58**	**122.607.553.247,75**	**114.215.696.484,28**
4.1.1	Penggunaan SiLPA	150.617.501.793,30	179.832.042.244,05	139.994.958.186,58	122.607.553.247,75	114.215.696.484,28
4.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**1.000.000.000-**	**1.000.000.000-**	**1.000.000.000-**
4.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000-	1.000.000.000-	1.000.000.000-
D.	**PEMBIAYAAN NETTO**	**149.117.501.793,30**	**178.332.042.244,05**	**138.994.958.186,58**	**121.607.553.247,75**	**113.215.696.484,28**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **"Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan"**. Tujuan utama dari visi tersebut adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat. Indikator yang paling tepat untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya pendapatan per kapita. Target ini akan dapat tercapai apabila proyeksi pertumbuhan ekonomi dan pergeseran struktur ekonomi dari pertanian dan pertambangan menuju sektor industri pengolahan dan sektor jasa tercapai dengan baik.

Visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan membuat kota ini pantas menjadi ibu kota provinsi yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera secara ekonomi, terdidik dan sehat. Dampak langsung dari meningkatknya indikator ekonomi, pendidikan dan kesehatan adalah menurunnya tingkat kemiskinan. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terdidik dan sehat akan menekan eksternalitas negatif dari pembangunan seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dalam jangka panjang diharapkan Kota Pangkalpinang menjadi kota percontohan keberhasilan pembangunan ekonomi di Provinsi Bangka Belitung.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pendapatan perkapita;
2. Mewujudkan kesejahteraan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar sektor publik dari pendidikan dan kesehatan;
3. Mengurangi dampak negatif pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan dan antar daerah serta masalah pencemaran lingkungan;
4. Menciptakan aparatur pemerintah jujur, bersih, berwibawa dan berkualitas melalui dukungan fasilitas yang memadai dan penegakan supremasi hukum;
5. Menegakkan hukum yang tidak diskriminatif dan tanpa membedakan kedudukan pelaku guna menekan tindakan kejahatan dan aksi ilegal;
6. Menjalin kerjasama yang baik antar dinas, antar pemerintah daerah dan antar pemerintah, dewan dan masyarakat guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai;
7. Memiliki modal utama pengembangan sektor perdagangan dan jasa melalui pengembangan sistem informasi dan ketersediaan data yang berkualitas terutama di dalam menghadapi era globalisasi;
8. Meningkatkan peran serta pengusaha melalui peningkatan jiwa kewirausahaan wanita melalui kesetaraan gender dan wanita pengusaha di dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi;
9. Menciptakan masyarakat dengan gaya hidup yang religius dan memiliki jiwa serta tubuh yang sehat;

10. Menciptakan keharmonisan hidup melalui masyarakat yang taat hukum yang memiliki komitmen dan integritas tinggi terhadap pembangunan;

Berdasarkan RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026, saat ini pembangunan Kota Pangkalpinang telah memasuki periode tahun ke-5 tahap ketiga dengan prioritas pada 6 bidang yaitu:

1. *Kerja sama*, mencakup kerja sama antar dinas dan kerja sama antar pemerintah daerah. Saat ini hubungan yang perlu diperhatikan yaitu hubungan antara pemerintah dan DPRD yang harus terjaga secara profesional;
2. *Ekonomi*, hal yang perlu diperhatikan adalah daya dukung utilitas seperti ketersediaan air bersih. Kota Pangkalpinang harus semakin memantapkan diri sebagai kota yang makmur secara ekonomi. Kemakmuran ini diharapkan mampu menekan dampak eksternalitas negatif pembangunan seperti kemiskinan, rumah liar, ketimpangan distribusi pendapatan, termasuk masalah penanganan soal lingkungan hidup seperti pengelolaan sampah;
3. *Empowerment*, peranan pelaku pembangunan selain pemerintah seperti pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat harus semakin diperkuat. Hal ini penting agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan;
4. *Pemerintah*, pemerintah harus fokus pada sistem penjenjangan karir yang baik untuk aparat dengan tupoksi yang jelas. Jumlah pegawai harus betul-betul memperhatikan kebutuhan pelayanan publik sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan;
5. *Permasalahan*, saat ini ada dua permasalahan pokok yang harus diperhatikan yaitu meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan tindak kejahatan, oleh

karena itu, diperlukan ketegasan dan supremasi hukum untuk menindak pelaku kejahatan tersebut;

6. *Sistem informasi*, saat ini sistem informasi harus menjadi prioritas. Jaringan informasi yang berkualitas dan baik akan mendukung kegiatan pemerintahan dan perekonomian Kota Pangkalpinang;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 tahun 2019. Visi dari RPJMD tersebut, yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu **"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"** (Sejahtera, Nyaman, Unggul Makmur). Makna dari visi tersebut adalah:

Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Nyaman, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan dibandingkan SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, banyak hasil, serba kecukupan, tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Visi Kota Pangkalpinang tersebut sejalan dengan Visi RPJPD Kota Pangkalpinang 2007-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi RPJMD dengan RPJPD Kota Pangkalpinang

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi Jangka Panjang 2007-2026
Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (**Sejahtera Nyaman Unggul Makmur**)"	Meningkatkan **kesejahteraan** rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan

Dari persandingan tersebut dapat dilihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kota Pangkalpinang sudah selaras dengan visi jangka panjang Kota Pangkalpinang. Keselarasan tersebut khususnya terletak pada frase **SEJAHTERA**. Artinya adalah apa yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam pembangunan jangka menengah akan mampu menyumbang pencapaian cita-cita jangka panjang. Selain itu visi RPJMD Kota Pangkalpinang juga sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu:

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi RPJMD Kota Pangkalpinang dengan RPJMN

Visi Jangka Menengah 2018-2023	Visi RPJMN 2020-2024
Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (**Sejahtera Nyaman Unggul Makmur**)"	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Visi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kota Pangkalpinang. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pengembangan Kota Pangkalpinang selama 5 tahun ke depan adalah:

1. **Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan**

   Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perizinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. **Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.**

   Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.**

   Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government (e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement)*

4. **Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berkeadilan.**

   Pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan.

5. **Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.**

   Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antarwilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Keterkaitan misi jangka menengah Kota Pangkalpinang dengan misi Jangka menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Misi RPJMD Kota Pangkalpinang dengan
Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

MISI RPJMD PANGKALPINANG	MISI RPJMD PROVINSI BANGKA BELITUNG
1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	**Misi 1** Meningkatkan pembangunaan ekonomi berbasis potensi daerah **Misi 4** Meningkatkan kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	**Misi 6** Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.	**Misi 5** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.	**Misi 3** Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.	**Misi 2** Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas **Misi 6** Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Pangkalpinang

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan pengangguran, dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan pertumbuhan PDRB sektor unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor; • Pariwisata • Perdagangan • Jasa
		Meningkatkan pertumbuhan investasi	Nilai investasi
		Terkendalinya laju inflasi	Angka inflasi
		Menurunnya kesenjangan pendapatan penduduk	Indeks gini
		Menurunnya tingkat pengangguran	TPT
		Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat	PDRB per kapita
		Meningkatnya perlindungan sosial terhadap penduduk miskin	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN KUALITAS KEAMANAN KETERTIBAN, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DALAM MENGHADAPI BENCANA.	Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks risiko bencana
		Meningkatnya cakupan penegakan perda dan perkada	Persentase penegakan Perda
		Menekan angka penyalahgunaan narkoba	Menurunnya kasus penyalahgunaan narkoba
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MENUJU TERCAPAINYA *GOOD GOVERNANCE*.	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
			Indeks Profesionalitas ASN

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKEADILAN.	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah
			Harapan lama sekolah
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya kualitas pembangunan responsif gender dan anak	Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap APBD
		Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA) terhadap APBD
			Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial *(Non Pemerintah)*
			Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural *(JPT, Administrator & Pengawas)* di lingkup Pemda.
	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Meningkatnya upaya penurunan angka kelahiran	*Total Fertility Rate* (TFR)

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Mengembangkan potensi pemuda dan olah raga	Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti
	Meningkatkan upaya pelestarian seni dan budaya daerah	Meninngkatnya pelestarian nilai-nilai seni budaya daerah	Persentase seni budaya yang dilestarikan
MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar ditopang dengan pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	Persentase jalan dalam kondisi baik
			Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Luasan Areal Kawasan Kumuh
			Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi
			Rasio rumah layak huni
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani
			Indeks kualitas air
			Indeks kualitas udara

4.2 Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 merupakan tahapan pembangunan ke-4 RPJPN 2005-2025 dan tahun ke-2 RPJMN (2020-2024). Prioritas dalam RKP Tahun 2021 adalah Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan Tema Pembangunan Nasional tahun 2021 adalah "Meningkatkan industri dan pariwisata di berbagai wilayah didukung oleh investasi".

4.2.1 Perubahan Tema Pembangunan

Mewabahnya Covid-19 di Indonesia, yang mulai terjadi sejak awal bulan Maret 2020, sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, sehingga diperlukan penyelarasan kebijakan pembangunan dalam rangka penanggulangan dampak pandemi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemik *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Beberapa hal penting yang terdapat dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pelonggaran batasan defisit anggaran (APBN) hingga tahun 2022 untuk kemudian dinormalkan kembali maksimal 3 persen PDB;
2. Penyesuaian belanja wajib di bidang kesehatan, anggaran dana desa, dan Dana Alokasi Umum;

3. Realokasi anggaran dan *refocusing* belanja kepada kegiatan penanggulangan Covid-19;
4. Peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha;
5. Penyesuaian kebijakan pembiayaan anggaran dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi Covid-19;

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan dampak Covid-19, menyebabkan adanya perubahan kebijakan pembangunan sehingga perlu dilakukan penyesuaian tema pembangunan yang tertuang dalam RKP Tahun 2021 menjadi lebih adaftif dan responsif terhadap wabah Covid 19 dan proses pemulihannya.

Tabel 4.5
Perubahan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021	PERUBAHAN TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2021
"Percepatan Pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur Perekonomian yang kokoh berlandaskan Keunggulan kompetitif di berbagai Wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan Berdaya saing"	"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"

Agenda pembangunan yang merupakan prioritas nasional tahun 2021 tetap mengacu pada RPJMN dengan melakukan penekanan pada beberapa prioritas pembangunan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.*
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

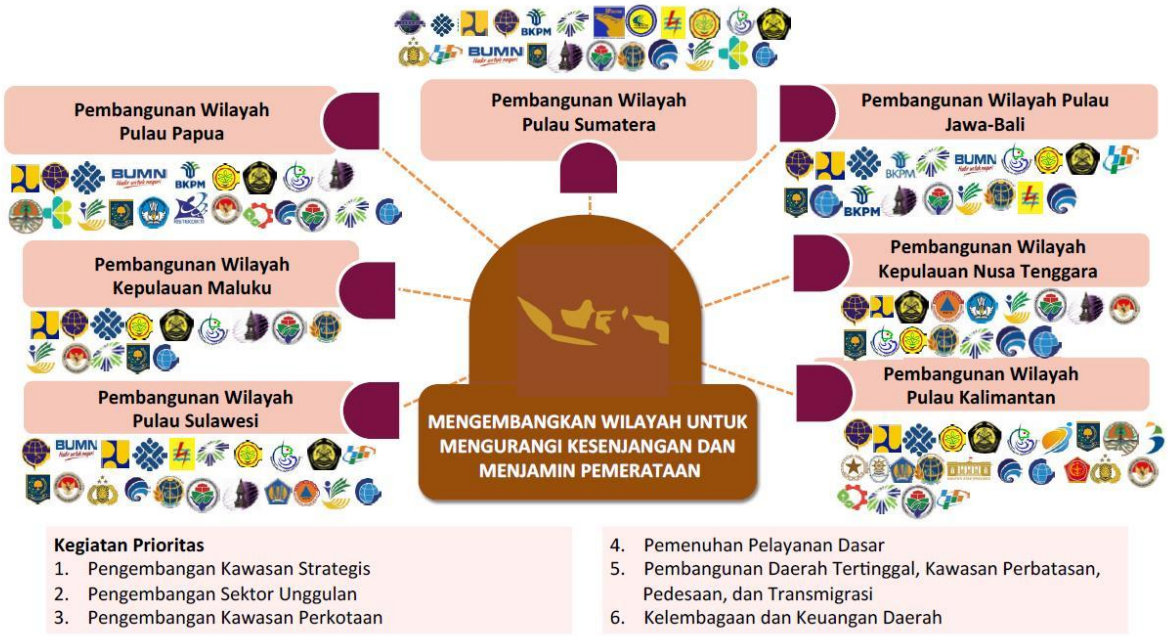
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.*
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.*
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.*
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

*Keterangan: *) Prioritas Nasional yang memperoleh penekanan di tahun 2021*

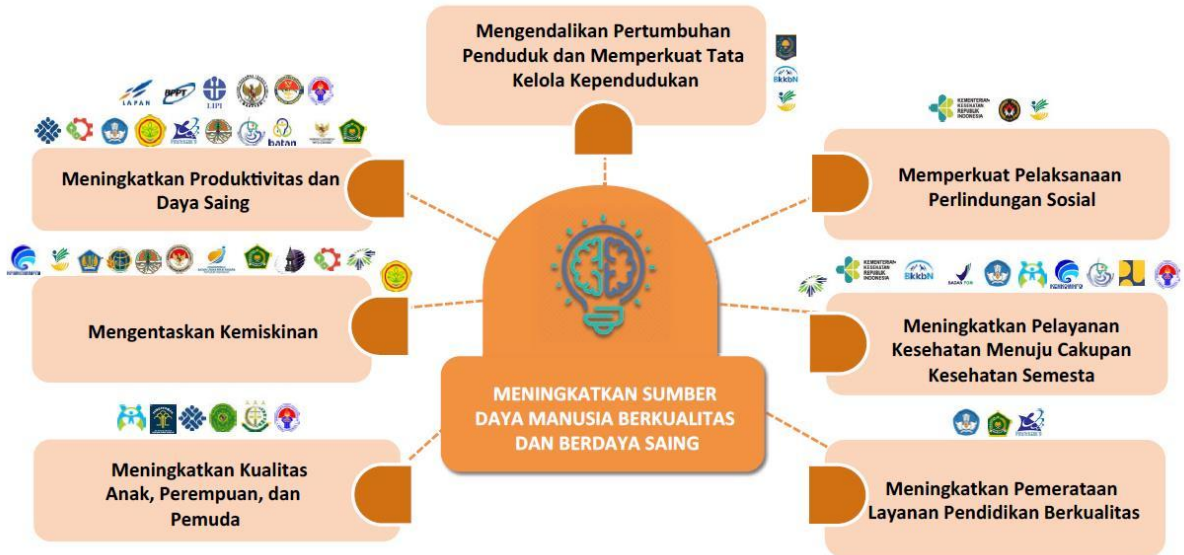
Gambar 4.1
Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan



Gambar 4.2
Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan



Gambar 4.3
SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Gambar 4.4
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Gambar 4.5
Infrastruktur Untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar



Gambar 4.6
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim



Gambar 4.7
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Perencanaan pembangunan daerah tidak dapat terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi. Perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan

nasional dan provinsi. Dengan berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 dan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, serta memperhatikan dan menyesuaikan dengan tema RKP Tahun 2021, telah ditetapkan kebijakan dan tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Keterkaitan Kebijakan Pembangunan dengan Perubahan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	PERUBAHAN TEMA PEMBANGUNAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021
"Mewujudkan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan SDM "	"Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"

Keterkaitan dan persandingan antara tema pembangunan Kota Pangkalpinang dengan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel 4.7
Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI TAHUN 2021	TEMA PEMBANGUNAN KOTA TAHUN 2021
"Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potensi Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar"	"Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"

dari persandingan tersebut terlihat bahwa Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang mendukung dan selaras dengan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan dan keselarasan tersebut khususnya

terletak pada kesadaran pentingnya pemberdayaan masyarakat guna melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang menurun akhir-akhir ini sebagai dampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah covid-19.

Keterkaitan dan persandingan antara Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel 4.8

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI (PPP)	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA (PPK)
PPN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PPP 1 Peningkatan Ekonomi Masyarakat	PPK 4 Pengembangan dan Penguatan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan PPK 5 Peningkatan Iklim Investasi
PPN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PPP 2 Pembangunan Agropolitan PPP 3 Pengembangan Pariwisata PPP 4 Pembangunan Bahari	PPK 6 Peningkatan Produktifitas, Daya Saing dan Potensi Komoditas Lokal Berbasis Ekonomi Kreatif
PPN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	PPP 5 Pembangunan Pendidikan PPP 6 Pembangunan Kesehatan PPP 7 Pembangunan Berdemokrasi	PPK 9 Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pengarusutamaan Gender
PPN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		PPK 10 Peningkatan Daya Saing dan Pelestarian Seni Budaya Daerah

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PPN)	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI (PPP)	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA (PPK)
PPN 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		PPK 1 Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
PPN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PPP 8 Pengendalian Lingkungan Hidup PPP 9 Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	PPK 3 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah Optimalisasi PPK 8 Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Serta Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PPK 10 Peningkatan Tata Kelola Birokrasi Dan Pelayanan Publik	PPK 2 Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi

Keterangan:

PPN : Prioritas Pembangunan Nasional

PPP : Prioritas Pembangunan Provinsi

PPK : Prioritas Pembangunan Kab/Kota

: Prioritas Nasional yang memperoleh penekanan di tahun 2021

Tabel 4.9

Prioritas Pembangunan dan Sasaran Kota Pangkalpinang Tahun 2021

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN : "Mewujudkan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pembangunan SDM "

TEMA PEMBANGUNAN : "Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
1	Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur bina marga dan perhubungan	Persentase jalan dalam kondisi baik (90%)	Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air	Presentase jalan yang di rehabilitasi (60%)	Dinas PU PR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Panjang jalan baru (30km)	
					Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang (40%)	
					Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (0%)	
					Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi (0%)	
				Program Tata Ruang	Jumlah RDTR yang tersusun (2 dokumen)	Dinas PU PR
					Jumlah RTBL yang tersusun (2 dokumen)	
					Persentase RTH publik wilayah perkotaan (14 dokumen)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
				Program Pertamanan dan Perkuburan	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Publik (100%)	Dinas Perkim
				Program pengembangan perumahan dan fasilitas umum	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman (100%)	
			Persentase Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik/ 93%	Program Pelayanan Perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (93%)	Dinas Perhubungan
					Persentase Layanan angkutan darat (90%)	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Luas Areal Kawasan Kumuh (5ha)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan (7%)	Dinas Perkim

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
			Rasio Rumah Layak Huni (91,50%)	Program pengembangan perumahan dan fasilitas umum	Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni (100%)	Dinas Perkim
			Persentase Rumah Tinggal Berakses Sanitasi (97,50%)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman (7%)	Dinas Perkim
				Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air	Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang	Dinas PU PR
					Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
2	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Percepatan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai AKIP (Predikat BB)	Prog. Peningkatan Sistem Penga-wasan Internal, Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (17 KEGIATAN)	Inspektorat
					Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB (30 %)	
				Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/informasi Daerah	Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD	BAPPEDA & LITBANG
					Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Predikat WTP)	Prog. Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	BAKEUDA
				Program Manajemen Aset	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	
				Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	Pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah	BAKEUDA dan OPD Penghasil PAD
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai 84)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indek kepuasan masyarakat (NILAI 4)	KECAMATAN BUKIT INTAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (85%)	
					Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (85%)	
					Indek Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan (nilai 100)	KECAMATAN GABEK
					Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik (100%)	KECAMATAN GERUNGGANG
					Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (60%)	KECAMATAN GIRIMAYA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (60%)	
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (60%)	
					Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (60%)	
					Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (60%)	KECAMATAN PANGKALBALAM
					Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (60%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (60%)	
					Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (60%)	
					Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (85%)	KECAMATAN RANGKUI
					Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik (100%)	KECAMATAN TAMANSARI
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (80%)	Dinas DUKCAPIL

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk (Rasio 1.047)	
					Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk (Rasio 870)	
					Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran (84%)	
					Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk (Rasio 750)	
					Cakupan Kepemilikan Akte Kematian (28%)	
					Cakupan Kepemikikan KTP (99,30%)	
					Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (100%)	
					Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (100%)	
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase propemperda yang dibahas;	Sekretariat Daerah
					Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD;	
					Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD;	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD);	
				Program Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca	Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan (0,64%)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Rasio judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan (rasio 1:2)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi (14%)	
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (179.836)	
					Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan (25.607)	
				Prog. Peningkatan Komunikasi, Informasi, Media Massa, Protokol	Presentase pelayanan komunikasi Informasi, dan Protokol	SEKRETARIAT DAERAH
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase OPD yang mendapatkan nilai Baik dalam Survey Kepuasan Masyarakat;	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelembagaan	
				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Dinas PMPTSP dan NAKER
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ (Nilai 3,30%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya (100%)	Dinas KOMINFO
					Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi (100%)	
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID aktif (100%)	Dinas KOMINFO
					Jumlah Layanan Informasi Publik yang Terlayani (100%)	
				Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	SEKRETARIAT DAERAH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
			Indeks Profesionalitas ASN/ Nilai (77,6 %)	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	BKPSDMD
					Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)	
					Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	
					Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	
					Persentase Pejabat struktural dan fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah	Meningkatnya Kualitas LH	Timbunan Sampah yang ditangani/ Persentase sampah yang tertangani/ (84%)	Program Pengendalian Persampahan	Presentase sampah terkelola dengan metode 3R (17%)	Dinas LH
			Indeks Kualitas Air (Indeks 71,70)		Persentase penanganan sampah perkotaan (80%)	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks 96,50)		Persentase sampah yang terangkut ke TPA (70%)	
			Indeks tutupan Lahan (Indeks 0,4)	Program Penataan Lingkungan Hidup	Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan (31%)	Dinas LH
					Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Nilai untuk mencapai Adipura (nilai 76)	
					Indeks Kualitas LH (indeks 78)	
					Indeks Kualitas Air (indeks 71,70)	
					Indeks Kualitas udara (indeks 96,50)	
					Indeks tutupan lahan (indeks 0.40)	
4	Pengembangan dan Penguatan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan	Peningkatan Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Pariwisata, Perdagangan , Jasa (15,10%)	Program Peningkatan Kepariwisataan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (3%)	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase meningkatnya PAD sektor pariwisata (2,3%)	
					Persentase penyelenggaraan even dalam rangka mempromosikan potensi wisata daerah	
					Persentase destinasi wisata dengan sarana dan fasilitas publik yang tersedia	
				Program Peningkatan Kualitas Perindustrian	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (10%)	Dinas KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
					Persentase jumlah industri yang mendapat fasilitas untuk peningkatan daya saing (37%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Penyusunan RPIK Kota Pangkalpinan	
					Tersedianya fasilitas saran dan prasarana industri / 1 jenis	
					Tersedianyan sistem informasi industri / 1 data/informasi	
				Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (40%)	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
					Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT (10%)	
				Program Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas UMKM	Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Baru (100%)	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
					Persentase peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) (4%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase usaha mikro dan kecil (36%)	
				Program Peningkatan Kualitas Perdagangan	Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan (20%)	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
					Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar (20%)	
					Persentase pemilik UTTP yang tertib niaga (20%)	
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi	Jumlah produksi perikanan budidaya (937.285 ton)	Dinas Pangan dan Pertanian
					Jumlah produksi perikanan tangkap (3.276 ton)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Angka konsumsi ikan masyarakat (53 kg/kapita/tahun)	
				Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Sarana BBIL yang direnovasi (5 unit)	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Jumlah Unit Sarana Yang di Beli (3 paket)	
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (97.000 ton/ kpt/ tahun)	Dinas Pangan dan Pertanian
					Ketersediaan energi per kapita (2.400 kkal/ kapita/ hari)	
					Ketersediaan protein per kapita (63 gr/ kapita/ hari)	
					Jumlah Cadangan Pangan (15 ton)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Skor 90)	
					Konsumsi Energi Perkapita (2.150 kkal/ kapita/ hari)	
					Konsumsi Protein Perkapita (57 gr/ kapita/ hari)	
					Persentase Pangan yang aman konsumsi (100%)	
				Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan	Jumlah produksi Jagung (61 ton)	Dinas Pangan dan Pertanian
					Jumlah produksi Nanas (2.300 ton)	
					Jumlah produksi Jahe Merah (2,5 ton)	
					Jumlah produksi Cabe (20 ton)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Jumlah produksi Daging (5.331 ton)	
					Jumlah produksi Telur (140 ton)	
					Jumlah produksi Susu (133.939 liter)	
					Jumlah populasi ternak (77.708 ekor)	
					Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan (1.700 ekor)	
5	Peningkatan Iklim Investasi	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Nilai Investasi (Rp. 40 M)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	2. Persentase realisasi Investasi (70%)	Dinas PMPTSP dan Naker
					Jumlah investor yang berinvestasi di Kota Pangkalpinang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
				Program peningkatan pelayanan perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan	
		Terkendalinya Laju Inflasi	Angka Inflasi (5,35%)	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase peningkatan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan (100 %)	SEKRETARIAT DAERAH
6	Peningkatan Produktifitas, Daya Saing dan Potensi Komoditas Lokal Berbasis Ekonomi Kreatif	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (4,95%)	Program Ketenagakerjaan	TPAK / 70%	Dinas PMPTSP dan NAKER
					TPAK perempuan / 40,5%	
					Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan / 70%	
					Rasio penduduk yang bekerja / 70%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Angka sengketa pengusaha dan pekerja / 52 kasus	
					Upah rata-rata per jam pekerja / 18.000	
					Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas / 76%	
				Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Sekretariat Daerah
7	Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Perlindungan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Perlindungan Sosial Terhadap Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan perlindungan sosial (41,50%)	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (10%)	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
				Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan (2,95%)	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial / (100%)	
					Terpenuhinya upaya Perlindungan dan Jaminan Sosial (100%)	
8	Optimalisasi Penanggulangan dan Mitigasi Bencana Serta Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya Keberdayaan dan Ketahanan Masyarakat Dalam Menghadapi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana (skor 109)	Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan mitigasi bencana	Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia	BPBD
					Persentase kelurahan siaga bencana	
					Persentase penanganan tanggap darurat	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	
					Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik	
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota 12 bulan	Satpol PP
					Persentase kelurahan memiliki kelompok kader siaga kebakaran	
					Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Jumlah upaya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	
					Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	
				Program Penanggulangan Banjir dan Genangan	Luas wilayah tergenang >2 kali setahun (40%)	Dinas PU PR
					Persentase kawasan abrasi yang tertangani (40%)	
					Persentase titik genangan dan banjir yang tertangani (40%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
		Meningkatnya Cakupan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda (98%)	Program Penegakan Perda, Perkada dan Pemeliharaan Trantibum	Persentase penegakan perda dan perkada	SATPOL PP
					Meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggar perda	
					Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	
					Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk	
					Angka gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani	
					Persentase anggota linmas yang terlatih dalam penanganan gangguan kemanan dan ketertiban	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
		Menekan Angka Penyalahgunaan Narkoba	Menurunnya kasus penyalahgunaan Narkoba (150 kasus)	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan,Kesehatan, dan Pengarusutamaan Gender	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (9,94 tahun) Harapan Lama Sekolah (12,96 tahun)	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/DIVtenaga kependidikan (64,36%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/DIV (93,96%)	
					Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/DIV (96,81%)	
					Persentase guru PAUD Formal yang memiliki sertifikat pendidik (26,30%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik (48,03%)	
					Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik (52,50%)	
					Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas 70 (8,34%)	
					Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SMP Nilai diatas 70 (32,93%)	
					Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran (24,28%)	
					Persentase guru SMP yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran (20,59%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
				Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun) (60,18%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun) (10,35%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A (1%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B (5,65%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C (9,65%)	
					Jumlah PAUD yang terakreditasi A (24%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi (23%)	
					Jumlah dokumen kurikulum PAUD (1%)	
					Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD (3%)	
					Jumlah dokumen kurikulum PNF (1%)	
					Angka Kelulusan Paket A (100%)	
					Angka Kelulusan Paket B (100%)	
					Angka Kelulusan Paket C (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
				Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	Persentase sekolah penerima BOP (100%)	Dinas Dikbud
				Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	Persentase sekolah penerima BOS (100%)	Dinas Dikbud
				Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (100%)	Dinas Dikbud
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (1,90%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (106,60%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD (106,20%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (105,50%)	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP (109,80%)	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD (88,40%)	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (80%)	
					Jumlah SD/MI yang terakreditasi A (52 sekolah)	
					Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A (18 sekolah)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Rata-rata nilai USBN SD (69,12)	
					Rata-rata nilai UN SMP (58,09)	
					Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (88,00%)	
					Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (88,00%)	
					Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (9 prestasi)	
					16. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (13 prestasi)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (72,74 tahun)	Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	Dinas Kesehatan
					Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (40%)	
					Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas (31%)	
					Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar (100%)	
				Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan	Prevalensi stunting pada balita (<20%)	
					Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita (<13%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (100%)	
					Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar (100%)	
					Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut (100%)	
					Persentase pelayanan kesehatan balita (100%)	
					Cakupan kunjungan bayi (100%)	
					Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Cakupan kelurahan siaga aktif (80%)	
					Persentase siswa kelas I - IX mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%)	
					Persentase pemanfaatan media promosi	
					Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (62%)	
					Persentase TTU yang memenuhi persyaratan (82%)	
					Persentase TPM yang memenuhi Persyaratan (82%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga (100%)	
					Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (48 per 100.000 Penduduk)	
					Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk (<1 Per 1000 penduduk)	
					Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosi (100%)	
					Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (100%)	
					Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar (23%)	
					Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar (42,7%)	
					Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan skring kesehatan sesuai standar (23,5)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi (100%)	
					Persentase kelurahan universal child immunization (UCI) (100%)	
					Persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan (100%)	
				Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (85%)	Dinas Kesehatan
					Cakupan SDM yang sesuai standar (5,20%)	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (100%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar (80%)	
					Persentase PIRT yang memiliki izin eda (100%)	
					Cakupan pengelolaan fasilitas pelayanan kefarmasian dan perbekalan farmasi (100%)	
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan responsif Gender dan Anak	Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG) Terhadap APBD (8,30%)	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score nilai KLA (70)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
			Rasio Anggaran Resfonsif Hak Anak (ARA) Terhadap APBD (0,90%)			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
		Meningkatnya Keterlibatan dan Partisipasi Perempuan dalam Berbagai Sektor Pembangunan	Jumlah perempuan sebagai profesional, teknisi dan manajerial (non pemerintah) (38 orang)	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score nilai KLA (70)	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
			Rasio perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT), Administrator dan Pengawas di lingkup Pemda (40,50%)			
		Meningkatnya Upaya Penurunan Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (1,9%)	Program Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif (1 tahun)	Dinas Kesehatan
					Contraceptive Prevalence *Rate Modern* (64,27%)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/TARGET	OPD PENGAMPU
					Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (Jumlah 2.224)	
10	Peningkatan Daya Saing dan Pelestarian Seni Budaya Daerah	Meningkatnya prestasi pemuda dan Olahraga	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti (93%)	Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga	Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti (96%)	Dinas Pariwisata
					Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti (93%)	
					Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan (9 buah)	
					Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan (11 buah)	
					Jumlah tempat pementasan seni budaya (4 buah)	

Sumber: RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023

Tabel 4.10

Rekapitulasi Daftar Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021

Pendukung Prioritas Nasional

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1	2	3	4	6	7
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
1.01	**PENDIDIKAN**				
1.01.20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Persentase guru PAUD formal yang memiliki kualifikasi S1/D IV tenaga kependidikan **(64,36%)**	23.395.414.203	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
			2. Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/D IV **(93,96%)**		
			3. Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/D IV **(96,81%)**		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			4. Persentase guru PAUD formal yang memiliki sertifikat pendidik **(26,30%)**		
			5. Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik **(48,03%)**		
			6. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik **(52,50%)**		
			7. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas 70 **(8,34%)**		
			8. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SMP Nilai diatas 70 **(32,93%)**		
			9. Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran **(24,28%)**		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			10.Persentase guru SMP yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran **(20,59%)**		
1.01.31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal	**1.** Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun) **(60,18%)**	2,039,012,036	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
			2. Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun) **(10,35%)**		
			3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A **(1%)**		
			4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B **(5,65%)**		
			5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C **(9,65%)**		
			6. Jumlah PAUD yang terakreditasi A **(24%)**		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			7. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi **(23%)**		
			8. Jumlah dokumen kurikulum PAUD **(1%)**		
			9. Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD **(3%)**		
			10. Jumlah dokumen kurikulum PNF **(1%)**		
			11. Angka Kelulusan Paket A **(100%)**		
			12. Angka Kelulusan Paket B **(100%)**		
			13. Angka Kelulusan Paket C **(100%)**		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.01.33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD	Persentase sekolah penerima BOP **(100%)**	75,000,000	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
1.01.34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)	Persentase sekolah penerima BOS **(100%)**	80,000,000	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
1.01.35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar (100%) 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan (1,90%) 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD (106,60%) 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD (106,20%) 5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (105,50%) 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP (109,80%)	11.976.871.400	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD (88,40%)		
			8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (80%)		
			9. Jumlah SD/MI yang terakreditasi A (52 sekolah)		
			10. Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A (18 sekolah)		
			11. Rata-rata nilai USBN SD (69,12)		
			12. Rata-rata nilai UN SMP (58,09)		
			13. Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (88,00%)		
			14. Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin (88,00%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			15. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (9 prestasi)		
			16. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional (13 prestasi)		
1.02	**KESEHATAN**				
1.02.41	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD	1. Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	50.677.456.693	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
			2. Persentase penduduk yang memanfaatkan Labkesda (40%)		
			3. Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas (31%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			4. Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar (100%)		
.02.42	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan	1. Prevalensi stunting pada balita (<20%)	1.494.942.950	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
			2. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada balita (<13%)		
			3. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Atenatal sesuai standar (100%)		
			4. Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar (100%)		
			5. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut (100%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			6. Persentase pelayanan kesehatan balita (100%)		
			7. Cakupan kunjungan bayi (100%)		
			8. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir (100%)		
			9. Cakupan kelurahan siaga aktif (80%)		
			10. Persentase siswa kelas I - IX mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%)		
			11. Persentase pemanfaatan media promosi		
			12. Cakupan kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (62%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			13. Persentase TTU yang memenuhi persyaratan (82%)		
			14. Persentase TPM yang memenuhi Persyaratan (82%)		
			15. Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga (100%)		
			16. Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (48 per 100.000 Penduduk)		
			17. Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk (<1 Per 1000 penduduk)		
			18. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) (100%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			19. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosi (100%)		
			20. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (100%)		
			21. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar (23%)		
			22. Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar (42,7%)		
			23. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan *skring* kesehatan sesuai standar (23,5)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			24. Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi (100%)		
			25. Persentase kelurahan *universal child immunization* (UCI) (100%)		
			26. Persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan (100%)		
1.02.43	DINAS KESEHATAN	Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	1. Cakupan kota yang memberikan pelayanan kesehatan (85%)	5.575.228.900	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
			2. Cakupan SDM yang sesuai standar (5,20%)		
			3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (100%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			4. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar (80%)		
			5. Persentase PIRT yang memiliki izin edar (100%)		
			6. Cakupan pengelolaan fasilitas pelayanan kefarmasian dan perbekalan farmasi (100%)		
1.03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				
1.03.52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air	1. Presentase jalan yang di rehabilitasi (60%)	61.623.537.900	PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
			2. Panjang jalan baru (30km)		
			3. Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang (40%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat (0%)		
			5. Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi (0%)		
1.03.53	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Penanggulangan Banjir dan Genangan	1. Luas wilayah tergenang >2 kali setahun (40%)	30.337.849.000	PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
			2. Persentase kawasan abrasi yang tertangani (40%)		
			3. Persentase titik genangan dan banjir yang tertangani (40%)		
1.03.54	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Tata Ruang	1. Jumlah RDTR yang tersusun (1 dokumen)	2.033.700.400	PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
			2. Jumlah RTBL yang tersusun		
			3. Persentase RTH publik wilayah perkotaan 13 dokumen)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1.04.16	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Program Lingkungan Sehat Perumahan	1. Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman 2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan (7%)	8,886,243,744	PN 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
1.04.45	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Program Pertamanan dan Perkuburan	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Publik (100%)	6.049.538.206	PN 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
1.04.46	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Program Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman (100%)	11.875.225.050	PN 1. Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah
1.05	**KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.05.30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1. Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 70% 2. Koordinasi pencegahan penyalahagunaan narkotka	1.128.976.670	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1.05.31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program pembinaan politik dalam negeri	Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi 70%	270,826,611	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
1.05.34	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana	1. Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia 2. Persentase kelurahan siaga bencana 3. Persentase penanganan tanggap darurat 4. Persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	4,558,114,500	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			5. Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik		
1.05.34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota 12 bulan	6,718,537,063	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
			2. Persentase kelurahan memiliki kelompok kader siaga kebakaran		
			3. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)		
			4. Jumlah upaya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran		
			5. Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.05.35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Program Penegakan Perda, Perkada dan Pemeliharaan Trantibum	1. Persentase penegakan Perda dan Perkada 2. Meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggar Perda 3. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 4. Rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk 5. Angka gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani 6. Persentase anggota Linmas yang terlatih dalam penanganan gangguan kemanan dan ketertiban	5,431,473,500	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
1.05.36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	60,000,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.05.37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur yang menaati peraturan yang berlaku	51,000,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1.05.38	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	39,000,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
1	**SOSIAL**				
1.06.64	DINAS SOSIAL	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial/100%	919,374,500	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
1.06.66	DINAS SOSIAL	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti (10%)	953,472,120	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
1.06.70	DINAS SOSIAL	Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Menurunnya angka kemiskinan (2,95%)	1,354,416,900	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				
2.07	**TENAGA KERJA**				
2.07.21	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Program Ketenagakerjaan	1. TPAK/70% 2. TPAK perempuan/40,5% 3. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan/ 70% 4. Rasio penduduk yang bekerja/70% 5. Angka sengketa pengusaha dan pekerja/52 kasus 6. Upah rata-rata per jam pekerja/18.000	470,053,500	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			7. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas/76%		
2.08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
2.08.21	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score nilai KLA (70)	995,027,500	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2.09	**PANGAN**				
2.09.16	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1. Ketersediaan pangan utama **(97.000 ton/ kpt/tahun)** 2. Ketersediaan energi per kapita **(2.400 kkal/kapita/hari)** 3. Ketersediaan protein per kapita **(63 gr/ kapita/ hari)** 4. Jumlah cadangan pangan **(15 ton)**	460,754,000	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) **(Skor 90)**		
			6. Konsumsi Energi Perkapita **(2.150 kkal/ kapita/hari)**		
			7. Konsumsi Protein Perkapita **(57 gr/kapita/hari)**		
			8. Persentase Pangan yang aman konsumsi **(100%)**		
2.10	**PERTANAHAN**				
2.10.19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Program Pertanahan	Persentase penyelesaian kasus tanah negara/100%	19,256,865,000	PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
2.11	**LINGKUNGAN HIDUP**				
2.11.25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengendalian Persampahan	1. Presentase sampah terkelola dengan metode 3R (17%)	17,870,022,809	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			2. Persentase penanganan sampah perkotaan (80%)		Bencana, dan Perubahan Iklim
			3. Persentase sampah yang terangkut ke TPA (70%)		
2.05.26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Penataan Lingkungan Hidup	1. Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan (31%)	2,811,364,670	PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
			2. Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan (100%)		
			3. Nilai untuk mencapai Adipura (nilai 76)		
			4. Indeks kualitas LH (indeks 78)		
			5. Indeks kualitas Air (indeks 65)		
			6. Indeks kualitas udara (indeks 85)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			7. Indeks tutupan lahan (indeks 0.30)		
2.12	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
2.12.15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil **(80%)** 2. Rasio penduduk Ber KTP persatuan penduduk **(Rasio 1.047)** 3. Rasio bayi berakte kelahiran per 1000 penduduk **(rasio 870)** 4. Cakupan kepemilikan akte kelahiran **(84%)** 5. Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk **(Rasio 750)** 6. Cakupan kepemilikan akte kematian **(28%)**	1,417,109,900	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			7. Cakupan kepemikikan KTP **(99,30%)**		
			8. Cakupan kememilikan Kartu Keluarga **(100%)**		
			9. Cakupan pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **(100%)**		
			10. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK **(100%)**		
2.13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
	KECAMATAN BUKIT INTAN	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Indek kepuasan masyarakat (angka: 4)	7,482,462,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (85%)		
			3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (80%)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (85%)		
	KECAMATAN GABEK	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Indek penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 2. Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	6.376.223.284	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	KECAMATAN GERUNGGANG	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik (100%)	6,564,422,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	KECAMATAN GIRIMAYA	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun (60%) 2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (60%) 3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (60%)	5,567,917,300	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (60%)		PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	KECAMATAN PANGKALBALAM	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun (60%)	5,630,534,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (60%)		
			3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (60%)		
			4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (60%)		
	KECAMATAN RANGKUI	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun (85%)	8,526,543,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			2. Indek kepuasan masyarakat (angka: 88)		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (85%)		
			4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (85%)		
	KECAMATAN TAMAN SARI	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	5,500,992,925	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
2.14.15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Program Keluarga Berencana	1. Cakupan peserta KB aktif **(1 tahun)**	1,456,664,900	PN 3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
			2. *Contraceptive Prevalence Rate Modern* **(64,27%)**		
			3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) **(Jumlah 2.224)**		
2.15	**PERHUBUNGAN**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
2.15.15	DINAS PERHUBUNGAN	Program Pelayanan Perhubungan	1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik **(91%)**	11,367,382,700	PN 5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
			2. Persentase layanan angkutan darat **(95%)**		
			3. Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan terbangun		
			4. Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ kondisi baik		
			5. Persentase menurunnya angka pelanggaran lalu lintas		
			6. Persentase LPJU yang berfungsi baik		
			7. Persentase jaringan jalan yang terlayani trayek angkutan		

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			8. Persentase pertumbuhan pendapatan daerah dari sektor perparkiran dan lainnya		
2.16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
2.16.30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase opd yang aktif dan update *website*-nya **(100%)** 2. Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral **(100%)** 3. Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah kota dengan pusat dan provinsi **(100%)**	2,430,298,726	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.16.31	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID aktif **(100%)** Jumlah layanan informasi publik yang terlayani **(100%)**	428,803,637	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.17	**KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
2.17.19	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi	1. Persentase koperasi aktif **(40%)** 2. Persentase koperasi yang melaksanakan RAT **(10%)**	196,660,000	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.17.20	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	Program Pertumbuhan dan Peningkatan Kualitas UMKM	1. Persentase pertumbuhan pelaku usaha baru **(100%)** 2. Persentase peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM) **(4%)** 3. Persentase usaha mikro dan kecil **(36%)**	72,211,500	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.18	**PENANAMAN MODAL**				
2.18.16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Persentase realisasi investasi **(70%)**	388,777,500	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			2. Jumlah investor yang berinvestasi di Kota Pangkalpinang		Berkeadilan
2.18.20	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	1. Persentase perizinan yang diterbitkan 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	657,913,791	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				
2.19.22	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga	1. Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti **(96%)** 2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti **(93%)**	5,289,319,000	PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
2.20	**STATISTIK**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
2.20.16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1. Persentase OPD yang aktif dan *update website* nya **(100%)** 2. Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral **(100%)** 3. Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah kota dengan pusat dan provinsi **(100%)**	498.134.780	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
2.21	**PERSANDIAN**				
2.21.16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1. Persentase OPD yang aktif dan *update website* nya **(100%)** 2. Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral **(100%)**	72,973,463	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			3. Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah kota dengan pusat dan provinsi **(100%)**		
			4. Persentase pelaksanaan persandian daerah yang sesuai ketentuan **(100%)**		
2.22	**KEBUDAYAAN**				
2.22.21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda	1. Jumlah cagar budaya yang dilindungi **(36 cagar budaya)**	2.417.891.800	PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
			2. Jumlah seni dan budaya yang dilestarikan **(9 buah)**		
			3. Jumlah sejarah dan tradisi yang dilestarikan **(11 buah)**		
			4. Jumlah tempat pementasan seni budaya **(4 buah)**		
2.23	**PERPUSTAKAAN**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
2.23.22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Program Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca	1. Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan **(0,64%)**	409,515,700	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			2. Rasio judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan **(rasio 1:2)**		
			3. Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi **(14%)**		
			4. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun **(179.836)**		
			5. Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan **(25.607)**		
2.24	**KEARSIPAN**				
2.24.19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Program Penyelenggaraan Kearsipan	1. Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola **(5,2%)**	318,165,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			2. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan **(87%)** 3. Persentase SDM kearsipan yang memiliki kompetensi **(36%)**		dan Transformasi Pelayanan Publik
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				
3.25.31	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi	1. Jumlah produksi perikanan budidaya **(937.285 ton)** 2. Jumlah produksi perikanan tangkap **(3.276 ton)** 3. Angka konsumsi ikan masyarakat **(53kg/kapita/tahun)**	2.352.332.500	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.25.32	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota	1. Jumlah unit sarana BBIL yang direnovasi **(5 unit)**	0	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			2. Jumlah unit sarana yang di beli **(3 paket)**		Berkeadilan
3.26	**PARIWISATA**				
3.26.18	DINAS PARIWISATA	Program Peningkatan Kepariwisataan	1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan (3%) 2. Persentase meningkatnya PAD sektor pariwisata (2,3%) 3. Persentase penyelenggaraan even dalam rangka mempromosikan potensi wisata daerah 4. Persentase destinasi wisata dengan sarana dan fasilitas publik yang tersedia	3.656.481.000	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.27	**PERTANIAN**				
3.27.25	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan	1. Jumlah produksi Jagung **(61 ton)**	1,395,730,000	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			2. Jumlah produksi Nanas **(2.300 ton)**		Berkualitas dan Berkeadilan
			3. Jumlah produksi Jahe Merah **(2,5 ton)**		
			4. Jumlah produksi Cabe **(20 ton)**		
			5. Jumlah produksi Daging **(5.331 ton)**		
			6. Jumlah produksi Telur **(140 ton)**		
			7. Jumlah produksi Susu **(133.939 liter)**		
			8. Jumlah populasi ternak **(77.708 ekor)**		
			9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan **(1.700 ekor)**		
3.30	**PERDAGANGAN**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
3.30.21	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	Program Peningkatan Kualitas Perdagangan	1. Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan **(20%)** 2. Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar **(20%)** 3. Persentase pemilik UTTP yang tertib niaga **(20%)**	11.002.000.698	PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
3.31	**PERINDUSTRIAN**				
3.31.23	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	Program Peningkatan Kualitas Perindustrian	1. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah **(10%)** 2. Persentase jumlah industri yang mendapat fasilitas untuk peningkatan daya saing **(37%)** 3. Penyusunan RPIK Kota Pangkalpinang 4. Tersedianya fasilitas saran dan prasarana industri/1 jenis	1,540,905,755	PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			5. tersedianyan sistem informasi industri/ 1 data/informasi		
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				
4.01	**PERENCANAAN PEMBANGUNAN**				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/informasi Daerah	1. Persentase Program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD 2. Persentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD 3. Persentase usulan kegiatan Musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD 4. Persentase hasil data infrastruktur pengembangan wilayah SDA dan LH yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	5,370,622,971	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
4.02	**KEUANGAN**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
	BADAN KEUANGAN DAERAH	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah 2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja	8,706,615,646	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	BADAN KEUANGAN DAERAH	Program Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	1. Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah 2. Meningkatnya jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	1,641,165,000	
4.03	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Program Kepegawaian Daerah	1. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 2. Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)	3,571,153,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
			3. Persentase pegawai \dengan penilaian prestasi kerja baik		
			4. Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian		
			5. Persentase Pejabat struktural dan fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi		
4.04	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Program Penelitian dan Pengembangan	1. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	1.516.672.200	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
			2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti		
4.05	**PENGAWASAN**				

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
	INSPEKTORAT DAERAH	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.245.936.100	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase terpenuhinya kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional	330,700,000	
4.06	**SEKRETARIAT DAERAH**				
	SEKRETARIAT DAERAH	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang dilaksanakan	3,483,719,000	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	112,630,000	

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
		Program Peningkatan Kerjasama Daerah	Persentase meningkatnya kerjasama daerah	5,483,275,000	
		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan	1,130,000,000	
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	1,531,887,000	
		Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Beragama	Persentase meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pembinaan kerukunan agama	10,516,663,000	
		Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol	Persentase meningkatnya komunikasi dan informasi serta media massa dan protokol	3,973,529,497	

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
		Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah	5,919,302,000	
		Program Penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	Persentase meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan rakyat	1,711,808,100	
		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase peningkatan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	300,000,000	
		Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	Persentase peningkatan pengembangan BUMD, perencanaan, pengkajian, pembinaan, monitoring	220,000,000	
		Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	Persentasenya pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan	50,000,000	

NO	URUSAN/OPD PENANGGUNGJAWAB	PROGRAM	OUTCOME/ TARGET	PAGU KEGIATAN	MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL (PN)
		Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi	336,220,000	
4.07	**SEKRETARIAT DEWAN**				
	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		29,439,606,481	PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.3 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals)* sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs.

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara *(universal)*, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memastikan terlaksananya pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola yang inklusif sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam dokumen *Transforming Our World* : *The Agenda for Sustainable Development* pada tahun 2015. 17 SDGs memiliki target yang berhubungan dengan agenda pembangunan daerah, dan sebagai bagian dari prioritas nasional dan komitmen internasional, maka SDGs harus terintegrasi kedalam pembangunan daerah. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah daerah memegang kunci dalam menghubungkan SDGs dengan masyarakat. Pemerintah daerah berperan dalam mengkoordinasikan integrasi SDGs kedalam kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan

tantangan di daerah masing-masing. Perlu ada keselarasan antara RPJMD dengan SDGs, serta perlu ditentukan indikator SDGs yang sesuai dengan agenda pembangunan daerah.

4.4 Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Tahun 2021

Tantangan pembangunan di tahun 2021 tidak terlepas dari beberapa isu yang mengemukakan yang terjadi hampir di seluruh Wilayah Tanah Air. Keberhasilan program pembangunan pada tahun 2021, dipengaruhi dengan penanganan isu strategis yang ada saat ini. Beberapa isu yang kita menghadapi adalah:

Isu yang kesatu adalah pandemi Covid-19, kasus Covid-19 terkonfirmasi positif di Kepulauan Bangka Belitung khususnya di Kota Pangkalpinang relatif rendah dibandingkan jumlah kasus di provinsi-provinsi lain di Wilayah Barat. Sampai saat ini, risiko Kota Pangkalpinang terhadap penularan Covid-19 juga termasuk sedang. Namun demikian tetap diwaspadai mengingat Kota Pangkalpinang merupakan pintu keluar masuk arus penumpang di Pulau Bangka, maka diperlukan pemantauan yang ketat disertai disiplin yang tinggi dari segenap masyarakat untuk menjalankan *physical distancing* dan untuk menjalankan arahan pemerintah tentang pembatasan sosial. Dampak negatif pandemi ini dirasakan hampir di semua bidang, terutama dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keberhasilan kita mengatasi penyebaran virus ini akan menjadi kunci bagi pemulihan sosial ekonomi di wilayah Kota Pangkalpinang. Jika kita bisa mengatasi pandemi ini dengan cepat, maka faktor-faktor produksi tidak terlalu lama menganggur atau

rusak sehingga roda perekonomian bisa segera berputar dengan kapasitas penuh.

Isu yang kedua, Perkembangan perekonomian secara umum di Pulau Bangka, sedang mengalami transformasi, bergeser dari perekonomian berbasis pertambangan kearah perekonomian yang didorong industri pariwisata. Proses hilirisasi juga mulai berkembang dengan sedang tumbuhnya kawasan industri yang mengolah pasir silika dan timah. Terkait dengan hal ini, mengingat Kota Pangkalpinang merupakan pintu utama keluar masuk arus barang dan penumpang di Pulau Bangka, maka proses transformasi ini perlu diimbangi dengan percepatan pembangunan infrastruktur pendukung perekonomian dan pemberdayaan masyarakat guna menggali potensi yang ada di Kota Pangkalpinang.

Isu yang ketiga, Peningkatan kualitas pelayanan dasar sangat penting untuk mendorong pengembangan kualitas SDM. Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, kualitas kesehatan (fisik dan psikis), kepribadian dan kepercayaan diri, tingkat kesejahteraan hidup dan ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Pendidikan dan kesehatan merupakan suatu upaya dalam proses pengembangan SDM. Pembangunan sumberdaya manusia khususnya di bidang pendidikan perlu ditingkatkan guna mengimbangi permintaan dan penawaran pasar kerja lokal maupun global. Fokus yang perlu ditangani adalah peningkatan partisipasi sekolah di tingkat dasar ke tingkat menengah dan pendidikan informal yang berhubungan dengan keterampilan atau keahlian kerja. Di samping itu, penyiapan dan pemberdayaan UMKM juga sama pentingnya, melalui pembinaan yang optimal, inovasi, promosi dan juga manajemen yang baik. Dengan arah ini kita

berharap masyarakat lokal bisa berpartisipasi aktif dan menerima manfaat dari transformasi industrialisasi di Kepulauan Bangka Belitung umumnya dan Kota Pangkalpinang khususnya.

Kasus pandemi yang saat ini terjadi, menimbulkan tekanan yang luar biasa pada pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan kita. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan apresiasi terhadap para tenaga medis dan paramedis, penyediaan peralatan dan perlengkapan pelayanan alat kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD). Peningkatan pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan daerah diperlukan guna mengantisipasi kemungkinan adanya tekanan yang sama di masa yang akan datang.

Terkait sektor pemerintahan, peningkatan kualitas SDM juga mempengaruhi peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik perlu didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal, serta ketersediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, SDM sebagai kunci keberhasilan kinerja harus mendapatkan perhatian utama. Kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat akan dapat dicapai apabila SDM yang terlibat langsung dalam pelayanan adalah SDM yang potensial, kompeten, integritas dan inovatif. Disamping itu, perlu pula diperhatikan tingkat kesejahteraan pegawai mengingat memiliki kaitan yang strategis dalam pemberian pelayanan berkualitas.

Berdasarkan isu strategis yang mengemuka di Kota Pangkalpinang, maka kebijakan untuk tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui:

a. melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur publik dan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat,
b. mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan, serta mendorong investasi,
c. meningkatkan pelayanan dasar yang meliputi pembangunan sumberdaya manusia khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial,
d. memperkuat kapasitas daerah dalam penyediaan sistem kesehatan daerah, ketahanan bencana, serta jaring pengaman sosial.

Tabel 4.11

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2021 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Sustainable Developement Goals (SDGs)

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
1	**Mengakhiri kemiskinan di manapun dan dalam semua bentuk**	Peningkatan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan PMKS.	Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial	Menurunnya Angka Kemiskinan	2,95 %	DINAS SOSIAL
			Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD	Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar	Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	88 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KBUDAYAAN
				Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	88 %	
			Program pengembangan perumahan dan fasilitas umum	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman (Pembangunan /rehabilitasi RTLH)	100%	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
2	**Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan**	Pengembangan komoditas unggulan, inovasi produk dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan.	Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan	Jumlah produksi Jagung	61 ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Jumlah produksi Nanas	2.300 ton	
				Jumlah produksi Jahe Merah	2,5 ton	
				Jumlah produksi Cabe	20 ton	
				Jumlah produksi Daging	5.331 ton	
				Jumlah produksi Telur	140 ton	
				Jumlah produksi Susu	133.939 liter	
				Jumlah populasi ternak	77.708 ekor	
				Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	1.700 ekor	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	97.000 ton/ kpt/ tahun	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
				Ketersediaan energi per kapita	2.400 kkal/ kapita/ hari	
				Ketersediaan protein per kapita	63 gr/ kapita/ hari	
				Jumlah Cadangan Pangan	15 ton	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor 90	
				Konsumsi Energi Perkapita	2.150 kkal/ kapita/ hari	
				Konsumsi Protein Perkapita	57 gr/ kapita/ hari	
				Persentase Pangan yang aman konsumsi	100%	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi	Jumlah produksi perikanan budidaya	937.285 ton	
				Jumlah produksi perikanan tangkap	3.276 ton	
				Angka konsumsi ikan masyarakat	53 kg/kapita/tahun	
		Peningkatan mutu layanan kesehatan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) serta pemenuhan dan penyediaan bahan pangan yang memenuhi unsur gizi berimbang	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan	Persentase TTU yang memenuhi persyaratan	82%	DINAS KESEHATAN
				Persentase TPM yang memenuhi Persyaratan	82%	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
3	**Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia**	Peningkatan mutu layanan kesehatan dengan penguatan pelayanan kesehatan primer (primary health care) serta pemenuhan dan penyediaan bahan pangan yang memenuhi unsur gizi berimbang	Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/ BLUD	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	100 %	DINAS KESEHATAN
				Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	40%	
				Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas	31 %	
			Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan	Prevalensi *stunting* pada balita	<20%	DINAS KESEHATAN
				Prevalensi Kekurangan Gizi *(underweight)* pada balita	<13%	
				Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	
				Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar	100%	
				Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Persentase pelayanan kesehatan balita	100%	
				Cakupan kunjungan bayi	100%	
				Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	
				Cakupan kelurahan siaga aktif (80%)	80 %	
				Persentase siswa kelas I - IX mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (100%)	100 %	
				Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	62%	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	
				Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	48 per 100.000 Penduduk	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk	<1 Per 1000 penduduk	
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%	
				Persentase pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkulosi*	100%	
				Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	
				Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	23%	
				Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	42,7%	
				Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan *skring* kesehatan sesuai standar	23,5	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi	100%	
				Persentase kelurahan universal child *immunization* (UCI)	100%	
				Persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan	100%	
			Program Peningkatan Mutu Bidang Kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	85 %	DINAS KESEHATAN
				Cakupan SDM yang sesuai standar	5,20 %	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 %	
				Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	80%	
				Persentase PIRT yang memiliki izin edar	100 %	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Cakupan pengelolaan fasilitas pelayanan kefarmasian dan perbekalan farmasi	100 %	
4	**Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua**	Pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, tata kelola, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.	Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)	60,18 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun)	10,35 %	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A	1 %	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B	5,65 %	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C	9,65 %	
				Jumlah PAUD yang terakreditasi A	24 %	
				Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi	23 %	
				Jumlah dokumen kurikulum PAUD	1 %	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD	3 %	
				Jumlah dokumen kurikulum PNF	1 %	
				Angka Kelulusan Paket A	100 %	
				Angka Kelulusan Paket B	100 %	
				Angka Kelulusan Paket C	100 %	
			Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	100 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	1,90 %	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	106,60 %	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD	106,20 %	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (105,50%)	105,50 %	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP	109,80 %	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	88,40%	
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	80%	
				Jumlah SD/MI yang terakreditasi A	52 sekolah	
				Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A	18 sekolah	
				Rata-rata nilai USBN SD	69,12	
				Rata-rata nilai UN SMP	58,09	
				Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	9 prestasi	
				Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	3 prestasi	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
5	**Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**	Percepatan pemenuhan anggaran *responsive gender* dan anak guna menyelesaiakan isu strategis gender dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran *responsive gender* yang meluas akuntable dan sinergis.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Score nilai KLA	70	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
6	**Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua**	Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur dengan prioritas pada peningkatan aksesibilitas dan pemerataan infrastruktur	Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air	Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang	40%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang	40%	
				Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat		
		Peningkatan dan penataaan kualitas lingkungan serta permukiman.	Program pengembangan perumahan dan fasilitas umum	Persentase rumah tinggal memiliki akses sanitasi	97,50 %	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
7	**Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua**					
8	**Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua**	Peningkatan kualitas pariwisata dengan prioritas pada pengembangan kerjasama paket wisata dengan daerah lain, dan pengembangan destinasi wisata.	Program Peningkatan Kepariwisataan	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	3%	DINAS PARIWISATA
		Pengembangan kompetensi dan daya saing tenaga kerja, pengembangan pelatihan dan pembinaan kewirusahaan, pengembangan kerjasama tripartit.	Program ketenagakerjaan	TPAK	70%	DINAS PMPTSP DAN NAKER
				TPAK perempuan	40,5%	
				Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	
				Rasio penduduk yang bekerja	70%	
				Upah rata-rata per jam pekerja	18.000	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	76%	
		Perbaikan, peningkatan kualitas, dan pemberian kemudahan pelayanan dan penanaman modal.	Program peningkatan pelayanan perizinan	Persentase perizinan yang diterbitkan	100 %	DINAS PMPTSP DAN NAKER
		Intensifikasi promosi dan *monitoring* serta evaluasi dalam bidang investasi.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase realisasi Investasi	70%	DINAS PMPTSP DAN NAKER
9	**Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi**	Peningkatan dan pengembangan Infrastruktur dengan prioritas pada peningkatan aksesibilitas dan pemerataan infrastruktur	Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air	Presentase jalan yang di rehabilitasi	60%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Panjang jalan baru	20 km	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
10	**Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara**					
11	**Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan**	Peningkatan dan penataaan kualitas lingkungan serta permukiman.	Program pengembangan perumahan dan fasilitas umum	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman	100%	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
12	**Memastikan pola konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan**	Meningkatkan daya dukung lingkungan dengan prioritas pada mitigasi dan penanganan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Program Pengendalian Persampahan	Presentase sampah terkelola dengan metode 3R	17%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Persentase penanganan sampah perkotaan	80%	
				Persentase sampah yang terangkut ke TPA	70%	
13	**Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya**	Peningkatan kapasitas masyarakat dan seluruh stakeholder dalam menghadapi ancaman bencana.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan Mitigasi Bencana	Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia	80 %	BPBD
				Persentase kelurahan siaga bencana	60 %	
				Persentase penanganan tanggap darurat	100 %	
				Persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	100 %	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
				Persentase obyek terdampak bencana yang tertangani dengan baik	65%	
			Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota 12 bulan	100 %	SATPOL PP
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial	100%	
14	**Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan**					
15	**Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan,**	Meningkatkan daya dukung lingkungan dengan prioritas pada mitigasi dan penanganan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Program Penataan Lingkungan Hidup	Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan	31%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan	100%	

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati			Nilai untuk mencapai Adipura	Nilai 76	
				Indeks Kualitas LH	Indeks 78	
				Indeks Kualitas Air	Indeks 65	
				Indeks Kualitas udara	Indeks 85	
				Indeks tutupan lahan	Indeks 0.30	
16	**Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan**	Peningkatan perlindungan, produktivitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu dan PMKS.	Program Rehabilitasi Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	10%	DINAS SOSIAL
		Penataan SAKIP	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	20 %	INSPEKTORAT DAERAH

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
	inklusif di semua level.	Perbaikan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan	100 %	SEKRETARIAT DAERAH
		Perbaikan tata laksana asset dan tanah daerah.	Program Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah	Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	100 %	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Peningkatan penerapan standar pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik pemerintah daerah.	Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indek kepuasan masyarakat	angka	KECAMATAN BUKIT INTAN
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	85%	
				Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	85%	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indek Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan		KECAMATAN GABEK
				Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik		

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerint2ahan yang baik	100%	KECAMATAN GERUNGGANG
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	60%	KECAMATAN GIRIMAYA
				Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	60%	KECAMATAN PANGKALBALAM
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	60%	
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indek kepuasan masyarakat	Angka 88	KECAMATAN RANGKUI
				Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (85%)		
			Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik		KECAMATAN TAMAN SARI

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM INDIKATOR *(OUT COME)*	TARGET	PERANGKAT DAERAH
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase PPID aktif	100 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
				Persentase OPD yang aktif dan update websitenya	100 %	
17	**Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan**					

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2021 disusun berdasarkan program prioritas dengan mempertimbangkan evaluasi dan rancangan teknokratis (sinkronisasi pusat-provinsi-kota), serta aspirasi dan kepentingan masyarakat, melalui proses pemeringkatan prioritas dari yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program prioritas, adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah dan merupakan program prioritas yang baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal.

Program dan kegiatan prioritas tahun 2021 merupakan operasionalisasi dari prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018-2023, yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan. Program dan kegiatan prioritas tersebut nantinya akan menjadi acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan

Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021. Selain itu juga sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021.

Pelaksanaan perencanaan Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun kelima belas dari Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Tahun 2007-2025, dengan arah kebijakan yang akan dituju oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

NO.	FAKTOR INTERNAL
1.	Hubungan profesionalisme kerja antara DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang
2.	Daya dukung utilitas dasar seperti jaringan listrik dan air bersih
3.	Kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban dan keamanan seperti narkoba, tingkat kejahatan
4.	Kejelasan dan ketersediaan TUPOKSI di setiap dinas Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
5.	Peran pengusaha di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang
6.	Ketersediaan jaringan teknologi informasi seperti internet dan telepon
7.	Alokasi anggaran untuk program yang dijalankan oleh dinas
8.	Kesesuaian jabatan struktural dengan ketersediaan SDM
9.	Tingkat kepastian hukum bagi para investor
10.	Partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Pangkalpinang
11.	Pembinaan sentra pelayanan jasa oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang
12.	Penanganan kasus-kasus sengketa lahan seperti penyelesaian lahan sengketa dan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang
13.	Jumlah PNS dan alokasi dana yang mendukung aktifitas PNS di Kota Pangkalpinang
14.	Eksternalitas pembangunan di Kota Pangkalpinang (Kemiskinan, Pedagang Kaki Lima, Rumah Liar dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan)
15.	Ketersediaan dana operasional untuk mendukung aktivitas DPRD Kota Pangkalpinang (Proposal dari LSM, Penyambutan Tamu, Pansus , dan lain-lain)
16.	Emansipasi perempuan di dalam pembangunan Kota Pangkalpinang
17.	Dampak permasalahan sampah di Kota Pangkalpinang
18.	Pengendalian Banjir di Kota Pangkalpinang

Untuk prioritas pembangunan 5 tahun ketiga adalah:

NO.	BIDANG	PRIORITAS
1.	Kerjasama	Mencakup kerjasama antar dinas dan kerjasama antar-pemerintah daerah
2.	Ekonomi	1. Daya dukung utilitas 2. Kelayakan dan kesinambungan program dan alokasi anggaran 3. Mengurangi dampak eksternalitas pembangunan 4. Penanganan lingkungan hidup
3.	Peran dan Kontribusi	Tahap *empowerment,* peranan pelaku pembangunan selain pemerintah yaitu: pengusaha, wanita dan partisipasi masyarakat secara umum di dalam proses pembangunan agar manfaat dan keuntungan dari keberhasilan pembangunan dapat terus terjaga dan tetap berkesinambungan
4.	Pemerintah	1. Peningkatan sistem penjenjangan karir yang baik dengan tupoksi yang jelas 2. Memperhatikan kebutuhan pelayanan publik 3. Alokasi anggaran untuk pemerintah dan DPRD harus tetap terjaga dengan baik
5.	Keamanan dan eksternalitas negatif	Diperlukan sebuah supremasi hukum yang tegas untuk menindak pelaku kejahatan tersebut
6.	Sistem Informasi	Jaringan informasi yang berkualitas dan baik untuk mendukung kegiatan perekonomian Kota Pangkalpinang yang sebagian besar digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan

Indikasi rencana program Tahun 2021 berdasarkan prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2021, yang mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 guna mendukung pembangunan secara menyeluruh dapat dikelompokan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, serta 8 (delapan) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.

Kebijakan pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah: "Pembenahan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan

Pembangunan SDM" dengan tema pembangunan RKPD 2021 adalah **"Percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"** dengan prioritas pembangunan seperti yang telah diuraikan pada Bab 4, dilaksanakan dengan program prioritas sebagai berikut:

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2021

5.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Isu strategis urusan pendidikan di Kota Pangkalpinang antara lain adalah 1)masih adanya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang kondisinya tidak baik, baik kerusakan berat maupun ringan; 2) masih ditemukannya kasus anak tidak melanjutkan sekolah karena putus di masa studi; 3) menurunnya persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs ; 4) Masih adanya pendidik yang belum memenuhi kualifikasi S1/D4.

Tujuan yang hendak dicapai dari urusan Pendidikan adalah Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan PAUD, PNF dan DIKDAS yang berkualitas merata dan terjangkau. Sasarannya adalah Tersedia dan terjangkaunya akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Non Formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah.

Program-program yang akan dilaksanakan dalam urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yaitu:1) APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60,18%; 2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan 1,9%; 3)Persentase Sarana prasarana PAUD dalam kondisi baik 80%; dan 4)Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A 14,97%.

b. Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan Pendidikan Dasar

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yaitu: 1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar sebesar 100%; 2) Persentase Sarana Prasarana SD dalam kondisi baik sebesar 89%; 3) Persentase Sarana Prasarana SMP dalam kondisi baik sebesar 74%; 4)Persentase satuan DIKDAS yang terakreditasi A sebesar 60%; 5)Persentase sekolah hijau minimal tingkat provinsi sebesar 10%; 6)Angka Putus Sekolah (APS) SD sebesar 0,02%; 7)Angka Putus Sekolah (APS) SMP sebesar 0,17%; 8) Angka Kelulusan SD sebesar 100%; 9) Angka Kelulusan SMP sebesar 100%; 10) Angka melanjutkan Siswa SD sebesar 100%; 11) Angka melanjutkan Siswa SMP sebesar 100%; 12) Persentase Capaian SPM Pendidikan sebesar 100%.

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2020 yaitu APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 60,18%; Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan 1,9%; Persentase Sarana prasarana PAUD dalam kondisi baik 80%; dan Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A 14,97%.c.

c. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yaitu: 1) Persentase guru PAUD,PNF yang berkualifikasi S1/DIV sebesar 40,85%; 2) Persentase guru PAUD,PNF yang bersertifikat pendidik sebesar 26,30%; 3) Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV sebesar 94,88%; 4) Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik sebesar 49,48%; 5) Persentase hasil uji kompetensi guru PAUD nilai di atas 70 sebesar 25,95%; 6) Persentase hasil uji guru kompetensi guru DIKDAS di atas 70 sebesar 16,32%.

d. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan di Kota Pangkalpinang Tahun 2021 yaitu Persentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS/BOP sebesar 100%.

2. Kesehatan

Isu strategis urusan kesehatan di Kota Pangkalpinang adalah 1) berfluktuasinya kasus Covid 19 di Kota Pangkalpinang; 2) masih ditemukannya kasus kematian

ibu melahirkan bayi dan balita ; 3) masih adanya Prevalensi balita pendek dan sangat pendek *(stunting)*; 4) masih berfluktuasinya Angka kesakitandan Angka kematian DBD ; 5) belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 5) masih belum semua penduduk memiliki akses sanitasi dasar (Jamban keluarga, penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum.

Dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat akan mempengaruhi peningkatan jumlah kunjungan masyarakat difasilitas kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, balita, lansia, usia produktif melalui peningkatan upaya kesehatan masyarakat, peningkatan sarana prasarana kesehatan, peningkatan promosi dan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat (germas), dan pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga (PISPK).

Indikator kinerja daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Kota Pangkalpinang Tahun 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5.1

Penetapan Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	40
2.	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	150
3.	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4
4.	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	6
5.	Prevalensi gizi buruk	%	<1,5
6.	Prevalensi TB per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	115
7.	Prevalensi stunting pada balita	%	<20
8.	Prevalensi kekurangan gizi *(underweight)* pada balita	%	<13
9.	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
10.	Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar	%	100
11.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100
12.	Persentase pelayanan kesehatan balita	%	100
13.	Cakupan Kunjungan bayi	%	100
14.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100
15.	Cakupan kelurahan siaga aktif	%	80
16.	Persentase TPM yang memenuhi persyaratan	%	82
17.	Persentase TTU yang memenuhi persyaratan	%	82
18.	Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	%	62
19.	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	100
20.	Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	48
21.	Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	<1
22.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	100
23.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100
24.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100
25.	Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	%	23
26.	Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	%	42,7
27.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan skring kesehatan sesuai standar	%	23,5
28.	Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi <24 jam	%	100
29.	Persentas kelurahan *universal child immunization* (UCI)	%	100
30.	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	%	95
31.	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas	%	32
32.	Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar	%	100
33.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	100
34.	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	%	80

Indikator-indikator tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terbagi ke dalam tiga program kerja sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pelayanan Bidang Kesehatan
b. Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/BLUD
c. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Bidang Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Beberapa permasalahan di urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (perpipaan PDAM, PAMSIMAS dan DAK); 2) namun masih terdapat ruas jalan di Kota Pangkalpinang dalam kondisi rusak; 3) masih terdapat jembatan di Kota Pangkalpinang dalam kondisi yang memerlukan peningkatan; 4) belum adanya rencana tata ruang wilayah Kota Pangkalpinang yang *up to date* yang sesuai dengan kondisi perkembangan kota; 5) belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air

   Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase Jalan Kota Kondisi Baik sebesar 57,5%, Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik sebesar 85%, Persentase rumah tangga dengan akses air bersih sebesar 90%.

b. Program Penanggulangan Banjir dan Genangan

   Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Luas wilayah tergenang >2 kali setahun sebesar 20%.

c. Program Tata Ruang

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase luas RTH Publik sebesar 14%, Persentase kesesuaian pemanfataan ruang dengan rencana tata ruang sebesar 84%.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) masih terbatasnya lahan yang tersedia untuk pemakaman; 2)belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) perumahan dan permukiman; 3)belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak; 4) masih ada rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum mendapatkan penanganan; 5)belum semua wilayah permukiman memiliki PSU (Prasarana Sarana Utilitas).

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pertamanan dan Perkuburan

Kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian indikator *outcome* adalah: Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman; Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwa yang meninggal; Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman; Pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau; Penebangan dan Pemangkasan pohon; Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau; Pemeliharaan Alun-alun Taman Merdeka; Penataan dan Pemeliharaan Taman Sari Kota Pangkalpinang; Pemutakhiran Data Pohon Milik Pemerintah; Penyusunan Dokumen Lingkungan; Penyusunan DED Spot Taman di Kawasan Hutan Tua Tunu; Penyusunan DED Spot Taman di Areal *Chinese Town*; Penyusunan DED Spot Taman di Kampong Muslim.

b. Program Pengembangan Perumahan dan Fasilitas Umum

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu luas areal kawasan kumuh sebesar 5%, persentase rumah tinggal berakses sanitasi sebesar 97,5%, rasio rumah layak huni sebesar 91,5%.

c. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu persentase rumah tinggal berakses sanitasi sebesar 97,5%.

d. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat, yang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan dasar, yaitu: 1) Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota, dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebesar 100%; 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni sebesar 100%

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah ; 2)perlunya perhatian yang serius terhadap bencana yang terjadi di Kota Pangkalpinang; 3)masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pangkalpinang.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang merupakan urusan yang dilaksanakan oleh

3 (tiga) Perangkat Daerah yang berbeda, yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bendaca Daerah (BPBD), dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol). Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

I. Satpol PP

a. Program Penegakan Perda, Perkada dan Pemeliharaan Trantibum

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase Penegakan PERDA sebesar 98%.

b. Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran sebesar 100% dan Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama 13 menit.

II. BPBD

Program Penyelenggaraan Penanggulangan dan mitigasi Bencana, Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Cakupan penanganan bencana sebesar 100% dan Indeks Kapasitas Bencana dengan nilai “SEDANG”.

III. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Fungsi pembinaan ideologi dan politik dengan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Bina ideologi dan wawasan kebangsaan

b. Pembinaan Politik Dalam Negeri

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut:

a. Program Administrasi Perkantoran

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase pelaksanaan surat menyurat, sumber daya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase pelaksanaan pemiliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 5 dokumen.

6. Sosial

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) tingginya PMKS Kota Pangkalpinang sebanyak 11.109 orang pada tahun 2018; 2) meningkatnya angka kemiskinan Kota Pangkalpinang karena terjadinya Covid 19; 3) masih ada keluarga miskin di Kota Pangkalpinang yang belum mendapatkan bantuan.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penanganan kemiskinan dan pemberdayaan sosial

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Jumlah PKMS yang terdata dalam BDT sebanyak 13 orang, Persentase keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan KUBE sebesar 15,02%.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Jumlah Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 55%.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase korban bencana mendapatkan bantuan tanggap darurat sebesar 100%.

5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) meningkatnya tingkat pengangguran di Kota Pangkalpinang karena dampak COVID 19; 2) cakupan pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan berfluktuatif; 3) tingginya kasus konflik industrial ; 4) minimnya anggaran untuk pelatihan tenaga kerja yang berbasis kompetensi maupun kewirausahaan.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Ketenagakerjaan, Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70%, TPAK Perempuan sebesar

50%, Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan sebesar 70 %, Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja maksimal sebanyak 52 kasus, Rasio penduduk yang bekerja sebesar 70%, Upah rata-rata per jam pekerja sebesar Rp 18.000,00, Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 76%.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) belum semua perangkat daerah menyusun program dan kegiatan *responsive gender* sebagai bentuk implementasi PUG di daerah ; 2) Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif; 3) menurunnya persentase perempuan yang bekerja di lembaga pemerintahan; 4) masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase perempuan di legislatif sebesar 16,67%, Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO 92,86%, Status KLA yang dicapai **"Ninda"**.

3. Pangan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah belum optimalnya penganekaragaman pangan masyarakat Kota Pangkalpinang. Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 90, Ketersediaan pangan

utama sebanyak 97.000 ton, Ketersediaan protein per kapita 63 gr/kapita/hari, Jumlah cadangan pangan 15 ton.

4. Pertanahan

Isu strategis yang masih menjadi permasalahan di bidang pertanahan di Kota Pangkalpinang adalah masih banyak lahan milik Pemkot Pangkalpinang yang belum bersertifikat dan masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/sengketa tanah di masyarakat karena tampal batas dan tumpang tindih hak kepemilikan.

Dalam rangka menyelesaikan isu strategis yang menjadi permasalahan pertanahan di Kota Pangkalpinang dilaksanakan program Pertanahan. Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase penyelesaian kasus tanah negara sebesar 100%, dan Persentase tanah milik Pemkot yang bersertifikat sebesar 80%.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1)Pengurangan sampah perkotaan di Kota Pangkalpinang menunjukkan kinerja yang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun; 2) presentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik kawasan perkotaan di Kota Pangkalpinang masih rendah; 3) tingginya volume sampah yang menyebabkan TPA di Kota Pangkalpinang tidak dapat lagi menampung sampah dari masyarakat.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Persampahan

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase sampah yang tertangani 84%, Persentase sampah terangkut ke TPA 70%, Persentase sampah terkelola dengan metoda 3R 17%.

b. Program Penataan Lingkungan Hidup

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Indeks Kualitas LH dengan skor 78, Indeks Kualitas Air dengan skor 71,7, Indeks Kualitas Udara dengan skor 96,5, Indeks Tutupan Lahan dengan skor 0,4, Persentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan sebesar 31%.

c. Program Kampung Iklim

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1)kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus KTP; 2) kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran; 3) masih minimnya penduduk yang mengurus akta kematian; 4) masih minimnya penduduk yang mengurus akta perkawinan.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi kependudukan. Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Cakupan kepemilikan KTP sebesar 99,3%, Cakupan Kepemilikan KK sebesar 100%, Rasio Bayi Berakte kelahiran per 1000 penduduk sebesar 870, Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 84%, Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk sebesar 1.047, Rasio Perkawinan yang tercatat di Capil per 1000 penduduk sebesar 765.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1)jumlah Pos Yandu Aktif belum optimal; 2) tingkat prestasi LPM di Kota Pangkalpinang tergolong rendah; 3) jumlah kelompok binaan LPM belum optimal; 4) masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 34%.

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai indeks 80, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebesar 80%, dan Persentase sarana prasarana publik yang terbangun sebesar 95%. Ketiga target tersebut akan dicapai melalui program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

   Merupakan program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dengan indikator kinerja peningkatan jumlah kader pemberdayaan masyarakat dengan target 6 kelompok.

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

   Merupakan program yang dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Kecamatan di Kota Pangkalpinang

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Pangkalpinang adalah 1) masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam rangka mengendalikan kelahiran; 2) cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB masih dibawah target nasional. Ini menunjukkan kecilnya keikutsertaan masyarakat (pasangan usia subur) dalam program KB; 3) belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang Ketahanan Keluarga; 4)masih

kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKL dan BKR). Upaya penanganan permasalahan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana, dengan fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Laju pertumbuhan penduduk (LPP) ditekan sebesar 3,15, dan *Contraceptive Prevalence Rate Modern* sebesar 64,27.

9. Perhubungan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) masih adanya kondisi fasilitas perlengkapan jalan yang dalam kondisi rusak; 2) masih ada jaringan jalan yang belum terlayani angkutan umum; 3) kondisi angkutan umum (angkot) di Kota Pangkalpinang sebagian besar sudah terlalu lama dan memerlukan peremajaan; 4) menurunnya jumlah angkutan umum, dikarenakan perkembangan angkutan *online* seperti *Grab;* 5) masih banyak lampu penerangan jalan di Kota Pangkalpinang yang belum terpasang; 6) tidak berfungsinya terminal antar kota seperti di terminal Selindung.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Perhubungan

Tujuan yang ingin dicapai Perangkat Daerah penyelenggara urusan perhubungan adalah meningkatkan kinerja penyelengaraan Perhubungan, yang ditunjukan dengan capaian Predikat A pada Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN). Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan tahunan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. Predikat penghargaan tersebut dapat diraih dengan pencapaian sasaran antara lain meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan, dan meningkatkan pelayanan

angkutan umum bagi masyarakat. Tahapan pencapaian yang dilalui adalah: Meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan melalui (1) Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (2) Kerjasama/koordinasi dalam peningkatan keselamatan lalu lintas (3) Pemeliharaan prasarana Perhubungan; Meningkatkan kinerja angkutan umum melalui: (1)Penataan trayek (2)Pembinaan sopir angkutan umum (3) Pengujian kelaikan angkutan umum.

Disamping hal tersebut, terkait dengan peningkatan kinerja penyelengaraan perhubungan, diperlukan upaya penataan dan pengelolaan perpakiran serta meningkatkan pendapatan daerah. Upaya peningkatan penataaan parkir untuk menunjang keamanan dan kenyamanan lalu lintas, dilakukan melalui: (1) Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Petugas Parkir (2) Pengawasan dan Penertiban Parkir Liar (3)Penambahan Titik Parkir Berdasarkan Kajian.

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 adalah: (1) Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sebesar 93%, dan (2) Persentase Layanan angkutan darat sebesar 90%.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) belum terkelola dan terpadunya sistem informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik; 2) belum semua OPD di Kota Pangkalpinang yang memiliki website aktif dan *update*; 3) kurangnya koordinasi antar OPD dalam pembangunan website di masing-masing OPD; 4) aplikasi pengaduan informasi publik yang dibuat oleh pemerintah pusat (lapor.id) masih belum dapat beroperasi secara optimal.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 8,7%, Persentase OPD yang aktif dan *update* websitenya 100%, dan Persentase Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aktif sebesar 100%.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) semakin menurunnya jumlah koperasi di Kota Pangkalpinang; 2) masih ditemukan koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat; 3) masih rendahnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang masuk dalam kategori sehat; 4) lambatnya peningkatan status usaha mikro ke posisi usaha kecil.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase Koperasi Aktif sebesar 40%.

b. Program Pertumbuhan dan kualitas UMKM

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 4%, dan Persentase Usaha Mikro dan Kecil sebesar 36%.

12. Penanaman Modal Daerah

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) masih rendahnya promosi investasi di Kota Pangkalpinang, kegiatan promosi investasi hanya di lakukan 1 tahun sekali; 2) belum optimalnya kerjasama penanaman modal.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

   Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase realisasi investasi sebanyak 70 investor.

b. Program peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan serta penanganan pengaduan perizinan

   Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dengan skor 94.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) kurangnya sarana dan prasarana olahraga; 2) belum optimalnya pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga; 3) kurangnya minat pemuda dalam mengikuti kompetisi.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Rasio Prestasi Pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional terhadap ajang yang diikuti 96%, Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti sebesar 94%.

14. Statistik

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat. Hal tersebut menjadikan kesulitan dalam mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral sebesar 100%, adanya Buku Kota Pangkalpinang Dalam Angka, dan Buku PDRB Kota Pangkalpinang.

15. Persandian

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal serta pemanfaatan persandian dalam penyelengggaraan pemerintahan daerah belum optimal, hal ini selain karena masalah internal, secara eksternal banyak OPD yang belum memahami manfaat persandian. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah dengan Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi sebesar 85%.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) minimnya gelaran festival seni dan budaya dan misi kesenian yang diselenggarakan; 2) belum optimalnya Perlindungan dan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman; 3) belum optimalnya pelestarian sejarah dan tradisi, dan belum optimalnya pelestarian dan pemajuan seni budaya.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya dan Permuseuman, Seni Budaya, Sejarah dan Tradisi

Fokus dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu cagar budaya yang teregistrasi secara nasional sebanyak 14 jenis.

b. Program Pengembangan Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda

Fokus dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu seni budaya yang dilestarikan sebanyak 10 jenis.

17. Perpustakaan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) belum optimalnya peningkatan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah; 2) koleksi buku yang dimiliki perpustakaan masih terbatas. Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca dengan fokus dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan sebesar 0,64%, Rasio judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan sebesar 1:2, dan Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi sebesar 14%.

18. Kearsipan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku; 2) jumlah arsip in aktif yang berhasil dikelola mengalami penurunan; 3) ketersediaan SDM arsiparis yang masih sangat terbatas.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Kearsipan dengan fokus dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola sebesar 5,2%.

5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) menurunnya produksi perikanan tangkap; 2) menurunnya produksi perikanan budidaya; 3) belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi

   Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Jumlah Produksi Perikanan Tangkap sebanyak 3.276 ton, dan Angka Konsumsi Ikan Masyarakat sebanyak 53,24 kg/kapita/tahun.

b. Program Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota

c. Program Pengadaan sarana dan Prasarana Pemberdayaan usaha Nelayan skala Kecil

d. Program pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil

   Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Jumlah Produksi Perikanan Budidaya sebesar 937.285 ton.

2. Pariwisata

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan; 2) menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara; 3) belum optimalnya kualitas

infrastruktur pendukung pariwisata; 4) belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan sebesar 3%, dan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD sebesar 2%. Kedua target tersebut akan dicapai melalui program-program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kepariwisataan
b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3. Pertanian

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan; 2) berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan, Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Jumlah produksi Jagung sebanyak 61 ton, Jumlah produksi Nanas sebanyak 2.300 ton, Jumlah Produksi Daging sebanyak 5.331 ton, Jumlah Produksi Telur sebanyak 140.28 ton, dan Jumlah produksi ternak 77.708 ekor.

4. Perdagangan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah menurunnya kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Perdagangan

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 10%, dan Kontribusi sektor Perindustrian dalam PDRB sebesar 12%.

5. Perindustrian

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku industri kecil; 2) belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri; 3) pertumbuhan jumlah industri di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan; 4) belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Perindustrian

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebesar 10%, Kontribusi sektor Perindustrian dalam PDRB sebesar 12%.

5.1.4.Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah masih adanya ketidak sinkronan antara program di dalam dokumen RPJMD dan program dalam RKPD, serta masih adanya ketidak sinkronan antara kegiatan di dalam dokumen APBD dan kegiatan dalam RKPD.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/informasi Daerah dengan fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase program

RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD sebesar 98,5%, Presentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD sebesar 98%, dan Persentase usulan kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD 46%.

2. Keuangan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota Pangkalpinang dan anggaran belanja APBD belum terserap secara optimal.

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi) sebesar 26%, Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 2% dan Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 87%. Ketiga target tersebut akan dicapai melalui program-program yang akan dilaksanakan berikut:

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Program Manajemen Aset
c. Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah 1) belum optimalnya penyimpanan arsip digital pegawai, dikarenakan belum lengkapnya data pegawai yang masuk dari ASN; 2) masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi ; 3) masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti diklat (struktural dan managerial) peningkatan kompetensi.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah dengan fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 67,62%, Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM dengan nilai 63,5, Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik 90%, dan Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian sebesar 80%.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang menjadi isu strategis di Kota Pangkalpinang adalah minimnya inovasi di Kota Pangkalpinang dikarenakan tidak terdata dan terdokumentasinya Inovasi yang ada di OPD, serta belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan dengan fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 80%, dan Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti sebesar 30%.

5. Sekretariat Daerah

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Persentase OPD yang mendapatkan nilai Baik dalam *Survey* Kepuasan Masyarakat sebesar 86%. Target tersebut akan dicapai melalui program-program yang akan dilaksanakan berikut:

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
2. Program Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Program Peningkatan Pratisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa;
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;

5. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan dan Pembinaan Kerukunan Agama;
6. Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat;
7. Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi serta Media Massa dan protokol;
8. Program Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Program Pengembangan dan Pembinaan Lembaga Ekonomi dan Keuangan;
10. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan;
11. Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan , Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi;
12. Program Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan;
13. Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi
14. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
15. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan.

6. Sekretariat Dewan

Permasalahan yang menjadi isu strategis adalah 1) belum optimalnya Ranperda yang disiapkan OPD sehingga memperlambat pembahasan; 2) belum semua agenda terjadwal secara resmi dalam pembahasan Bamus; 3) beberapa penyelenggaraan rapat-rapat dewan belum tepat waktu; 4) belum pernah dilakukan penilaian pelayanan setwan terhadap DPRD.

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD sebesar 81%, Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), dan Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD. Target tersebut akan dicapai melalui program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

7. Inspektorat

Permasalahan yang menjadi isu strategis adalah 1) respon OPD terhadap Rekomendasi BPK kurang Optimal; 2) respon OPD terhadap hasil reviu yang dilakukan inspektorat kurang optimal; 3) OPD kurang kooperatif dalam merespon kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan pengendalian internal; 4) perubahan ketentuan untuk evaluasi, sehingga menyulitkan melakukan penyesuaian.

Fokus kegiatan dalam rangka mendukung target indikator tahun 2021 yaitu Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pangkalpinang dengan Nilai BB, Tingkat Maturitas SPIP pada Level III, Tingkat Kapabilitas APIP pada Level III. Target tersebut akan dicapai melalui program:

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

5.2 Telaahan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam Pasal 54 huruf a, menyebutkan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rencana APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.

Kemudian Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam Pasal 78 ayat (1) huruf i, menyebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Selanjutnya pada ayat (2), menyebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, disampaikan pokok-pokok pikiran DPRD terhadap RKPD Tahun 2021, yang terakumulasi dari berbagai sumber diantaranya dari usulan, harapan dan kepentingan masyarakat serta aspirasi berkembang di tingkat komisi-komisi sebagai representasi dari tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan.

5.2.1 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Berdasarkan Hasil Reses

1) Penanganan permasalahan banjir dan air genangan yang belum teratasi, dan masih diperlukan pembangunan fisik berupa *drainase*, gorong-gorong, saluran air limbah masyarakat, saluran primer, sekunder, anak sungai yang dapat mengalir sampai ke sungai dan muara sungai. Hal ini menjadi program prioritas utama bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk penanggulangannya.
2) Upaya penanggulangan sampah untuk diprioritaskan, mengingat volume sampah semakin meningkat. Untuk itu perlu kajian-kajian yang mendalam terhadap teknis pengelolaan maupun pengolahan sampah yang selama ini dinilai masih sangat lemah, untuk itu perlu dianggarkan biaya pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomis dari pengolahan sampah tersebut agar dapat dikerjasamakan dengan pihak-pihak terkait serta dikerjakan swakelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
3) Penyediaan lahan TPU/perkuburan, untuk menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah, hal ini masih dikeluhkan atau dipertanyakan oleh masyarakat sejauhmana respon pemerintah daerah terhadap lahan perkuburan, karena sudah melebihi kapasitas/*overload*.

4) Lampu penerangan jalan masih dikeluhkan karena banyak yang putus/mati, hal ini akan berdampak pada rawannya kecelakaan dan kejahatan di malam hari, terutama pada jaringan jalan kolektor sekunder maupun jaringan jalan lokal dan jalan lingkungan, sehingga perlu anggaran pemeliharaan lampu. Kemudian pemasangan baru pada titik tertentu pada jaringan jalan lingkungan.
5) peningkatan jalan setapak pada jalan lingkungan dan pengaspalan jalan, pembangunan trotoar dan taman.
6) Penyediaan air bersih, seperti pembuatan sumur-sumur bor pada daerah rawan air bersih.
7) Pembangunan non-fisik, berupa pelayanan publik yang masih belum optimal dirasakan oleh masyarakat terutama terhadap pelayanan kesehatan menyangkut BPJS, program rumah layak huni, bantuan pada kegiatan Posyandu dan PAUD, fasilitas guru mengaji/ustadz/ustadzah, honor RT/RW. untuk itu perlu dievaluasi terhadap pelayanan publik.
8) Masih kurangnya sarana dan prasarana publik, RTH, Ruang Ramah Publik, sarana prasarana olahraga remaja dan sarana budaya.
9) Peningkatan masif lapangan kerja dan peluang usaha pemuda di Pangkalpinang.
10) Rencana pembangunan jembatan dari Kampung Opas menuju Pasir Putih dengan *fisibilities studies* dan DED-nya serta rencana realisasinya.
11) Penguatan pengawasan terhadap penertiban umum serta tambang-tambang liar yang beroperasi di wilayah Kota Pangkalpinang.
12) Program pengentasan kemiskinan, dengan memberikan peluang lapangan pekerjaan yang diprioritaskan bagi warga yang berdomisili di

Pangkalpinang. Data kemiskinan terakhir 10.270 orang, sementara untuk data pengangguran 4.700 orang. Dengan adanya peluang kerja dapat mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran di Kota Pangkalpinang.

13) Pembangunan saran penghubung (jembatan) sebagai infrastruktur dalam perataan pembangunan di wilayah Pangkalpinang yang terisolir atau terjadinya kesenjangan pembangunan akibat jarak dan jangkauan dengan pusat kota terlalu jauh.
14) Lebih fokus dalam perhatian dan penanganan terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta bentuk nyata dalam melakukan pembinaan.
15) Perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah terhadap produk-produk lokal yang semestinya dijadikan paten atau HAKI, sehingga menjadi *trade mark* daerah atau produk unggulan daerah.

5.2.2 Aspirasi Masyarakat

Aspirasi masyarakat berdasarkan hasil kegiatan reses oleh DPRD Kota Pangkalpinang di Daerah Pemilihan (DAPIL) Tahun 2019, yang menampung dan menghimpun usulan dari berupa pembangunan fisik, sebagai berikut:

1. DAPIL I: Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Girimaya

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
A.	**Pemasangan Lampu Jalan**	
1.	Belum ada lampu jalan di Jl. Basuki Rahmad Kelurahan Batu Intan (depan Gg. Intan II) gelap pada malam hari	Dinas Perhubungan
2.	Pemasangan lampu jalan di 3 (tiga) titik di tikungan Jl.Mustika II/SMK PGRI 3 di RT.05/RW.01, gelap dan rawan kecelakaan	Dinas Perhubungan

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
3.	Pemasangan Lampu jalan di Kel. Semabung Lama RT.12/RW.03 sebanyak 23 titik	Dinas Perhubungan
4.	Pemasangan/perbaikan lampu jalan di RT.002/RW.001, Jl. Kota Demak (depan rumah Mantri Robba'i), Kelurahan Pasir Putih, lampu dalam keadaan mati	Dinas Perhubungan
5.	Pemasangan lampu jalan di Kelurahan Sinar Bulan dan di jalan Jl. Perkuburan Sinar Bulan	Dinas Perhubungan
6.	Pemasangan lampu jalan di Jl. Batu Kaldera dan Jl. Mustika Kelurahan Semabung Lama	Dinas Perhubungan
B.	**Pembangunan Jalan/Pengaspalan Jalan/Cor Jalan/conblok**	
1.	Perbaikan jalan Perkuburan Aek Ati, Kelurahan Air Mawar	DPUPR
2.	Lapen di Jalan H. Sulaita RT.02/RW.01 Kel. Air Itam	DPUPR
3.	Rehab Gang Merah Delima I berikut bandar dan perbaikan bandar jalan Lidah tanah (sambungan)	Dinas Perkim
4.	Pengaspalan jalan yang terputus di Jl. Batu Nirwana menuju Jl. Mustika II/SMK PGRI 3 di RT.05/RW.01.	DPUPR
5.	Peningkatan jalan setapak di Jl. Depati Hamzah (depan Hotel Griya Tirta), Jl.Mustika depan Perumahan Puri tembus ke RT.13/03 Kel.Semabung Lama	DPUPR
6.	Pengaspalan Jalan di Jalan Perbakin Dalam 1, panjang sekitar 65 meter di RT.07/RW.02 Kelurahan Sriwijaya.	DPUPR
C.	**Drainase/Bandar/Got/Pengerukan**	
1.	Pengerukan Sungai Pedindang yang melewati Kelurahan Batu Intan dan Kelurahan Bintang, untuk mengatasi banjir	DPUPR
2.	Pembangunan drainase/pembuangan air dari Depan Ponpes HS Air Itam hingga CV.Dona, untuk mengantisipasi Air Genangan/Banjir di Perumahan Bhayangkara. (RT.02 Kel.Temberan)	PUPR
3.	Hotmik di Jl. Lidah Tanah sepanjang 200 m x 5 m, RT.02/RW.01 Air Itam	PUPR
4.	Rehab drainase di Komplek Sampur.	Dinas Perkim
5.	Pemasangan Plat Dekker di Ruas jalan Zamrud (depan Gereja BHM) RT.12/W.03 Kel. Semabung Lama	PUPR
6.	Peninggian Penggalian DAM Sungai/Talud (lanjutan), ukuran lebih kurang 100 meter di RT.005/RW.003, Kelurahan Pasar Padi	PUPR
7.	Pelebaran Got/selokan di RT.003 Kel. Pasar Padi	Dinas Perkim
8.	Pembangunan saluran drainase di Jl. Perbakin Dalam 1, panjang sekitar 100 meter, di RT.07/RW.02 Kelurahan Sriwijaya	Dinas Perkim

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
D.	**Pembangunan Gedung/Kantor**	
1.	Percepatan pembangunan Kantor Kelurahan Air Mawar	DPUPR
2.	Percepatan pembangunan Kantor Kelurahan Sinar Bulan	DPUPR
3.	Penyediaan lapangan Bola di Kelurahan Air Mawar	DPUPR
E.	**Sumur Bor**	
1.	Pembuatan Sumur Bor sebanyak 3 (tiga) buah di RT.02/01 Kel. Air Itam (sarana air bersih)	DPUPR
2.	Sarana air bersih (Sumur Bor) di RT.09/RW.03 Kel. Sriwijaya	DPUPR
F.	**Plat Penomoran Rumah**	
1.	Pemasangan Plat Nomor Rumah di Kelurahan Semabung Lama	Dinas Perkim
2.	Pemasangan papan nama jalan/Gang dan nomor rumah di RT. 10/RW.02 Kel. Semabung Lama	Dinas Perkim
3.	Pemasangan plat nomor rumah di RT.06/RW.03 Kel. Air Itam	Dinas Perkim
G.	**Rumah Tidak Layak Huni dan Masalah Sampah**	
1.	Pembangunan RUTILAHU di RT.02/RW.01 Kelurahan Air Itam, sebanyak 3 (tiga) rumah	Dinas Perkim
2.	Pengadaan Tong Sampah Plastik di Kelurahan Air Itam	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Pengadaan Tong/drum Sampah di Kelurahan Semabung Lama	Dinas Lingkungan Hidup

2. DAPIL II: Kecamatan Rangkui

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
A.	**Pemasangan Lampu Jalan**	
1.	Lampu jalan putus/mati, di Jl. Liong Boen RT.06/RW.02 Kel. Melintang	Dinas Perhubungan
2.	Lampu jalan tidak memadai, di Jl. Gajah Mada 2 RT.01/RW.01 Kelurahan Gadah Mada	Dinas Perhubungan

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
3.	Lampu jalan yang belum terealisasi, di Kelurahan Pintu Air	Dinas Perhubungan
4.	Lampu jalan yang belum terealisasi, di RT.09/RW.03 Kelurahan Keramat	Dinas Perhubungan
5.	Lampu jalan di sepanjang Jalan Cengkeh, Kelurahan Pintu Air	Dinas Perhubungan
B.	**Pengaspalan Jalan/Hotmix/Jembatan**	
1.	Perbaikan kembali jalan setapak di Gg. Kuini I dan Kuini II RT.01/RW.01 Kel. Gajah Mada	Dinas Perkim
2.	Pengaspalan Jalan di TK. Kartika (Asrama Kodim) di RT.01/RW.01 Kelurahan Asam	DPUPR
3.	Pemasangan tanda Zebra Cross di Depan Masjid Al-Mustaqim RT.01/RW.01 Kelurahan Gajah Mada, karena sering terjadi Kecelakaan	Dinas Perhubungan
C.	**Persampahan**	
1.	Sampah yang menumpuk di RT.06/RW.02, Kelurahan Melintang karena motor sampah tidak masuk ke lingkungan tersebut	Dinas Lingkungan Hidup
D.	**Drainase/Bandar/Got**	
1.	Pembuatan drainase di Jl.Nanas RT.07/RW.03 Kelurahan Gajah Mada (sampai sekarang belum disrespon)	Dinas Perkim
2.	Pelebaran/penggalian Bandar di Jl. Depati Amir RT.06/RW.02 Keluahan Gajah Mada (depan Kantor Polisi Militer), bila hujan air tumpah kejalan, buntu/sampah	Dinas Perkim
3.	Perbaikan saluran air /Bandar di Jl. Bina Marga RT.04 dan RT.06 (belakang PDAM) Kelurahan Asam, buntu tidak mengalir ke PDAM	Dinas Perkim
E.	**Pinjam Pakai**	
1.	Rumah dinas Kesehatan yang berada di Kelurahan Pintu Air, bertahun-tahun tidak ditempati untuk dipinjam/dihibah ke kegiatan PAUD	Sekretariat Daerah
F.	**Ketertiban Umum/Pengamanan**	
1.	Macet di sekitar SPBU Terminal Jalan Mentok akibat pengerit Bensin, untuk dapat ditindaklanjuti/ditertibkan.	Satpol PP
2.	Pengadaan/pemasangan Kaca Cembung di 10 (sepuluh) titik tikungan di Kelurahan Pintu Air	Dinas Perhubungan

3. DAPIL III: Kecamatan Taman Sari dan Kecamatan Gerunggang

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
A.	**Pemasangan Lampu Jalan**	
1.	Lampu-lampu jalan putus/mati di Jl. Stania Bukit Baru dan Jalan Murai Kelurahan Taman Bunga	Dinas Perhubungan
2.	Perbaikan Lampu jalan putus/mati sebanyak 9 titik di Gg. Pipit dan 2 titik di Jl. Adhiyaksa, Gg. Tiung RT.06/ RW.02 Kel. Kacang Pedang	Dinas Perhubungan
3.	Penambahan dan peremajaan lampu jalan di Kawasan Tampuk Pinang Pura	Dinas Perhubungan
4.	Pemasangan lampu jalan di Rasakunda RT.09/RW.03 Kelurahan Tuatunu Indah	Dinas Perhubungan
5.	Pemasangan dan perbaikan lampu jalan di Jl. Raya Kulan RT.09/RW.03 (depan Mesjid Almizan) Kelurahan Tuatunu Indah	Dinas Perhubungan
6.	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan di Jl. Nyatoh Dalam RT.06/RW.02 Kelurahan Bukit Sari	Dinas Perhubungan
7.	Perbaikan lampu jalan (2 titik) di jalan Gang Mantri Dalam (depan rumah Pak RW/ rumah Koh Asin) Kelurahan Taman Bunga	Dinas Perhubungan
B.	**Pengaspalan/Perbaikan Jalan dan Perbaikan Jembatan**	
1.	Pengaspalan Berm/pinggir jalan sampai batas drainase, agar tidak kelihatan kumuh di Kelurahan Taman Bunga	DPUPR
2.	Peningkatan jalan di Jalan Rengas Tuatunu (tembusan dari Pesanteren Mambaul Ulum sampai ke Perumahan PNS).	DPUPR
3.	Peningkatan Jalan di Jalan Kikim, Kampak Kulan, Kel. Tuatunu	DPUPR
4.	Peningkatan Jalan di Gang Makmur, Kelurahan Air Kepala Tujuh	DPUPR
5.	Pembangunan Jembatan Penghubung di Gandaria Kelurahan Air Kepala Tujuh	DPUPR
6.	Pembuatan plat dekker di Jl. Zubir Kel. Kacang Pedang.	DPUPR
7.	Peningkatan jalan Pasadena (Pahlawan 12) Kel. Kacang Pedang	DPUPR
8.	Peningkatan jalan di Lapangan Bola Teratai Kel. Kacang Pedang	DPUPR
9.	Peningkatan jalan Sutet Kulan Kelurahan Tua Tunu	DPUPR
10.	Peningkatan jalan di Gang Nuri, Kelurahan Kacang Pedang	DPUPR
11.	Perbaikan Jalan (Aspal) di Jalan Nyatoh Dalam RT.06/RW.02 Kelurahan Bukit Sari	DPUPR

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
12.	Pengaspalan Jalan Fatmawati Dalam yang tembus ke Tuatunu (Jalan menuju Pemancingan Kampak Serasi), sepanjang 750 meter di RT. 10 Kelurahan Tuatunu Indah	DPUPR
13.	Pengaspalan Jalan Air Ulu, lintas Pesantren Mamba Ul-Ulum Tuatunu (samping Perumahan Manggis), sepanjang lebih kurang 200 meter, berikut pembangunan jembatan di RT. 01/RW. 01 Kel. Tuatunu Indah	DPUPR
14.	Pengaspalan Jalan di Belakang Mesjid Al-Muqarom, panjang lebih kurang 200 meter di RT.01/RW.01 Kelurahan Tuatunu	DPUPR
15.	Pengaspalan jalan menuju pemancingan Kampak Serasi yang menuju Tuatunu	DPUPR
16.	Pembuatan talud sungai menuju pemancingan Kampak Serasi	DPUPR
C.	**Drainase/Bandar/Selokan/Saluran**	
1.	Pengerukan Bandar/Selokan di Depan Kantor Koramil dari RT.01 sampai dengan RT.03 dan Bandar Sungai Rangkui Kelurahan Gedung Nasional	Dinas Perkim
2.	Perbaikan saluran air di Jl. Letkol Saleh Ode (Masdji Baitul Hikmah) karena Buntu/mampet. RT.06/RW.02 Kel.Kacang Pedang	Dinas Perkim
3.	Pembangunan drainase di Jl.Kikim, Kampak Kulan	Dinas Perkim
4.	Pembuatan drainase di Jl. Saleh Ode (Sebelah Perumahan BPS) Kel. Kacang Pedang	Dinas Perkim
5.	Penambahan tembok bata di sepanjang drainase di Jl. Bukit Tani di RT.01 dan RT.02 Kelurahan Bukit Sari	Dinas Perkim
6.	Pembuatan Drainase di Jl. Raya Kulan RT.10 Kelurahan Tuatunu Indah	Dinas Perkim
7.	Pembuatan Drainase di Jl. Nyiur (depan Masjid Markas Al-Quran) Kecamatan Gerunggang	Dinas Perkim
8.	Pembuatan Saluran Primer Permanen di Jl. Fatmawati Dalam (Gg. Mawar) RT.009/RW.03 Kelurahan Tuatunu Indah	Dinas Perkim
9.	Pembuatan drainase (saluran Sekunder) di Jl. Tampuk Pinang Pura RT.07/RW.02 Kelurahan Air Kepala Tujuh	Dinas Perkim
10.	Pembuatan saluran drainase di Jl. Nyatoh Dalam RT.06/RW.02 Kelurahan Bukit Sari	Dinas Perkim
11.	Pembuatan saluran drainase di Jl. Cempaka (belakang Penjahit Cebo) RT.01/RW.01 Kelurahan Gedung Nasional	Dinas Perkim
13.	Pemyambungan siring/bandar sepanjang 150 meter di RT. 01, Gang Awal Kelurahan Tuatunu Indah	Dinas Perkim
D.	**Lahan Perkuburan/TPU**	
1.	Penyediaan lahan perkuburan/ TPU, karena perkuburan yang ada di Kecamatan Gerunggang dan Taman Sari sudah overload	Dinas Perkim

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
E.	**Masalah Sampah**	
1.	Penyediaan Bak/Tong sampah di RW.01 Kelurahan Gedung Nasional	Dinas Lingkungan Hidup
2.	Penyediaan penampungan sampah/Bak/ Tong Sampah di sekitar Tampuk Pinang Pura, sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan	Dinas Lingkungan Hidup
F.	**Sumur Bor**	
1.	Pembuatan Sumur Bor sebagai sarana air bersih di RT.05/RW.02 Kelurahan Gedung Nasional	DPUPR
2.	Pembuatan Sumur Bor di RT.02 Bukit Tani Kelurahan Bukit Sari	DPUPR
3.	Pengadaan Mesin Pompa Air (Mesin Jet Pump) di Jl. Nyatoh Dalam RT.06/RW.02 Kelurahan Bukit Sari.	DPUPR

4. DAPIL IV: Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gabek

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
A.	**Pembangunan Jembatan/Drainase/Bandar/ Saluran Air/Selokan**	
1.	Pembangunan Jembatan Sumberejo dan normalisasi/ pelebaran saluran air di hulu jembatan jika hujan air meluap karena tingginya debet air karena dangkalnya	DPUPR
2.	Pembangunan jembatan di samping jembatan Sumberejo lama di Jl. RE.Martadinata	DPUPR
3.	Pembangunan Jembatan/Jerambah Gantung untuk diprioritaskan	DPUPR
4.	Pembangunan drainase/limbah pembuangan di lingkungan Kelurahan Jerambah Gantung	Dinas Perkim
5.	Pembangunan drainase (untuk penanggulangan banjir) di RT. 05 Kelurahan Selindung	Dinas Perkim
6.	Normalisasi saluran di Jalan Mujair RT. 06/RW. 02 Kelurahan Rejosari	Dinas Perkim
7.	Normalisasi saluran di Jalan Nila Kelurahan Rejosari	Dinas Perkim
8.	Normalisasi saluran primer di Lembawai Hulu	Dinas Perkim

NO	USULAN MASYARAKAT	OPD TERKAIT
B.	**Pembangunan Jalan/Jembatan/Gedung**	
1.	Penambahan pembangunan WC di SDN No.38 dan SDN No.14	DPUPR
2.	Pembangunan /pembuatan Gapura Kelurahan Jerambah Gantung	DPUPR
3.	Jalan Len Listrik untuk dibuat 2 jalur	DPUPR
4.	Pembangunan jembatan lokasi Kampung Opas ke Pasir Putih	DPUPR
C.	**Pengaspalan Jalan**	
1.	Perbaikan dan pengaspalan di terminal Selindung	DPUPR
2.	Pembangunan jalan setapak Tembus ke PLN	Dinas Perkim
3.	Peningkatan jalan Patin dan Jalam Patin 1 RT.01/RW.01 Kelurahan Rejosari	DPUPR
4.	Peningkatan Jalan Bandeng 2 dan Jl. Bandeng 3 RT.02/RW.01 Kelurahan Rejosari.	DPUPR
D.	**Lahan TPU**	
1.	Untuk menyediakan lahan TPU baru	Dinas Perkim
E.	**Sampah**	
1.	Untuk menyediakan bak-bak sampah	Dinas Lingkungan Hidup
F.	**Ketertiban Umum/Lalu Lintas**	
1.	Penempatan Cermin Cembung di Jl. Mujair Kelurahan Rejosari	Dinas Perhubungan
2.	Penempatan Cermin Cembung di Jl.Bandeng 1 (belakang SD MIN)	Dinas Perhubungan
G.	**Ketertiban Umum/Lalu Lintas**	
1.	Pembuatan sumur bor di RT. 08 Kelurahan Gabek I (dekat rumah sdri Sulastri)	DPUPR

5. Pembangunan Non Fisik, berupa saran dan masukan serta keluhan masyarakat yang perlu dikaji dan ditindaklanjuti.

NO	DINAS/OPD	SARAN DAN MASUKAN
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengawasan terhadap pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, yang pembangunannya tidak sesuai sehingga ada yang tidak bisa ditempati oleh pemiliknya. Untuk itu perlu koordinasi dengan lurah dan Ketua RT setempat
		Program Rumah Layak Huni perlu ditingkatkan dengan memperhatikan data penerima yang lebih valid, agar tidak terjadi konflik serta perlu dilakukan sosialisasi kepada warga setempat
		Untuk bantuan Rumah Layak Huni, perlu dilakukan evaluasi agar tepat sasaran agar tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan, sehingga kecemburuan sosial masyarakat dapat teratasi
		Penebangan Pohon/Pokok Kayu yang sudah kering disekitar area perkuburan (TPU) Gabek, agar tidak membahayakan dan mengganggu kabel listrik di sepanjang Jalan Raya Selindung
		Pembuatan Tugu/Monumen sebagai pengingat perjuangan dan jerih payah masuknya Kelurahan Selindung dari Kabupaten Bangka ke Kota pangkalpinang serta Taman sebagai Ruang Terbuka atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
		Untuk menyampaikan kepada pengembang perumahan, untuk membuat Musolah di lingkungan perumahan
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Masalah sampah memang menjadi PR bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang, karena disamping kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah, sehingga terjadi penumpukan sampah hampir disetiap sudut Kota Pangkalpinang, sehingga perlu solusi penanganan terhadap persampahan.
		Memperhatikan kebersihan lingkungan dengan membuat bak-bak sampah
3.	PUD Air Minum	Penyelesaian masalah air bersih dari PDAM di setiap Kecamatan
4.	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Pendataan ulang dan peremajaan UMKM skala Kelurahan
		Penertiban Pasar Kerabut, agar terlihat rapi dan indah (tidak kumuh)
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perolingan Kepala Sekolah SDN No.3 Kota Pangkalpinang.
6.	Dinas Perhubungan	Transparansi dasar pengenaan tarif parkir berjenjang oleh pengelola parkir swasta di Pangkalpinang
7.	Posyandu/PAUD	Untuk meningkatkan sarana dan prasarana Posyandu/PAUD
		Penambahan insentif/honor petugas Posyandu
8.	BPJS	Masalah BPJS yang bila tidak membayar satu bulan tidak bisa mengakses pelayanan (berobat) tapi hutang/tunggakan bertambah, untuk itu mohon dilakukan pemutihan tunggakan BPJS

5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021

Berdasarkan hasil anaisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.2
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
1	**PENDAPATAN**	**804.641.982.905,66**
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**164.499.503.025,66**
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	98.800.000.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	21.507.766.241,66
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.240.000.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.951.736.784,00
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**545.815.188.880,00**
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.162.606.960,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	497.652.581.920,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	
1 . 2 . 4	Dana Insentif Daerah	
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**94.327.291.000,00**
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	61.360.000.000,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.407.291.000,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	14.560.000.000,00
2	**BELANJA**	**926,249.536.153,41**
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**392.026.009.987,41**

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN 2021
2.1.1	Belanja Pegawai	367.279.219.487,41
2.1.2	Belanja Subsidi	
2.1.4	Belanja Hibah	18.390.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	215.230.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	2.020.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.121.560.500,00
2.2	**BELANJA LANGSUNG**	**534.223.526.166**
2.2.1	Belanja Pegawai	79.377.897.218
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	302.328.853.833
2.2.3	Belanja Modal	152.516.775.115
	SURPLUS / DEFISIT	**(121.607.553.247,75)**
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**122.607.553.247,75**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	122.607.553.247,75
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**1.000.000.000,00**
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**121.607.553.247,75**
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-

5.4. Pemetaan Nomenklatur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No

23 tahun 2014. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Yang menjadi latar belakang terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini adalah 1) program kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014; 2) beragamnya klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur program, kegiatan, organsisasi, dan akun yang digunakan Pemerintah Daerah dikarenakan dibukanya kesempatan untuk menambah dalam bentuk dst; 3) terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi; 4) sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistic kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional; 5) Terdapat perangkat daerah yang tugas dan fungsinya belum mengacu pada Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 dan turunannya.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan
7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompakan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable, responsible,* serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prisip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan/pengelompokan, pemberian kode dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri No 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. melakukan evaluasi perencanan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. membantu keala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. mendukung penyelenggaraan sistem Infromasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, seluruh

OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan pada RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023 yang masih berlaku dengan mempedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Hasil pemetaan oleh OPD ini selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemetaan dan menjadi bagian lampiran Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

DRAFT KOMPILASI PROGRAM DAN PAGU INDIKATIF TIAP PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA AKHIR PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**52.172.050.497**	**171.270.000**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**52.172.050.497**	**171.270.000**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran YangTerlaksana Dengan Baik**	**100 %**	**4.857.223.500**	**0**		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Terlaksananya tertib penataan suratmenyurat	12 Bulan	206.500.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Terlaksananya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 Bulan	1.080.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Terlaksananya layanan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	61.410.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Terlaksananya Layanan PenyediaanJasa Administrasi Keuangan	12 Bulan	543.350.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Terlaksananya Layanan Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Pembersih	12 Bulan	281.955.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Terlaksananya Layanan PenyediaanAlat Tulis Kantor	12 Bulan	136.400.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Terlaksananya Layanan PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	214.765.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Terlaksananya Layanan PenyediaanKomponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	40.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Terlaksananya Layanan PenyediaanPeralatan Rumah Tangga	12 Bulan	6.480.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Terlaksananya Layanan PenyediaanBahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	201.813.500	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Terlaksananya Layanan PenyediaanMakanan dan Minuman	12 Bulan	738.300.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Terlaksananya Layanan Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan	900.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran			Terlaksananya Layanan PenyediaanJasa Perkantoran	12 Bulan	46.250.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.43	Penyediaan Jasa Asuransi Gedung Kantor			Terlaksananya Layanan PenyediaanJasa Asuransi Gedung Kantor	12 Bulan	200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.01.44	Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor			Terlaksananya Layanan Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik**	**100 %**	**11.774.053.000**	**0**		
4.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dibeli	3 Kendaraan	1.654.835.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			Jumlah Perlengkapan RumahJabatan/Dinas Yang Tersedia	1 Paket	505.060.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					549.976.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			Jumlah Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Yang Tersedia	1 Paket	549.485.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah Peralatan Gedung KantorYang Tersedia	1 Paket	200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Jumlah Meubelair Yang Dibeli	1 Paket	200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan			Jumlah waktu pemeliharaan RumahJabatan	12 Bulan	969.972.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Jumlah waktu pemeliharaan RumahDinas	12 Bulan	150.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah waktu pemeliharaan gedungkantor	12 Bulan	498.890.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			Jumlah waktu pemeliharaan mobiljabatan	12 Bulan	362.890.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasioal			Jumlah waktu pemeliharaankendaraan dinas/operasional	12 Bulan	1.469.840.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas			Jumlah waktu pemeliharaan peralatan rumah jabatan/dinas	12 Bulan	318.620.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan			Jumlah rumah jabatan yang direhab	2 Gedung	2.500.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.68	Penyediaan makan dan minum rumah dinas/jabatan			Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian rumah jabatan	12 Bulan	154.485.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.69	Pembuatan Taman Rumah Jabatan					200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.70	Pembangunan Pagar Besi					150.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.71	Pembangunan Garasi Rumah Jabatan					340.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.72	Pengadaan Kolam Ikan Rumah Jabatan/Dinas					100.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.73	Pengadaan Pos Jaga					200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.74	Pembangunan Pagar					200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.02.75	Pengadaan Kolam Rumah Jabatan					500.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**	**431.732.000**	**0**		
4.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah waktu Pendidikan dan Pelatihan Formal yang dilaksanakan	12 Bulan	50.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.05.51	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			Jumlah Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	1 Kegiatan	70.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.05.52	Pendayagunaan Aparatur dalam Peningkatan Kinerja Organisasi			Jumlah Pendayagunaan Aparatur Dalam Peningkatan Kinerja Organisasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan	85.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.05.81	Rapat Koordinasi Kerjasama Daerah			Jumlah waktu Pelaksanaan RapatKoordinasi Kerjasama Daerah	12 Bulan	30.120.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanya			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	2 Paket	146.612.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.05.108	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Humas dan Protokol					50.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**340.008.400**	**0**		
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran					3.920.300	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun					3.920.300	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)					3.920.300	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06.16	Penyusunan Laporan Umum Tahunan Penerapandan Pencapaian standar pelayanan minimal			Jumlah Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian StandarPelayanan Minimal Yang Disusun	1 Laporan	34.007.500	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06.21	Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah KotaPangkalpinang			Jumlah dokumen LAKIP SekretariatDaerah Kota Pangkalpinang yang disusun	1 Laporan	20.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah Laporan PenyelenggaraanSPIP Yang Disusun	1 Laporan	26.240.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.06.23	Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang			Jumlah dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang yang disusun	1 Laporan	138.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.06.24	Fasilitasi SAKIP Kota Pangkalpinang			Jumlah dokumen SAKIP KotaPangkalpinang yang disusun	10 Dokumen	110.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.16	**Program peningkatan pelayanan kedinasankepala daerah/wakil kepala daerah**			**Persentase kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDHyang dilaksanakan**	**100 %**	**3.483.719.000**	**0**		
4.01.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat			Jumlah waktu Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosialdan masyarakat	12 Bulan	1.042.530.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri			Jumlah waktu penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luarnegeri yang difasilitasi	12 Bulan	547.269.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya			Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusatdan pemerintah daerah lainnya	12 Bulan	1.000.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.16.08	Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Rumah Jabatan			Jumlah waktu Penyediaan makanan dan minuman harian rumah jabatan	12 Bulan	893.920.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.17	**Program Peningkatan Dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah**			**Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**100 %**	**112.630.000**	**0**		
4.01.17.02	Penyusunan Standar Satuan Harga					112.630.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.25	**Program Peningkatan Kerjasama Daerah**			**Persentase meningkatnya kerjasama daerah**	**100 %**	**5.483.275.000**	**171.270.000**		
4.01.25.17	Tata Laksana kerjasama daerah			Jumlah Penyelenggaraan Rakorwil APEKSI Sumbagsel	1 Kegiatan	81.725.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.25.18	APEKSI			Jumlah Kerjasama daerah yangdifasilitasi	5 Kerjasama	215.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.25.19	Pengelolaan Izin PDLN			Jumlah izin PDLN yang difasilitasi	3 Izin	11.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.25.20	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah			Jumlah Monitoring dan EvaluasiKerjasama Daerah Yang Dilaksanakan	1 Kali	15.550.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.25.21	UCLG dan City Net			Jumlah Keikutsertaan PemerintahDaerah Dalam Kegiatan UCLG danCity Net	2 Kali	160.000.000	171.270.000	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.25.22	Penyelenggaraan Rakernas APEKSI			Jumlah Penyelenggaraan RakernasAPEKSI	1 Kegiatan	5.000.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26	**Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**			**Persentase Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan**	**100 %**	**1.130.000.000**	**0**		
4.01.26.36	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)			Jumlah laporan Rencana AksiNasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang disusun	1 Laporan	50.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.37	Penyusunan Pedoman dan Ketentuan pelaksanaandari peraturan undang-undang bidang organisasi			Jumlah Pedoman dan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan undang-undang bidang organisasi yang disusun	1 dokumen	60.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.39	Bantuan Penyelesaian Kasus Kasus Hukum			Jumlah Bantuan Penyelesaian KasusKasus Hukum	3 Kasus Hukum	300.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.41	Penyusunan dan Pengelolaan Peraturan / Keputusan Walikota			Jumlah Pengelolaan Peraturan/Keputusan Walikota Yang Disusun	450 Surat Keputusan	100.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.46	Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah			Jumlah Pembahasan PeraturanDaerah yang Disusun	15 Perda	200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.48	Penyusunan Tugas dan Fungsi Organisasi PerangkatDaerah Kota pangkalpinang			Jumlah tugas dan fungsi OrganisasiPerangkat Daerah Kota Pangkalpinang yang disusun	1 Produk Hukum	70.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.49	Publikasi produk hukum daerah			Jumlah produk hukum daerah yangdipublikasi	100 Produk Hukum	40.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.50	Penyuluhan hukum bagi pelajar			Jumlah penyuluhan hukum bagipelajar yang dilaksanakan	10 Sekolah	40.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.26.51	Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum			Jumlah produk hukum yang dipublikasikan pada JDIH yang dikelola	30 Produk Hukum	200.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.52	Penyusunan Sambutan Walikota			Jumlah Sambutan Walikota yangdisusun	15 Sambutan	30.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.26.53	Pembinaan kelurahan sadar hukum (KADARKUM)			Jumlah Kelurahan Sadar Hukum(KADARKUM) yang dibina	7 Regu	40.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan**			**Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan**	**100 %**	**1.531.887.000**	**0**		
4.01.29.05	Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran					95.980.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.09	Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja			tersusunnya dokumen analisa jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	130.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.16	Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik			Jumlah Unit Pelayanan Publik yangdinilai	30 Unit Pelayanan	75.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.22	Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pangkalpinang			Jumlah Laporan Reformasi BirokrasiPemerintah Kota Pangkalpinang	1 Laporan	150.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.23	Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah daerah			Jumlah kajian Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Laporan	125.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.39	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)			Jumlah laporan Survey KepuasanMasyarakat (SKM)	1 Laporan	75.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.48	Asistensi Penyusunan LPPD			Jumlah pelaksanaan asistensipenyusunan LPPD	1 Kali	48.905.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.50	Inventarisasi Unsur Rupabumi			Jumlah Laporan Hasil InventarisasiUnsur Rupabumi	1 Laporan	105.662.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.51	Rapat Koordinasi Pemerintahan			Jumlah Pelaksanaan rapat koordinasipemerintahan	7 Kali	130.840.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.52	Penyusunan LPPD dan IPPD Akhir Tahun Anggaran			Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	170.500.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.29.53	Rapat Koordinasi Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasikecamatan dan kelurahan	7 Kali	40.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.54	Penataan Administrasi Kewilayahan			Jumlah laporan penataan administrasi kewilayahan	1 Laporan	100.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.55	Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah laporan pelaksanaanpembinaan kecamatan dan kelurahan	1 Laporan	60.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.56	E-LPPD dan RLPPD			Jumlah Dokumen yang disusun	2 Dokumen	175.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.29.59	Rapat koordinasi hubungan kerja staf ahli Walikota dengan lintas sektor			Jumlah laporan koordinasi hubungankerja staf ahli Walikota dengan lintassektor	1 Dokumen	50.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33	**Program Peningkatan Kualitas Pemahaman, Pengamalan Agama dan Kerukunan Beragama**			**Persentase meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pembinaankerukunan agama**	**100 %**	**10.516.663.000**	**0**		
4.01.33.02	Pelaksanaan Urusan Haji			Jumlah kegiatan Urusan Haji YangDilaksanakan	2 Kegiatan	149.500.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.08	Peningkatan Pemahaman Bacaan Al-Qur'an			Jumlah Santri Bacaan Al-Qur'an yangdiwisuda	2.500 Santri	4.962.600.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.09	Penyelenggaraan Lomba dan Pembinaan MTQ/STQ			Jumlah Lomba dan PembinaanMTQ/STQ Yang Dilaksanakan	3 Lomba	1.571.135.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.10	Kajian Agama dalam Kehidupan Masyarakat			Jumlah waktu Kajian Agama dalamKehidupan Masyarakat	12 Bulan	1.470.415.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.11	Pembinaan Pengembangan Manajemen Masjid			Jumlah Manajemen Masjid yangdibina	50 Masjid	316.700.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.20	Peringatan dan Perayaan Isra' dan Mikraj NabiMuhammad SAW			Jumlah Peringatan dan Perayaan Isra' dan Mikraj Nabi Muhammad SAW	1 Kegiatan	151.700.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.21	Pawai Ta'aruf dan Safari Ramadhan			Jumlah Pawai Ta'aruf dan SafariRamadhan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	169.420.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.33.22	Kajian Ramadhan			Jumlah Kajian Ramadhan yang dılaksanakan	1 Kajian	44.450.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.23	Nuzulul Qur'an			Jumlah pelaksanaan Nuzulul Qur'an	1 Kegiatan	319.170.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.25	Perayaan Tahun Baru Hijriyah					332.550.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.26	Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW			Jumlah Perayaan Maulid NabiMuhammad SAW	1 Kegiatan	322.163.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.37	Tadarusan Al-Qur'an dan Ceramah Agama Islam Bulanan			Jumlah waktu Tadarusan Al-Qur'an dan Ceramah Agama Islam Bulananyang dilaksanakan	12 Bulan	312.350.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.40	Pelaksanaan Sholat Idhul fitri dan Idhul Adha			Jumlah Kegiatan Sholat Idul Fitri danIdul Adha yang dilaksanakan	2 Kegiatan	189.510.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.33.41	Penyuluhan Kemasyarakatan					205.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34	**Program Peningkatan Komunikasi dan Informasi Serta Media Massa dan Protokol**			**Persentase meningkatnya komunikasi dan informasi sertamedia massa dan protokol**	**100 %**	**3.973.529.497**	**0**		
4.01.34.03	Protokol dan Acara			Jumlah Protokol dan Acara yangdilaksanakan	750 Kegiatan	1.173.914.500	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.18	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah			Jumlah Layanan Jasa Dokumentasi Kegiatan Pemerintahan Daerah yang disediakan	750 Kegiatan	389.399.997	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.82	Penyediaan Jasa Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang			Jumlah Waktu Jasa Komunikasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang yang disediakan	12 Bulan	538.819.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.85	Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Peliputan dan Pemberitaan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan	750 Kegiatan	194.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.89	Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, WakilKepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Massa Cetak			Jumlah Waktu Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang MelaluiMedia Massa Cetak	12 Bulan	963.075.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.34.90	Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, WakilKepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media elektronik			Jumlah Waktu Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang MelaluiMedia Media Elektronik	12 Bulan	249.899.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.91	Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, WakilKepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang Melalui Media Daring			Jumlah Waktu Publikasi Informasi Kegiatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang MelaluiMedia Media Daring	12 Bulan	294.422.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.92	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keprotokolan					70.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.34.93	Pemantauan dan Analisis Berita Media Massa					100.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57	**Program Pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Pembangunan Daerah**			**Persentase Meningkatnya Pengendalian dan PelaporanPelaksanaan Pembangunan Daerah**	**100 %**	**5.919.302.000**	**0**		
4.01.57.10	Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan			Jumlah waktu layanan unit Pengadaan yang dilaksanakan	12 Bulan	2.283.451.550	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57.27	Bimbingan dan rapat kerja unit layanan pengadaan			Jumlah waktu Bimbingan dan Rapat Kerja Unit Layanan Pengadaan Yang dilaksanaan	12 Bulan	111.440.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57.28	Monitoring evaluasi pembangunan			Jumlah Waktu Monitoring EvaluasiPembangunan yang disusun	12 Bulan	378.204.400	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57.29	Monitoring pengendalian pembangunan			Jumlah Waktu Monitoring Pengendalian Pembangunan yangdilaksanakan	12 Bulan	1.184.975.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57.30	Tata kelola Pengadaan Barang/jasa			Jumlah waktu Tata Kelola PengadaanBarang/Jasa yang dilaksanakan	12 Bulan	0	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57.31	Asistensi Pembinaan Pengadaan Barang/jasa			Jumlah waktu Asistensi PembinaanPengadaaan Barang /Jasa yang dilaksanakan	12 Bulan	223.125.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.57.32	pengembangan LPSE			Jumlah Pengembangan LPSE yangdilaksanakan	1 Paket	885.550.000	0	APBD	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.57.50	Pemberdayaan Kebijakan KDH/WKDH			Jumlah Waktu PemberdayaanKebijakan KDH/WKDH yang dilaksanakan	12 Bulan	852.556.050	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58	**Program Penyelenggaraan kesejahteraanrakyat**			**Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan KesejahteraanRakyat**	**100 %**	**1.711.808.100**	**0**		
4.01.58.05	Pengelolaan Data dan Informasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial			Jumlah waktu Pengelolaan data danInformasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial	12 Bulan	60.405.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.13	Pemutakhiran Data UKS			Jumlah laporan Data UKS yangdimutakhirkan	1 Laporan	53.480.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.17	Peringatan Hari Jadi Kota Pangkalpinang			Jumlah Peringatan Hari Jadi KotaPangkalpinang yang diselenggarakan	1 Kegiatan	992.228.100	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.21	Monitoring UKS			Jumlah waktu monitoring UKS yangdilaksanakan	12 Bulan	82.465.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.22	Pembinaan dan Pengembangan UKS			Jumlah Waktu Pembinaan danPengembangan UKS yang dilaksanakan	12 Bulan	152.270.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.24	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Masyarakat			Jumlah Waktu Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Masyarakat	12 Bulan	90.854.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.31	Pelaksanaan dan Sosialisasi Hibah Bansos			Jumlah Sosisalisasi Hibah Bansosyang dilaksanakan	1 Kegiatan	85.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.33	Pengelolaan Juknis Hibah Bansos			Jumlah Juknis Hibah Bansos yang dikelola	1 Laporan	85.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.58.34	Seleksi Pemilihan Calon Pimpinan BAZNAS Kota Pangkalpinang			Jumlah Kegiatan Seleksi PimpinanBAZNAS Kota Pangkalpinang	1 Kegiatan	110.106.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.75	**Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**			**Persentase peningkatan penataan dan penyempurnaankebijakan sistem dan prosedur pengawasan**	**100 %**	**300.000.000**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.75.05	Kebijakan Penanggulangan Dampak Inflasi danDeflasi			Jumlah laporan kebijakan penanggulangan dampak inflasi dandeflasi	1 Laporan	300.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.77	**Program Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi**			**Persentase Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring**	**100 %**	**220.000.000**	**0**		
4.01.77.01	Regulasi/kebijakan umum dalam Pengelolaan BUMD			Jumlah Regulasi /kebijakan umumdalam Pengelolaan BUMD yang disusun	1 Dokumen	50.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.77.06	Pengawasan dan Pengendalian BUMD			Jumlah laporan pengawasan danpengendalian BUMD	1 Dokumen	10.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.77.08	Seleksi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Pinang			Jumlah kegiatan seleksi Dewan Pengawas Perumda air minum TirtaPinang	1 Laporan	60.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.77.09	Pembinaan dan Pengawasan BLUD			Jumlah Laporan Monitoring danEvaluasi Pelaksanaan Pengembangan BLUD	1 Laporan	100.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.83	**Program Kebijakan Bidang PengembanganEkonomi Kreatif dan Kewirausahaan**			**Persentasenya PengembanganEkonomi Kreatif dan Kewirausahaan**	**100 %**	**50.000.000**	**0**		
4.01.83.01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	50.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.85	**Program pengembangan pemanfaatan teknologi informasi**			**Persentase peningkatan Pengembangan PemanfaatanTeknologi Informasi**	**100 %**	**336.220.000**	**0**		
4.01.85.01	Pengelolaan Website Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah			Jumlah Website Bagian Humas danProtokol sekretariat Daerah yang dikelola	1 Website	70.000.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
4.01.85.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana LPSE			Jumlah kegiatan Pengadaan Saranadan Prasarana LPSE	1 Paket	266.220.000	0	APBD	Sekretariat Daerah
JUMLAH						**52.172.050.497**	**171.270.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**32.998.211.075**	**35.575.980.034**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**32.998.211.075**	**35.575.980.034**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat dipenuhi**	**100 %**	**1.751.074.594**	**1.906.011.715**		
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Terpenuhinya Jumlah Waktu Penyadiaan Jasa Komunikasi Sumber daya air Listrik yang tersedia	1 Tahun	222.860.094	270.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah Waktu penyediaan Jasa administrasi keuangan	12 Bulan	291.260.000	300.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah Waktu penyediaan peralatandan bahan pembersih	12 Bulan	261.961.111	287.317.899	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang mendapat perbaikan	225 Unit	78.471.900	86.319.090	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	36 Jenis	74.247.779	81.725.269	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah Jenis cetakan yang diadakan jumlah lembar fotocopy	12 Jenis	121.007.710	180.786.359	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan	14 Jenis	26.985.600	29.684.160	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah Peralatan dan PerlengkapanKantor	6 Jenis	247.246.000	188.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah Peralatan Rumah Tanggayang dibeli	6 Jenis	140.340.000	147.757.498	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah jenis bacaan yang tersedia	2 Jenis	23.584.000	45.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Tersedianya Makanan dan Minuman	1 PAKET	156.110.400	171.721.440	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah rapat-rapat koordinasi dankonsultasi yang dilaksanakan	1 Tahun	92.500.000	101.750.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.01.20	Penyediaan Jasa Dokumentasi			Jumlah Dokumentasi kegiatan DPRD	1 Tahun	14.500.000	15.950.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Dapat disediakan/dibangun/ dipelihara/rehab**	**100 %**	**1.138.560.000**	**976.205.725**		
4.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional					0	0	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Jumlah Meubelair	1 TAHUN	120.000.000	98.257.500	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			JUMLAH GEDUNG KANTOR YANG MENDAPAT PEMELIHARAAN RUTIN	1 TAHUN	149.683.000	165.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			JUMLAH KENDARAAN OPERASIONALYANG MENDAPAT PEMELIHARAAN	1 TAHUN	630.717.000	505.950.445	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor			JUMLAH PERALATAN GEDUNG YANG DIPELIHARA	1 TAHUN	76.400.000	84.040.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			TERPELIHARANYA GEDUNG KANTOR	1 PAKET	161.760.000	122.957.780	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.43	Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor					0	0	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase Sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya**	**100 %**	**608.970.000**	**466.353.800**		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			JUMLAH ADEKSI DAN JUMLAH BIMTEK YANG	1 TAHUN	125.000.000	137.500.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				DIIKUTI ASN					
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya			JUMLAH PAKAIAN DINAS APARATURDAN ANGGOTA DPRD	172 ORANG	483.970.000	328.853.800	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**LAKIP dengan nilai BB**	**100 %**	**60.000.000**	**64.200.000**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah Jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi yang disusun	3 Jenis	5.500.000	6.050.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah jenis laporan keuangansemesteran	1 Jenis	5.500.000	6.050.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah jenis laporan keuangan akhirtahun	1 Tahun	5.500.000	6.050.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah Jenis dokumen perencanaan kinerja	3 Jenis	5.500.000	6.050.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.06.06	PELAKSANAAN FORUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)			Jumlah Dokumen SPIP yang disusun	1 dokumen	19.000.000	20.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.06.07	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen PMRB yangdisusun	1 dokumen	19.000.000	20.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**			**Presentase promperda yangdibahas**	**100 %**	**29.439.606.481**	**32.163.208.794**		
4.01.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah			Jumlah Rancangan Perda yangdibahas	20 Raperda	6.486.973.000	7.321.727.573	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.05	Kegiatan Reses			Jumlah Kegiatan Reses yang dilaksanakan	3 kali	147.518.000	120.120.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Jumlah Pendalaman Tugas yangdiikuti	6 kali	4.203.213.881	4.574.310.626	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.10	Pelayanan Tenaga Ahli			Jumlah laporan analisis tim	108 laporan	1.497.000.000	1.490.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				ahli/tenaga ahli yang disusun					
4.01.15.11	Publikasi DPRD			Jumlah jenis jasa mass media yangdigunakan	3 Jenis	581.179.000	590.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.13	Rapat-rapat dan konsultasi Keluar daerah			Rapat-rapat konsultasi keluar daerahyang diikuti	60 kali	14.221.849.150	15.644.034.065	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.16	Peningkatan Kualitas Jasmani pimpinan dan Anggota DPRD			Terlaksananya Medical Check Up	1 Paket	648.504.000	681.575.136	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.18	Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD			Jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	1 Jenis	699.274.450	647.002.400	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.19	Pengamanan Penyaluran Aspirasi			Jumlah penyaluran aspirasi masyarakat yang mendapatpengamanan	2 kali	9.990.000	11.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.20	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD			Jumlah PAW anggota DPRD yang dilaksanakan	1 kali	61.450.000	146.509.044	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.22	Raperda Inisiatif DPRD			Jumlah Raperda Inisiatif yang disahkan	2 Raperda	57.189.000	73.889.750	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.23	Rapat-rapat paripurna istimewa			Jumlah rapat-rapat Paripurna yang diselenggarakan	2 kali	520.350.000	522.040.200	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.24	Penyusunan website DPRD			Terupdatenya Website SekretariatDPRD	3 kali	47.316.000	55.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.25	Penyusunan sistem E-Reses			Terserapnya aspirasi masyarakat	1 Tahun	47.800.000	55.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.15.26	Penyusunan kajian akademik			tersedianya dokumen kajian akademik	5 Buku	210.000.000	231.000.000	APBD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
JUMLAH						32.998.211.075	35.575.980.034		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					3.568.500.000	1.846.600.000		
4.02	Pengawasan					3.568.500.000	1.846.600.000		
4.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			1. Jumlah Kegiatan Terpenuhinya Pelayananan Administrasi Perkantoran		578.273.400	396.000.000		
				2. Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %				
4.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	85.500.000	86.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.03	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah jenis peralatan perlengkapan kantor	2 Jenis	210.338.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang tersedia	1 Jasa	26.720.000	28.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah alat kebersihan yang dibeli	1 Jasa	30.763.500	34.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah Peralatan Kantor yang diperbaiki	21 Unit/Tahun	25.450.000	28.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	1 Jenis Barang	30.150.500	34.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah Jenis Barang Cetak yang dibeli	1 Jenis Barang	34.726.400	38.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jenis	6.875.000	8.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	27.750.000	30.000.000	APBD	Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah Rapat- rapat Koordinasi Keluar Daerah yang diikuti	10 Kali	100.000.000	110.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**1. Jumlah Kegiatan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**		**297.883.500**	**328.000.000**		
				2. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	**100 %**				
4.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.02.10	Pengadaan mebeleur					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Unit	78.516.000	86.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pemeliharaan	8 Unit	219.367.500	242.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**99.147.000**	**0**		
				2. Terpenuhinya Kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	**100 %**				
4.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	3 Orang	21.597.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					77.550.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.05.95	Sosialisasi Gerakan Anti Narkoba					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**1. Jumlah Kegiatan PeningkatanPengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**		**16.560.000**	**19.600.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				2. Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	**100 %**				
4.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	1 Laporan	3.265.000	4.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	1 Laporan	2.625.000	3.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2.625.000	3.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah Laporan Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	3 Laporan	3.265.000	3.600.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP	1 Laporan	4.780.000	6.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20	**Program peningkatan sistem pengawasaninternal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**			**1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**2.245.936.100**	**993.000.000**		
				2. Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	**20 %**				
4.02.20.01	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala			Jumlah laporan Hasil Pengawasan Internal Berkala	200 LHP	1.037.679.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan			Jumlah Laporan Hasil tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	100 Laporan	266.188.360	290.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif			Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif	2 kali	50.130.000	55.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.08	Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal			Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Eksternal	12 Laporan	41.440.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.10	Pemantauan Kegiatan Pengawasan terhadap Evaluasi Periodik dan Penilaian Mandiri PelaksanaanReformasi Birokrasi			Jumlah laporan hasil Monitoring PMPRB	4 Laporan	64.050.000	0	APBD	Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.02.20.17	Klinik Konsultasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kota Pangkalpinang			Jumlah laporan Klinik Konsultasi	4 Laporan	8.000.000	10.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.34	Penyelesaian TPTGR Oleh Tim Penyelesaian KerugianDaerah (TPKD)			Jumlah laporan hasil TPTGR oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	4 Laporan	129.985.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.41	Monitoring Aksi Pencegahan dan PemberantasanKorupsi			Jumlah Laporan Monitoring Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Laporan	28.050.000	30.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.48	Unit Pemberantasan / Pengendalian Pungutan Liar Pemerintah Kota Pangkalpinang			Jumlah Laporan Hasil Unit Pemberantasan/Pengendalian Pungutan Liar	4 Laporan	345.000.000	380.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.63	Maturitas Penyelenggaraan SPIP di LingkunganPemerintah Kota Pangkalpinang			Jumlah laporan hasil Maturitas SPIP di Lingkungan Pemerintahan Kota Pangkalpinang	4 Laporan	62.618.740	69.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.64	Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal			Jumlah Laporan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Internal	12 Laporan	68.840.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.69	Bimtek Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS)					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.70	Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkunganpemerintah Kota Pangkalpinang			Jumlah laporan hasil UPG	4 Laporan	52.850.000	59.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.71	Survei Penilaian Integritas			Jumlah Laporan Survei Penilaian Integritas	1 Laporan	91.105.000	100.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.20.72	Monitoring dan evaluasi LHKASN/LHKPN					0	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.21	**Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan**			**1. Jumlah Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**		**330.700.000**	**110.000.000**		
				2. Persentase APIP yang memiliki standar Kompetensi Pengawasan	**75 %**				
4.02.21.05	Diklat Sertifikat JFA dan P2UPD			Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Sertifikat Jabatan Fungsional (JFA) dan P2UPD	4 Orang	55.500.000	60.000.000	APBD	Inspektorat Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.02.21.15	Peningkatan Kompetensi APIP			Jumlah Pegawai yang megikuti peningkatan Kompetensi APIP	10 Orang	230.000.000	0	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.21.16	Pelatihan Substantif			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Substantif	10 kali	15.500.000	17.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
4.02.21.17	Evaluasi Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit	2 Laporan	29.700.000	33.000.000	APBD	Inspektorat Daerah
JUMLAH						**3.568.500.000**	**1.846.600.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**9.381.221.258**	**5.134.070.000**		
4.03	**Perencanaan**					**9.381.221.258**	**5.134.070.000**		
4.03.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**1.156.550.987**	**1.070.800.000**		
4.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	178.800.000	200.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	waktu penyediaan jasa administrasikeuangan yang tersedia	12 bulan	269.300.000	280.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	waktu penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang tersedia	12 bulan	58.877.000	60.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	waktu yang disediakan untuk pemeliharaan Peralatan Kerja	12 bulan	40.800.000	40.800.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 jenis	24.265.800	25.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis Barang Cetakan yang tersedia	8 jenis	21.825.000	22.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	1 jenis	10.000.000	11.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis peralatan dan perlengkapankantor yang tersedia	5 jenis	221.283.187	100.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis peralatan rumah tangga yangtersedia	2 jenis	4.400.000	5.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang tersedia	3 jenis	0	0	APBD	Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	waktu yang sediakan untuk makanan dan minuman	11 bulan	27.000.000	27.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	waktu yang disediakan untuk rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	300.000.000	300.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur**	**100 %**	**1.368.625.100**	**521.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis perlengkapan gedung kantoryang tersedia	2 jenis	72.442.600	100.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	gedung kantor yang mendapatpemeliharaan rutin /berkala	1 unit	72.500.000	80.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	kendaraan yang mendapatkanperawatan rutin/berkala	5 unit	194.502.500	95.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02.36	Pemeliharaan Taman Kantor			waktu penyediaan jasa pemeliharaantaman kantor	12 bulan	225.350.000	26.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dilakukan rehabilitasi	1 UNIT	403.830.000	220.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02.43	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 unit	250.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.02.44	Pengadaan Mebeuler					150.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya**	**100 %**	**111.750.000**	**111.750.000**		
4.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Bukitintan	Kecamatan Girimaya	PNS yang mengikuti diklat/bintek/sosialisasi/ diklat dalam satu (1) tahun	8 orang	50.000.000	50.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.05.85	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jenis pakaian pegawai yang tersedia	60 stel	61.750.000	61.750.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
									Daerah
4.03.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan**	**100 %**	**25.000.000**	**25.000.000**		
4.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja OPD yang tersedia	3 laporan	5.000.000	5.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			5.000.000	5.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Laporan Keuangan Akhir Tahunyang tersedia	0 laporan	5.000.000	5.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.06.05	Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Laporan Renja, RKA, dan DPA	3 laporan	5.000.000	5.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.06.22	Penyusunan laporan Sistem Pengendalian InternPemerintah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			5.000.000	5.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.28	**Program Penelitian dan Pengembangan**			**1. Persentase dokumen perencanaan yang digunakandalam perenanaan pembangunan daerah**	**100 %**	**1.348.672.200**	**0**		
				2. Persentase implementasi rencana kelitbangan	**20 %**				
				3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	**20 %**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				4. Persentase perangkat daerahyang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	**20 %**				
				5. Persentase kebijakan inovasiyang diterapkan di daerah	**20 %**				
4.03.28.01	Penelitian dan Pengembangan PembangunanDaerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.28.02	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Jumlah inovasi dan teknologi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang	3 inovasi dan teknologi	945.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.28.03	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian Bidang Keuangan Dalam Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan AsetDaerah, Reformasi Birokrasi			Jumlah pelaksanaan dan evaluasipenelitian bidang keuangan	2 kali	129.732.800	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.28.04	Penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan terhadap keberadaan, penyebaranmasyarakat miskin perkotaan pada tingkat kecamatan dan kelurahan Kota Pangkalpinang			Jumlah survey penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dilaksanakan.	21 kali	140.518.900	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.28.05	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Pembangunan Untuk Peningkatan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			Jumlah penelitian dan Pengembangan bid. Ekonomi untuk peningkatan pajak daerah dan restribusi daerah	1 penelitian	133.420.500	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29	**Program Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Data/informasi Daerah**			**1. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD**	**100 %**	**5.370.622.971**	**3.405.520.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				2. Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	**100 %**				
				3. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	**100 %**				
				4. Persentase Tersedianya data informasi komposit	**100 %**				
4.03.29.01	Penyusunan RKPD	Bukitintan	Kecamatan Girimaya			230.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			167.996.174	250.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.03	Koordinasi Forum Kota Sehat Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen koordinasi forum kotasehat Pangkalpinang	1 dokumen	98.377.750	150.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.04	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan KotaPangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Laporan hasil koordinasi penanggulangan kemiskinan	1 laporan	84.375.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.05	Survey Perencanaan Pembangunan Daerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen Survey Perencanaan Kota Pangkalpinang	1 Dokumen	228.900.000	300.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.06	Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen LAKIP kota Pangkalpinang	1 dokumen	0	125.520.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.07	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			133.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.08	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Gerakan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Laporan monev, pengendalian dan pelaporan gerakan	1 laporan	80.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	Masyarakat Hidup Sehat			masyarakat hidup sehat					Daerah
4.03.29.09	Workshop perencanaan pembangunan daerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			57.557.400	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.10	Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kota Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			151.429.100	100.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.11	Penyusunan data / informasi Sosial Budaya	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Jenis data/informasi elektronik sosial budaya yang tersedia	1 data/informasi elektronik	63.250.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.12	Pemuktahiran Data Infrastruktur daerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen data infrastruktur secara akurat yang tersedia	1 dokumen	249.757.500	230.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.13	Pengolahan data SDA dan LH	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Data informasi SDA dan LH	1 paket	493.474.247	500.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.14	Kelompok Kerja Penataan dan Pelestarian KotaPusaka(Pokja P2KP)	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Draf dokumen perencanaan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P2KP) yang tersedia	1 Dokumen	389.630.000	400.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.15	Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (PokjaPKP)	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Jumlah dokumen hasil Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman(Pokja PKP)	1 dokumen	201.680.500	150.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.16	Pengelolaan Sistem E-Planning	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Jenis data elektronik perencanaan jangka pendek yang tersedia	1 jenis	238.952.000	200.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.17	Penyusunan RKPD Perubahan	Sriwijaya	Bukit Intan			93.301.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
									Daerah
4.03.29.18	Kelompok Kerja Air Minum dan PenyehatanLingkungan (Pokja AMPL)	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Jumlah dokumen hasil Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	1 dokumen	425.161.000	250.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.19	Pengembangan Website	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Media elektronik perangkat daerahyang terkelola	1 media elektronik	49.940.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.20	Penyusunan Evaluasi RKPD	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			89.555.900	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.21	Pelaksanaan Pengusulan DAK	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			118.074.500	150.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.22	Koordinasi Pengarustamaan Gender KotaPangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen koordinasi pengarustamaan gender Kota Pangkalpinang	1 dokumen	68.625.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.23	Penyusunan Data/Informasi Pemerintahan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Laporan data/informasi pemerintah	1 laporan	96.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.24	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.25	Koordinasi Kota Layak Anak	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen koordinasi kota layak anak Kota Pangkalpinang	1 dokumen	70.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.26	Evaluasi RPJMD 2018-2023	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			80.000.000	80.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.03.29.27	Evaluasi Rencana Kerja OPD	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			103.150.900	120.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.28	Evaluasi Penggunaan Dana DAK	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			80.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.29	Evaluasi Renstra OPD	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			90.920.500	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.30	Bintek Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.31	Penyusunan masterplan kawasan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.32	Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Terlaksananya koordinasi pembangunan kampung senyum	100 persen	175.774.500	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.33	Koordinasi dan Sinkronisasi PembangunanInfrastruktur Kota			Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembangunan infrastruktur kota	1 dokumen	253.401.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.36	Koordinasi stunting Kota Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Dokumen hasil koordinasi stuntingKota Pangkalpinang	1 dokumen	60.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.37	Workshop Penyusunan LAKIP Kota Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.38	Penyusunan video profil Kota Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.03.29.39	Statistik Strategis Infrastruktur Daerah	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.40	Kajian Insfrastruktur Kota Pangkalpinang	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.41	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif/RENDIKRAF Kota Pangkalpinang			Dokumen Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang	1 dokumen	140.930.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.42	Koordinasi Penyusunan Dokumen PerencanaanBidang Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang			Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif Kota Pangkalpinang	1 dokumen	134.135.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.43	Penyusunan Perubahan RPJMD 2018-2023					300.000.000	0	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.03.29.44	Pengelolaan Data dan Informasi PembangunanDaerah			Jumlah informasi pembangunandaerah yang dibuat	24 informasi	73.274.000	400.000.000	APBD	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
JUMLAH							**9.381.221.258**	**5.134.070.000**	

4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**15.134.491.646**	**0**		
4.04	**Keuangan**					**15.134.491.646**	**0**		
4.04.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**2.280.194.000**	**0**		
4.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					670.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

4.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu jasa administrasi keuangan	12 Bulan	295.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan			Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	150.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikanperalatan kerja yang tertangani	12 bulan	100.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu layanan penyediaanATK yang tertangani	12 bulan	201.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	80.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tertangani	12 bulan	11.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantoryang tertangan	12 bulan	189.300.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah waktu layanan penyediaanperalatan rumah tangga yang tertangani	12 bulan	5.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan			Jumlah waktu layanan penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	5.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu layanan penyediaanmakanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	102.394.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.18	Rapat-rapat koordinaasi dan konsultasi ke luardaerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	300.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.34	Penataan arsip perkantoran			Jumlah dokumen arsip perkantoranyang tertata	10 dokumen	86.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.01.42	Penataan Inventarisasi Aset SKPD			Jumlah dokumen inventaris yang tertata	2 dokumen	85.500.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**1. Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur**	**100 %**	**1.989.656.000**	**0**		
				2. Meningkatnya sarana danprasarana aparatur dalam kondisi baik					
4.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantoryang tersedia	8 unit	270.850.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantoryang tersedia	1 paket	0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.10	Pengadaan Mebeleur			Jumlah Meubelair yang tersedia	10 set	195.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan rutin	1 unit	190.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas operasionalyang terpelihara	8 unit	377.930.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor			Jumlah peralatan gedung kantoryang terpelihara	4 unit	60.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					702.140.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.45	Pembangunan Gudang Peralatan					40.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.46	Penyusunan DED Perencanaan dan PengawasanPembangunan Gedung Arsip					103.736.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.47	Rehabilitasi Instalasi Listrik Gedung Kantor					50.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.02.48	Pembangunan Gedung Arsip					0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**1. Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya**	**100 %**	**160.926.000**	**0**		
				2. Meningkatnya kapasitassumber daya aparatur					
4.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 pegawai	40.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan			Jumlah pakaian dinas yan dibuat	170 stel	120.926.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**1. Persentase jumlah laporanyang terpenuhi**	**100 %**	**355.935.000**	**0**		
				2. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan					
4.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisaasi kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja danikhtisar kinerja SKPD yang disusun	1 laporan	2.850.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang disusun	1 laporan	3.310.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.04.06.03	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran			Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1 laporan	143.120.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunan			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	3.200.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06.05	Penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)			Jumlah dokumen RENJA yang disusun	1 dokumen	7.505.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06.15	Penatausahaan buku kas umum daerah			Jumlah buku kas umum daerah yangdisususun	16 buku	173.670.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06.18	Penyusunan SOP			Jumlah dokumen SOP yang disusun	1 dokumen	12.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.06.22	Penyusunan SPIP			Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 laporan	10.280.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17	**Program Peningkatan Dan PengembanganPengelolaan Keuangan Daerah**			**1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah**	**86 %**	**8.706.615.646**	**0**		
				2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja					
4.04.17.01	Penyusunan analisa standar belanja			Jumlah Perwako tentang Standar Belanja yang disusun	1 Perwako	122.050.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.05	Penyusunan rancangan perda tentang pajak daerahdan retribusi daerah			Jumlah Perwako tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun	1 perda	30.839.950	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD			Jumlah Perda tentang APBD yangdisusun	1 perda	343.740.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD			Jumlah Perwako tentang PenjabaranAPBD yang disusun	1 Perwako	361.450.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.08	Penyusunan rancangan perda tentang perubahanAPBD			Jumlah Perda tentang PerubahanAPBD yang disusun	1 perda	379.690.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.09	Penyusunan rancangan peraturan KDH penjabaran			Jumlah Perwako tantang PenjabaranPerubahan	1 perwako	313.754.500	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	perubahan APBD			APBD yang disusun					
4.04.17.10	Penyusunan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Jumlah Perda tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD yang disusun	1 perda	826.104.500	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD			Jumlah Perwako tentang PertanggungjawabanPelaksanaanAPBD yang disusun	1 perwako	394.973.696	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah			Jumlah sumber-sumber PendapatanPajak Daerah yang baru	30 %	608.740.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.22	Penyelesaian dokumen SPP dan SPM			Jumlah Dokumen SPP dan SPM yang diselesasaikan	10.648 SPP/SPM	99.215.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.23	Penyusunan KUA dan PPAS			Jumlah KUA dan PPAS yang disusun	1 Laporan	420.250.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.28	Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah			Jumlah TAPD yang studi pembelajaran	100 %	41.750.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.29	Update komputerisasi gaji			Jumlah data gaji pegawai yang terupdate	3.193 pegawai	158.413.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.30	Monitoring,evaluasi dan pelaporan			Jumlah laporan monitoring evaluasidan pelaporan yang disusun	1 Laporan	0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.75	Penyusunan profil pendapatan			Jumlah dokumen profil pendapatan	1 dokumen	177.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.80	Sosialisasi Pajak Daerah			Jumlah peserta sosialisasi Pajak Daerah	300 peserta	85.900.050	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.84	Penyusunan peraturan kebijakan perumusan dan perencanaan anggaran			Jumlah Perwako tentang Kebijakanperencanaan Anggaran	1 Perwako	310.400.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.85	Sosialisasi peraturan kebijakan perumusan dan perencanaan anggaran			Jumlah Peserta Sosialisasi Perumusan dan Perencanaan	70 peserta	90.200.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				Anggaran					
4.04.17.86	Implementasi penatausahaan belanja daerah			Jumlah Penerbitan SP2D	10.648 SP2D	177.900.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.93	Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah			Jumlah sistem pengembangan pengelolaan keuangan daerah	100 %	883.300.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.97	Pemeliharaan sarana dan prasarana sitem informasi keungan daerah			Jumlah waktu pemeliharaan saranadan prasarana SIKD	100 %	44.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.98	Peningkatan SDM Sistem Informasi Keuangan Daerah			Jumlah SDM Sistem Informasi Keuangan Daerah yang dilatih	100 %	100.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.115	Percetakan Massal,Penyerahan SPPT PBB danPelaksanaan Pekan Panutan PBB			Jumlah SPPT PBB yang tercetak	57.000 WP	250.170.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.123	Update pajak daerah			Jumlah data update pajak daerah	4.250 WP	125.449.950	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.126	Pemeliharaan sistem pajak daerah			Jumlah waktu pemeliharaan sistem pajak daerah	12 Bulan	151.500.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.128	Pengembangan aplikasi PPAS dan draf RKA			Jumlah jenis aplikasi PPAS dan drafRKA	100 %	185.155.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.129	Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Kas Daerahsecara Elektronik			Jumlah aplikasi pengelolaan kas daerah dibuat	1 aplikasi	135.250.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.130	Penyusunan Raperda Tentang Penyertaan Modal					148.200.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.133	Rakor Keuangan			Jumlah peserta rakor keuangan	100 peserta	40.315.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.136	Penyusunan Raperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					148.950.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.138	Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi penatausaan			Jumlah peserta bimtek pengelolaankeuangan bagi penatausahaan	60 peserta	0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.144	Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian daerah			Jumlah dokumen laporan tindak lanjut penyelesaian kerugian	1 laporan	0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				daerah					
4.04.17.145	Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah			Jumlah sistem informasi pajak daerah yang dikembangkan	100 %	0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.147	Pemanfaatan data dan aplikasi Pendukung SIKD			Jumlah data dan aplikasi pendukungSIKD	3 aplikasi	120.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.148	Pemeliharaan data base dan aplikasi pendukungSIKD			jumlah data base dan aplikasi yangdipelihara	3 database	44.305.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.149	Bimbingan teknis/sosialisasi aplikasi pendukung SIKD					105.500.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.150	Penyusunan Laporan Konsolidasi			Jumlah laporan konsolidasi yang disusun	1 laporan	125.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.151	Peningkatan Potensi dan Realisasi Dana Transfer Pusat ke Daerah			Jumlah peningkatan dana transferpertahun	15 %	543.630.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.152	Pendataan dan penatausahaan piutang pajakdaerah			Jumlah penurunan Piutang Pajakdaerah	15 %	247.760.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.17.153	Peningkatan Potensi dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah			Jumlah peningkatan PAD	20 %	365.760.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31	**Program Peningkatan Manajemen Aset dan Investasi Daerah**			**1. Persentase jumlah aset yangdikelola pemerintah daerah**	**100 %**	**1.641.165.000**	**0**		
				2. Meningkatnya jumlah asetyang dikelola pemerintah					
4.04.31.02	Entry data barang inventaris/barang milik daerah untuk buku besar aset			Jumlah dokumen barang inventaris/barang daerah dalam buku besar	1 dokumen	246.250.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31.07	Penghapusan dan pelelangan barang milik daerah			Jumlah dokumen penghapusanbarang milik daerah	1 dokumen	338.600.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.04.31.09	Penilaian aset daerah			Jumlah laporan penilaian aset daerah	35 laporan	110.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31.12	Inventarisasi barang milik daerah			Jumlah dokumen inventaris barangmilik daerah	216 dokumen	183.200.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31.13	Percepatan persetifikatan tanah milik daerah			Jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan	50 sertifikat	299.715.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31.14	Pengamanan aset milik daerah			Jumlah aset daerah persil bidangtanah yang diamankan	40 persil	315.000.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31.15	Pengaplikasian dan pendampingan SIMDA aset			Jumlah UPB yang didampingi dalam mengaplikasi SIMDA Aset	216 UPB	0	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
4.04.31.16	Peningkatan manajemen aset/barang			Jumlah peserta yang mengikutiBimtek Manajemen Aset	216 peserta	148.400.000	0	APBD	Badan Keuangan Daerah
JUMLAH						15.134.491.646	0		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**4.482.500.000**	**0**		
4.05	**Kepegawaian**					**4.482.500.000**	**0**		
4.05.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase layanan administrasi perkantoran yang**	**100 %**	**545.100.000**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				tertangani					
4.05.01.02	Pengadaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yangtertangani	12 Bulan	90.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah layanan jasa administrasikeuangan yang tertangani	12 Bulan	155.100.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah layanan jasa kebersihankantor yang tertangani	12 Bulan	55.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 Bulan	20.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah layanan penyediaan alat tuliskantor yang tertangani	12 Bulan	15.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah layanan penyediaan barangcetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	20.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bagunan kantor yang tertangani	12 Bulan	4.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah layanan penyediaan peralatan rumah tangga yang tertangani	12 Bulan	4.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah layanan penyediaan bacaan/buku peraturan perundang-undangan yang tertangani	12 Bulan	2.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	20.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani	12 Bulan	160.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100 %**	**200.000.000**	**0**		
4.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	30.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	5 Unit	140.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.02.25	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan GedungKantor			Jumlah peralatan dan perlengkapangedung kantor yang tersedia	2 Unit	30.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya**	**100 %**	**104.975.000**	**0**		
4.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti diklatformal	10 Orang	50.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.05.60	Peninjauan masa kerja dan Peningkatan PendidikanPNS			Jumlah ASN yang mendapat tambahan masa kerja dan peningkatan pendidikan	50 Orang	19.975.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang diadakan	50 Stel	35.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**61.272.000**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD yangdisusun	3 Dokumen	9.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06.03	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran/ prognosis keuangan			Jumla laporan keuangan semesteranyang disusun	1 Dokumen	9.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhirtahun yang disusun	1 Dokumen	9.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06.05	Penyusunan Rencana kerja, RKA, dan DPA			Jumlah laporan Renja, RKA dan DPAyang disusun	3 Dokumen	10.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06.27	Forum Perangkat Daerah			Jumlah pemangku kepentingan yanghadir	30 Peserta	9.537.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06.28	Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)			Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 Dokumen	7.500.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.06.29	Penyusunan Renstra			Jumlah jenis laporan perencanaanjangka menengah yang tersusun	1 Dokumen	7.235.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64	**Program Kepegawaian Daerah**			**1. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan danpelatihan struktural**	**61,50 %**	**3.571.153.000**	**0**		
				2. Indeks Reformasi Birokrasi(Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)	**62,50 Nilai**				
				3. Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	**85 %**				
				4. Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	**75 Nilai**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.05.64.01	Pendidikan dan penjenjangan struktural bagi PNS			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan penjenjangan strutural	37 Orang	1.202.700.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.02	Proses Penyelesaian cuti bagi PNS Kota Pangkalpinang			Jumlah penyelesaian cuti ASN KotaPangkalpinang	10 Orang	47.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.03	Diklat Teknis Tugas dan Fungsi			Jumlah ASN yang mengikuti diklatteknis tugas dan fungsi	20 Orang	85.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.04	Pelatihan Dasar Bagi CASN Daerah			Jumlah CASN yang mengikutipelatihan dasar	26 Orang	315.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.06	Uji Kompetensi bagi ASN Kota Pangkalpinang			Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi	41 Orang	155.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.07	Pengukuran Indeks Profesional ASN			Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan pengukuran indeks profesional ASN	70 Orang	50.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.08	Pengembangan Kompetensi PNS			Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	70 Orang	43.400.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.09	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS			Jumlah pelaksanaan pembinaan karirASN	6 Kali	105.900.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.10	Peningkatan dan Pembinaan Disiplin Aparatur SipilNegara			Jumlah penyelesaian kasus ASN yangindispliner	5 Orang	40.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.11	Seleksi penerimaan CASN dari pelamar umum			Jumlah peserta seleksi CASN yanglulus sesuai dengan formasi yang disetujui	250 Orang	5.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.12	Pengelolaan administrasi CASN menjadi ASN			Jumlah CASN yang diangkat menjadiASN	250 Orang	28.860.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.05.64.13	Pengelolaan administrasi kenaikan pangkatotomatis PNS			Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	600 Orang	98.950.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.14	Pengelolaan Data ASN Sistem Aplikasi PelayananKepegawaian (SAPK)			Jumlah data pelayanan kepegawaianyang dikelola	3.000 Data	260.350.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.15	Penyusunan Fomasi Pegawai			Jumlah formasi yang diusulkan	250 Formasi	24.450.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.16	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang MemilikiMasa Kerja 10, 20, 30 Tahun			Jumlah PNS yang menerima penghargaan	200 Orang	32.311.750	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.17	Pengelolaan Administrasi Pensiun PNS			Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	100 Orang	50.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.18	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Izin Belajarbagi PNS			Jumlah ASN pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugasbelajar	7 Orang	133.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.19	Penyelesaian Administrasi Karpeg, Karis/ Karsu			Jumlah Karpeg, Karir/Karsu, yang diterbitkan	150 Kartu	28.740.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.20	Pengelolaan dan Pengembangan Website Kepegawaian			Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	2 Website	54.265.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.21	Penataan Arsip Kepegawaian			Jumlah arsip kepegawaian yang didata	50 Meter lari	15.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.22	Pengelolaan Administrasi Dalam Jabatan Fungsional			Jumlah ASN yang diangkat dalamjabatan fungsional	30 Orang	38.075.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.23	Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)			Jumlah pelaksanaan seleksi JabatanPimpinan Tinggi yang terfasilitasi	1 Kali	125.735.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.24	Seleksi Mutasi PNS (Mutasi Masuk dan MutasiKeluar)			Jumlah PNS yang mengikuti seleksimutasi masuk dan keluar	30 Orang	57.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.05.64.25	Pengelolaan dan Pengembangan E-SMILE			Jumlah jenis data yang tersusun	1 Jenis data elektronik	130.850.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.26	Pembinaan pegawai KORPRI			Jumlah pelaksanaan HUT KORPRI	1 Kali	157.187.500	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.33	Pengelolaan E-LHKPN			Jumlah kepatuhan pelaporan LHKPNsecara elektronik	43 Orang	67.855.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.34	Pekan Olahraga KORPRI			Jumlah cabang yang dilombakan	7 Jenis	141.123.750	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.35	Rakor Kepegawaian			Jumlah peserta yang mengikuti rakor kepegawaian	50 Orang	12.000.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.05.64.36	Pengukuran Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian			Jumlah OPD yang diikutsertakandalam menilai pelayanan kepegawaian	30 OPD	66.400.000	0	APBD	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
JUMLAH						**4.482.500.000**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					**5.286.054.500**	**0**		
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat**					**5.286.054.500**	**0**		
1.05.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**380.340.000**	**0**		
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	80.400.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	145.440.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	27.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yangtertangani	12 bulan	10.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Bukitbesar	Kecamatan Girimaya	Jumlah waktu layanan penyediaanATK yang tertangani	12 bulan	6.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	5.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tertangani	12 bulan	3.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu layanan penyediaanmakanan dan	12 bulan	3.500.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				minuman yang tertangani					
1.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	100.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**195.000.000**	**0**		
1.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	20.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas operasionalyang terpelihara	7 unit	175.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**100 %**	**137.600.000**	**0**		
1.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	50.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	146 stell	87.600.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase jumlah laporan yangterpenuhi**	**100 %**	**15.000.000**	**0**		
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD yangdisusun	5 dokumen	2.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5 dokumen	2.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhirtahun yang disusun	5 dokumen	2.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA)yang disusun	5 dokumen	3.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.19	Penyusunan laporan SPM			Jumlah dokumen SPM yang disusun	5 dokumen	3.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun	5 dokumen	3.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.06.27	Forum Perangkat Daerah					0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34	**Program Penyelenggaraan Penanggulangandan Mitigasi Bencana**			**1. Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia**	**80 %**	**4.558.114.500**	**0**		
				2. Persentase kelurahan siaga bencana	**60 %**				
				3. Perentase penanganan tanggap darurat	**100 %**				
				4. Persentase korban bencana mendapatkan bantuan sosial	**100 %**				
				5. Persentase obyek terdampakbencana yang tertangani dengan baik	**85 %**				
1.05.34.05	Pemeliharaan Peralatan Penunjang Penanggulangan Bencana			Jumlah peralatan penunjang yang terpelihara	15 unit/barang	12.500.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.07	Dana Hibah Siap Pakai/Siap Siaga Bencana			Jumlah paket dana siap pakai / siapsiaga bencana yang tersedia	1 paket	120.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.34.24	Tanggap darurat dan evakuasi korbanpenanggulangan bencana			Jumlah waktu terlaksananya operasional tanggap darurat dan evakuasi korban penanggulangan bencana	12 bulan	3.958.837.500	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.26	Penyusunan / Pendataan Laporan Barang Logistik			Jumlah dokumen pendataan baranglogistik	2 dokumen	8.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.27	Pengumpulan, Pengelolaan dan Pelaporan Data			Jumlah data sebelum, saat dan setelah bencana yang tersedia	3 data	190.877.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.29	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Daerah Rawan Bencana			Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan bencana	3 dokumen	0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.32	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana danData Base / Peta Potensi Bencana			Jumlah dokumen kajian risiko bencana dan data base / peta potensi bencana yang disusun	1 dokumen	0	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.43	Siaga Bencana			Jumlah aparatur dan masyarakatyang kebutuhannya terpenuhi dalam penanganan bencana	500 orang	50.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.45	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana			Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulanganbencana	80 orang	52.090.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.46	Pelatihan Penanggulangan Bencana			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penanggulangan bencana	120 orang	65.810.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.47	Perumusan Kebijakan Umum Rehabilitasi/Rekonstruksi Penanggulangan Pasca Bencana			Jumlah paket rumusan kebijakanumum rehabilitasi/rekonstruksi penanggulangan bencana yang tersedia	1 paket	30.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.34.48	Pengadaan Buffer Stok Penanggulangan Bencana			Jumlah buffer stok yang tersedia	15 jenis/barang	70.000.000	0	APBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH						5.286.054.500	0		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					**2.277.000.000**	**2.001.813.370**		
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat**					**2.277.000.000**	**2.001.813.370**		
1.05.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**70 %**	**522.480.980**	**504.805.000**		
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	60.600.000	45.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah layanan jasa administrasikeuangan yang tertangani	12 Bulan	136.945.000	138.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah layanan jasa kebersihankantor yang tertangani	12 Bulan	47.205.000	47.205.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah layanan jasa peralatan kerjayang tertangani	12 Bulan	27.100.000	27.100.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah layanan penyediaan ATKyang tertangani	12 Bulan	14.500.000	16.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah layaan penyediaan barangcetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	11.630.980	12.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah layanan penyediaan komponen istalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 Bulan	3.000.000	3.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah penyediaan makanan danminuman yang tertangani	12 Bulan	16.500.000	16.500.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah yang tertangani	12 Bulan	150.000.000	200.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.19	Pembuatan dan Pengelolaan Website			Tersedianya Informasi untuk publik	1 tahun	30.000.000	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.01.20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			jumlah layanan penyediaan peralatan kerja yang tertangani	1 paket	25.000.000	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 75%**	**75 %**	**167.585.000**	**144.475.000**		
1.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya gedung kantor	1 Unit	14.450.000	14.500.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12 Bulan	153.135.000	129.975.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur75%**	**75 %**	**16.630.739**	**30.000.000**		
1.05.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Keikutsertaan ASN dalam pendidikandan pelatihan	5 Orang	16.630.739	30.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					0	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					0	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**nilai laporan capaian kinerjakeuangan 30 Lap**	**25 Skor/Peringkat**	**20.500.000**	**20.500.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Dok	3.500.000	3.500.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Tersusunnya laporan keuangansemesteran yang disusun	3 Dok	4.000.000	4.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Tersusunnya laporan keuangan akhirtahun yang disusun	3 Dok	4.000.000	4.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Tersusunnya laporan dokumenRENJA (RKA, RKT, dan DPA)	3 Dok	5.000.000	5.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Tersusunnya laporan SPIP yangdisusun	3 Dok	4.000.000	4.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.30	**Program Pembinaan dan PengembanganKetahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya**			**1. Persentase pembinaanideologi dan wawasan kebangsaan 70%**	**70 %**	**1.128.976.670**	**998.660.370**		
				2. Koordinasi pencegahan penyalahagunaan narkotka					
1.05.30.01	Pemberdayaan tim terpadu			Jumlah pelaksanaan peberdayaantim terpadu	4 Kali	187.655.400	200.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.30.03	Peningkatan nilai - nilai wawasan kebangsaan			Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan nilai - nilai wawasankebangsaan	6 Kali	636.140.000	473.250.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.30.04	Koordinasi kewaspadaan dini didaerah			Jumlah pelaksanaan koordinasikewaspadaan dini di daerah	12 Kali	251.985.370	265.410.370	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.30.05	Koordiinasi pencegahan penyalahgunaan narkotika			jumlah kegiatan koordiansi	1 kali	25.870.900	30.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.30.06	Pendidikan Bela Negara bagi Kader PKK dan bagi para pelajar/masyarakat			Jumlah kegiatan pelatihan	1 kali	27.325.000	30.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.31	**Program pembinaan politik dalam negeri**			**Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi 70%**	**70 %**	**270.826.611**	**303.373.000**		
1.05.31.01	Verifikasi data bantuan keuangan parpol			jumlah pelaksanaan verifikasi databantuan keuangan parpol	3 kali	52.400.000	66.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.31.02	Pembinaan dan pemberdayaan Ormas			Jumlah ORMAS yang terdata	100 Kali	0	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.31.04	Pemantauan dan perkembangan politik di daerah			Jumlah laporan perkembangan politik	4 Kali	37.373.000	37.373.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.31.05	Forum kerukunan umat beragama (FKUB)			Jumlah pelaksanaan kegiatan forumkomunikasi umat	1 Kali	69.799.800	80.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.31.06	Koordinasi forum- forum diskusi politik			Jumlah pelaksanaan kegiatan forumdiskusi politik	2 Kali	59.650.000	60.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.31.07	Pendataan ORMAS/LSM/LNL			jumlah ormas yang terdata	100 ormas	51.603.811	60.000.000	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.36	**Program Ideologi, Wawasan Kebangsaan danKetahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama**			**Persentase pembinaan ideologidan wawasan kebangsaan**	**70 %**	**60.000.000**	**0**		
1.05.36.01	Monitoring ketahanan ekonomi, sosial budaya			jumlah kegaitan monitoring	12 kali	60.000.000	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.37	**Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**			**persentase Aparatur Yang Menaati Peraturan Yang Berlaku**		**51.000.000**	**0**		
1.05.37.01	Rapat koordinas POKJA revolusi mental			jumlah rapat koordiansi	2 kali	51.000.000	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
1.05.38	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasionaldan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**			**persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur**		**39.000.000**	**0**		
1.05.38.01	Pemantauan orang asing (WNA)			jumlah orang asing yang terdata	30 orang	39.000.000	0	APBD	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
JUMLAH						2.277.000.000	2.001.813.370		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					41.597.032.083	985.489.404		
1.01	Pendidikan					41.597.032.083	985.489.404		
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12bulan	100 %	2.114.797.094	0		
1.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik	12 Bulan	397.850.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	925.175.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.07	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang dibeli	10 unit	179.612.150	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	78.002.706	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah peralatan kerja yang mendapat perbaikan	3 Jenis	15.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu penyediaan ATK diOPD	12 Bulan	43.499.200	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	34.077.246	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			jumlah waktu penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah peralatan rumah yang dibeli	3 Jenis	33.662.900	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	5.600.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu penyediaan makanandan minuman pegawai	12 Bulan	30.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu rapat-rapat koordinasidan konsultasi luar daerah yang diikuti	12 Bulan	250.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.30	Penataan Arsip Perkantoran			Jumlah waktu penataan arsip perkantoran	12 Bulan	46.007.892	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.31	Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah			jumlah dokumen penatausahaanaset OPD yang disusun	3 dokumen	66.310.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase Aparatur Perangkat Daerah memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran selama 12 bulan**	**100 %**	**840.360.350**	**10.000.000**		
1.01.02.00	Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantoryang mendapat pemeliharaan	5 unit	10.000.000	10.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.07	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantoryang dibeli	1 Unit	27.500.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.09	Penyediaan Peralatan Gedung Kantor			jumlah peralatan gedung kantoryang dibeli	2 Unit	25.696.350	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.22	Pemeliharaan Gedung Kantor			Jumlah waktu pemeliharaan gedungkantor	12 Bulan	144.554.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.02.24	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	136.410.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02.140	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana TIK(Teknologi Informasi dan Komunikasi)			1. Jumlah Waktu Layanan TIK dalamMendukung Pelayanan Pendidikan	12 Bulan	296.200.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				6. Jumlah Sarana dan Prasarana TIKdalam Mendukung Layanan Pendidikan.	13 Sarana				
1.01.02.141	Pembangunan gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	200.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase Aparatur PerangkatDaerah yang meningkat kapasitasnya**	**100 %**	**525.343.400**	**0**		
1.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah pegawai yang mengikutipendidikan dan pelatihan formal	5 pegawai	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.85	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	110 Stel	71.145.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.93	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan			jumlah berkas perhitungan Penetapan Angka kredit yang dinilai	115 Berkas	89.047.400	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.94	Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah			Jumlah calon pengawas sekolahyang dididik dan dilatih	30 orang	365.151.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.05.105	Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target 90% (laporan)**	**10 dokumen**	**550.233.600**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.06.02	Penyusunan Laporan semesteran Keuangan			jumlah dokumen laporan semesterankeuangan yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah dokumen laporan keuanganakhir tahun yang disusun	1 dokumen	6.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06.32	Pelaksanaan Pendataan Pendidikan danKebudayaan			1. Jumlah Jenis Buku Profil Pendidikan dan Kebudayaan yangDisusun	1 Jenis	201.136.600	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah Jenis Buku Saku Pendidikan dan Kebudayaan yangDisusun	1 Jenis				
				3. Jumlah Jenis Buku Profil Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Disusun	1 jenis				
				4. Jumlah Jenis Buku Rangkuman Pendidikan yang Disusun	1 Jenis				
				5. Jumlah Satuan Pendidikan yangMelakukan Verifikasi dan Validasi Data Pokok Pendidikan	209 Satuan Pendidikan				
1.01.06.33	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			Tersedianya Dokumen Perencanaan	3 jenis	100.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06.34	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan			Tersedianya dokumen evaluasiperencanaan pembangunan	1 jenis	100.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.06.35	Bimtek Penatausahaan Keuangan Sekolah			Jumlah sekolah dengan penatausahaan keuangan baik	36 sekolah	138.097.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.20	**Program Peningkatan Mutu Pendidik danTenaga Kependidikan**			**1. Persentase guru PAUD Formalyang memiliki kualifikasi S1/DIVtenaga**	**60,90 %**	**23.395.414.203**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				kependidikan					
				2. Persentase guru SD yangmemiliki kualifikasi S1/DIV	93 %				
				3. Persentase guru SMP yangmemiliki kualifikasi S1/DIV	95,81 %				
				4. Persentase guru PAUD Formalyang memiliki sertifikat pendidik	24,57 %				
				5. Persentase guru SD yangmemiliki sertifikat pendidik	46,31 %				
				6. Persentase guru SMP yangmemiliki sertifikat pendidik	49,90 %				
				7. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas70	7,38 %				
				8. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SMP Nilaidiatas 70	30,94 %				
				9. Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran	20,16 %				
				10. Persentase guru SMP yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran	13,24 %				
1.01.20.55	Pengembangan Mutu PTK dalam Pemanfaataan TIK			1. Jumlah Guru SD yang Mengikuti Pelatihan Pembelajaran Berbasis TIK	40 Orang	149.999.800	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				2. Jumlah Guru SMP yang MengikutiPelatihan Pembelajaran Berbasis TIK	40 Orang				
1.01.20.56	Pengembangan Mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan			1. Jumlah peserta yang mengikutipengembangan mutu PTK PAUD, PNF dan Tenaga Kebudayaan	110 Orang	485.822.503	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. jumlah Guru PAUD dan PNF yang dapat mengikuti lomba pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaanketingkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	16 Orang				
				3. Jumlah Guru PAUD Formal berprestasi ketingkat selanjutnya (minimal tingkat provinsi)	3 Orang				
1.01.20.58	Pengembangan Mutu PTK DIKDAS			1. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SD terlatih	20 orang	688.545.900	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMP terlatih	20 orang				
				3. Jumlah PTK SD berprestasi yangmengikuti lomba tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)	3 orang				
				4. Jumlah PTK SMP berprestasi yangmengikuti lomba tingkat lanjutan (minimal tingkat provinsi)	3 orang				
				5. Jumlah Calon Kepala Sekolah SD-SMP Negeri yang mengikuti diklat	30 orang				
1.01.20.59	Pengelolaan GTK PAUD			1. Jumlah GTK PAUD yang	31 orang	2.234.150.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				dikelola					Kebudayaan
				2. Jumlah GTK PAUD yang menerimainsentif	612 orang				
1.01.20.60	Pengelolaan GTK DIKDAS			Jumlah GTK DIKDAS yang dikelola	520 orang	19.836.896.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.31	**Program Peningkatan Akses dan Mutu Layanan PAUD dan Pendidikan Non Formal**			**1. Angka Partisipasi Kasar PAUDFormal (0-6 tahun)**	**50,96 %**	**2.039.012.036**	**0**		
				2. Angka Partisipasi Kasar PAUDNon Formal (0-6 tahun	**10,15 %**				
				3. Angka Partisipasi Kasar (APK)Paket A	**1 %**				
				4. Angka Partisipasi Kasar (APK)Paket B	**5,75 %**				
				5. Angka Partisipasi Kasar (APK)Paket C	**9,50 %**				
				6. Jumlah PAUD yang terakreditasi A	**21 lembaga**				
				7. Jumlah Lembaga PendidikanNon Formal yang terakreditasi	**20 lembaga**				
				8. Jumlah dokumen kurikulumPAUD	**1 dokumen**				
				9. Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD	**2 kerjasama**				
				10. Jumlah dokumen kurikulumPNF	**1 dokumen**				
				11. Angka Kelulusan Paket A	**100 %**				
				12. Angka Kelulusan Paket B	**100 %**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				13. Angka Kelulusan Paket C	**100 %**				
1.01.31.06	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Non Formal			jumlah lembaga yang mendapatkanpeningkatan mutu layanan	64 lembaga	245.829.636	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.31.07	Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.31.35	Peningkatan Mutu Layanan Kelembagaan PAUD			1. 1. Terbinanya lembaga PAUD(lembaga)	97 Lembaga	145.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. 2. Terakreditasinya LembagaPAUD (lembaga)	77 Lembaga				
1.01.31.41	Peningkatan Mutu Layanan Sarana PAUD dan PNF			1. Jumlah Prasarana PAUD yangdirehabilitasi	2 ruang	595.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah meubelair PAUD yangdibeli	65 Unit				
				3. Jumlah Meubelair PNF yang dibeli	50 unit				
1.01.31.42	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Anak UsiaDini			pendidikan non formal		515.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.31.43	Peningkatan fungsi pelayanan KBM di SKBPangkalpinang			Jumlah siswa SKB Pangkalpinangyang mendapat pelayanan KBM	304 siswa	538.182.400	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.31.44	Peningkatan Akses Pendidikan Non Formal					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.31.45	Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD (DAK FISIK)					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33	**Program pengelolaan bantuan operasional pendidikan (BOP) PAUD**			**Persentase sekolah penerima BOP**	**100 %**	**75.000.000**	**80.000.000**		
1.01.33.01	Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Tamansari Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.02	Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 1Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.33.03	Pengelolaan Dana BOP di TKN KecamatanPangkalbalam Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.04	Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 2Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.05	Manajemen BOP PAUD			Jumlah lembaga yang termonitoringdalam penggunaan BOP PAUD	97 lembaga	75.000.000	80.000.000	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.07	Pengelolaan Dana BOP di TKN Pembina 3Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.08	Pengelolaan Dana BOP di TKN Kecamatan Rangkui Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.09	Pengelolaan Dana BOP di TKN Model Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.33.10	Pengelolaan Dana BOP di SKB Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOPselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34	**Program pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS)**			**Persentase sekolah penerimaBOS**	**100 %**	**80.000.000**	**0**		
1.01.34.01	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 1 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.02	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 2 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.03	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 3 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.04	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 4 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.05	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 5 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.34.06	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 6 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.07	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 7 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.08	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 8 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.09	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 9 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.10	Pengelolaan Dana BOS di SMPN 10 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.11	Manajemen BOS DIKDAS					80.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.101	Pengelolaan Dana BOS di SDN 1 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.102	Pengelolaan Dana BOS di SDN 2 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.103	Pengelolaan Dana BOS di SDN 3 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.104	Pengelolaan Dana BOS di SDN 4 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.105	Pengelolaan Dana BOS di SDN 5 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.106	Pengelolaan Dana BOS di SDN 6 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.107	Pengelolaan Dana BOS di SDN 7 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.34.108	Pengelolaan Dana BOS di SDN 8 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.109	Pengelolaan Dana BOS di SDN 9 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.110	Pengelolaan Dana BOS di SDN 10 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.111	Pengelolaan Dana BOS di SDN 11 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.112	Pengelolaan Dana BOS di SDN 12 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.113	Pengelolaan Dana BOS di SDN 13 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.114	Pengelolaan Dana BOS di SDN 14 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.115	Pengelolaan Dana BOS di SDN 15 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.116	Pengelolaan Dana BOS di SDN 16 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.117	Pengelolaan Dana BOS di SDN 17 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.118	Pengelolaan Dana BOS di SDN 18 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.119	Pengelolaan Dana BOS di SDN 19 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.120	Pengelolaan Dana BOS di SDN 20 Pangkalpinang			Persentase pengelolaan dana BOSselama 12 Bulan (%)	100 %	0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.121	Pengelolaan Dana BOS di SDN 21 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.34.122	Pengelolaan Dana BOS di SDN 22 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.123	Pengelolaan Dana BOS di SDN 23 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.124	Pengelolaan Dana BOS di SDN 24 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.125	Pengelolaan Dana BOS di SDN 25 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.126	Pengelolaan Dana BOS di SDN 26 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.127	Pengelolaan Dana BOS di SDN 27 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.128	Pengelolaan Dana BOS di SDN 28 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.129	Pengelolaan Dana BOS di SDN 29 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.130	Pengelolaan Dana BOS di SDN 30 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.132	Pengelolaan Dana BOS di SDN 32 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.133	Pengelolaan Dana BOS di SDN 33 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.135	Pengelolaan Dana BOS di SDN 35 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.136	Pengelolaan Dana BOS di SDN 36 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.137	Pengelolaan Dana BOS di SDN 37 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.138	Pengelolaan Dana BOS di SDN 38 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.139	Pengelolaan Dana BOS di SDN 39 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.34.140	Pengelolaan Dana BOS di SDN 40 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.141	Pengelolaan Dana BOS di SDN 41 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.142	Pengelolaan Dana BOS di SDN 42 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.143	Pengelolaan Dana BOS di SDN 43 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.144	Pengelolaan Dana BOS di SDN 44 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.145	Pengelolaan Dana BOS di SDN 45 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.146	Pengelolaan Dana BOS di SDN 46 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.147	Pengelolaan Dana BOS di SDN 47 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.148	Pengelolaan Dana BOS di SDN 48 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.149	Pengelolaan Dana BOS di SDN 49 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.150	Pengelolaan Dana BOS di SDN 50 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.151	Pengelolaan Dana BOS di SDN 51 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.152	Pengelolaan Dana BOS di SDN 52 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.153	Pengelolaan Dana BOS di SDN 53 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.154	Pengelolaan Dana BOS di SDN 54 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.155	Pengelolaan Dana BOS di SDN 55 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.156	Pengelolaan Dana BOS di SDN 56 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.34.157	Pengelolaan Dana BOS di SDN 57 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.158	Pengelolaan Dana BOS di SDN 58 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.160	Pengelolaan Dana BOS di SDN 60 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.161	Pengelolaan Dana BOS di SDN 61 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.162	Pengelolaan Dana BOS di SDN 62 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.163	Pengelolaan Dana BOS di SDN 63 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.164	Pengelolaan Dana BOS di SDN 64 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.165	Pengelolaan Dana BOS di SDN 65 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.166	Pengelolaan Dana BOS di SDN 66 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.167	Pengelolaan Dana BOS di SDN 67 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.168	Pengelolaan Dana BOS di SDN 68 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.34.169	Pengelolaan Dana BOS di SDN 69 Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35	**Program Peningkatan Akses dan MutuLayanan Pendidikan Dasar**			**1. Angka Partisipasi Kasar (APK)Pendidikan Dasar**	**100 %**	**11.976.871.400**	**895.489.404**		
				2. Angka Partisipasi Kasar (APK)Pendidikan Kesetaraan	**1,96 %**				
				3. Angka Partisipasi Kasar (APK)SD	**106,55 %**				
				4. Angka Partisipasi Kasar (APK)Perempuan SD	**106,15 %**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				5. Angka Partisipasi Kasar (APK)SMP	105,45 %				
				6. Angka Partisipasi Kasar (APK)Perempuan SMP	109,79 %				
				7. Angka Partisipasi Murni (APM)SD	88,25 %				
				8. Angka Partisipasi Murni (APM)SMP	77,50 %				
				9. Jumlah SD/MI yang terakreditasi A	48 sekolah				
				10. Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A	17 sekolah				
				11. Rata-rata nilai USBN SD	69,10 point				
				12. Rata-rata nilai UN SMP	58,06 point				
				13. Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	85 %				
				14. Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkanbeasiswa miskin	85 %				
				15. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD TingkatProvinsi, Nasional dan Internasional	8 prestasi				
				16. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP TingkatProvinsi, Nasional dan Internasional	12 prestasi				
1.01.35.01	Peningkatan Akses Pendidikan Dasar			Jumlah jenis Akses Pendidikan Dasar yang dibangun	4 Jenis	8.381.190.400	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.35.02	Peningkatan Mutu Layanan KelembagaanPendidikan Dasar			Jumlah jenis peningkatan mutu layanan kelembagaan PendidikanDasar	0 Jenis	40.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.03	Peningkatan Mutu Layanan Sarana PendidikanDasar			Jumlah jenis peningkatan mutu layanan sarana Pendidikan Dasar	0 Jenis	215.087.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.04	Peningkatan Mutu Layanan Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar			1. Jumlah siswa yang mengikuti AKMdan Survey Karakter SD	4.500 Siswa	1.115.103.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah siswa yang mengikuti AKMdan Survey Karakter SMP	3.500 Siswa				
				3. Jumlah peserta yang memahamiKurikulum SD	65 Orang				
				4. Jumlah peserta yang memahamiKurikulum SMP	65 Orang				
				5. Jumlah peserta yang memahamipenilaian SD	95 Orang				
				6. Jumlah peserta yang memahamipenilaian SMP	95 Orang				
				7. jumlah mata pelajaran (mapel)yang dibuatkan kisi-kisi USBN SD	5 Mapel				
				8. Jumlah mata pelajaran (mapel) yang dibuatkan kisi-kisi USBN SMP	7 Mapel				
				9. Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SD)	90 Sekolah				
				10. Jumlah sekolah yang menyusun dokumen kurikulum muatan lokal di sekolah (SMP)	30 Sekolah				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.01.35.05	Peningkatan Kualitas Peserta Didik Pendidikan Dasar			2. jumlah cabang perlombaan yangdiikuti (SD dan SMP) ke tingkat lanjutan	43 cabang lomba	812.571.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				7. jumlah siswa yang mengikutipendidikan karakter	600 siswa				
1.01.35.06	Pemberian Beasiswa Siswa SD			Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SD	1.500 siswa	675.880.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.07	Pemberian Beasiswa Siswa SMP			Jumlah siswa yang menerima beasiswa miskin dan berprestasi jenjang SMP	890 siswa	391.660.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.08	Penerimaan Peserta Didik Baru			Jumlah peserta didik yang diterimadi jenjang SD SMP (siswa)	7.901 siswa	51.380.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.09	Pembangunan Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)			Jumlah prasarana belajar yangdibangun	20 Ruang	56.575.000	895.489.404	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.10	Rehabilitasi Prasarana Belajar SD (DAK FISIK)			Jumlah prasarana belajar yangdirehabilitasi	24 Ruang	59.153.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.11	Pengadaan Sarana Belajar SD (DAK FISIK)			Jumlah sarana belajar yang dibeli	8 Set	51.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.12	Pembangunan Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)			Jumlah prasarana belajar yang dibangun	44 Ruang	24.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.13	Rehabilitasi Prasarana Belajar SMP (DAK FISIK)			Jumlah prasarana belajar yangdirehabilitasi1	33 Ruang	55.272.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.35.14	Pengadaan Sarana Belajar SMP (DAK FISIK)			Jumlah sarana belajar yang dibeli	4 Set	48.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**2.417.891.800**	**0**		
2.16	**Kebudayaan**					**2.417.891.800**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.16.21	**Program Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Budaya Benda dan Tak Benda**			**1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi**	**36 cagar budaya**	**2.417.891.800**	**0**		
				2. Jumlah Seni dan Budaya yangdilestarikan	**9 buah**				
				3. Jumlah Sejarah dan Tradisiyang dilestarikan	**11 buah**				
				4. Jumlah tempat pementasanseni budaya	**4 buah**				
2.16.21.01	Pengembangan, Pelestarian dan PerlindunganCagar Budaya dan Permuseuman			1. Cagar Budaya dan Permuseumanyang mendapat pemeliharaan	3 buah	137.518.200	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah Komunitas Pencinta cagarBudaya yang dibentuk	0 komunitas				
				3. Jumlah Tim Ahli Cagar Budayayang bersertifikat	0 orang				
				4. Jumlah jenis Lomba Cagar Budayadan Permuseuman yang diselenggarakan	0 jenis				
				5. Jumlah siswa yang mengenal cagar budaya dan museum (PAUD,SD dan SMP)	0 siswa				
				6. Jumlah Cagar Budaya yang terdaftar dan ditingkatkan statusnya	0 CB				
				7. Jumlah Workshop dan SosialisasdiTentang Cagar Budaya dan Permuseuman	0 kali				
2.16.21.02	Pengembangan, Pelestarian dan Perlindungan Senidan Budaya Daerah			1. Jumlah Festival Budaya Daerahyang diselenggarakan	1 Event	1.880.373.600	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah Gelar Seni Budaya yang diselenggarakan	1 Event				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				3. Jumlah Pentas Seni untuk menyambut tamu negara	10 kali				
				4. Terseleksinya group Lomba Senisuara tingkat nasional	3 group				
				5. Jumlah peserta yang mengikuti pawai budaya dan getar seni APEKSI	30 peserta				
				6. Jumlah kreasi seni daerah yang dihasilkan melalui seniman masuk sekolah (SMS)	2 kreasi seni				
				7. Terbentuknya dewan kesenian kota pangkalpinang yang dibentuk dan aktif	1 lembaga				
				8. Terseleksinya group seni musiktradisional yang lolos ke tingkat nasional	0 group				
				9. Terseleksinya groun seni taritradisional ke tingkat nasional	0 group				
				10. Jumlah group seni teater tradisional yang maju ke tingkatnasional	0 group				
				11. Jumlah group seni/sanggar/komuni tas yang terdaftar	0 group				
				12. Jumlah bimbingan teknis dan supervisi dibidang perfilman dan kesenian bagi pamong budaya danpenggiat seni dan perfilman	0 orang				
				13. Jumlah penggiat seni dan budaya yang mendapat bantuan	0 orang				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.16.21.03	Pelestarian Nilai Sejarah dan Tradisi			1. Jumlah seleksi dan pelaksanaanpekan budaya nasional	0 Event	400.000.000	0	APBD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Jumlah karya tulis hasil lawatansejarah	120 karya tulis				
				3. Jumlah penyelenggaraan pelestarian adat dan tradisi masyarakat pangkalpinang (Hari JadiPangkalpinang dan Provinsi)	2 Event				
				4. Terbentuknya lembaga adat melayu kota pangkalpinang yangdibentuk dan yang aktif	1 lembaga				
				5. Jumlah Anggota Saka Widya Budaya Bhakti yang mendapat pembinaan	23 Anggota				
				6. Jumlah Data dan InformasiSejarah dan Tradisi yang dikumpulkan	1 kali				
				7. jumlah Workshop dan SosialisasiTentang Sejarah dan Tradisi yang diselenggarakan	1 kali				
			JUMLAH			**44.014.923.883**	**985.489.404**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					95.531.315.500	8.567.700.000		
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					95.531.315.500	8.567.700.000		
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase layanan administrasiperkantoran yang dapat terpenuhi	100 persen	930.868.200	538.500.000		
1.03.01.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air danlistrik	12 Bulan	20.688.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.02	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	324.920.000	400.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.03	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah Jenis jasa kebersihan kantor	12 bulan	51.035.200	8.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.04	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah jenis jasa perbaikanperalatan kerja	5 Jenis	30.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.05	Penyediaan alat tulis kantor			Penyediaan alat tulis kantor	26 Jenis	28.575.000	35.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	5 Jenis	25.000.000	30.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.03.01.07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4 Jenis	4.150.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.08	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Jenis	96.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.09	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu tersedianya makanandan minuman	11 Bulan	20.000.000	25.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu pelaksanaan rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	200.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.01.11	Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran			Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran	12 Bulan	130.500.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapatdisediakan / dipelihara**	**100 Persen**	**442.410.000**	**0**		
1.03.02.02	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 Jenis	271.110.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02.42	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor					0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02.43	Inventarisasi Aset			Jumlah Kecamatan yang dilakukan inventarisasi	7 Kecamatan	171.300.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase tingkat kehadiranPNS dalam 1 tahun**	**100 persen**	**132.950.000**	**150.000.000**		
1.03.05.01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	150 Stel	132.950.000	150.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun**	**100 persen**	**30.000.000**	**11.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan hasil capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	6 Dokumen	5.000.000	5.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD			Jumlah laporan keuangan semesteryang disusun	6 Dokumen	5.000.000	5.500.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06.03	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD			Jumlah laporan pelaporan keuanganakhir tahun yang disusun	6 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06.04	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah dokumen RENJA (RKT, RKAdan DPA) yang disusun	6 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06.05	Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)			Jumlah laporan hasil pengendalianintern pemerintah yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52	**Program Pembangunan, Pengembangan, Penataan Infrastruktur dan sumber daya air**			**1. Presentase jalan yang direhabilitasi**	**40 %**	**61.623.537.900**	**7.868.200.000**		
				2. Panjang jalan baru	**20 km**				
				3. Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang	**20 %**				
				4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	**%**				
				5. Persentase jasa konstruksiyang tersertifikasi	**%**				
1.03.52.01	Perencanaan Bidang Cipta Karya			jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen	906.997.400	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.02	Pengawasan teknis bidang cipta karya			Jumlah dokumen pengawasan yang dihasilkan	5 Dokumen	700.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.03	Pembangunan gedung kantor			jumlah unit gedung kantor yangdibangun	5 Unit	2.336.661.900	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.06	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor			jumlah unit gedung kantor yang direhabilitasi	20 Unit	4.980.969.100	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.03.52.08	Advis teknis pelayanan IMB					0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.10	Penyusunan Rencana Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM)			Jumlah Dokumen RPJIM yangdisusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.12	Interkoneksi Pemasangan Pipa HDPE KotaPangkalpinang			Jumlah paket kegiatan koneksi pipayang dilakukan	1 Paket	5.417.769.500	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.14	Pengawasan Teknis Bidang Bina Marga			jumlah dokumen yang dihasilkan	25 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.16	Pembangunan Jembatan			Jumlah panjang jembatan yang dibangun	1 Unit	2.500.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.17	Pembangunan Fasilitas Saluran Jalan			jumlah panjang saluran jalan yangdibangun	8.100 M	499.100.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.18	Pembangunan Utilitas / Bangunan PelengkapSaluran Jalan			jumlah unit utliltas bangunan yangdibangun	20 Unit	840.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.19	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan			jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	3 Km	4.556.800.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.20	Peningkatan Konstruksi Jalan			jumlah panjang jalan yang dilakukan peningkatan	29 Km	16.737.385.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.21	Perencanaan Bidang SDA			Jumlah dokumen perencanaan yangdibuat	10 Dokumen	3.412.075.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.22	Pengadaan Sarana dan Prasarana SDA danPenunjang Infrastruktur			jumlah jenis kebutuhan operasionalalat berat SDA	1 Unit	3.500.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.23	Pemeliharaan Operasional Alat Berat			jumlah unit alat berat yang dipelihara	4 Unit	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.24	Pembangunan Jalan	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	jumlah panjang jalan yang dibangun	9 Km	7.868.200.000	7.868.200.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.25	Pengembangan fasilitas umum			jumlah unit bangunan fasilitasumum yang dikembangkan	5 Unit	4.000.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.26	Perencanaan Bidang Bina Marga			Jumlah dokumen yang dihasilkan	25 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.03.52.27	Pengawasan Teknis Bidang SDA			jumlah dokumen yang dihasilkan	25 Dokumen	679.800.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.28	Pembangunan Turap / Talud / Bronjong			jumlah luas bangunan yang dibangun	218 M	2.000.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.29	Pembangunan Pagar Kantor			jumlah unit pagar yang dibangun	4 Unit	687.780.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.30	Perencanaan Bidang Cipta Karya			jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.52.31	Pembangunan Utilitas Jalan			Jumlah panjang utilitas jalan yangdibangun	1 paket	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.53	**Program Penanggulangan Banjir danGenangan**			**1. Luas wilayah tergenang >2kali setahun**	**40 %**	**30.337.849.000**	**0**		
				2. persentase kawasan abrasiyang tertangani	**40 %**				
				3. persentase titik genangandan banjir yang tertangani	**40 %**				
1.03.53.01	Penataan Kolong Kota Pangkalpinang			Jumlah Kolong yang DilakukanPenataan	1 Kolong	6.206.021.500	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.53.02	Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong			Jumlah luas saluran yang dibangun	1.900 M	12.899.427.500	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.53.03	Normalisasi Saluran Sungai Dan Selokan Jalan			Jumlah sungai yang dilakukannormalisasi	0 Sungai	6.870.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.53.04	Pemeliharaan Rutin Saluran 7 Kecamatan			Jumlah Kecamatan yang dilakukanpemeliharaan	7 Kecamatan	4.362.400.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.53.05	Sarana Prasarana Sanitasi					0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54	**Program Tata Ruang**			**1. Jumlah RDTR yang tersusun**	**1 dokumen**	**2.033.700.400**	**0**		
				2. Jumlah RTBL yang tersusun					
				3. Persentase RTH publik wilayah perkotaan	**13 dokumen**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.03.54.01	Survey Pemanfaatan Ruang			Jumlah Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang di Survey	400 Dokumen	111.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.02	Audit tata ruang			jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait audittata ruang	0 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.03	Koordinasi Penataan Ruang Daerah KotaPangkalpinang			Jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkaitpenataan ruang	5 Kegiatan	91.300.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.04	Bimbingan Teknis Pemetaan			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Pemetaan	0 Orang	147.250.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.05	Sosialisasi Rencana Tata Ruang			Jumlah Peserta Sosialisasi	2.000 Orang	217.620.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.06	Pengaturan kebijakan Penataan Ruang			Jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkaitkebijakan tata ruang	0 Dokumen	293.100.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.07	Pengawasan Teknis Penataan Ruang			Jumlah Peserta Bimbingan	0 Orang	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.08	Survey dan Pemetaan			Jumlah Peta yang Dibuat	3 Dokumen	56.112.500	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.09	Pengadaan Prasarana dan Sarana Bidang Tata ruang			Jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta) terkait RRTRKota Pangkalpinang	0 Dokumen	286.490.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.10	Monitoring dan Evaluasi Lingkup Penataan Ruang			jumlah dokumen (Perda/Perwako/Keputusan Walikota/Laporan/Peta)terkait evaluasi penataan ruang daerah	1 Dokumen	226.500.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.54.11	Operasional Stadion Depati Amir dan Pemeliharaan			Jumlah unit stadion yang dikelola	1 Unit	604.327.900	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**19.256.865.000**	**100.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.04	**Pertanahan**					**19.256.865.000**	**100.000.000**		
2.04.19	**Program Pertanahan**			**Persentase penyelesaian kasus tanah negara**	**100 Persen**	**19.256.865.000**	**100.000.000**		
2.04.19.01	Pengukuran dan pendataan tanah			Tersedianya data status kepemilikantanah yang akurat	7 Dokumen	269.200.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.02	Pembuatan Perda Pendukung Pertanahan			Tersedianya aturan yang mendukung atau dijadikan dasardalam hal perizinan maupun pengadaan tanah	3 Perda	46.210.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.03	pembuatan database asset bidang tanah kota pangkalpinang			terwujudnya akurasi data fisik dandata yuridis bidang tanah	0 Database	67.988.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.04	Pengadaan Lahan untuk Peningkatan Sarana Prasarana Daerah			terdatanya persentase luasan tanah dan asset serta meningkatnya pengamanan terhadap asset tanahpemkot dengan pengukuran yang lebih detail	7 Lahan	15.555.850.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.05	Pembuatan Alas Hak dan Aset Bidang Pertanahan			luas lahan yang mempunyai alas hak / bersertifikat	7 Kecamatan	75.544.000	100.000.000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.06	Pemeliharaan Asset Tanah Pemerintah KotaPangkalpinang			Terlaksananya pemeliharaan asset tanah kota Pangkalpinang sehinggalebih terjaga baik dan fisiknya	60 Aset	84.900.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.07	Monitoring Pelaksanaan Perizinan (Ippl dan Izin Lokasi)			terlaksananya pengawasan dalamhal perizinan	100 Data	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.08	Fasilitasi Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan			terselesaikannya konflik antarapemerintah kota dengan	3 Kasus	55.710.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.09	Pengamanan Aset			terlaksananya pengamanan asset	15 Aset	2.820.000.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.04.19.10	Pengadaan Alat Ukur			jenis alat ukur yang disediakan	0 Unit	146.313.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.11	Pemetaan Batas Tanah Kecamatan dan Kelurahan			Tersedianya data pemetaan batas-batas tanah di Kecamatan dan Kelurahan	0 Kec	135.150.000	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.04.19.12	Pemutakhiran Data Aset Bidang Pertanahan			tersedianya data-data yang terbarutentang asset kota Pangkalpinang baik fisik maupun yuridis	1 Data	0	0	APBD	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
JUMLAH						**114.788.180.500**	**8.667.700.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					**30.007.002.000**	**0**		
1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**					**30.007.002.000**	**0**		
1.04.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**1.563.050.000**	**0**		
1.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah waktu penyediaan jasa suratmenyurat	12 Bulan	45.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			"Jumlah Waktu Pembayaran Tagihan Rekening listrik, air, telp/wifi "	12 Bulan	444.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Keuangan "	12 Bulan	307.500.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu penyediaan Peralatandan Bahan Pembersih	12 Bulan	75.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu layanan pemeliharaanPeralatan kerja	12 Bulan	29.050.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu layanan PenyediaanATK	12 Bulan	35.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu layanan Barang cetakan dan Penggandaan yangtersedia	12 Bulan	40.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan komponeninstalasi listrik/penerangam bangunan kantor	12 Bulan	35.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapankantor yang dibeli	20 unit	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah waktu layanan penyediaanperalatan rumah tangga yang tertangani	12 Bulan	3.500.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan			Jumlah waktu layanan penyediaanbahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tertangani	100 %	10.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu layanan penyediaanmakanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	50.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 Bulan	200.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.57	Penyediaan Jasa Pengelolaan Arsiparis Kantor			Jumlah Layanan Jasa Pengelolaan Arsiparis Disperkim yang tertangani	12 Bulan	31.500.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.01.58	Penyediaan Jasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Layanan Jasa Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Disperkimyang tertangani	12 Bulan	157.500.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.04.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**1.070.000.000**	**0**		
1.04.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			"Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional /(Mobil Crane) yang dibeli "	1 unit	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantoryang tersedia	7 unit	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantoryang tersedia	5 unit	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.10	Pengadaan mebeleur			Jumlah Meubelair yang tersedia	10 Unit	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	120.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas operasionalyang terpelihara	12 Bulan	500.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.160	Penyusunan DED dan Masterplan Gedung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			Jumlah Dokumen DED dan masterPlan yang disusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02.161	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			"Jumlah Rehab Gedung Kantor yang dilaksanakan "	1 Unit	250.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur**	**100 %**	**210.000.000**	**0**		
1.04.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	14 Org	50.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	105 Stel	75.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05.106	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan			"Jumlah Pakaian Kerja Lapangan dan	80 Stel	85.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				Perlengkapannya yang tersedia"					
1.04.05.107	Sosialisasi (Pencegahan, pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P4GN			"Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi"	155 Orang	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerjadan Keuangan**	**12 skor**	**352.945.000**	**0**		
1.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Dokume	5.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	8 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhirtahun yang disusun	8 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.05	Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA)yang disusun	5 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.06	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal			"Jumlah Dokumen yang tersusun "	1 Dokumen	40.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.18	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)			"Jumlah Dokumen yang disusun "	1 Dokumen	29.535.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan
1.04.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di LingkunganOPD	1 Dokumen	10.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.23	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SIPD di Lingkungan OPD			1. Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SIPD di Lingkungan OPD	1 Dokumen	12.800.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
				2. tersusunnya Laporan dengan Baik	100 %				
1.04.06.24	Pelaksanaan Evaluasi Renstra			"Jumlah Dukumen yang tersusun "	1 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.04.06.25	Pelaksanaan Evaluasi Renja			"Jumlah Dukumen yang tersusun "	1 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.28	Pelaksanaan Forum OPD			"Jumlah Dokumen yang tersusun "	1 Dokumen	9.610.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.30	Penyusunan Data dan Pengelolaan WebSite			"Jumlah Waktu Layanan Redaksi atau Data yang diterbitkan "	12 Bulan	182.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06.31	Penyusunan Data dan Inventarisasi Aset Disperkim			"Jumlah Dokumen yang tersusun "	1 Dokumen	39.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.16	**Program Lingkungan Sehat Perumahan**			**1. Terciptanya LingkunganPerumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman**		**8.886.243.744**	**0**		
				2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	**7 %**				
1.04.16.03	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungansehat perumahan			Jumlah Penyuluhan dan Pengawasanyang dilakukan	90 %	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.16.14	Pemutakhiran Data Base Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang			Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dokumen	69.243.744	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.16.15	Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Perumahan			Jumlah Jalan Lingkungan Perumahandan Drainase Lingkungan Perumahan yang direhab/ditingkatkan	11 unit	8.488.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.16.16	Peningkatan peran serta masyarakat dalampelestarian lingkungan perumahan			Jumlah Peserta Sosialisasi	50 unit	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.16.17	Pengkajian dan Penyusunan Rumusan PSUPerumahan			Jumlah Kajian yang disusun danyang dirumuskan	1 Kajian	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.16.18	Pencegahan dan Pengendalian Kawasan kumuhKota Pangkalpinang			Jumlah waktu penanganan kasusyang dilakukan	12 Bulan	29.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45	**Program Pertamanan dan Perkuburan**			**Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Publik**	**100 %**	**6.049.538.206**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.04.45.01	Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedurdan manual pengelolaan areal pemakaman			Jumlah Raperwako yang menjadiPerwako	1 Perwako	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.02	Pemeliharaan taman dan ruang terbuka hijau			Jumlah Waktu Jasa Pemeliharaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau	12 Bulan	1.749.250.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.03	Penebangan dan Pemangkasan pohon			Jumlah Waktu Jasa Penebangan dan Pemangkasan Pohon	12 Bulan	991.650.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman Terbuka Hijau			Jumlah Sarana dan Prasarana TamanTerbuka Hijau yang dibangun	7 Taman	607.302.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.05	Pemeliharaan Alun-alun Taman Merdeka			Jumlah waktu jasa pemeliharaan Alun-Alun Taman Merdeka	12 Bulan	250.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.06	Pengumpulan dan analisis data base jumlah jiwayang meninggal			Jumlah waktu pendataan dan penyusunan data base perkuburan	12 Bulan	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.07	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman			Jumlah sarana dan prasaranapemakaman yang dibangun	2 TPU	2.111.336.206	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.10	Pemutakhiran Data Pohon Milik Pemerintah			Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.11	Asuransi Akibat Pohon Tumbang (Milik Pemerintah)			Jumlah Pohon yang diasuransikan	1 Paket	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.12	Review DED dan Masterplan Taman Pasar mambo					0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.13	Penataan Taman Sari Kota Pangkalpinang			Jumlah Waktu Jasa Penataan Taman Sari Kota Pangkalpinang	12 Bulan	240.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.14	Penyusunan Dokumen Lingkungan			Jumlah Dokumel UKL-UPL yangdisusun	1 Dokumen	100.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.15	Penyusunan DED Spot Taman di Kawasan Hutan Kota Tua Tunu			Jumlah Dokumen DED yang Disusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.45.16	Penyusunan DED Spot Taman di Areal Chinese Town			Jumlah Dokumen DED yang disusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.04.45.17	Penyusunan DED Spot Taman di Kampong Muslim			Jumlah Dokumen DED yang disusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46	**Program Pengembangan Perumahan, danFasilitas Umum**			**Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umumdi Kawasan Permukiman**	**100 %**	**11.875.225.050**	**0**		
1.04.46.01	Pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat(PB)			Jumlah Rumah layak huni yang dibangun	50 unit	2.000.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.02	Peningkatan Kualitas rumah tidak layak huni bagiMasyarakat (PK)			Jumlah Rumah tidak layak huni yangdirehab	50 unit	2.025.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.03	Penyediaan Jasa Pelayanan Site Plan			Jumlah Waktu Pendampingan danMonitoring yang dilakukan	12 Bulan	75.269.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.04	Penyediaan Jasa Pengelolaan UPT Rusunawa			"Jumlah Waktu Pelayanan dan Pengelolaan UPT Rusunawa "	12 Bulan	780.445.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.05	Pemeliharaan Rutin RUSUNAWA					500.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.06	Peningkatan Kemudahan Akses dan Jaringan Layanan RUSUNAWA			"Jumlah Penghuni RUSUNAWAÂ "	100 KK	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.07	Rehabilitasi sedang/berat gedung RUSUNAWA			"Jumlah Rehab Gedung Kantor yang dilaksanakan "	2 Block	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.08	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang di Lingkungan RUSUNAWA			Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang yang dibangun	2 Paket	200.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.09	Masterplan dan DED Sarana dan PrasaranaPenunjang RUSUNAWA			"Jumlah (Masterplan dan DED Sarana Penunjang RUSUNAWA) yang diterbitkan "	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.10	Pemutakhiran Data Perumahan			Jumlah Dokumen Data Base yangtersusu	1 unit	58.978.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.11	Penyediaan Rehab dan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana					793.179.050	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.12	Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan			Peraturan yang disusun	2 Dokumen	72.354.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.04.46.13	Penyediaan Rehab dan Pemberian Bantuan Rumah Layak Huni bagi Korban Relokasi Program Pemerintah			Jumlah Rumah rusak yg dibangun	60 unit	850.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.14	Pembangunan Jalan Setapak			Jumlah Jalan Setapak yang dibangun	7.000 m2	400.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.15	Pembangunan Drainase dan Talud			Jumlah Drainase dan Talud yangdibangun	6.000 m2	3.500.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.16	Pemeliharaan Rutin Jalan Setapak			Terlaksananya Pemeliharaan RutinJalan Setapak	7 Kecamatan	300.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.17	Pemeliharaan Rutin Drainase			Jumlah waktu layanan Jasa Pemeliharaan Drainase	12 Bulan	320.000.000	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.18	Pembangunan Plat duiker			Jumlah Plat Duiker yang dibangun	42 Unit	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.19	Pendampingan Program Nasional Kota Tanpa Kawasan Kumuh (KOTAKU)			Jumlah Waktu Monitoring dan Pendampingan yang Dilakukan	12 Bulan	0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.46.20	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan KawasanPermukiman (RP3KP)					0	0	APBD	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
JUMLAH						30.007.002.000	0		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					4.415.213.600	5.463.246.395		
1.06	Sosial					4.415.213.600	5.463.246.395		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.06.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya Upaya PelayananAdministrasi Perkantoran**	**11 upaya**	**660.519.500**	**969.760.300**		
1.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12 Bulan	79.400.000	90.245.300	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.	12 Bulan	288.340.000	221.950.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	12 Bulan	53.767.000	84.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	12 Bulan	19.000.000	45.500.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian ATK.	12 Bulan	18.923.500	38.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Barang Cetakan da Penggandaan	12 Bulan	13.989.000	25.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor.	12 Bulan	9.400.000	11.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					0	10.515.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah Waktu Penyediaan Makanandan Minuman.	12 Bulan	37.700.000	59.750.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke LuarDaerah			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah.	12 Bulan	140.000.000	383.800.000	APBD	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.06.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana Aparatur**	**5 upaya**	**496.942.580**	**846.600.000**		
1.06.02.03	Pembangunan Gedung Kantor					0	180.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor					43.481.000	47.600.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.02.10	Pengadaan Mebeleur			Jumlah Meubeleur yang diadakan.	12 Unit	25.889.580	76.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah Gedung/Bangunan/Prasarana Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala.	1 Unit	70.650.000	125.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala.	10 Unit	356.922.000	418.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**	**2 %**	**15.000.000**	**87.896.095**		
1.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan/Pelatihan Formal.	5 Orang	15.000.000	30.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.05.85	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya					0	57.896.095	APBD	Dinas Sosial
1.06.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Keuangan**	**6 dokumen**	**15.488.000**	**17.000.000**		
1.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Tersusun Laporan	1 Dok	4.037.000	4.500.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Tersusun Laporan	1 Dok	3.707.000	4.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Tersusun Laporan	1 Dok	3.707.000	4.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.06.05	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)			Tersusun Laporan	3 Dok	4.037.000	4.500.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.06.06	Penyusunan Renstra					0	0	APBD	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.06.64	**Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**			**Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial**	**100 %**	**919.374.500**	**1.193.400.000**		
1.06.64.04	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Perlindungan Sosial Korban BencanaAlam			Jumlah Personil TAGANA yang Mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan Bencana.	67 Orang	590.540.000	595.900.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.05	Penguatan Masyarakat Di Daerah Rawan Bencanadan Konflik Sosial					0	70.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.06	Pemuktahiran Data PMKS					35.000.000	55.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.09	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)Skala Kota			Jumlah Pendamping PKH Kota Pangkalpinang.	25 Orang	56.050.000	105.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.10	Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB)					29.600.000	50.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.11	Pemeliharaan barang logistik / evakuasi penanggulangan bencana			Jumlah Paket Barang Logistik/Evakuasi Penanggulangan Bencana.	200 Paket	48.907.500	80.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.12	Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga					110.732.000	191.800.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.64.14	Pemulangan, Penjemputan dan Pemakaman orang terlantar					48.545.000	45.700.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66	**Program Rehabilitasi Sosial**			**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**	**9 %**	**953.472.120**	**747.550.000**		
1.06.66.01	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PenyandangDisabilitas					278.603.000	220.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.02	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia					238.688.000	125.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.03	Pelayanan Pengangkatan					10.773.000	20.000.000	APBD	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	Anak/Adopsi								
1.06.66.04	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS					25.600.000	55.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.05	Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak					149.014.000	85.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.07	Pelayanan Teknis Rumah Perlindungan Sosial (RPS)					122.908.000	65.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.08	Pelaksanaan Patroli Sosial dan pelayanan PsikososialBagi PMKS					87.886.120	102.550.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.09	Peringatan Hari Disabilitas					0	75.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.10	Peringatan Hari Lanjut Usia					0	0	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.11	Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan danPemenuhan Hak Penyandang Disabilitas					0	0	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.12	Penyusunan Raperda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia					0	0	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.13	Strategi Peningkatan Peran Keluarga danMasyarakat Terhadap Pencegahan dan Penyalahgunaan NAPZA					0	0	APBD	Dinas Sosial
1.06.66.14	Sosialisasi Perda Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia			Jumlah Peserta Sosialisai	100 Orang	40.000.000	0	APBD	Dinas Sosial
1.06.70	**Program Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan Sosial**			**Menurunnya Angka Kemiskinan**	**3,20 %**	**1.354.416.900**	**1.601.040.000**		
1.06.70.01	Monitoring dan Evaluasi Kualitas PengembanganKUBE					33.047.000	40.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.02	Pemuktahiran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin / BDT			Jumlah PMKS yang terdata dalamBDT.	13.000 KK	58.249.000	135.500.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.03	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BantuanPangan			Tersusunnya Laporan Monev BPNT.	7 Dok	24.200.000	53.200.000	APBD	Dinas Sosial

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	Non Tunai (BPNT)								
1.06.70.05	Bantuan Pengembangan KUBE					0	0	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.06	Pelaksanaan Hari Pahlawan			Terlaksananya Peringatan Hari Pahlawan	450 Orang	57.831.500	102.300.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.07	Pemberdayaan Kelembagaan Keluarga (LK3)Sakinah			Jumlah LK3 yang Mendapatkan Pembinaan.	8 LK3	7.059.000	28.600.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.08	Pusat Pelayanan Sosial Terpadu			Jumlah Kasus Sosial yang mendapatkan Penanganan.	48 Kasus	22.180.000	65.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.09	Satuan Bhakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos)			Jumlah Sakti Peksos	18 Orang	514.440.000	545.490.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.10	Bulan Bhakti Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Skala Kota			Terlaksananya Rangkaian KegiatanBulan Bhakti HKSN Kota Pangkalpinang.	400 Orang	35.985.400	170.750.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.12	Penguatan Kapasitas Potensi Sumber KesejahteraanSosial (PSKS)			Jumlah Personil PSKS	49 Orang	268.505.000	298.000.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.13	Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat (Petugas SLRT)			Jumlah Petugas SLRT	60 Orang	32.920.000	62.200.000	APBD	Dinas Sosial
1.06.70.14	Bantuan Usaha Bagi Fakir Miskin	KacangPe	Gerunggang	Jumlah fakir miskin (PKH dan Non PKH) yang mendapatkan bantuan usaha.	150 Orang	300.000.000	100.000.000	APBD	Dinas Sosial
JUMLAH						4.415.213.600	5.463.246.395		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					4.471.458.791	0		
2.01	Tenaga Kerja					470.053.500	0		
2.01.21	Program ketenagakerjaan			1. TPAK	68 persen	470.053.500	0		
				2. TPAK perempuan	40 persen				
				3. Persentase pencari kerja yangterdaftar yang ditempatkan	60 persen				
				4. Rasio penduduk yang bekerja	65 persen				
				5. Angka sengketa pengusahadan pekerja	55 kasus				
				6. Upah rata-rata per jampekerja	17.000 ribu				
				7. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15tahun ke atas	73 persen				
2.01.21.01	Aplikasi IPK dan Bursa Kerja Online, entry datapencari kerja			Jumlah waktu penyediaan datainformasi pasar kerja Kota Pangkalpinang	12 bulan	152.826.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.01.21.02	Monitoring Penempatan Tenaga AKL, AKAD dan TKA			jumlah Waktu Penyediaan Data penempatan Tenaga kerja AKL,AKAD, dan TKA	12 bulan	33.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.01.21.03	Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi pencarikerja			pencari kerja yang terampil	45 orang	164.227.500	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.01.21.05	Mediasi Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial			jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan perjanjianbersama	52 kasus	35.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.01.21.07	Rapat Koordinasi Lembaga Kerja sama Tripartit			Jumlah rekomendasi yang dihasilkandari rapat koordinasi	4 rekomendasi	35.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.01.21.10	Monitoring peningkatan keterampilan pencari kerja melalui lembaga pelatihan kerja			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerjayang dimonitor	9 Lembaga pelatihankerja	25.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.01.21.11	Pendataan ketenagakerjaan dan peta kerawananhubungan industrial di Kota Pangkalpinang			Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	25.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12	**Penanaman Modal**					**4.001.405.291**	**0**		
2.12.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 persen**	**2.658.662.000**	**0**		
2.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik yang tertangani	12 bulan	144.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	39.690.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	49.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah jenis peralatan kantor yangdipelihara	7 jenis	19.550.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah jenis atk yang tersedia	26 jenis	17.408.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah layanan penyediaan barangcetakan dan penggandaan	12 bulan	6.734.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jenis komponen listrik yang tersedia	11 jenis	3.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			jumlah jenis makanan minumanyang tersedia	4 jenis	10.230.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.12.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	150.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.19	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah jenis peralatan rumah tanggayang tersedia	1 jenis	510.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.01.20	Rehab berat gedung kantor			jumlah gedung yang direhab	1 gedung	2.218.540.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**terpenuhinya kebutuhan Saranadan Prasarana Aparatur**	**100 persen**	**165.595.000**	**0**		
2.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			jumlah unit gedung kantor yangdipelihara	2 unit	50.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			jangka waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	115.595.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur**	**100 persen**	**116.000.000**	**0**		
2.12.05.86	Penyusunan DED Balai Latihan Kerja			jumlah dokumen yang tersusun	1 dokumen	66.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.05.88	Pendidikan/ pelatihan keterampilan dan profesionalisme			Jumlah jenis diklat yang diikuti	1 jenis	50.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.06	**Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase jumlah laporan yang terpenuhi**	**100 persen**	**14.457.000**	**0**		
2.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			jenis laporan yang disusun	3 jenis	3.700.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.12.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			jenis laporan yang disusun	1 jenis	2.631.875	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			jenis dokumen yang disusun	3 dokumen	3.600.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD					1.850.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.06.23	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			jenis laporan yang disusun	1 jenis	2.675.125	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.16	**Program Peningkatan Iklim Investasi danRealisasi Investasi**			**1. Jumlah upaya dalam meningkatkan iklim investasidan realisasi investasi**		**388.777.500**	**0**		
				2. Persentase realisasi Investasi	**65 %**				
2.12.16.28	penyelenggaraan pameran investasi			Pameran investasi yang diselenggarakan/ yang diikuti	1 kali	120.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.16.29	peningkatan koordinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dandunia usaha			terlaksananya koodinasi dan kerja sama di bidang penanaman modal	1 kali	218.777.500	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.16.32	Penyusunan laporan potensi dan peluang investasi			Laporan potensi dan peluang investasi	1 laporan	50.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20	**Program peningkatan pelayanan perijinan**			**1. Persentase perizinan yang diterbitkan**	**100 %**	**657.913.791**	**0**		
				2. Indeks kepuasan masyarakatterhadap pelayanan perizinan					

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.12.20.01	survey lapangan perizinan			jumlah izin yang disurvey	170 izin	165.388.791	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20.02	penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkupperizinan I			Jumlah izin yang diterbitkan	2.620 izin	161.516.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20.03	penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkupperizinan II			Jumlah izin yang diterbitkan	520 izin	121.702.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20.04	penyelenggaraan pelayanan perizinan lingkupperizinan III			Jumlah izin yang diterbitkan	750 izin	126.307.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20.06	Pengawasan dan Pengendalian Perizinan			jumlah unit usaha yang di pantau	70 unit usaha	35.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20.09	Penyusunan Laporan Perizinan Penanaman Modal			jumlah Laporan Perizinan dan Non Perizinan	10 buku	24.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
2.12.20.10	penanganan pengaduan masyarakat			jumlah pengaduan yangditindaklanjuti	4 pengaduan	24.000.000	0	APBD	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja
JUMLAH						**4.471.458.791**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar					61.536.624.100	35.128.309.927		
1.02	Kesehatan					61.536.624.100	35.128.309.927		
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3.339.410.000	0		
1.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Terlaksananya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12 bulan	230.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Terlaksananya layanan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	577.260.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Terlaksananya layanan jasa kebersihan kantor	12 bulan	108.650.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Terlaksananya layanan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	45.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Terlaksananya layanan penyediaanATK	12 bulan	55.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Terlaksananya layanan penyediaanbarang cetakan dan penggandaan	12 bulan	33.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Terlaksananya layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	13.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan					0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	peraturanperundang-undangan								
1.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Terlaksananya layanan penyediaanmakanan dan minuman	12 bulan	60.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Terlaksananya layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	230.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.19	Penyedia Jasa Perkantoran			Terlaksananya layanan jasa perkantoran	12 bulan	1.987.500.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.34	Penataan Arsip Perkantoran					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.01.51	Penyusunan Data dan Inventarisasi Barang Daerah Lingkup Dinas dan UPT					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana aparatur**	**100 %**	**254.204.000**	**0**		
1.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan	251.204.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor			Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor	17 jenis	3.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur**	**100 %**	**54.315.000**	**0**		
1.02.05.85	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya(Olah Raga)					0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.05.90	Penyusunan daftar usulan penetapan angka kredit(DUPAK) bagi fungsional tertentu			Tersedianya daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK)bagi fungsional tertentu	650 orang	49.449.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.05.91	Workshop penyusunan ANJAB, ABK, EVAJAB			Terlaksananya workshop penyusunan ANJAB, ABK dan EVAJAB	60 PESERTA	4.866.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerjadan Keuangan**	**75 skor**	**141.066.557**	**0**		
1.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Tersusunnya laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 Dokumen	16.160.157	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Tersusunnya Laporan Keuangansemesteran	25 Dokumen	8.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Tersusunnya Laporan KeuanganAkhir Tahun	50 Dokumen	12.706.400	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	Sriwijaya	Kecamatan Girimaya	Tersusunnya laporan dokumenRENJA (RKT,RKA,DPA)	6 Dokumen	16.500.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.09	Penyusunan RENSTRA			Tersusunnya laporan dokumenRenstra	25 Dokumen	13.700.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Terlaksananya Laporan SPIP	12 Bulan	10.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.37	Penyusunan Perencanaan bidang kesehatan			Terlaksananya penyusunan perencanaan bidang kesehatan	4 Kegiatan	32.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.06.38	Pengumpulan Updating dan Analisa data daninformasi Kesehatan			Terlaksananya pengumpulan updating dan analisa data daninformasi kesehatan	2 Dokumen	32.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41	**Program Peningkatan Pelayanan Mutu Layanan Kesehatan/**			**1. Persentase pelayanan rumahsakit yang bermutu**	**90 %**	**50.677.456.693**	**35.128.309.927**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	BLUD			**2. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda**	**35 %**				
				3. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas	**30 %**				
				4. Persentase penduduk miskinyang dilayani sesuai standar	**100 %**				
1.02.41.01	Pelayanan dan pendukung pelayanan KesehatanBadan Layanan Umum Daerah			Terlaksananya pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan badan layanan umum daerah	12 Bulan	24.153.000.000	26.568.300.000	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.02	Penyelenggaraan kesehatan dasar Rumah Sakit			Terlaksananya penyelenggaraankesehatan dasar Rumah Sakit	12 bulan	7.868.616.757	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.03	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit			Terlaksananya layanan peningkatan sarana prasarana Rumah Sakit	12 bulan	307.440.843	338.184.927	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.04	Penyelenggaraan Pemeriksaan Labkesda			Terlaksananya layanan penyelenggaraan pemeriksaanLabkesda	12 bulan	341.521.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.05	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasGerunggang			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Gerunggang	12 bulan	412.057.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.06	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasSelindung			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Selindung	12 bulan	410.031.250	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.07	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas PasirPutih			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Pasir Putih	12 Bulan	416.420.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.08	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar Puskesmas AirItam			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar	12 bulan	726.000.320	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				Puskesmas Air Hitam					
1.02.41.09	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasGirimaya			. Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasarPuskesmas Girimaya	12 bulan	430.417.398	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.10	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasTaman Sari			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Tamansari	12 Bulan	450.074.500	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.11	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasPangkal Balam			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Pangkal Balam	12 bulan	570.845.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.12	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasKacang Pedang			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Kacang Pedang	12 Bulan	352.589.625	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.13	Penyelenggaraan Kesehatan Dasar PuskesmasMelintang			Terlaksananya layanan penyelenggaraan kesehatan dasar Puskesmas Melintang	12 Bulan	458.325.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.14	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Gerunggang					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.15	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Selindung					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.16	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Pasir Putih					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.17	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Air Itam					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.18	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Girimaya					0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.41.19	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Taman Sari					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.20	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Pangkal Balam					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.21	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Kacang Pedang					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.22	Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif (DAK NonFisik) Puskesmas Melintang					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.23	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gerunggang			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gerunggang	12 Bulan	682.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.24	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Selindung			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Selindung	12 Bulan	540.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.25	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Pasir Putih			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas PasirPutih	12 Bulan	414.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.26	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Air Itam			Terlaksananya Layanan penyelenggaran Jaminan KesehatanNasional Puskesmas Air Itam	12 Bulan	588.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.27	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Girimaya			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Girimaya	12 Bulan	600.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.28	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Taman Sari			Terlaksananya Pelayanan KesehatanMasyarakat Puskesmas Tamansari	1 tahun	330.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.41.29	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Pangkal Balam			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pangkalbalam	12 bulan	660.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.30	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Kacang Pedang			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Melintang	12 Bulan	360.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.31	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan NasionalPuskesmas Melintang			Terlaksananya layanan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Melintang	12 Bulan	840.000.000	840.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.32	Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			Terlaksananya layanan pembiayaandan jaminan kesehatan	21.591 Orang	6.710.750.000	7.381.825.000	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.33	Sosialisasi Pembiayaan dan Jaminan KesehatanMasyarakat Miskin					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.34	Monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya jaminan kesehatan			Terlaksananya monitoring, evaluasidan pelaporan upaya jaminan kesehatan	1 Dokumen	52.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.41.35	Layanan rumah singgah					2.003.368.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42	**Program Peningkatan Pelayanan BidangKesehatan**			**1. Prevalensi stunting padabalita**	**%**	**1.494.942.950**	**0**		
				2. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita	**%**				
				3. persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	**100 %**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				4. Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar	100 %				
				5. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %				
				6. Persentase pelayanan kesehatan balit	100 %				
				7. Cakupan kunjungan bayi	100 %				
				8. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %				
				9. Cakupan kelurahan siagaaktif	80 %				
				10. Persentase siswa kelas I - IXmendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				
				11. Persentase pemanfaatanmedia promosi					
				12. Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	61 %				
				13. Persentase TTU yang memenuhi persyaratan	81 %				
				14. Persentase TPM yang memenuhi Persyaratan	81 %				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				15. Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100 %				
				16. Perkiraan Angka KesakitanDBD per 100.000 Penduduk	49 per 1.000 penduduk				
				17. Perkiraan Angka KesakitanMalaria per 1000 penduduk	per 1.000 penduduk				
				18. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuhmanusia (HIV)	100 %				
				19. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosi	100 %				
				20. Pelayanan kesehatan orangdengan gangguan jiwa berat	100 %				
				21. Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	23 %				
				22. Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	42,52 %				
				23. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan skring kesehatansesuai standar	22,50 %				
				24. Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan	100 %				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi					
				25. persentas kelurahan universal child immunization (UCI)	**100 %**				
				26. persentase calon jemaah hajiyang mendapatkan pemeriksaan	**100 %**				
1.02.42.01	Lomba Kelurahan Ber Perilaku Hidup Bersih danSehat Tk. Kota Pangkalpinang			Terlaksananya lomba kelurahan berprilaku hidup bersih dan sehat tingkat kota Pangkalpinang	42 KELURAHAN	14.375.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin			Terlaksananya layanan pemberiantambahan makanan dan vitamin	12.494 Balita	81.527.200	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.03	Lomba Balita Sejahtera Indonesia (LBSI)			Terlaksananya Lomba Balita Sejahtera Indonesia	9 Puskesmas	48.535.350	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaiankeluarga sadar gizi			Terlaksananya layanan pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi	9 Puskesmas	19.937.450	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program gizi			Terlaksananya Monitoring evaluasidan pelaporan program gizi	9 Puskesmas	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.07	Evaluasi Program Kesehatan ibu dan anak			Terlaksananya evaluasi programkesehatan ibu dan anak	9 Puskesmas	81.175.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.08	Audit Maternal Perinatal			Terlaksananya audit maternalperinatal	12 bulan	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.10	Lomba senam lansia Tk. Kota			Terlaksananya lomba senam lansiatingkat Kota	9 Puskesmas	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.11	Lomba senam lansia Tk. Provinsi			terlaksannya lomba senam tingkatprovinsi	1 tim	0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.42.12	Pelayanan kesehatan lansia			terlaksananya pelayanan kesehatanlansia	17.000 lansia	12.805.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.13	Pelayanan Kesehatan anak balita			terlaksanya pelayanan kesehatananak balita	16.736 balita	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.14	Monitoring evaluasi pelayanan kesehatan bayi			terlaksananya monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan bayi	9 Puskesmas	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.15	Pelayanan Kesehatan Neonatus			terlaksanya pelayanan kesehatanneonatus	4.389 bayi	55.445.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.16	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.17	Bimbingan teknis dan pembinaan, pengelolaan dan kinerja posyandu					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.18	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (PenguatanGERMAS)			terlaksananya kegiatan hari kesehatan nasional	5 KEGIATAN	26.873.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.19	Kegiatan lomba kesehatan institusi dan UKBM Tk.Kota			Terlaksananya kegiatan lomba kesehatan institusi dan UKBM tingkaKta	2 LOMBA	51.412.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.22	Evaluasi Hasil Penjaringan kesehatan peserta didikkelas I sampai kelas IX					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.23	Evaluasi Hasil Penjaringan kesehatan peserta didikkelas X					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.24	Cetak buku pedoman penjaringan dan rapot kesehatanku					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.25	Pengembangan media promosi dan informasi sadarhidup sehat			Terlaksanya layanan pengembanganmedia promosi dan informasi sadar hidup sehat	9 JENIS	57.340.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.26	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Lingkungan Sehat					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.27	Pelaksanaan Study EHRA			Terlaksananya pelaksanaan StudyEhra	1 Dokumen	410.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.42.28	Pelaksanaan Pangkalpinang Sehat			Terlaksananya Lomba LingkunganBersih dan Sehat	7 Kelurahan	48.523.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.29	Pembinaan dan Pengawasan Tempat - tempatUmum			Terlaksananya layanan pembinaandan pengawasan tempat-tempat umum	12 hari	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.30	Pembinaan pasar sehat			Terlaksananya layanan pembinaanpasar sehat	1 Lokasi	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.31	Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Makanandan minuman			Terlaksananya kegiatan pembinaandan pengawasan kesehatan maskanan dan minuman	5 Kegiatan	79.629.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.32	Investigasi KLB keracunan pangan			Terlaksananya layanan investigasiKLB keracunan Pangan	3 Lokasi	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.33	Pembinaan dan pengawasan IRTP			Terlaksananya pembinaan dan pengawsan IRT	0,60 IRTP	21.848.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.34	Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga			Terlaksananya layanan pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga	12 Bulan	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.35	Penyemprotan fogging/sarang nyamuk			1. Terlaksananya layanan penyemprotan fogging/sarang nyamuk	33 KASUS	145.670.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.36	Peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.38	Sosialisasi triple eliminasi (HIV, Hepatitis, Siphilis)bagi petugas di Fasyankes Swasta			Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi triple eliminasi (HIV, Hepatitis, Siphilis) bagi petugas di Fasyankes Swasta	100 ORANG	26.581.100	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.39	Mobile VCT ke tempat resiko tinggi					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.40	monitoring dan evaluasi pemberian ARV					0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.42.41	sosialisasi tentang penyakit HIV AIDS dan penyakitmenular lainnya disekolah dan di perguruan tinggi			Terlaksananya sosialisasi tentangpenyakit HIV AIDS dan penyakit menular lainnya disekolah dan di perguruan tinggi	12 Sekolah	27.352.650	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.42	survey pengetahuan komprehensif disekolah dan perguruan tinggi usia 15 - 24 tahun					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.43	sosialisasi penyakit zoonosis					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.44	workshop peningkatan petugas pnemonia balitadan diare			Terlaksananya Layanan workshoppeningkatan petugas pnemonia balita dan diare	40 orang	14.133.250	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.45	sosialisasi tentang pemberian obat pencegahanmassal kecacingan					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.46	Peningkatan kapasitas tatalaksana petugas terhadap penyakit TB					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.47	Pemeriksaan survey kontak dan skrining TB didaerah khusus					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.48	Sosialisasi Tuberkulosis bagi Kader Kesehatan			Terlaksananya Sosialisasi Tuberkulosis bagi Kader Kesehatan	100 orang	26.463.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.49	percetakan form pencatatan dan pelaporanpenyakit menular					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.50	pertemuan koordinasi dengan lintas sektor					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.51	Konsultasi dr. spesialis jiwa			1. terlaksananya konsultasi dan pemeriksa penderita jiwa dengan drjiwa	4 puskesmas	38.500.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.52	Skrining kesehatan jiwa dan napza pada remaja			1. Terlaksananya layanan skriningkesehatan jiwa dan NAPZA pada remaja	450 orang	0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.42.53	Sosialisasi faktor resiko hipertensi			1. Terlaksananya layanan sosialisasifaktor resiko hipertensi	50 orang	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.54	skrining PTM di posbindu khusus			1. Terlaksananya layanan skriningPTM di Posbindu khusus	300 orang	15.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.55	evaluasi kawasan tanpa rokok semua tatanan			1. Terlaksananya layanan evaluasi kawasan tanpa roko semua tatanan	20 lokasi	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.56	monitoring evaluasi PTM			1. Terlaksananya kegiatan monitoring evaluasi Penyakit TidakMenular	1 data	20.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.57	Lomba capaian program penyakit tidak menular			1. Terlaksananya kegiatan lombacapaian program penyakit tidak menular	3 Kelurahan	22.895.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.58	Pertemuan Faktor Resiko Penyakit Tidak MenularBagi Lintas Sektor			1. Terlaksananya kegiatan sosilaisasitentang bahaya penyakit tidak menular gangguan metabolik bagi intas program dan lintas sektoral	50 orang	17.305.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.59	Deteksi dini kanker servik dan kanker payudara			1. Terlaksananya layanan deteksidini kanker servik dan kanker payudara	100 orang	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.60	Peningkatan surveilans Epidemiolgi danPenanggulangan Wabah			Terlaksananya survailance puskesmas, rumah sakit, klinikswasta lainnya dan pelayanan kesehatan lainnya	42 Jumlah Fasilitas Kesehatan	66.303.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.61	Pelayanan Vaksinasi bagi balita dan anak sekolah			Terlaksananya pelayanan vaksinasibagi bayi, balita, ibu hamil , anak sekolah dan WUS	4.142 orang	30.047.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.42.62	Pelayanan Kesehatan Haji			Terlaksananya pelayanan kesehatancalon jemaah haji di kota pangkalpinang	350 Jemaah Haji	35.267.950	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.43	**Program Peningkatan Mutu BidangKesehatan**			**1. Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan**	**80 %**	**5.575.228.900**	**0**		
				2. Cakupan SDM yang sesuaistandar	**3,87 %**				
				3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	**100 %**				
				4. Persentase sarana kesehatanyang memenuhi standar	**55 %**				
				5. Persentase PIRT yang memiliki izin eda	**100 %**				
				6. Cakupan pengelolaan fasilitaspelayanan kefarmasian dan perbekalan farmasi	**100 %**				
1.02.43.01	Peningkatan Potensi dan Realisasi PAD			Terlaksananya Layanan PeningkatanPotensi dan Realisasi PAD	31 Buku	8.750.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.02	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan			Terlaksananya Lomba PemulihanKesehatan secara mandiri di masyarakat	7 kelompok	40.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.03	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan			Terlaksananya Kegiatan PeningkatanPelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	4 Kegiatan	33.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.04	Workshop Penyusunan Pembentukan SPGDT			Terlaksananya Workshop Penyusunan Pembentukan SPGDT	40 Peserta	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat			Terlaksananya Monitoring, Evaluasidan Pelaporan Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.43.06	Pelaksanaan dan Pembentukkan Puskesmas BLUD			Terlaksananya Pelaksanaan dan Pembentukan Puskesmas BLUD	3 Puskesmas	60.400.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.07	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal			Keikutsertaan ASN dalam pendidikandan pelatihan	5 Orang	42.281.250	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.08	kegiatan lomba-lomba bidang kesehatan			Terlaksananya kegiatan lomba-lombabidang kesehatan	6 Lomba	27.561.750	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.09	Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan Program SDK			Terlaksananya Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program SDK	3 Dokumen	3.157.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.10	Kegiatan Penyelenggaraan Uji Kompetensi JabatanFungsional Kesehatan			Terlaksananya layanan penyelenggaraan uji kompetensijabatan fungsional kesehatan	50 Orang	30.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.11	Kegiatan penyediaan tenaga pemenuhan standarisasi mutu pelayanan rumah sakit					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.12	Pelaksanaan akreditasi puskesmas					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.13	Kegiatan akreditasi rumah sakit					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.14	akreditasi labkesda					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.15	Pembangunan gedung baru Puskesmas			1. Terlaksananya pembangunangedung baru Puskesmas	0 Puskesmas	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.16	Renovasi Puskesmas			1. Terlaksananya renovasi Puskesmas	0 Puskesmas	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.17	Rehab Pustu			Terlaksananya rehab Pustu	4 Pustu	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.18	Rehab Polindes/Poskeskel			Terlaksananya rehab polindes danposkeskel	6 Polindes/ Poskeskel	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.19	Pengembangan pembangunan gedung baruRumah Sakit			Terlaksananya manajemen kontruksiuntuk Pembangunan Gedung RS	100 %	5.000.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.20	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)					0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.43.21	Penyediaan alat kesehatan bagi puskesmas danjaringan lainnya					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.22	Pengadaan prasarana penyediaan alat, mesin, dan bahan untuk pengendalian penyakit kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat di puskesmas non afirmasi dan Labkesda					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.23	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Bukitbesar	Kecamatan Girimaya			0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.24	Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga			Terlaksananya layanan pengawasandan pengendalian keamanan , kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga	90 PIRT/Produk	15.188.250	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.25	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SaranaKefarmasian Swasta			Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Pengawasan obat dan perbekalan kesehatan di kota pangkalpinang	1 Dokumen	25.331.500	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.27	Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.28	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan					0	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.29	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalankesehatan (ALKES/PKRT)			Terlaksananya kegiatan peningkatanpemerataan obat dan perbekalan kesehatan (ALKES/PKRT)	20 Orang	25.493.150	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.30	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan			Terlaksananya kegiatan peningkatan alat dan perbekalan kesehatan yang dikalibrasi	100 Alat Kesehatan	50.066.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.31	Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan			Terlaksananya layanan kefarmasiandan alat kesehatan	12 Bulan	194.000.000	0	APBD	Dinas Kesehatan
1.02.43.32	Manajemen Pelaksanaan Dana BOK Kefarmasian					0	0	APBD	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.02.43.33	Pemusnahan Obat-obat, BHP dan Reagen rusakdan Kadaluarsa			Terlaksananya Pemusnahan Obat- obat, BHP dan Reagen rusak dan kadaluarsa (Pemilahan obat expireddan Rusak)	1 Paket	0	0	APBD	Dinas Kesehatan
JUMLAH						61.536.624.100	35.128.309.927		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**3.491.300.397**	**3.631.824.596**		
2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					**2.034.635.497**	**1.742.869.996**		
2.02.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya Upaya PelayananAdministrasi Perkantoran**	**11 upaya**	**958.569.997**	**901.394.996**		
2.02.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	151.770.000	166.947.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.02	Penyediaan jasa perkantoran			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Perkantoran	12 bulan	261.000.000	287.100.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.03	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12 bulan	26.743.210	29.417.531	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.04	Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi ke luardaerah			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah	12 bulan	120.000.000	165.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.05	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah Waktu Penyediaan Makanandan Minuman	12 bulan	18.020.000	19.822.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah Waktu Penyediaan BiayaPembelian ATK	12 bulan	41.926.245	46.118.869	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
									Kb
2.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan					149.120.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.08	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin/Berkala	4 unit	120.921.682	133.013.850	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.09	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Barang Cetakan da Penggandaan	12 bulan	15.000.000	16.500.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.10	Penyediaan alat kebersihan kantor			Jumlah Waktu Penyediaan Biaya Pembelian Alat Kebersihan Kantor	12 bulan	34.068.860	37.475.746	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah waktu penyediaan komponeninstalasi listrik	12 bulan	10.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
2.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana Aparatur**	**5 upaya**	**65.550.000**	**2.475.000**		
2.02.02.03	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah Gedung/Bangunan/Prasarana Kantor yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1 unit	2.250.000	2.475.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.02.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Jumlah peralatan penunjang perkantoran yang diadakan	30 unit	63.300.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.02.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Keuangan**	**6 dokumen**	**15.488.000**	**0**		
2.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Tersusun laporan	1 dokumen	4.037.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Tersusun Laporan	1 dokumen	3.707.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Tersusun Laporan	1 dokumen	3.707.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.06.04	Penyusunan Renja (RKT, RKA, DPA)			Tersusun Laporan	1 dokumen	4.037.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21	**Program Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak**			**Score nilai KLA**	**60 score**	**995.027.500**	**839.000.000**		
2.02.21.01	Penyusunan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.02	Sosialisasi Perda Pemberdayaan dan PerlindunganPerempuan			Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	38.397.500	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.03	Pembinaan Organisasi Perempuan			Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan di Kota Pangkalpinang	30 Organisasi	71.880.000	80.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.04	Fasilitasi Pengembangan Industri Rumahan			Jumlah IR yang Diberdayakan	336 IR	45.000.000	55.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.02.21.07	Peringatan Hari Anak			Terlaksananya Peringatan Hari Anak.	200 Orang	73.000.000	70.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.08	Pengembangan Forum Anak Skala Kota			Jumlah Peserta Kongres	90 Orang	75.000.000	80.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.09	Pengembangan Kebijakan Kota Layak Anak (KLA)			Jumlah Kecamatan Prioritas ProgramKLA.	7 Kecamatan	35.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.10	Sosialisasi Perda Perlindungan Anak					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.11	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)			Meningkatnya kapasitas PATBM	10 PATBM	40.000.000	44.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.02.21.12	Fasilitasi Layanan Penanganan Kasus Perempuandan Anak			Jumlah Kasus Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan danAnak.	60 Kasus	150.000.000	165.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.13	Evaluasi Pelaksanaan PUG			Status Capaian PUG (APE)	1 Status	40.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.14	Workshop PPRG Bagi Perencana OPD			Jumlah OPD yang Menyusun GAPdan GBS.	31 OPD	70.000.000	70.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.15	Penyusunan Raperda PUG					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.17	Penyusunan RAD PUG			Tersusunnya dokumen RAD PUG	1 Dok	0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.02.21.18	Sosialisasi Perda PUG					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.19	Penyediaan Sistem Basis Data Gender dan Anak			Tersedianya Sistem Basis Data danGender	1 Sistem	110.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.20	Peningkatan peran aktif Perempuan dalamDinamika Pembangunan					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.21	Sosialisasi Perda KLA			Jumlah Peserta Sosialisasi	100 Orang	26.700.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.22	Pelatihan PPRG Bagi Aparatur Perencana di Kelurahan			Jumlah Kelurahan yang menyusunGAP dan GBS	20 Kel	30.000.000	30.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.23	Fasilitasi Penguatan Kelembagaan PUG			Jumlah lembaga yang dikuatkan	1 Lembaga	60.000.000	60.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.24	Fasilitasi Pembentukan Forum Kesetaraan danKeadilan Gender (KKG)			Terbentuknya Forum KKG	1 Unit	40.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.25	Rakor PUG			Sinkronisasi Kegiatan	31 OPD	30.000.000	35.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.02.21.26	Pendampingan Perempuan Untuk PengembanganEkonomi Rumah Tangga			Jumlah perempuan yang berhasilmenyelesaikan praktek pelatihan	80 Orang	60.050.000	70.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08	**Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana**					**1.456.664.900**	**1.888.954.600**		
2.08.15	**Program Keluarga Berencana**			**1. Cakupan Peserta KB Aktif**		**1.456.664.900**	**1.888.954.600**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				2. Contraceptive PrevalenceRate Moder	**63,49 %**				
				3. Laju Pertumbuhan Penduduk(LPP)	**2,23 jumlah**				
2.08.15.09	Pelaksanaan Pendataan Keluarga Di KotaPangkalpinang			Terlaksananya Layanan PendataanKeluarga di Kota Pangkalpinang	42 Kelurahan	0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.11	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Kemitraan DenganMedia Massa			Terlaksananya Kegiatan PenyebaranKIE - Melalui Kemitraan Dengan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Luar Ruangan	8 Kali	60.000.000	66.000.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.30	Penyebaran KIE-KKBPK Melalui Sosialisasi KelilingDengan Pemutaran Film Ditengah Masyarakat			Terlaksananya Penyebaran KIE melalui sosialisasi Keliling denganPemutaran Film di tengah Masyarakat	7 Kali	32.000.000	35.200.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.32	Rapat Koordinasi Bidang KB			Terlaksananya Kegiatan RapatKoordinasi Bidang KB	60 Orang	63.389.000	69.727.900	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.44	Orientasi Pendidik Sebaya Pusat Informasi Konseling-Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R)			terlaksananya layanan orientasi pendidik sebaya pusat informasikonseling kesehatan reproduksi remaja (PIK-R)	25 Siswa / Mahasiswa	40.754.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.48	Lomba - lomba dalam rangka hari keluarga nasional			terlaksananya lomba-lomba harikeluarga nasional	6 lomba	49.784.392	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.49	Pembinaan duta generasi berencana (genre)			Terlaksananya Kegiatan PembinaanDuta Generasi Berencana	40 orang	99.395.900	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.50	Temu Kader KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)			Terlaksananya Lomba dan Temu Kader Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional dalam Rangka Harganas KeXXVIII	2 Kegiatan	162.430.000	749.646.100	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.08.15.51	Pembinaan dan Pendamping Kelompok Bina Keluarga			terlaksananya pembinaan dan pendamping kelompok bina keluarga	210 orang	32.565.608	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.52	Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.53	Pelatihan Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga					0	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.54	Genre Saka Kencana			Terlaksananya Kegiatan Genre SakaKencana	22 LOKASI	36.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.55	Kegiatan Bakti IBI, PKK, TNI, dan Bhayangkara			Terlaksananya Kegiatan Bhakti IBI,PKK dan Bhayangkara	825 Peserta KB	244.235.000	268.658.500	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.56	Pembentukan Kampung Kb Percontohan			Terlaksananya Kegiatan Pembentukan kampung KB Percontohan	1 Kampung KB	39.847.000	43.831.700	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.59	Pertemuan Monev Grand Design Pembangunan Kependudukan			Terlaksananya Pertemuan MonevGrand Design Pembangunan Kependudukan	1 Kali	16.900.000	18.590.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.60	Sosialisasi Kependudukan di Sekolah-Sekolah Kependudukan			Terlaksananya Sosialisasi Kependudukan di Sekolah Sekolah	120 Orang	18.338.500	20.172.350	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.08.15.61	Penyusunan Buku Profil KKBPK			Tersusunnya Penyusunan Buku ProfilKKBPK	100 Buku	28.016.000	30.817.600	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.62	Pengukuran Analisis dampak kependudukan			Terlaksananya Pengukuran AnalisisDampak Kependudukan	15 Dokumen	38.455.250	42.300.775	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.08.15.63	Pengadaan pojok Kependudukan di SaranaPendidikan			Terlaksananya Pengadaan Pojok Kependudukan di Sarana Pendidikan	26 Sarana Pendidikan	53.054.250	58.359.675	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
2.08.15.65	Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana BalaiPenyuluhan Lapangan			Terlaksananya kegiatan penunjang keluarga berencana balai penyuluh lapangan	42 Kelurahan	441.500.000	485.650.000	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**1.404.654.500**	**0**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**1.404.654.500**	**0**		
4.01.70	**Program peningkatan partisipasi masyarakatdalam membangun desa**			**Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa**		**1.404.654.500**	**0**		
4.01.70.07	Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG)			Jumlah Pelaksanaan Lomba TTG Tingkat Kota dan Keikutsertaan dalam gelar TTG Nasional	2 Kali	56.135.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.09	Bulan bhakti gotong royong masyarakat			Jumlah pelaksanaan lomba gotongroyong tingkat kota dan puncak peringatan BBGRM	2 Kali	160.160.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.20	Lomba Kader Umum PKK			Jumlah Pelaksanaan Lomba KaderUmum PKK	1 Kali	24.739.500	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.24	Lomba Pelaksanaan Visual Asam Asetat			Jumlah Pelaksanaan Lomba VisualAsam Asetat	1 Kali	47.105.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.26	Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)			Jumlah Lomba Pola Asuh Anak danRemaja (PAAR) yang dilaksanakan	1 Kali	49.830.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.38	Rakon PKK			Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi PKK Kota Pangkalpinangyang terfasilitasi	3 kali	52.095.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.70.39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PKKKecamatan dan Kelurahan			Jumlah pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporanterhadap kegiatan yang terkait dengan PKK	10 kali	113.840.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.40	Lomba Administrasi PKK			Jumlah Pelaksanaan lombaadministrasi PKK	1 kali	40.350.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.41	Lomba UP2K			Jumlah Pelaksanaan Lomba UP2K	1 kali	53.985.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.42	Pelaksanaan hari kesatuan gerak PKK			Jumlah Pelaksanaan kegiatan HUTHKG Kota Pangkalpinang dan Jambore PKK Tingkat Nasional	2 kali	298.720.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak Dan Kb
4.01.70.43	Lomba Dasawisma			Jumlah Pelaksanaan Lomba Dasawisma	1 kali	29.950.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
4.01.70.44	Lomba HATINYA PKK			Jumlah pelaksanaan lomba HATINYA PKK	1 kali	27.675.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
4.01.70.45	Evaluasi perkembangan kelurahan melalui lomba kelurahan			Jumlah lomba kelurahan yang dilaksanakan	2 jenis	125.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
4.01.70.46	Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan PKK			Jumlah pembinaan rutin dan sosialisasi tentang isu-isu yang berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat	12 kali	180.070.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
4.01.70.47	Penyelenggaraan Rakon PKK			Jumlah penyelenggaraan Rakon PKK di Pangkalpinang	1 kali	100.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.70.48	Pendampingan pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan			Jumlah Pendampingan Evaluasi Pada Desa dan Kelurahan	42 kali	45.000.000	0	APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
JUMLAH						**4.895.954.897**	**3.631.824.596**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3	**Urusan Pilihan**					**2.984.242.500**	**3.134.242.500**		
3.03	**Pertanian**					**2.984.242.500**	**3.134.242.500**		
3.03.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**839.109.500**	**989.109.500**		
3.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Selindung Baru	Kecamatan Gabek	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang tertangani	12 Bulan	98.960.500	98.960.500	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu layanan jasa adminisrasi	12 Bulan	350.001.000	350.001.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				keuangan yang tertangani					
3.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	123.060.000	123.060.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	16.620.000	16.620.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 Bulan	15.641.000	15.641.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	12.540.000	12.540.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 Bulan	2.287.000	2.287.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 Bulan	200.000.000	350.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur Prasarana Aparatur**	**100 %**	**251.375.000**	**251.375.000**		
3.03.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	24.000.000	24.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang	1 Unit	45.750.000	45.750.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				dipelihara					
3.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang mendapat pemeliharaan	7 unit	181.625.000	181.625.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**persentase aparatur yang lulus diklat**	**100 %**	**20.000.000**	**20.000.000**		
3.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.05.85	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya					0	0	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.05.101	Tes Urine bagi Pegawai ASN dan PHL di lingkungan OPD			Jumlah pegawai ASN dan PHL yang mengikuti tes urine	135 orang	0	0	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentasi Jumlah Laporan Yang terpenuhi**	**100 %**	**17.274.000**	**17.274.000**		
3.03.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yg disusun	5 Dokumen	2.241.000	2.241.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Jumlah laporan keuangan semestran yang disusun	5 Dokumen	1.910.000	1.910.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 dokumen	1.910.000	1.910.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)			Jumlah laporan renja yang disusun	5 Dokumen	2.565.000	2.565.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.06.22	Penyusunan Pelaporan PenyelenggaraanSPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun	3 Dokumen	2.013.000	2.013.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.06.27	Forum perangkat Daerah			Jumlah pelaksanaan kegiatan forum perangkat daerah	1 kali	6.635.000	6.635.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16	**Program Peningkatan Ketahan Pangan**			**1. Ketersediaan energi per kapita**	**2.300 kkal/kapita/hari**	**460.754.000**	**460.754.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN (pertanian/perkebunan)	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				2. Ketersediaan protein per kapita	**63 gr/kapita/hari**				
				3. Jumlah Cadangan Pangan	**7,50 Ton**				
				4. Konsumsi Energi Perkapita	**2.066 kkal/kapita/hari**				
				5. Konsumsi Protein Perkapita	**66 gr/kapita/hari**				
				6. Persentase Pangan yang aman konsumsi	**100 %**				
3.03.16.01	penyusunan sistem,kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)			jumlah jenis peta kewaspadaan pangan	1 Peta	4.670.000	4.670.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.02	Uji Mutu dan Keamanan Pangan			jumlah pelaksanaan uji mutu dan keamanan pangan	3 kali	50.000.000	50.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.03	Analisis Neraca Bahan Makan (NBM)			Jumlah Laporan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	2.788.000	2.788.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.04	Lomba Cipta menu Pangan Bergizi dan Seimbang dan Pangan			Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu B2SA Berbasis Pangan Lokal	3 Kali	144.506.000	144.506.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.05	Pengembangan Cadangan Pangan			Jumlah cadangan pangan yang disediakan	2 Ton	33.330.000	33.330.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.06	Survei dan Analisis Harga,Pasokan dan Akses Pangan			Jumlah data hasil survei dan analisis Harga, Pasokan dan Akses Pangan	5 Laporan	9.880.000	9.880.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.08	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi Pangan melalui pola Pangan Harapan (PPH)			Jumlah Laporan Pola Konsumsi Pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	5 Laporan	1.740.000	1.740.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.09	Pelatihan Diversifikasi Pangan			Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan Diversifikasi Pangan	10 Orang	87.300.000	87.300.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.10	Pembinaan dan Monev KRPL/P2KP			Jumlah kelompok yang dibina	9 Kelompok	11.900.000	11.900.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.11	Pameran Ketahanan Pangan			Jumlah Pameran yang diikuti	1 Kali	14.640.000	14.640.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.16.12	Pengawasan Keamanan Pangan			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	4 Laporan	100.000.000	100.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.03.16.13	Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan			Jumlah pelaksanaan rapat dewan ketahanan pangan	2 Kali	0	0	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25	**Program Pengembangan Pertanian dan Peternakan**			**1. Jumlah produksi Jagung**	**60 ton**	**1.395.730.000**	**1.395.730.000**		
				2. Jumlah produksi Nanas	**2.100 ton**				
				3. Jumlah produksi Jahe Merah	**2 ton**				
				4. Jumlah produksi Cabe	**17 ton**				
				5. Jumlah produksi Daging	**5.278 ton**				
				6. Jumlah produksi Telur	**140 ton**				
				7. Jumlah produksi Susu	**132.613 liter**				
				8. Jumlah populasi ternak	**76.939 ekor**				
				9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	**1.600 ekor**				
3.03.25.03	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis			jumlah peserta yang mengikuti pelatihan agribisnis	25 Orang	50.342.000	50.342.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.04	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan TABULAPOT - TABULAKAR			Banyaknya tanaman dalam polybag yang diserahkan ke masyarakat	1.000 bibit/polybag	37.953.000	37.953.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.05	Pengembangan Pembenihan/Perbibitan			terpeliharanya dan terawatnya bibit tanaman dan pohon induk	550 polybag	60.000.000	60.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi pelaporan kebijakan subsidi pertanian	1 Laporan	61.146.000	61.146.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan data statistik pertanian/perkebunan			jumlah laporan data statistik yang tersusun	1 Laporan	25.153.500	25.153.500	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.08	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan			tersedianya bibit tanaman yang berlabel	235 bibit	28.072.000	28.072.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.09	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan			Jumlah THL/TBPP yang mendapat peningkatan kesejahteraan	9 orang	164.003.500	164.003.500	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.10	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana			Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	9 unit	16.853.000	16.853.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	teknologi pertanian/perkebunan tepat guna								
3.03.25.11	Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam			Jumlah petani yang mengikuti pelatihan	40 petani	21.654.500	21.654.500	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.12	Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (Penas KTNA)					0	0	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.16	Peningkatan Kompetensi Petugas dan Penangkar			Jumlah Petugas dan Penangkar yang Kompeten	5 Orang	41.811.000	41.811.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.19	Pengawasan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Jumlah kecamatan yang diawasi dan dilindungi	7 kecamatan	39.380.500	39.380.500	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.21	Pengawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet)			jumlah pelayanan kesehatan masyrakat veteriner yang diberikan	600 Pelayanan	50.000.000	50.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.22	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular ternak			jumlah jenis sarana dan prasarana pencegahan penyakit menular ternak yang di beli	2 Jenis	45.000.000	45.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.23	Pembibitan dan perawatan ternak			jumlah populasi ternak di UPTD	40 Ekor	223.000.000	223.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.25	Pembinaan dan pengawasan pemotongan ternak (operasional RPH)			Jumlah PAD Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	247.500.000 Rupiah	200.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.27	Pendataan masalah peternakan			jumlah dokumen data statistik dan data produksi peternakan yang akurat dan terbarukan	2 Dokumen	15.000.000	15.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.31	Penyusunan atau revisi perda					0	0	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.32	Peningkatan Penyelenggaraan UPTD PUSKESWAN			Jumlah PAD Pelayanan Kesehatan Hewan	132.000.000 Rupiah	137.000.000	137.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.33	Sosialisasi peraturan perundangan bidang peternakan dan kesehatan hewan			jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	40 orang	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.34	Pembangunan / Renovasi Puskeswan			jumlah bangunan yang di	1 Paket	109.361.000	109.361.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				bangun					
3.03.25.35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan			Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	1 Paket	30.000.000	30.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
3.03.25.36	Penyusunan SID dan DED			Jumlah SED dan DED yang dibuat	1 Paket	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Pangan Dan Pertanian
JUMLAH						2.984.242.500	3.134.242.500		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					22.083.643.000	22.418.731.265		
2.05	Lingkungan Hidup					22.083.643.000	22.418.731.265		
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	858.215.000	858.215.000		
2.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Tersedianya jasa komuniasi sumber daya air dan listrik	100 %	142.000.000	142.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tersedianya jasa administrasi keuangan	100 %	160.325.000	160.325.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor			Tersedianya pelayanan kebersihan kantor	100 %	32.000.000	32.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.09	Penyediaan jasa Perbaikan peralatan kerja			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	100 %	61.850.000	61.850.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya alat tulis kantor	100 %	21.500.000	21.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100 %	15.310.000	15.310.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor			Tersedianya jenis komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor	100 %	5.000.000	5.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah peralatan dan perlengapan kantor yang dibeli	1 unit	0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			tersedianya makanan dan minum	100 %	22.230.000	22.230.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	1 paket	200.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.01.24	Penyediaan jasa penunjang administrasi perkantoran			Tersedianya jasa administrasi perkantoran	8 orang	198.000.000	198.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	403.187.521	128.552.521		
2.05.02.10	Pemeliharaan Conblok					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor			tersedianya pemeliharaan gedung kantor	1 Paket	95.652.521	95.652.521	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapatkan pemeliharaan	9 unit	307.535.000	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.02.80	Pengadaan Meubelair			Tersedianya meja dan kursi kerja	1 paket	0	32.900.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan Kapasitas Sumberdaya aparatur**	**100 %**	**115.758.000**	**115.758.000**		
2.05.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tercapainya SDM Aparatur dan Teknis	42 Pegawai	60.000.000	60.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.05.85	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas yang dibuat	100 Stel	0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.05.97	Sosialisasi Penyuluhan Narkoba					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.05.98	Peningkatan dan Pendataan Objek Retribusi Persampahan			Tersedianya Data Objek Retribusi Persampahan	100 %	21.743.000	21.743.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.05.99	Peningkatan Penerimaan PAD			tersedianya barang cetakan	100 %	34.015.000	34.015.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Presentase jumlah laporan yang terpenuhinya**	**100 %**	**25.095.000**	**40.461.351**		
2.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD			Tersusunnya LAKIP tahun 2019	1 Laporan	2.350.000	2.350.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD			Tersusunnya laporan keuangan semesteran	1 Laporan	2.350.000	2.350.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD			Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	2.350.000	2.350.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)			Tersusunnya Dokumen RENJA (RKT, RKA dan DPA)	1 Laporan	2.350.000	2.350.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06.06	Penyusunan laporan Standar Pelayanan Minimal			Tersusunnya Laporan Standart Pelayanan Minimal	1 Laporan	3.150.000	3.150.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06.08	Penyusunan Profil Dinas Lingkungan Hidup			Tersusunnya Profil Dinas Lingkungan Hidup	1 Buku	0	15.366.350	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.06.27	Forum Perangkat Daerah			Tersusunya Laporan Kegiatan Forum Daerah Dinas Lingkungan Hidup	1 Laporan	9.335.000	9.335.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.05.06.28	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Tersusunnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Dokumen	3.210.000	3.210.001	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25	**Program Pengendalian Persampahan**			**1. Presentase sampah terkelola dengan metode 3R**	**12 %**	**17.870.022.809**	**18.274.797.809**		
				2. Persentase penanganan sampah perkotaan	**75 %**				
				3. Persentase sampah yang terangkut ke TPA	**65 %**				
2.05.25.01	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	2 unit	161.257.250	161.257.250	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.02	Peningkatan operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			Meningkatnya pelayan kebersihan	90 %	13.559.811.898	13.559.811.898	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.04	Pengendalian pencegahan pencemaran sampah liar			Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Pencegahan Pencemaran Sampah Liar	16 kali	49.542.200	49.542.200	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.05	Operasional TPA Sistem Sanitari Landfil			Jumlah TPA yang Beroperasi	1 kawasan	3.627.072.688	3.627.072.688	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.06	Rehabilitasi sarana dan prasarana persampahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang Mendapatkan Rehabilitasi	3 unit	0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.07	Pemeliharaan kebersihan perumahan tampuk pinang pura					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.09	Sosialisasi pemilihan dan pengolahan sampah masyarakat			Jumlah peserta sosialisasi	100 orang	53.726.728	53.726.728	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.11	Pemeliharaan kebersihan perumahan RUSUNAWA					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.13	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan (Operasional TPA)					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.14	Penyusunan Data Persampahan					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.20	Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan			Jumlah Pemenang Lomba	6 pemenang	90.120.720	90.120.720	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.05.25.21	Penataan TPA			Tersedianya tempat pencucian kendaraan,kolam lindi dan Sumur Bor	3 Paket	287.189.500	691.964.500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.24	Penyusunan SOP persampahan					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.25.25	Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota			Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kebersihan Kota	8 kali	41.301.825	41.301.825	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26	**Program Penataan Lingkungan Hidup**			**1. Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan**	**31 %**	**2.811.364.670**	**3.000.946.584**		
				2. Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan	**100 %**				
				3. Nilai untuk mencapai Adipura	**76 nilai**				
				4. Indeks Kualitas LH	**75 indeks**				
				5. Indeks Kualitas Air	**63 indeks**				
				6. Indeks Kualitas udara	**80 indeks**				
				7. Indeks tutupan lahan	**0,30 indeks**				
2.05.26.01	Koordinasi penilaian kota sehat/adipura			Jumlah pelaksanaan koordinasi penilaian kota sehat/adipura	4 kali	130.817.805	130.817.805	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.02	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup			Jumlah Perusahaan/ Pelaku Usaha yang diawasi	45 Usaha/Kegiatan	41.165.000	41.165.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.03	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Alam			Terpeliharanya Aset Sumber Daya Alam	1 Paket	612.757.744	612.757.744	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.04	Pemantauan Bahan perusak ozone			Jumlah Pemantaun Bahan Perusak Ozon	30 Pelaku	34.660.500	34.660.500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.05	Pembinaan Program Adiwiyata			Jumlah Sekolah yang mendapat Pembinaan	10 Sekolah	54.718.780	54.718.780	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.07	Penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat pencemaran kerusakan lingkungan			Jumlah Kasus Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran Perusakan Lingkungan	5 Kasus	29.050.000	29.050.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.05.26.08	Akreditasi laboratorium			Terlaksananya Survailens I setelah Re-Akreditasi Laboratorium	85 %	51.375.866	51.375.866	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.09	Penyelenggaraan Sekretariat komisi AMDAL			Jumlah dokumen AMDAL yang dapat diselesaikan	2 dokumen	61.353.000	61.353.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.10	Akselerasi Laboratorium			Sertifikat	25 orang	27.000.000	27.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.11	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)			Jumlah Dokumen IKPLHD yang tersedia	1 Dokumen	91.500.000	91.500.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.13	Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	1 Dokumen	177.803.112	177.803.112		Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.14	Pengawasan Limbah B3			Jumlah perusahaan yang diawasi dalam pengolahan limbah B3	10 Perusahaan	46.398.500	46.398.500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.15	Pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3			Jumlah dokumen hasil pendataan dan pemetaan penghasil limbah B3	2 Dokumen	39.057.000	39.057.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.16	Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup			Dokumen penyusunan kebijakan lingkungan hidup	90 %	17.378.930	17.378.930	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.17	Pengadaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan			Tersedianya peralatan gelas untuk ruang lingkup parameter baru	80 %	30.000.000	30.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.18	Pengadaan alat laboratorium lingkungan			Tersedianya pengadaan alat laboratorium lingkungan	85 %	95.010.000	95.010.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.19	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan			Tersedianya Data dari Sertifikat Hasil Uji	300 SHU	0	2.792.797	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.20	Kaji Ulang Dokumen Laboratorium			Tersedianya dokumen mutu / SNI / Standart Method yang termutakhir	75 %	5.100.000	5.100.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.21	Kaji banding laboratorium terakreditasi			Kaji banding dengan Laboratorium yang sudah Terakrediatasi	80 %	35.000.000	35.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.22	Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup			Jumlah koordinasi penilaian dokumen lingkungan hidup	100 kali	43.324.000	43.324.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.23	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim			Terindentifikasinya GRK dan Profil Emisi GRK	100 %	38.937.500	47.587.500	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.05.26.28	Pengendalian kerusakan hutan dan lahan			Terindentifikasinya potensi kerusakan tanah untuk produksi biomassa dalm bentuk peta status kerusakan tanah/lahan untuk produksi biomassa	1 Buku	32.451.660	32.451.660	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber pencemaran institusi dan non institusi			terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sumber pencemaran oleh dunia usaha	1 Data	14.888.442	14.888.442	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.30	Inventarisasi data base ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah Kota Pangkalpinang			Data ruang terbuka hijau kota pangkalpinang	1 Data	83.643.000	50.736.118	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.32	Penyusunan Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH)	1 dokumen	132.249.800	132.249.800	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.33	Pelayanan UPTD Laboratorium Lingkungan			Terlaksananya operasional Laboratorium Lingkungan	85 %	452.381.373	452.381.373	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.34	Pengambilan Sampling Udara			Terlaksananya pengujian sampel udara	75 %	23.669.184	23.669.184	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.36	Pengelolaan dan pengolahan data hasil uji kualitas air dan udara			Data IKA IKU	1 Data	52.026.000	58.072.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.37	Pantai dan Laut Lestari					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.38	sosialisasi dampak kerusakan lingkungan hidup					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.39	sosialisasi sumber pencemaran					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.40	pengendalian perubahan iklim					0	100.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.40	Review dan revisi peraturan bidang pengelolaan SDA & LH			Terbentuknya Perda	12 Bulan	0	75.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.41	Peningkatan sarana dan prasarana Sumber daya alam			tersedianya mesin bor lubang biopori dan cainsaw	1 paket	40.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.42	pembuatan lubang biopori			tersedianya lubang biopori	1 paket	317.647.474	317.647.473	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.43	pembuatan papan nama kolong					0	30.000.000	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.44	Pemeliharaan dan Pengendalian Kolong					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
2.05.26.45	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					0	0	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
JUMLAH						**22.083.643.000**	**22.418.731.265**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**2.200.000.000**	**4.112.586.902**		
2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**					**2.200.000.000**	**4.112.586.902**		
2.06.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**439.695.200**	**505.649.480**		
2.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	133.500.000	153.525.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	36.043.000	41.449.450	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	33.313.700	38.310.755	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikanperalatan kerja yang tertangani	12 bulan	37.360.100	42.964.115	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)			jumlah waktu layanan penyediaanalat tulis kantor yang tertangani	12 Bulan	20.464.200	23.533.830	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.11	Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan			jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	18.788.100	21.606.315	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.12	Penyediaan Komponen instalasi/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 Bulan	11.592.100	13.330.915	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Jumlah layanan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4 unit	28.083.000	32.295.450	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				yang tersedia					
2.06.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			jumlah waktu layanan penyediaanmakanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	20.551.000	23.633.650	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			jumlah waktu layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluar daerah yang tertangani	60 Bulan	100.000.000	115.000.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**171.615.100**	**342.857.365**		
2.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			jumlah perlengkapan gedung kantoryang tersedia	6 unit	34.173.000	39.298.950	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung/kantor			jumlah gedung kantor yang	1 unit	25.844.000	29.720.600	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			jumlah kendaraan dinas operasionalyang terpelihara	3 unit	111.598.100	128.337.815	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.02.43	Pembangunan Gedung Kantor			jumlah gedung kantor yang dibangun	1 unit	0	100.000.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.02.44	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			jumlah peralatan gedung yang tersedia	4 unit	0	45.500.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur**			**Persentase aparatur yang mendapat peningkatan**	**100 %**	**132.325.700**	**187.793.555**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				kapasitas					
2.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 orang	0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.05.85	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			jumlah pakaian dinas yang tersedia	60 stell	37.273.000	42.863.950	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.05.92	Bimtek Pelayaan Publik			jumlah peserta bimtek pelayananpublik	48 orang	95.052.700	109.310.605	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.05.95	Sosialisasi pencegahan penyelahgunaan narkoba					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.05.96	Penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu			jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	59 stell	0	35.619.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.06	**Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase laporan keuangandan kinerja yang dibuat**	**100 %**	**39.254.100**	**45.142.215**		
2.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja danrealisisasi kinerja yang disusun	1 dokumen	4.500.000	5.175.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN YANG DISUSUN	1 dokumen	4.000.000	4.600.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.06.04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun			jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	4.000.000	4.600.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)			Jumlah dokumen perencanaanjangka pendek yang disusun	2 dokumen	5.754.100	6.617.215	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP diLingkungan OPD			jumlah laporan hasil implementasiSPIP yang disusun	2 dokumen	6.000.000	6.900.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.06.06.27	Forum OPD			tersosialisasinya rencana kerja dinasDUKCAPIL tahun N+1	1 kali	15.000.000	17.250.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15	**Program Penataan Administrasi Kependudukan**			**1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil**	**79 %**	**1.417.109.900**	**3.031.144. 287**		
				2. Persentase keserasian Database Kependudukan	**94 %**				
2.06.15.00	Inovasi Pelayanan Kependudukan dan pencatatansipil					0	100.000.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.01	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu			jumlah waktu pengoprasian SIAK	12 bulan	968.867.800	1.114.197.970	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasikependudukan			jumlah jenis laporan informasi kependudukan	2 Jenis	46.832.000	53.856.800	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Jumlah laporan monev yang disusun	2 dokumen	7.000.000	8.050.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.35	Pemutakhiran dokumen catatan sipil			jumlah data dokumen capil yang di mutakhirkan	400 data	54.000.000	62.100.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.40	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Jumlah dokumen IKM yang disusun	2 Dokumen	22.757.900	26.171.585	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.42	Penyediaan sarana pelayanan publik bidangkependudukan			jumlah jenis sarana pelayananbidang kependudukan	2 Jenis	29.449.200	33.866.580	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.43	Penyediaan sarana pelayanan publik bidang capil			jumlah jenis sarana pelayananbidang capil	1 Jenis	13.579.200	15.616.080	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.80	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan			jumlah masyarakat yang mendapat layanan administrasi kependudukan	4.900 orang	262.213.700	301.545.755	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				diluar hari kerja					
2.06.15.84	Pengembangan jaringan komunikasi dan sarana prasarana alat penunjang KTP-e					0	74.658.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.85	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatandata penduduk					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.86	Pembuatan Kartu Identias Anak			jumlah KIA yang diterbitkan	5.000 lembar	0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.87	Pelayanan kepemilikan dokumen kependudukanpenduduk rentan			jumlah penduduk rentan yang memiliki dokumen	30 orang	0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.88	Penataan dan pengelolaan dokumen register arsipcatatan sipil			jumlah banyak dokumen capil yangdimutakhirkan	10 ML	0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.89	Pendataan penduduk pendatang sementaramenetap WNI dan WNA					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.90	Diklat administrasi kependuduan					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.91	Pendampingan mutu pelayanan dan visitasi auditoreksternal ISO			jumlah ISO yang diperoleh	1 ISO	0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.93	Pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan KIA					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.94	Penyediaan Peralatan Server					0	0	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.95	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			Jumlah jenis pengelolaan SIAK	3 jenis	12.410.100	14.271.615	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.96	Penyusunan Standar Pelayanan			Jumlah dokumen standar pelayanan yang dibuat atau direvisi	1 Dokumen	0	25.000.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021 (N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.06.15.97	Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP)			1. jumlah dokumen SOP yang diterbitkan	1 dokumen	0	35.000.002	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				2. jumlah dokumen SOP yang dibuat	1 Dokumen				
2.06.15.98	Isbat Nikah					0	75.000.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.99	Pelayanan Dokumen Kependudukan			jumlah jenis pelayanan keliling kemasyarakat	2 Jenis	0	450.000.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.100	Pelayanan Mutasi Penduduk non Permanen			jumlah mutasi penduduk non permanen	1.200 orang	0	37.174.500	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.101	Penerbitan Dokumen Kependudukan dan identitas Resmi anak			jumlah jenis sarana penerbitan dokumen kependudukan dan identitas resmi anak	2 Jenis	0	513.050.000	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.06.15.102	Pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraanadministrasi kependudukan			jumlah jenis pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	3 Jenis	0	91.585.400	APBD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
JUMLAH						**2.200.000.000**	**4.112.586.902**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**17.177.156.700**	**17.291.303.000**		
2.09	**Perhubungan**					**17.177.156.700**	**17.291.303.000**		
2.09.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani**	**100**	**4.960.937.000**	**5.456.740.000**		
2.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	4.427.997.000	4.854.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yangtertangani	12 Bulan	225.790.000	184.240.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	55.650.000	56.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yangtertangani	12 Bulan	19.000.000	30.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu layanan penyediaanATK yang tertangani	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	13.000.000	13.000.000	APBD	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Bulan	4.500.000	4.500.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah waktu layanan penyediaanperalatan rumah tangga yang tertangani	12 Bulan	5.000.000	10.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu layanan penyediaanmakanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	10.000.000	15.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 Bulan	160.000.000	250.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.01.44	Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kantor			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalamKondisi baik**	**100**	**583.337.000**	**555.000.000**		
2.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantoryang tersedia	1 Paket	38.337.000	50.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor			Jumlah peralatan gedung kantoryang tersedia	1 Paket	45.000.000	50.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit/Gedung	150.000.000	80.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dapat terpelihara	14 Unit	350.000.000	375.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur**			**Persentase Meningkatnya Aparatur yang Profesional dan Kompeten**	**100**	**240.000.000**	**295.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	65.000.000	100.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.05.84	Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perhubungan			Jumlah Laporan Monitoring/Evaluasi di Bidang Perhubungan	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	110 Stell	175.000.000	195.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100**	**25.500.000**	**25.500.000**		
2.09.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja OPD			Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaOPD yang Tersusun	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Bukitintan	Kecamatan Girimaya	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah laporan keuangan akhirtahun yang disusun	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA)yang disusun	3 Dokumen	3.500.000	3.500.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.06.09	Pelaksanaan Forum Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP)			Jumlah Dokumen SPIP yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	10.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15	**Program Pelayanan Perhubungan**			**1. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik**	**91 %**	**11.367.382.700**	**10.959.063.000**		
				2. Persentase Layanan angkutan	**95 %**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				darat					
2.09.15.01	Perencanaan pembangunan prasaranan danfasilitas perhubungan			Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Dokumen	619.616.700	300.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.02	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan			Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun	1 Jenis	0	0	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.03	Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan			Jumlah Peserta Sosialisasi KebijakanDi bidang Perhubungan	75 Orang	100.000.000	0	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.04	Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light			Jumlah waktu pemeliharaan Traffic light dan warning light	12 Bulan	94.300.000	100.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.05	Perawatan/Pergantian Rambu-Rambu jalan			Jumlah Perawatan/Perganti anRambu-Rambu Lalu Lintas	100 Unit	94.300.000	100.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.06	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana UPTD.PPTP			Jumlah Waktu Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana UPTD.PPTP	12 Bulan	178.810.000	185.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.07	Rehabilitas Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD.PPTP			Jumlah Gedung kantor UPTD.PPTP dapat dilakukan Rehabilitas Pemeliharaan	1 Unit/Gedung	122.120.000	145.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.08	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamananpenumpang dilingkungan terminal			Jumlah Pelayanan PelaksanaanPenciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal (Lokasi)	3 Unit Terminal	100.000.000	0	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.09	Penertiban Angkutan Kota			Jumlah Waktu Pelaksanaan Penertiban angkutan Kota	12 Bulan	95.000.000	75.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.10	Pengawasan dan Pengendalian Parkir			Jumlah Titik/Zona pengawasan dan pengendalian parkir	250 Titik/Zona	40.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.09.15.11	Pemilihan Awak Teladan			Jumlah Peserta Pemilihan Awak Teladan	40 Orang	40.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.12	Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas			Terlaksananya Pemilihan Pelajar Disiplin Lalu Lintas	100 %	32.400.000	55.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.13	Pengawasan dan Penertiban Parkir			Jumlah Titik/Zona Pengawasan dan penertiban parkir	250 Titik/Zona	76.750.000	76.750.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.14	Penertiban Angkutan Lebaran (H-7 dan H+7)			Jumlah Titik/Zona Penertiban Angkutan (H-7 dan H+7)	10 Titik/Zona	61.175.000	65.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.15	Peningkatan Kinerja Juru Parkir			Jumlah Jenis Penyediaan Prasarana/Kelengkapan Juru Parkir	4 Jenis Barang	100.000.000	75.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.17	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas			Jumlah Pengadaan Rambu-rambulalu lintas	50 Unit	85.000.000	85.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.18	Pengadaan marka jalan			Jumlah Pengadaan Marka Jalan	100 Meter	90.000.000	90.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.20	Pengadaan pagar pengaman jalan			Jumlah Pengadaan Pagar pengamanjalan	100 Meter	180.000.000	180.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.22	Peningkatan Menejemen Rekayasa lalu Lintas			Jumlah Dokumen Kajian MenejemenRekayasa Lalu Lintas yang tersusun	1 Dokumen	233.100.000	233.100.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.23	Pengadaan Traffic Light dan Warning Light			Jumlah Pengadaan Traffic Light danWarning Light	4 Unit	83.000.000	83.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.24	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	12 Bulan	763.425.000	763.425.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.27	Pelayanan Forum Lalu Lintas			Jumlah Peserta/Forum Masyarakat Mengikuti Kegiatan Pelayanan Forum Lalu lintas	50 Orang	22.060.000	22.060.000	APBD	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.09.15.29	Operasi Lalu Lintas Gabungan (TNI, POLRI, LLAJ)			Jumlah Waktu Pelaksanaan Operasilalu lintas gabungan (TNI, POLRI,LLAJ)	12 Bulan	54.700.000	54.700.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.30	Pemeliharaan dan Perbaikan Lampu PeneranganJalan Umum			Jumlah Waktu Pelaksanaan Pemeliharaan Penerangan jalanumum	12 Bulan	1.623.004.000	1.636.764.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.32	Pengadaan Marka Parkir			Jumlah Pengadaan Marka Parkir	200 Meter	103.388.000	103.388.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.34	Pengadaan Perlengkapan kerja lapangan/Perlengkapan keselamatan kerja penerangan jalan umum			Jumlah Jenis Perlengkapan Kerja lapangan/Perlengkapan KeselamatanKerja Penerangan Jalan Umum Yang dapat tersedia	6 Jenis	46.000.000	46.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.35	Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)			Jumlah Pengadaan Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum	600 Titik Lampu	5.095.596.000	5.225.196.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.36	Analisa dan Kebutuhan Lampu Penerangan JalanUmum			Jumlah Dokumen Analisis dan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.37	Penyelenggaraan Perparkiran			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Penyelenggaraan Perparkiran	12 Bulan	659.680.000	659.680.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.38	Penyelenggaraan Terminal			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Penyelengaraan Terminal	12 Bulan	121.853.000	100.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.39	Peningkatan Penerimaan PAD Dinas Perhubungan			Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pendukung Peningkatan Penerimaan Penerimaan PAD	12 Bulan	168.560.000	120.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
2.09.15.40	Penyelenggaraan UPTD.PPTP			Jumlah Kendaraan Angkutan Umumdan Barang yang yang di Uji	8.000 Unit	283.545.000	300.000.000	APBD	Dinas Perhubungan
JUMLAH						17.177.156.700	17.291.303.000		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**4.643.898.030**	**135.000.000**		
2.10	**Komunikasi dan Informatika**					**4.072.789.787**	**75.000.000**		
2.10.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase Kelancaran administrasi, keuangan danoperasional perkantoran**	**100 %**	**452.438.577**	**0**		
2.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	97.526.504	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah layanan jasa administrasikeuangan yang terlayani	12 Bulan	84.630.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah layanan jasa kebesihankantor yang tertangani	12 Bulan	51.281.264	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.10.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani.	12 Bulan	7.650.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah layanan penyediaan ATKyang tertangani	12 Bulan	22.007.286	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah layanan penediaan barangcetak dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	13.322.776	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	1 Jenis	5.498.219	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah layanan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tertangani	12 Bulan	2.022.528	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yangtertangani	12 Bulan	15.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah			Jumlah layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah yang tertangani	12 Bulan	125.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.01.34	Penataan Arsip Perkantoran			Jumlah layanan jasa penunjang administrasi perkantoran	12 Bulan	28.500.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai**	**100 %**	**670.450.000**	**0**		
2.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantoryang tersedia	1 Paket	0	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	1 Unit	43.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	4 Unit	114.500.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedungkantor			Jumlah gedung kantor yamh dipelihara	1 Paket	15.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.02.27	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional					497.950.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur**			**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**100 %**	**55.800.000**	**0**		
2.10.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Orang	45.800.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	40 Stel	0	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.05.96	Sosialisasi dan Tes Narkoba			Jumlah SDM yang memahamibahaya narkoba	40 Orang	10.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase peningkatan kualitasLaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**	**34.998.847**	**0**		
2.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD yangdisusun	1 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	4.999.698	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen	4.999.946	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhirtahun yang disusun	1 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah laporan RENJA (RKT, RKA danDPA) yang disusun	3 Dokumen	4.999.505	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06.25	Pelaksanaan Evaluasi RENJA			Jumlah laporan evaluasi RENJA yangtersusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06.26	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas dan Kinerja			Jumlah laporan monev akuntabilitasdan kinerja yang disusun	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.06.28	Forum Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP)			Jumlah laporan rekomendasi tindaklanjut SPIP yang disusun	1 Dokumen	9.999.698	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.30	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**			**1. Persentase OPD yang aktifdan update websitenya**	**100 %**	**2.430.298.726**	**0**		
				2. Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral					
				3. Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusatdan Provinsi					
2.10.30.01	Layanan nama domain dan sub domain bagilembaga, pelayanan pubik dan kegiatan di lingkungan pemerintah daerah			TERSEDIANYA LAYANAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN BAGI LEMBAGA PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG	20 SUBDOMAIN	111.184.955	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.30.02	Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dalampenggunaan aplikasi elektronik.			Meningkatnya kemampuan SDM Pemerintah Daerah dalam penggunaan	15 ORANG	50.000.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				aplikasi elektronik					
2.10.30.03	Penyelenggaran ekosistem TIK dan kerjasamaSmart City.			Terselenggaranya ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	1 Kegiatan	150.999.795	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.30.04	Penyusunan kebijakan dalam penyelenggaran namadomain dan e-Goverment (SPBE).			Tersusunnya kebijakan dalam penyelenggaran nama domain dane-Goverment (SPBE) dilingkunganPemerintah Kota Pangkalpinang.	1 DOKUMEN	59.719.308	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.30.05	Layanan akses internet, intranet, dan komunikasiintra pemerintah daerah.			Tersedianya layanan akses internet,intranet, dan komunikasi intra Pemerintah Kota Pangkalpinang.	1 PAKET	166.992.163	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.30.06	Layanan manajemen data dan informasi elektronikpemerintah daerah.			Terlaksananya layanan manajemendata dan informasi elektronik Pemerintah Daerah	1 PAKET	136.383.070	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.30.07	layanan infastruktur dasar Data Center, Disater Recovery Center dan TIK.			Terlaksananya layanan infrastrukturdasar data center, disater recovery center dan TIK	2 JENIS	1.755.019.435	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.31	**Program Pengelolaan Informasi danKomunikasi Publik**			**Persentase PPID aktif**	**100 %**	**428.803.637**	**75.000.000**		
2.10.31.01	Penyusunan dan Pengelolaan Data Informasi Publik			Terlaksananya Layanan InformasiPublik	100 %	104.781.710	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.31.02	Sosialisasi dan pembentukan Kelompok InformasiMasyarakat (KIM)			Kelompok Informasi Masyarakat	7 Kelompok	0	75.000.000	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.31.03	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media elektronik			Talkshow dan Pemberitaan sebanyak17 kali dalam 1 tahun :100%	100 %	70.683.449	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.31.04	Pengelolaan konten website pemerintah			420 Halaman dan 12 vlog / kontenvideo	100 %	73.373.822	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.31.05	Pengelolaan layanan aduan masyarakat KotaPangkalpinang					95.215.618	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.10.31.07	Penyebarluasan informasi penyelenggaraanpemerintahan daerah melalui media cetak			Pemberitaan Di Media Cetak Lokalsebanyak 14 kali selama 1 tahun	100 %	45.749.069	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.10.31.10	Penyelenggaran hubungan masyarakat, media dankemitraan komunitas.			Juara lomba vlog dan fotographi	6 Orang	38.999.969	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.14	**Statistik**					**498.134.780**	**0**		
2.14.16	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**			**Persentase OPD yang aktif dan update websitenyaPersentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoralPersentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota denganPusat dan Provinsi**	**100 %**	**498.134.780**	**0**		
2.14.16.01	Pengumpul dan Pengolahan data statistik sektoral			Tersedianya Data Sektoral DariSeluruh OPD	100 %	253.179.156	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.14.16.02	Diseminasi data statistik sektoral			Tersedianya Data Sektoral Dari OPD	100 %	45.250.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.14.16.03	Koordinasi Statistik Sektoral			Tersedianya Data Sektoral DariSetiap OPD	100 %	43.025.624	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.14.16.04	Forum Data Statistik Sektoral					156.680.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.15	**Persandian**					**72.973.463**	**60.000.000**		
2.15.16	**Program Penyelenggaraan PengamananInformasi Pemerintah Daerah**			**Persentase OPD yang aktif dan update websitenyaPersentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoraPersentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD,**	**100 %**	**72.973.463**	**60.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi					
2.15.16.01	Pengelolaan Berita Sandi dan Berita Lainnya			Peningkatan Pemanfaatan Persandian	1 tahun	30.623.463	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.15.16.02	Penyusunan kebijakan tata kelola keamananinformasi					0	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.15.16.03	Literasi keamanan informasi pemerintah daerah danpublik			Peningkatan pemanfaatan persandian	60 orang	0	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.15.16.04	Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi			Memahami Keamanan Informasi	60 Orang	0	60.000.000	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.15.16.05	Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi					42.350.000	0	APBD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
JUMLAH						**4.643.898.030**	**135.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**268.871.500**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**					**268.871.500**	**0**		
2.11.19	**Program Peningkatan Kualitas dan KapasitasKelembagaan Koperasi**			**1. Persentase Koperasi Aktif**	**40 %**	**196.660.000**	**0**		
				2. Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	**10 %**				
2.11.19.01	Penilaian koperasi berprestasi			Terlaksananya Penilaian Koperasi Berprestasi	3 Koperasi	18.395.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.02	Pelatihan akutansi dan manajemen koperasi					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.03	Pelatihan manajemen KSP/USP koperasi			Terlaksananya pelatihan manajemenpengelolan ksp/usp koperasi	30 Orang	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.04	Penilaian kesehatan KPS/USP Koperasi			Terlaksannya Penilaian KesehatanKSP/USP Koperasi	20 Koperasi	16.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.05	Pembinaan kelembagaan, usaha dam PermodalanKoperasi			terlaksananya pembinaan perkoperasian (4 triwulan)	60 Koperasi	35.175.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.06	Penyuluhan kelompok ekonomi produktif masyarakat			Terlaksannya Penyuluhan Perkoperasian pada KelompokEkonomi Produktif	50 Orang	39.650.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.07	Bimbingan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.08	Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip koperasi			Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Prinsip-Prinsip dan Jati diri Koperasi	60 Koperasi	45.250.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.09	Peningkatan gerakan masyarakat sadar koperasi			Terlaksananya Peningkatan GerakanMasyarakat Sadar Koperasi	30 orang	42.190.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.19.10	Pengawasan dan pemeriksa koperasi					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.11.20	**Program Pertumbuhan dan PeningkatanKualitas UMKM**			**1. Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Baru**	**100 %**	**72.211.500**	**0**		
				2. Persentase peningkatan usaha kecil dan menengah(UKM)	**3 %**				
				3. Persentase usaha mikro dankecil	**34 %**				
2.11.20.01	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan			Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM	50 Orang	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.20.02	Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha UMKM (2Angkatan)			terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM	50 Orang	39.474.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.20.03	Fasilitasi Kemudahan formalisasi BU					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.20.04	fasilitasi Pengembangan UMKM			Jumlah UMK yang di fasilitasi Halal,SNI, HAKI, Dll	35 UMK	32.737.500	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
2.11.20.05	Bantuan Permodalan Kepada Pelaku UMKM					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3	**Urusan Pilihan**					**13.619.191.753**	**230.000.000**		
3.06	**Perdagangan**					**11.002.000.698**	**0**		
3.06.21	**Program Peningkatan Kualitas Perdagangan**			**1. Persentase sarana prasaranaperdagangan yang memiliki informasi perdagangan**	**20 %**	**11.002.000.698**	**0**		
				2. Persentase pasar tradisionalyang memenuhi standar					
				3. Persentase pemilik UTTP yangtertib niaga					
3.06.21.01	Monitoring dan Evaluasi stok dan harga bahanpokok serta bahan strategis lainnya			Jangka Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	9 Bulan	113.697.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.06.21.02	Promosi komoditas perdagangan kota pangkalpinang			Terselenggaranya Pameran ProdukUMKM Yang Dapat Di Promosi	2 Event	2.922.739.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.03	Pasar Murah			Jumlah Lokasi Pasar Murah	4 Kecamatan	121.850.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.04	Pengawasan bahan Berbahaya (B2) di KotaPangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.05	Pembangunan dan operasionalisasi aplikasi sisteminformasi perdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.06	Pengawasan pupuk dan pestisida					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.07	Pengawasan dan pengendalian minuman beralkoholdi Kota Pangkalpinang			Jumlah Sarana Perdagangan Minuman Beralkohol Yang Diawasi	10 Lokasi	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.08	Kerjasama Pertukaran produk unggulan daerah					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.09	Sosialisasi Peningkatan Konsumen Cerdas					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.10	Penyusunan Perangkat Peraturan Lingkup Perdagangan			Jumlah Peraturan Yang Disusun	1 Peraturan	47.951.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.11	Sosialisasi/ Desiminasi Peraturan Lingkup Perdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.12	Pembangunan PUJASERA Senyum Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.13	Pengembangan/Rehabilitasi/Renovasi Ruko Milik Pemerintah Kota			Jumlah ruko yang direnovasi	14 ruko	2.518.313.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.14	Operasionalisasi dan Peningkatan Pelayanan UPT Pasar			Tersedianya Sarana dan prasaranaPelayannan UPT Pasar Induk	100 %	1.109.787.700	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.15	Updating Data Pasar					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.16	Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.06.21.17	Pembangunan Kantor UPT Pasar.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.18	Revitalisasi/Renovasi Pasar Kota Pangkalpinang			jumlah pasar yang direvitalisasi/ rehabilitasi	1 pasar	1.700.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.19	Peningkatan pengamanan pasar					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.20	Operasionalisasi Pengembangan Kemetrologian			Terjaminnya kebenaran alat UTTPdalam transaksi jual beli	1.500 Unit	362.799.998	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.21	Pengawasan UTTP			Terjaminnya kebenaran alat UTTPdalam transaksi perdagangan	1.500 Unit	63.049.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.24	Pasar Tertib Ukur					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.25	Penilaian Angka Kredit					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.30	Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat StandarMetrologi					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.32	Peningkatan Potensi dan Realisasi PAD			Terlaksananya Jumlah waktu peningkatan potensi dan realisasi PAD	100 %	45.498.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.33	Supervisi Pengawasan Pengembangan/Rehabilitasi Ruko Milik Pemerintah Kota			Jumlah dokumen pengawasan	1 dokumen	64.425.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.34	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Ruko Milik Pemkot					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.35	Penyusunan Andalalin Ruko Milik Pemerintah Kota					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.36	Penyusunan DED Revitalisasi Pasar KotaPangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.37	Penyusunan DED Pengembangan/Rehabilitasi Ruko Milik Pemerintah Kota menjadi Pujasera Senyum					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.06.21.38	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasar Kota Pangkalpinang			jumlah dokumen perencanaan pembangunan	2 dokumen	1.550.637.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.39	Supervisi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor UPT Pasar					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.40	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Gedung Kantor UPT Pasar					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.41	Supervisi dan Pengawasan Revitalisasi/Renovasi Pasar Kota Pangkalpinang			Jumlah dokumen pengawasan	1 dokumen	51.810.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.42	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Revitalisasi/Renovasi Pasar Kota Pangkalpinang			Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.44	Penyusunan Andalalin Pembangunan Pasar Rakyat			Jumlah dokumen analisa	1 dokumen	147.674.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.45	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Pasar Rakyat			Jumlah dokumen lingkungan hidup	1 dokumen	87.370.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.47	Monitoring Tertib Niaga di Kota Pangkalpinang			jenis yang dimonitor	2 jenis	43.635.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.06.21.48	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			jenis media sosialisasi	3 jenis	50.765.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07	**Perindustrian**					**2.617.191.055**	**230.000.000**		
3.07.01	**Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**1. Terpenuhinya KebutuhanAdministrasi Perkantoran**	**100 %**	**770.398.800**	**0**		
				2. Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani					
3.07.01.02	Penyediaan Jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dan internet			Terpenuhinya jasa telepon, listrikdan air	100 %	113.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tersedianya jasa administrasi	100 %	241.840.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				perkantoran					
3.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 %	49.985.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Peralatan dan perlengkapan administrasi perkantoran	100 %	36.275.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya alat tulis kantor	100 %	36.166.800	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedianya barang cetakan danpenggandaan kantor	100 %	45.537.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tersedianya alat listrik dan elektronik	100 %	13.355.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Peralatan dan perlengkapan kantor yang di beli	100 %	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Buku Perundang-Undangan	100 %	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Tersedianya makan dan minumpegawai	100 %	84.240.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah			Terlaksananya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah	100 %	150.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.19	Penyediaan Jasa perkantoran			Tersedianya jasa perkantoran	100 %	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.01.46	Penyediaan Peralatan dan Instalasi Internet					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**1. Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**233.221.500**	**0**		
				2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam					

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				kondisi baik					
3.07.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.			Perlengkapan Gedung kantor yangdi beli	100 %	36.500.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Peralatan Gedung kantor yang di beli	100 %	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.10	Pengadaan Meubeleur			Mebelair yang di beli	100 %	37.800.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya Gedung kantor	100 %	25.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional			Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100 %	133.921.500	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan perdagangan
3.07.02.25	Pembangunan Gedung Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.26	Supervisi dan Pengawasan Pembangunan GedungKantor Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.27	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.28	Rehabilitasi Gedung Dinas Koperasi, UMKM danPerdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.29	Supervisi Pengawasan Rehabilitasi PembangunanGedung Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.30	Mobilisasi Pindah Kantor					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.02.31	Penyusunan DED Rehabilitasi/Pengembangan Gedung Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	Perdagangan								
3.07.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur**			**1. Persentase aparatur yanglulus diklat**	**100 %**	**50.000.000**	**0**		
				2. Persentase sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya					
3.07.05.01	Pendidikan dan latihan formal			Terselenggaranya Pendidikan danPelatihan Formal	100 %	50.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.			Pakaian dinas beserta perlengkap annya	100 %	0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**1. Persentase jumlah Laporanyang terpenuhi**	**100 %**	**22.665.000**	**0**		
				2. Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan					
3.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja& ikhtisar realisasi kinerja SKPD.			Tersedianya data LAKIP	100 %	4.129.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran SKPD			Tersedianya laporan keuangansemesteran	100 %	4.764.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD			Tersedianya laporan keuangan akhirtahun	100 %	4.464.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.06.05	Penyusunan RENJA (RKT,RKA,dan DPA)			Tersedianya RKT, RKA dan DPA	100 %	4.308.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.06.22	Penyusunan Pelaporan SPIP di lingkungan OPD			Tersedianya RKT, RKA dan DPA	100 %	5.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.07.23	**Program Peningkatan Kualitas Perindustrian**			**1. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah**	**5 %**	**1.540.905.755**	**230.000.000**		
				2. persentase jumlah industri yang mendapat fasilitas untuk peningkatan daya saing	**20 %**				
				3. penyusunan RPIK Kota Pangkalpinang	**1 jenis**				
				4. Tersedianya fasilitas saran dan prasarana industri	**1 jenis**				
				5. tersedianyan sistem informasi industri	**1 data/informasi**				
3.07.23.01	Pendampingan Industri Kota Pangkalpinang.			IKM yang mendapat pendampingan	60 IKM	202.716.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.02	Pembinaan dan Pemberdayaan Dekranasda dan Industri Potensial.			Pemberdayaan Dekranasda Kota Pangkalpinang, Workshop2 Event	60 perajin	736.359.255	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.03	Penyusunan RPIK Kota Pangkalpinang.			Tersedianya Naskah Perencanaan RPIK	1 Dokumen	116.760.500	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.04	Penyusunan Raperda RPIK Kota Pangkalpinang.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.05	Pemuktahiran Data Industri Kecil dan Menengah.			Pemutakhiran Data Industri Kota Pangkalpinang	1 Kegiatan Pendataan IKM	24.772.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.06	Pembinaan UPL pada Industri Kecil Kota Pangkalpinang.			Peserta UPL yang dapat pembinaan	6 IKM	55.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.07	Pendampingan Legalitas Usaha Industri.			IKM yang memiliki Legalitas	60 IKM	42.981.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.08	Pembinaan Industri Pengolahan Pangan.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.09	Pembinaan Industri Kerajinan.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.10	Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Industri.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.07.23.11	Pendampingan Perizinan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah.			IKM yang memiliki ijin usaha	60 IKM	57.799.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.12	Pembangunan Sistem Informasi Industri			Tersedianya Sistem Informasi Industri	1 sistem	120.113.500	230.000.000	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.13	Pemberdayaan Rumah Kemasan Skala Kecil Kota Pangkalpinang.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.14	Coaching dan Mentoring Bisnis Industri.			Jumlah peserta yang mendapatan Coaching dan mentoring BisnisIndustri	50 orang	77.403.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.15	Peningkatan Kemampuan SDM ASN Perindustrian.			Peserta Pelatihan ASN Perindustrian	5 orang	50.000.000	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.16	Pembinaan Industri Kreatif.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.17	Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.			IKM YANG BERBASIS TEKNOLOGI INDUSTRI	10 IKM	57.001.500	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.18	Pembinaan Industri Menengah Kota Pangkalpinang.					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
3.07.23.19	Pemberdayaan Kemasan Industri Berdaya Saing					0	0	APBD	Dinas Koperasi, Umkm Dan Perdagangan
JUMLAH						**13.888.063.253**	**230.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**5.818.648.000**	**500.000.000**		
2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**					**5.818.648.000**	**500.000.000**		
2.13.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani**		**409.480.500**	**0**		
2.13.01.01	Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	186.585.500	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.02	Penyediaaan Jasa Admnistrasi Keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	36.830.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	30.355.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.04	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 bulan	16.600.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.05	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 bulan	11.850.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.06	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	12.510.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.07	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 bulan	3.800.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.13.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	10.950.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.01.09	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 bulan	100.000.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**		**105.721.000**	**0**		
2.13.02.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	32.500.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	2 unit	73.221.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase meningkatnya aparatur yang profesional dan kompeten**		**0**	**0**		
2.13.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 orang	0	0	APBD	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.13.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan**		**14.127.500**	**0**		
2.13.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	2.487.500	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	2.340.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.06.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	2.860.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.06.04	Penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	1 dokumen	3.410.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.06.05	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan			Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 dokumen	3.030.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	OPD								
2.13.22	**Program Peningkatan Kepemudaan dan Olahraga**			**1. Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti**	**95 %**	**5.289.319.000**	**500.000.000**		
				2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	**92 %**				
2.13.22.01	Pelatihan dan pelaksanaan paskibraka			Terpilihnya anggota Paskibraka Kota Pangkalpinang	36 orang	495.026.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.02	Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda			Jumlah pemuda yang mengikuti fasilitasi	22 orang	99.670.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.06	Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN)			Jumlah atlet yang berprestasi	110 Orang	195.900.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.07	Liga Sepakbola Pelajar (LSP)			Jumlah atlet yang berprestasi	30 orang	78.055.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.09	Pengembangan olahraga rekreasi			Jumlah penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi	89 kali	680.653.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.10	Penyediaan Jasa Penunjang Sarana dan Prasarana Olahraga			Jumlah petugas jasa penunjang sarana dan prasarana olahraga	10 orang	227.500.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.27	Kejuaraan Daerah (KEJURDA)			Jumlah Atlet yang berprestasi	134 Orang	1.167.525.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.28	Invitasi Olahraga Tradisional (IOT)			Jumlah atlet yang berprestasi	20 orang	144.990.000	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.29	Penyediaan prasarana olahraga			Jumlah prasarana olahraga yang tersedia	1 paket	2.200.000.000	500.000.000	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.30	Pengiriman duta belia paskibraka			Jumlah duta belia paskibaraka yang berprestasi	36 orang	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.31	Penyusunan PERDA kepemudaan			Jumlah dokumen perda kepemudaan yang tersusun	1 dokumen	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.32	Pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pemuda			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan	33 orang	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2.13.22.33	Fasilitasi penyuluhan tentang bahaya narkoba dikalangan generasi muda			jumlah peserta yang mengikuti fasilitasi penyuluhan tentang bahaya narkoba	50 orang	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.34	Sosialisasi PERDA dan Perwako Keolahragaan			jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	50 orang	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.35	Sprint Pantai			Jumlah Penyelenggaraa event olaharag wisata	1 kali	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.13.22.36	Kincang Pesona PGK			Jumlah penyelenggaraan event olahraga wisata	1 kali	0	0	APBD	Dinas Pemuda Dan Olahraga
JUMLAH						**5.818.648.000**	**500.000.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					**1.599.378.200**	**369.300.000**		
2.17	**Perpustakaan**					**1.281.213.200**	**116.000.000**		
2.17.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**601.725.500**	**0**		
2.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			jangka waktu ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	116.900.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jenis jasa administrasi keuangan	6 jenis	192.420.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah jasa kebersihan kantor	3 orang	79.170.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jenis peralatan kerja yang diperbaiki	4 jenis	18.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jenis alat tulis kantor yang tersedia	50 jenis	19.169.500	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jenis barang cetakan dan penggandaan	13 jenis	11.280.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi			Jenis komponen instalasi	10 jenis	8.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	listrik/penerangan bangunan kantor			listrik					Kearsipan
2.17.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	3 jenis	3.450.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jangka waktu ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 bulan	7.728.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jangka waktu ketersediaan makanan dan minuman	11 bulan	23.208.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah orang yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah untuk rapat koordinasi dan konsultasi	30 kali	120.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.01.47	Pengembangan dan Pemeliharaa Sistem/Website			Jangka waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem/ web	12 bulan	2.400.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**213.472.000**	**20.000.000**		
2.17.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 kali	22.500.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	6 unit	160.972.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan kearsipan
2.17.02.25	Mobilisasi Pindah Kantor					30.000.000	20.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas**	**100 %**	**36.000.000**	**0**		
2.17.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/fungsional	5 orang	36.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase jumlah laporan yang terpenuhi**	**100 %**	**20.500.000**	**0**		
2.17.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jenis laporan capaian kinerja yang disusun	3 jenis	3.500.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Laporan	4.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir			Jumlah laporan keuangan	1 Laporan	4.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	tahun			akhir tahun yang disusun					Kearsipan
2.17.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			jangka waktu ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	5.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jenis dokumen pelaporan SPIP di Lingkungan OPD yang disusun	1 Jenis	4.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22	**Program Pelayanan Perpustakaan dan Peningkatan Budaya Baca**			**1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun**	**178.786 Orang**	**409.515.700**	**96.000.000**		
				2. Jumlah judul buku yang tersedia di perpustakaan	**25.357 Judul**				
2.17.22.01	Pengembangan Minat dan Budaya Baca			Jenis lomba peningkatan minat dan budaya baca	4 jenis	80.000.000	96.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22.02	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat			Jumlah perpustakaan umum/khusus/sekolah/masyarakat yang terbina	17 Perpustakaan	9.367.500	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22.03	Pemeliharaan dan Pengolahan Bahan Pustaka			Jumlah bahan pustaka yang terpelihara	1.300 Eksemplar	56.377.200	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22.05	Promosi dan Publikasi Perpustakaan			jumlah media promosi perpustakaan	3 Media Promosi	27.743.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22.06	Pengembangan Layanan Perpustakaan Keliling			Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling	600 Kunjungan	82.601.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Umum			Jenis layanan perpustakaan	4 Jenis	133.427.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.17.22.217	Perluasan Gedung fasilitas layanan Perpustakaan umum			Jumlah Gedung fasilitas layanan perpustakaan umum yang diperluas	1 unit	20.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18	**Kearsipan**					**318.165.000**	**253.300.000**		
2.18.19	**Program Penyelenggaraan Kearsipan**			**1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan**	**87 %**	**318.165.000**	**253.300.000**		
				2. Persentase SDM kearsipan yang memiliki kompetensi	**36 %**				
2.18.19.01	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah			Jumlah meter linier/box yang dikelola	100 ml	80.000.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.19.03	Penelusuran Arsip			jumlah arsip tokoh/ peristiwa	3 Arsip	12.285.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				sejarah yang tersimpan					Kearsipan
2.18.19.04	Lomba Pengelola Kearsipan			Jumlah unit kearsipan terbaik	6 unit kearsipan	40.770.000	60.000.000	APBD	
2.18.19.05	Akuisisi/Penyusutan/Pemusnahan Arsip			Jumlah meter linier arsip yang di data dalam JRA	40 ML	20.110.000	0	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.19.06	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Kearsipan			Jumlah peserta bimtek yang terlatih	60 Orang	50.000.000	73.100.000	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.19.07	Bimbingan dan Supervisi Penataan Arsip di Unit Pencipta Arsip Binaan			Jumlah unit kearsipan yang arsip vitalnya ditata	5 unit kearsipan	35.000.000	40.100.000	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.19.10	Pengawasan dan Audit Kearsipan Internal			Jumlah unit kearsipan yang diaudit	30 unit kearsipan	65.000.000	40.000.000	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.18.19.15	Bimbingan dan Supervisi Penataan Arsip Lintas Sektor dan swasta			Jumlah unit kearsipan binaan yang mendapat bimbingan	1 unit kearsipan	15.000.000	40.100.000	APBD	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
JUMLAH						**1.599.378.200**	**369.300.000**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3	**Urusan Pilihan**					**3.677.667.000**	**3.364.999.993**		
3.01	**Kelautan dan Perikanan**					**3.677.667.000**	**3.364.999.993**		
3.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi**	**100 %**	**547.763.000**	**716.213.000**		
3.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	64.750.000	64.750.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.07	Penyediaan Administrasi Keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 Bulan	203.481.000	203.481.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	100.199.000	100.199.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 Bulan	10.000.000	10.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 Bulan	11.351.000	11.351.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	12.105.000	12.105.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 Bulan	2.227.000	2.227.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat			Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	12.100.000	12.100.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 Bulan	120.000.000	300.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.01.19	Pembuatan dan Pengelolaan Website					11.550.000	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan/dibangun/pelihara/rehab**	**100 %**	**674.197.500**	**685.747.500**		
3.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	1 Paket	200.000.000	200.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.02.22	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			Jumlah Unit gedung yang mendapat pemeliharaan	1 Unit	100.000.000	100.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah Unit kendaraan dinas / operasional yang mendapat pemeliharaan	6 Unit	185.747.500	185.747.500	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.01.02.25	Pengadaan Mebeleur			Jumlah jenis mebeleur yang diadakan	7 Jenis	188.450.000	200.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase sumberdaya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya**	**100 %**	**86.100.000**	**120.000.000**		
3.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	9 Orang	30.000.000	60.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	85 stel	56.100.000	60.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase jumlah laporan yang terpenuhi**	**100 %**	**17.274.000**	**17.273.993**		
3.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	5 Dokumen	2.241.000	2.241.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	5 Dokumen	1.910.000	1.910.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 Dokumen	1.910.000	1.910.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	5 Dokumen	2.565.000	2.565.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.06.22	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun	3 Dokumen	2.013.000	2.013.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.06.27	Forum Perangkat Daerah			jumlah pelaksanaan kegiatan forum perangkat daerah	1 Kali	6.635.000	6.634.993	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pemasaran dan Konsumsi**			**1. Jumlah produksi perikanan budidaya**	**907.285 ton**	**2.352.332.500**	**1.825.765.500**		
				2. Jumlah produksi perikanan tangkap	**3.212 ton**				
				3. Angka konsumsi ikan masyarakat	**52 kg/kapita/tahun**				

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.01.31.06	Validasi Data Statistik Perikanan			jumlah dokumen yang tervalidasi	1 Dokumen	71.613.000	71.613.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.07	Pengembangan Balai Benih Ikan Lokal			Target PAD BBIL Kota Pangkalpinang	500.000.000 Rupiah	822.152.500	822.152.500	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.08	Fasilitasi peningkatan kelembagaan serta Bimtek terhadap pelaku usaha di bidang Perikanan Tangkap			Jumlah Kelompok Pelaku Usaha Yang terfasilitasi	3 Kelompok	35.000.000	35.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.09	Pemagangan Pelaku Usaha dan Tenaga Teknis Bidang perikanan Tangkap, budidaya dan Pengolahan			Jumlah Peserta yang mengikuti pemagangan	75 Orang	100.000.000	100.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.10	Bimtek Pelatihan Perawatan dan Perbaikan Mesin kapal					0	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.11	Kegiatan Gemar ikan dan Lomba Masak			Angka Konsumsi Ikan	53,24 Kapita/ Tahun	150.000.000	150.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.12	Rehap Kios P2HP Kota Pangkalpinang					0	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.13	Pembinaan kelompok budidaya ikan			Jumlah Kelompok yang Dibina	30 Kelompok	298.313.000	300.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.14	Kegiatan Fasilitasi Kemasan Produk Hasil Perikanan 2021					0	20.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.15	Sosialisasi dan Pembinaan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Pengolahan Ikan dan Surat Kelayakan Pengolahan			Jumlah Dokumen (STPUPI) dan (SKP)	30 Dokumen	50.000.000	50.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.16	Kegiatan Optimalisasi Kios P2HP					0	45.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.17	Penyediaan Jasa Pengelolaan UPT TPI			Jumlah UPT TPI yang Beroperasi	1 Unit	200.530.000	207.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.18	Bukti pencatatan Kapal perikanan Kota Pangkapinang			Jumlah Kapal Yang Terdata	125 Kapal	25.000.000	25.000.000	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.19	Penyusunan SID & DED					0	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.31.20	Perencanaan Sarana dan Prasarana Perikanan					599.724.000	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.01.32	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD) Kabupaten/Kota			1. Jumlah Unit Sarana BBIL yang direnovasi	7 unit	0	0		
				2. Jumlah Unit Sarana Yang di Beli	3 paket				
3.01.32.01	Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul					0	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.01.32.02	Rehabilitasi Kolam atau Bak Induk/Calon Induk					0	0	APBD	Dinas Kelautan Dan Perikanan
JUMLAH						3.677.667.000	3.364.999.993		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3	Urusan Pilihan					4.456.481.000	926.152.000		
3.02	Pariwisata					4.456.481.000	926.152.000		
3.02.01	Program Pelayanan Administrasi			Persentase layanan	100 %	625.355.000	627.920.000		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	Perkantoran			**administrasi perkantoran yang tertangani**					
3.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	226.585.500	226.585.500	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.07	Penyediaaan Jasa Administrasi Keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	141.830.000	141.830.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	33.512.500	33.512.500	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 bulan	26.500.000	26.500.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 bulan	13.435.000	16.000.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	16.142.000	16.142.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 bulan	4.000.000	4.000.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman			Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	13.350.000	13.350.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tertangani	12 bulan	150.000.000	150.000.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik**	**100 %**	**115.285.000**	**115.285.000**		
3.02.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 unit	32.500.000	32.500.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	2 unit	82.785.000	82.785.000	APBD	Dinas Pariwisata

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
3.02.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten**	**100 %**	**40.000.000**	**60.000.000**		
3.02.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	40.000.000	60.000.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan**	**100 %**	**19.360.000**	**29.680.000**		
3.02.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 dokumen	3.200.000	3.200.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	3.800.000	3.800.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	3.840.000	3.840.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.06.05	Penyusunan RENJA (RKT,RKA dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	1 dokumen	4.680.000	15.000.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.06.23	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 dokumen	3.840.000	3.840.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18	**Program Peningkatan Kepariwisataan**			**1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan**	**3 %**	**3.656.481.000**	**93.267.000**		
				2. Persentase meningkatnya PAD sektor pariwisata	**2,10 %**				
3.02.18.01	Festival Beribu Senyuman			Jumlah event yang diselenggarakan	1 kali	662.050.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri			Jumlah pameran/festival yang diselenggarakan dan diikuti dalam 1 tahun	5 kali	1.214.900.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.06	Pemilihan Duta Wisata Pangkalpinang			Jumlah penyelenggaraan pemilihan duta wisata	1 kali	301.250.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.07	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata			Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata	6 Jenis	188.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.08	Peningkatan pemanfaatan			Jumlah jenis media promosi	1 media	5.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata			pemasaran pariwisata					
3.02.18.09	Penyediaan Bahan Promosi Pariwisata			Jumlah jenis media promosi pemasaran pariwisata	3 Jenis	46.767.000	93.267.000	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.11	Pengawasan, Monitoring dan Penertiban Jasa Usaha dan Sarana Wisata			Jumlah usaha yang mendapat Pengawasan, Monitoring dan penertiban	60 usaha	20.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Objek Wisata			Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara	1 objek	751.956.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.39	Fasilitasi Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona Terhadap Masyarakat Sekitar Daerah Wisata			Jumlah peserta yang mengikuti dialog kepariwisataan	60 orang	0	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.40	Pembinaan dan Lomba Cipta Pesona ODTW			Jumlah peserta yang mengikuti lomba	7 kelompok	45.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.41	Pembinaan dan Penguatan Peran Saka Pariwisata			Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	60 orang	0	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.42	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Jumlah peserta yang mengikuti dialog kepariwisataan	60 orang	0	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.43	Penyelenggaraan Lomba Masak Chef Hotel dan Restoran			Jumlah peserta yang mengikuti lomba	20 orang	30.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.44	Sosialisasi Peraturan-peraturan kepariwisataan			Jumlag peserta yang mengikuti sosialisasi	40 Orang	0	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.45	Pemberian Penghargaan Adikarya Wisata bagi Pelaku Kepariwisataan			Jumlah kategori pelaku pariwisata yang mendapat penghargaan	4 kategori	70.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.46	Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Kepariwisataan			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	50 orang	0	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.47	Penyusunan Peraturan-Peraturan Kepariwisataan			Jumlah dokumen pengembangan pariwisata	1 dokumen	65.000.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
3.02.18.48	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisisata Daerah (RIPARDA) Kota Pangkalpinang					256.558.000	0	APBD	Dinas Pariwisata
JUMLAH						4.456.481.000	926.152.000		

KODE	URUSAN / PROGRAM /	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	RENCANA	RENCANA TAHUN	SUMBER	PERANGKAT

	KEGIATAN	LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)		TAHUN 2021(N)	2022 (N + 1)	DANA	DAERAH
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**8.557.354.000**	**6.437.000.001**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**8.557.354.000**	**6.437.000.001**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**764.692.000**	**939.500.000**		
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 Bulan	85.000.000	98.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 Bulan	415.500.000	380.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	33.000.000	35.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 Bulan	35.000.000	36.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 Bulan	17.542.000	20.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 Bulan	26.650.000	36.500.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 Bulan	7.000.000	12.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0	120.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 Bulan	19.500.000	22.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	125.500.000	180.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				yang tertangani					
4.01.01.27	Pemasangan Baru/ Penambahan Daya Listrik					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.40	Penyediaan Sarana Pelayanan administrasi Perkantoran					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.01.42	Penataan inventarisasi Aset SKPD					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**155.000.000**	**350.000.000**		
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	75.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur					0	100.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	75.000.000	85.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	4 Unit	70.000.000	78.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.166	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.02.167	Pemeliharan Aplikasi E-Monitoring dan Pelayanan			Jumlah web site/aplikasi perkantoran yang terbangun/terpelihara	2 jenis	10.000.000	12.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 %**	**135.200.000**	**140.000.000**		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	8 Orang	75.000.000	70.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	80 steel	60.200.000	70.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**	**20.000.000**	**22.500.000**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	3.000.000	3.500.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen	4.000.000	4.500.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	4.000.000	4.500.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang disusun	3 Dokumen	5.000.000	5.500.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 Dokumen	4.000.000	4.500.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**1. Indek kepuasan masyarakat**	**4**	**7.482.462.000**	**4.985.000.001**		
				2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	**85 %**				
				3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	**80 %**				
				4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	**80 %**				
				5. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun					
4.01.86.01	Penyusunan Buku Profil Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.02	Lomba Kelurahan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.03	Pembinaan kelurahan terbaik					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)			Jumlah waktu Terlaksanannya Pelayanan administrasi terpadu	12 Bulan	25.000.000	29.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.07	Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.08	Pembinaan PKK			Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan PKK tingkat Kecamatan	12 Bulan	95.000.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.09	Pembinaan UKS					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI			jumlah Kegiatan Pelaksanaan KSI	1 Kegiatan	15.844.000	20.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.12	Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.13	Sosialisasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.14	Pelaksanaan Musrenbang			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	31.500.000	34.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.15	Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah Waktu Pelaksanaan Gotong Royong	12 Bulan	21.440.000	25.000.001	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.16	Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan HUT RI tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	95.000.000	100.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.17	Hari Jadi Kota Pangkalpinang			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Hari jadi Kota Pangkalpinang	3 Kegiatan	44.000.000	46.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.18	Pelaksanaan STQ/MTQ			Jumlah Kegiatan Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kecamatan	1 Kegiatan	182.000.000	192.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.19	Pelaksanaan Porkot					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.20	Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	120 Orang	19.500.000	21.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.27	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Putih			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	151.310.000	160.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.28	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sinar Bulan			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	151.310.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.29	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Temberan			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	160.485.000	163.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.30	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung lama			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	145.127.000	160.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.31	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Mawar			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	157.415.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.32	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bacang			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	151.310.000	160.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.33	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Itam			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	154.760.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.34	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Putih			Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 Bulan	475.976.000	490.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.35	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sinar Bulan			Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	12 Bulan	475.976.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.36	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Temberan			Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 Bulan	466.976.000	490.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.37	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan semabung lama			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 bulan	482.160.000	510.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.38	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan air mawar			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	469.871.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.39	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bacang			Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 Bulan	475.976.000	495.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.40	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Itam			Jumlah waktu pemberdayaan Masyarakat kelurahan	12 Bulan	472.526.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.41	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Pasir Putih					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.42	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Sinar Bulan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.43	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Temberan					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.44	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Semabung Lama					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.45	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Mawar					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.46	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Bacang					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.47	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Itam					0	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.48	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Putih					366.000.000	375.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.49	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sinar Bulan					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.50	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Temberan					366.000.000	375.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.51	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Lama			Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	6 paket	366.000.000	380.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.52	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Mawar			Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana	6 Paket	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.53	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bacang					366.000.000	380.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
4.01.86.54	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Itam					366.000.000	380.000.000	APBD	Kecamatan Bukit Intan
JUMLAH						**8.557.354.000**	**6.437.000.001**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**9.550.643.000**	**8.627.807.211**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**9.550.643.000**	**8.627.807.211**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**759.225.000**	**730.725.000**		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah Pelaksanaan Tertib Penatausahaan Surat Menyurat yang Tertangani	12 bulan	57.200.000	57.200.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tertangani	12 bulan	75.000.000	75.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keuangan yang Tertangani	12 bulan	309.860.000	281.360.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah Layanan Jasa Kebersihan Kantor yang Tertangani	12 bulan	55.000.000	55.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah Layanan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang Tertangani	12 bulan	24.200.000	24.200.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah Layanan Penyediaan ATK yang Tertangani	12 bulan	19.500.000	19.500.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah Layanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tertangani	12 bulan	13.600.000	13.600.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah Layanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tertangani	12 bulan	14.315.000	14.315.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tertangani	12 bulan	12.550.000	12.550.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah Layanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang	12 bulan	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				Tertangani					
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah Layanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Tertangani	12 bulan	3.000.000	3.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah Layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang Tertangani	12 bulan	25.000.000	25.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah Layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	150.000.000	150.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.27	Pemasangan Baru/ Penambahan Daya Listrik			Jumlah Layanan Pemasangan Baru/Penambahan Daya Listrik yang Tertangani	12 bulan	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.42	Penataan inventarisasi Aset SKPD			Jumlah Waktu Penataan	12 bulan	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.01.49	Mobilisasi Pindah Kantor					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**188.275.000**	**188.275.000**		
4.01.02.03	Pembangunan gedung kantor			Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	12 bulan	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	0 paket	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	0 paket	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.10	Pengadaan mebeleur			Jumlah Meubelair yang Tersedia	0 set	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	12 bulan	87.150.000	87.150.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara	12 bulan	82.600.000	82.600.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Jumlah Paket Rehab	0 paket	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.66	Pengadaan Website			Jumah Paket Pengadaan	0 paket	0	0	APBD	Kecamatan Rangkui

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.02.168	Pengadaan aplikasi					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.169	Pengadaan gedung kantor/rehab total Gedung aula					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.02.170	Pemeliharaan Rutin/berkala jaringan listrik, air			Jumlah Jaringan Listrik, Air yang Terpelihara	12 bulan	18.525.000	18.525.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 %**	**56.100.000**	**56.100.000**		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 orang	30.000.000	30.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia	30 Stell	26.100.000	26.100.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**5 laporan**	**20.500.000**	**20.500.000**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun	1 Dokumen	3.500.000	3.500.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Disusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Disusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah Laporan Renja (RKT,RKA,DPA) yang Disusun	3 Dokumen	5.000.000	5.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah Laporan SPIP yang Disusun	1 Dokumen	4.000.000	4.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun**	**80 %**	**8.526.543.000**	**7.632.207.211**		
4.01.86.01	Penyusunan Buku Profil Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.02	Lomba Kelurahan			Keikutsertaan	8 Kelurahan	5.000.000	5.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				kelurahan Dalam lomba Administrasi					
4.01.86.03	Pembinaan Kelurahan Terbaik			Terbinanya Kelurahan Terbaik	12 bulan	5.000.000	5.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.05	Pemilihan RT RW					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)			Terlaksanannya Pelayanan Administrasi Terpadu	12 bulan	7.000.000	7.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.07	Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.08	Pembinaan PKK			Jumlah PKK yang Dibina	8 kelurahan	110.000.000	110.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.09	Pembinaan UKS			Jumlah UKS yang dibina	38 UKS	19.200.000	19.200.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI			Terlaksananya KSI	70 orang	26.100.000	26.100.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.12	Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.13	Sosialisasi Forum Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.14	Pelaksanaan Musrenbang			Jumlah Kehadiran Masyarakat yang diundang dalam Musrenbang	175 orang	20.000.000	20.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.15	Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah Masyarakat yang ikut Gotong Royong	200 orang	30.000.000	30.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.16	Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan			Terlaksananya Pelayanan Hubungan Kemasyrakatan	3.500 orang	125.000.000	125.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.17	Hari Jadi Kota Pangkalpinang			Pelaksanaan Hari Jadi Kota Pangkalpinang	300 orang	50.000.000	50.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.18	Pelaksanaan STQ/MTQ			Jumlah Peserta STQ/MTQ	1 Kegiatan	162.950.000	162.950.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.19	Pelaksanaan Porkot					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.20	Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum			Presentase Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum	12 bulan	11.000.000	11.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.22	Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.23	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan			Jumlah Waktu Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	2 kali	9.000.000	9.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.55	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan P. Air			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi	12 Bulan	177.313.000	177.313.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.56	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bintang			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	160.684.000	160.684.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.57	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan G. Mada			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 bulan	195.488.000	195.488.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.58	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan M. Jamik			jumlah waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 bulan	157.630.000	157.630.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.59	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Asam			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 bulan	203.626.000	203.626.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.60	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Melintang			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	176.076.000	176.076.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.61	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan P. Lalang			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 Bulan	226.237.000	226.237.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.62	Peningkatan pelayanan Administrasi Kelurahan Keramat			Jumlah Waktu Pelayanan Administrasi Kelurahan	12 bulan	173.349.000	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.63	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan P. Air			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	449.974.000	449.974.214	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.64	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bintang			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	466.603.000	466.603.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.65	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan G. Mada			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	431.799.000	431.799.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.66	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan M. Jamik			Jumlah waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	469.656.000	469.656.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.67	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan asam			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	423.661.000	423.661.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.68	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Melintang			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	451.210.000	451.210.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.69	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Parit Lalang			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	401.050.000	500.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.70	Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Keramat			Jumlah Waktu Pemberdayaan Masyarakat	12 bulan	453.937.000	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.71	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan pintu Air					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.72	Peningkatan partisipasi masyarakat					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Bintang								
4.01.86.73	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan G.Mada					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.74	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Masjid Jamik					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.75	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Asam					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.76	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Melintang					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.77	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Parit Lalang					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.78	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan Kelurahan Keramat					0	0	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.79	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan pintu Air			Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan Prasarana	1 paket	366.000.000	365.999.997	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.80	Pembangunan Sarana dan prasarana Kelurahan Bintang			Jumlah Paket pembangunan sarana dan Prasarana	1 Paket	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.81	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan G.Mada			Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1 paket	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.82	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Masjid Jamik			Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1 paket	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.83	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Asam			Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1 paket	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.84	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Melintang			Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1 paket	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.85	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parit Lalang			Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	1 paket	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Rangkui
4.01.86.86	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keramat			Jumlah Paket Pembangunan Sarana dan prasarana	1 paket	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Rangkui
JUMLAH						9.550.643.000	8.627.807.211		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					7.564.072.000	0		
4.01	Administrasi Pemerintahan					7.564.072.000	0		
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100 %	743.156.000	0		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	22.500.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	66.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya	100 Persen	322.790.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tersedianya jasa kebersihan kantor	100 Persen	57.900.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	100 Persen	21.100.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Tersedianya alat tulis kantor	100 Persen	14.500.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	11.500.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					45.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	16.600.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan	12 Bulan	2.500.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Tersedianya makan dan minum pegawai	12 Bulan	30.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi Keluar Daerah			Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan	121.766.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.01.27	Pemasangan baru/penambahan daya listrik					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**179.994.000**	**0**		
4.01.02.03	Pembangunan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.10	Pengadaan Meubelair					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	12 Bulan	110.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	69.994.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.66	Pengadaan website					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.166	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.02.168	Pengadaan aplikasi					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya**	**100 %**	**56.000.000**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				aparatur					
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan ASN	12 Orang	45.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			Terlaksanakannya sosialisasi	100 Orang	11.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun**	**7 dokumen**	**20.500.000**	**0**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumah dokumen lakip	1 Dokumen	3.500.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Terlaksanakannya penyusunan laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD			Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Tersusunnya laporan dokumen Renja (RKT,RKA,DPA)	3 Dokumen	5.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Tersusunnya laporan SPIP	1 Dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**1. Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik**	**100 %**	**6.564.422.000**	**0**		
				2. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun					
4.01.86.01	Penyusunan Buku Profil Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.02	Lomba Kelurahan			Keikutsertaan kelurahan dalam lomba kelurahan	6 Kelurahan	9.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.03	Pembinaan Kelurahan Terbaik			Terbinanya kelurahan terbaik	1 Kegiatan	9.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan			Jumlah rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	2 Kegiatan	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.05	Pemilihan RT RW					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)			Terlaksanannya Pelayanan administrasi terpadu	12 Bulan	12.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.07	Penyusunan dan implementasi SOP Pelayanan					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.08	Pembinaan PKK			Terbinanya PKK yang ada di wilayah kecamatan	6 Kelurahan	95.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.09	Pembinaan UKS			Terbinanya UKS yang ada di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI			Terlaksananya KSI	1 Kegiatan	10.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan			Jumlah kegiatan pemberdayaan kapasitas kelembagaan	6 Kegiatan	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.12	Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.13	Sosialisasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak			peserta sosialisasi yang hadir	100 Orang	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.14	Pelaksanaan Musrenbang			Terlaksanakannya musyawarah rencana pembangunan kecamatan	240 Orang	33.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.15	Pelaksanaan Gotong Royong			terlaksanakannya kegiatan penghijauan dan gotong royong	800 Orang	22.700.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.16	Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan			Terlaksananya pelayanan hubungan kemasyarakatan	800 Orang	150.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.17	Hari Jadi Kota Pangkalpinang			Pelaksanaan hari jadi kota Pangkalpinang	300 Orang	39.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.18	Pelaksanaan STQ/MTQ			terlaksanakannya STQ Tingkat Kecamatan	70 Orang	150.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.19	Pelaksanaan PORKOT					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.20	Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum			Jumlah Peserta yang ikut bimbingan	150 Orang	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.23	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.24	Monitoring UKS					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.87	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Taman Bunga			Terlaksanakannya Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	134.951.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.88	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Merapin			Terlaksanakannya Administrasi di Kelurahan	12 Bulan	125.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.89	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Kepala Tujuh			TERLAKSANANYA ADMINISTRASI DI KELURAHAN	12 BULAN	125.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.90	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Sari			Terlaksanakannya administrasi di kelurahan	12 Bulan	143.787.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.91	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Tua Tunu Indah			Terlaksananya administrasi di Kelurahan	12 Bulan	145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.92	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kacang Pedang			Terlaksanakannya administrasi Kelurahan	12 Bulan	134.951.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.93	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman Bunga			Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan	12 Bulan	492.336.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.94	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Merapin			Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan	12 Bulan	502.287.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.95	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Kepala Tujuh			Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan	12 BULAN	502.287.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.96	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Sari			Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat	12 Bulan	483.500.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				kelurahan					
4.01.86.97	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tua Tunu Indah			Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Tingkat Kelurahan	12 Bulan	482.287.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.98	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kacang Pedang			Terbinanya lembaga kemasyarakatan dan organisasi tingkat kelurahan	12 Bulan	492.336.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.99	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Taman Bunga					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.100	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Bukit Merapin					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Kepala Tujuh					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.102	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Bukit Sari					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.103	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Tua Tunu Indah					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.104	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Kacang Pedang					0	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.105	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Taman Bunga			Jumlah paket sarana dan prasarana	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.106	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Merapin			Jumlah Paket sarana dan prasarana	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.107	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Air Kepala Tujuh			Jumlah paket sarana dan prasarana	12 BULAN	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.108	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Bukit Sari			Jumlah Paket sarana dan prasarana	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.109	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Tua Tunu Indah			Jumlah Paket Sarana dan Prasarana	1 Paket	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
4.01.86.110	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Kacang Pedang			Jumlah paket sarana dan prasarana	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gerunggang
JUMLAH						7.564.072.000	0		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**6.570.786.070**	**0**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**6.570.786.070**	**0**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**783.238.395**	**0**		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	140.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	14 Jasa	380.479.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah jasa Kebersihan kantor	2 Jasa	52.414.315	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	5 Jenis	40.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	30.934.500	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah paket belanja cetak dan penggandaan	2 Jenis	28.634.020	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah paket penyediaan komponen instalasi & listrik/penerangan	1 Tahun	6.500.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	1 Jenis	0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	9.160.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	1 Tahun	95.116.560	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 %**	**199.154.750**	**0**		
				2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.10	Pengadaan Mebeluer					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.12	Pembangunan parkir					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	100.130.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas operasional			jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	3 unit	77.024.750	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.107	Dekorasi Ruangan/pelayanan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.109	pemeliharaan website			jumlah waktu pemeliharaan website	1 Tahun	22.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.146	Pembangunan Mushola					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.166	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik,air					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.02.168	Pengadaan aplikasi					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.170	Pemeliharaan aplikasi					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.171	Pembuatan baleho kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.172	Pembuatan Taman Kantor					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.173	Pembangunan nama kantor					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.02.174	Pembuatan video profil					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**1. Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 %**	**66.900.000**	**0**		
				2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			Jumlah jenis pakaian yang dibuat	4 Jenis	60.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)			Terwujudnya sosialisasi penanggulangan narkoba	1 kali	6.900.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.05.109	Bahaya narkoba					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**1. Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun**	**7 dokumen**	**20.500.000**	**0**		
				2. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan					
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah dokumen lakip	1 dokumen	3.500.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT,RKA,DPA)			Jumlah dokumen RENJA	1 dokumen	5.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.06.22	Penyusunan pelaporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan OPD			Jumlah dokumen SPIP	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik**	**100**	**5.500.992.925**	**0**		
4.01.86.01	penyusunan buku profil kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.02	lomba kelurahan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.03	pembinaan kelurahan terbaik					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.04	rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan			Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	21.009.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.05	Pemilihan RT/RW					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.06	penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.07	penyusunan dan Implementasi SOP pelayanan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.08	Pembinaan PKK			Jumlah waktu PKK yang dibina	12 Bulan	159.548.400	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.11	pemberdayaan kapasitas kelembagaan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.12	pembentukan forum kecamatan dan kelurahan layak anak					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.13	sosialisasi forum kecamatan dan kelurahan layak anak					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.14	Pelaksanaan musrembang			Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrembang	1 kali	20.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.15	pelaksanaan gotong royong			Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	48 kali	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.16	peningkatan pelayanan hubungan masyarakat			Terlaksananya pelayanan hubungan kemasyarakatan	1 kali	151.999.455	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.17	hari jadi kota pangkalpinang			pelaksanaan hari jadi kota pangkalpinang	1 kali	37.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.18	pelaksanaan STQ/ MTQ			pelaksanaan kegiatan STQ/MTQ	1 kali	130.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.19	Pelaksanaan PORKOT			Cabang olahraga yang di ikuti	1 kali	0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.20	Pembinaan keamanan dan ketertiban umum					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.23	rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan tingkat kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.24	Monitoring UKS					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.25	Bimtek RT/RW					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.26	kegiatan sadar hukum					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.111	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Opas Indah			Jumlah waktu pelayanan kelurahan opas indah	12 bulan	141.559.214	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.112	peningkatan pelayanan administrasi kelurahan gedung nasional			jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan gedung nasional	12 bulan	141.559.214	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.113	peningkatan pelayanan administrasi kelurahan batin tikal			Jumlah Waktu Pelayanan Kelurahan Batin Tikal	12 Bulan	141.559.214	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.114	peningkatan pelayanan administrasi kelurahan rawa bangun			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan Rawa Bangun	12 Bulan	141.559.214	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.115	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Kejaksaan			Jumlah Waktu Pelayanan Kelurahan Kejaksaan	12 bulan	98.445.214	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.116	pemberdayaan masyarakat kelurahan Opas Indah			jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan opas indah	12 bulan	485.728.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.117	pemberdayaan masyarakat kelurahan Gedung Nasional			jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan gedung nasional	12 Bulan	485.728.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.118	pemberdayaan masyarakat kelurahan Batin Tikal			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Batin Tikal	12 Bulan	485.728.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.119	pemberdayaan masyarakat kelurahan Rawa Bangun			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Rawa Bangun	12 Bulan	485.728.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.120	pemberdayaan masyarakat kelurahan Kejaksaan			Jumlah Waktu Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kejaksaan	12 bulan	528.842.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.121	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan kelurahan Opas Indah			Meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan opas indah	12 Bulan	0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.122	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Gedung Nasional					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.123	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Batin Tikal			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Batin Tikal	12 Bulan	0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.124	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Rawa Bangun					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.125	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan kejaksaan					0	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.126	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Opas Indah			meningkatnya sarana dan prasana kelurahan opasa indah	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.127	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Gedung Nasional			meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan gedung nasional	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.128	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Batin Tikal			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Batin Tikal	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
4.01.86.129	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Rawa Bangun			Meningkatakan sarana dan prasarana kelurahan Rawa Bangun	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.130	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan Kejaksaan			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kelurahan Kejaksaan	12 bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Taman Sari
JUMLAH						**6.570.786.070**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**6.570.782.000**	**1.359.286.000**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**6.570.782.000**	**1.359.286.000**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100 %**	**649.361.625**	**0**		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			jumlah waktu pelaksanaan tertib penatausahaan surat menyurat yang tertangani	12 bulan	85.152.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			jumlah waktu layanan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	95.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	212.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			jumlah waktu layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	67.500.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 bulan	20.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			jumlah waktu penyediaan ATK yang tertangani	12 bulan	30.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	21.678.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor	12 bulan	10.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			jumlah waktu layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	21.700.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			jumlah waktu layanan rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	86.331.625	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.19	Pemasangan Baru/Penambahan Daya					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.01.20	Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana Aparatur**	**100 %**	**261.526.375**	**0**		
4.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.10	Pengadaan meubelair					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.02.12	Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.20	Pemeliharaan rutin / berkala rumah jabatan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			jumlah waktu gedung kantor yang dipelihara	1 tahun	52.300.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit	84.226.375	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.42	Rehab sedang /berat Gedung kantor					100.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.66	Pengadaan Website					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.82	Pemeliharan Website			jumlah website perkantoran yang terbangun / terpelihara	6 jenis	25.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.166	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.168	Pengadaan aplikasi					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.02.169	Pembangunan Gedung Kantor			jumlah bangunan yang di bangun	1 paket	0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 %**	**18.000.000**	**0**		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			jumlah pakaian dinas	30 stell	18.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.05.110	Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 %**	**11.360.000**	**0**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			jumlah laporan yang disusun	8 dokumen	2.840.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			jumlah laporan keuangan semesteran	8 dokumen	2.840.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	8 dokumen	2.840.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.06.05	Penyusunan Renja (RKT, RKA dan DPA)			jumlah laporan yang disusun	8 dokumen	2.840.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.06.09	Penyusunan RENSTRA					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.06.36	Penyusunan Laporan Aset					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**1. Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun**	**40 %**	**5.630.534.000**	**1.359.286.000**		
				2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	**40 %**				
				3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	**40 %**				
				4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	**40 %**				
4.01.86.01	Penyusunan Buku Profil Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.02	Lomba Kelurahan					15.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.03	Pembinaan Kelurahan Terbaik					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.05	Pemilihan RT RW					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)			jumlah waktu pelayanan administrasi PATEN	12 bulan	140.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.07	Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.08	Pembinaan PKK			jumlah waktu pelaksanaan kegiatan PKK	12 bulan	110.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.09	Pembinaan UKS			jumlah waktu pelaksaan UKS	12 bulan	8.600.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI			jumlah waktu pelaksanaan KSI	12 bulan	13.980.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan			jumlah waktu pelaksanaan pemberdayaan kapasitas kelembagaan	12 bulan	30.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.12	Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.13	Sosialisasi Forum Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.14	Pelaksanaan Musrenbang			jumlah waktu pelaksanan musrenbang	1 kali	29.994.500	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.15	Pelaksanaan Gotong Royong			jumlah waktu pelaksanaan gotong royong	11 bulan	30.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.16	Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan			jumlah waktu pelaksanaan pelayanan hubungan kemasyarakatan	1 kali	94.690.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.17	Hari Jadi Kota Pangkalpinang			jumlah waktu pelaksanaan hari jadi kota Pangkalpinang	1 kali	45.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.18	Pelaksanaan STQ/MTQ			jumlah waktu pelaksanaan STQ	1 kali	131.957.500	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.19	Pelaksanaan Porkot					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.20	Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum			jumlah waktu pelaksanaan trantibum	11 bulan	14.880.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.22	Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.23	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.131	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasir Garam			jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	141.633.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.132	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Lontong Pancur			jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 bulan	139.056.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.133	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ketapang			jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	124.311.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.134	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Ampui			jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	149.861.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.135	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Rejosari			jumlah waktu pelayanan administrasi kelurahan	12 bulan	118.507.000	118.507.000	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.136	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasir Garam			jumlah waktu kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan	12 bulan	485.653.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.137	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ampui			jumlah waktu kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan	12 bulan	477.425.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.138	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang			jumlah waktu kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan	12 bulan	502.976.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.139	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lontong Pancur			jumlah waktu kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan	12 bulan	488.231.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.140	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rejosari			jumlah waktu kegiatan pemberdayaan kemasyarakatan	12 bulan	508.779.000	508.779.000	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.141	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Garam					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.142	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ampui			jumlah waktu pembangunan saranan dan prasarana kelurahan	1 tahun	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.143	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lontong Pancur			jumlah waktu pembangunan saranan dan prasarana kelurahan	1 tahun	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.144	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang			1. jumlah waktu pembangunan saranan dan prasarana kelurahan	1 tahun	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
				2. terlaksananya pembangunan saranan dan prasarana kelurahan	1 tahun				
4.01.86.145	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rejosari			jumlah waktu pembangunan saranan dan	1 tahun	366.000.000	366.000.000	APBD	Kecamatan Pangkalbalam

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				prasarana kelurahan					
4.01.86.146	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasir garam					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.147	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Lontong Pancur					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.148	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ketapang					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.149	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Ampui					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
4.01.86.150	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Rejosari					0	0	APBD	Kecamatan Pangkalbalam
JUMLAH						6.570.782.000	1.359.286.000		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**					**6.570.785.000**	**0**		
4.01	**Administrasi Pemerintahan**					**6.570.785.000**	**0**		
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**	**100 %**	**754.795.950**	**0**		
4.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	49.999.750	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik	12 Bulan	84.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi			Jumlah waktu administrasi	12 Bulan	367.452.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	keuangan			keuangan					
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	52.498.600	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah waktu penyediaan jasa perbaikan dan perlatan kerja	12 Bulan	25.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah waktu penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	13.804.500	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah waktu belanja cetak dan penggandaan	12 Bulan	20.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah waktu penyediaan alat elektronik dan penerangan kantor	12 Bulan	10.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman pegawai	12 Bulan	20.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah waktu rapat-rapat koordinasi	12 Bulan	112.041.100	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.01.50	Publikasi/Penyebaran informasi melalui media cetak					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**100 persen**	**188.573.500**	**0**		
4.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.09	Pengadaan Peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.10	Pengadaan Meubelair			Jumlah paket pengadaan	4 Jenis	30.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah waktu pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	57.500.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan	76.073.500	0	APBD	Kecamatan Girimaya

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.02.42	Rehab Sedang / Berat Gedung Kantor					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.82	Pemeliharaan website			Jumlah waktu pemeliharaan website	6 Paket	25.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.166	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.02.168	Pengadaan aplikasi					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100 persen**	**36.000.000**	**0**		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah aparatur melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya			Jumlah ASN	30 ASN	21.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.05.95	Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.05.110	Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**100 persen**	**23.498.250**	**0**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah dokumen lakip	1 Laporan	3.500.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	1 Laporan	3.999.950	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan	3.999.950	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06.05	Penyusunan Renja (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah dokumen renja	1 Laporan	3.999.650	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06.09	Penyusunan RENSTRA			Jumlah dokumen renstra	1 Laporan	3.999.800	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah dokumen SPIP	1 Laporan	3.998.900	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.06.36	Penyusunan Laporan Aset					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**1. Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun**	**40 %**	**5.567.917.300**	**0**		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat wakt	40 %				
				3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	40 %				
				4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	40 %				
4.01.86.01	Penyusunan Buku Profil Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.02	Lomba Kelurahan			Jumlah Kelurahan yang mengikuti lomba	5 Kelurahan	10.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.03	Pembinaan Kelurahan Terbaik			Jumlah Kelurahan yang terbina	1 Kelurahan	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan			Jumlah waktu rapat koordinasi lembaga kemasyarakatan	140 Orang	11.860.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.05	Pemilihan RT RW					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)			Jumlah waktu pelayanan PATEN yang diselenggarakan	12 Bulan	19.983.600	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.07	Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan			Tersusunnya dan terlaksananya SOP Pelayanan	2 Jenis	14.999.700	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.08	Pembinaan PKK			Jumlah PKK yang dibina	5 kelurahan	110.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.09	Pembinaan UKS			Jumlah UKS yang dibina	38 UKS	12.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI			Jumlah penurunan angka kematian ibu dan anak	80 Orang	10.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.12	Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.13	Sosialisasi Forum Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.14	Pelaksanaan Musrenbang			Jumlah kehadiran masyarakat yang hadir	150 Orang	25.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.15	Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah masyarakat yang hadir gotong royong	2.000 Orang	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.16	Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan			Jumlah masyarakat yang hadir	4.000 Orang	135.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.17	Hari Jadi Kota Pangkalpinang			Jumlah masyarakat yang hadir	400 Orang	43.350.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.18	Pelaksanaan STQ/MTQ			Jumlah peserta yang mengikuti	300 Orang	149.400.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.19	Pelaksanaan Porkot			Jumlah cabang olahraga yang diikuti	5 cabang	0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.20	Pembinaan Keamanan dan ketertiban umum			Jumlah waktu pembinaan keamanan dan ketertiban umum	12 Bulan	9.990.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.22	Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.23	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan			Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan	2 kali	19.899.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.151	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Batu Intan			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	148.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.152	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Bukit Besar			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	148.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.153	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Semabung Baru			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	148.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.154	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Sriwijaya			Jumlah waktu pelayanan administrasi Kelurahan	12 Bulan	148.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.155	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Padi					148.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.156	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Batu Intan			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	479.287.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.157	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Besar			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	479.287.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.158	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semabung Baru			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	479.287.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.159	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sriwijaya			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	479.287.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.160	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Padi					479.287.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.161	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Intan					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.162	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Besar			Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.163	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semabung Baru			Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.164	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sriwijaya			Jumlah waktu pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.165	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Padi			Jumlah waktu pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 Bulan	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.166	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Batu Intan					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.167	Peningkatan Partisispasi Masyarakat Dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Bukit Besar					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.168	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Semabung Baru					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.169	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Sriwijaya					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
4.01.86.170	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemeliharaan Lingkungan Kelurahan Pasar Padi					0	0	APBD	Kecamatan Girimaya
JUMLAH						6.570.785.000	0		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang					7.564.072.000	443.014.974		
4.01	Administrasi Pemerintahan					7.564.072.000	443.014.974		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**12 bulan**	**937.848.716**	**0**		
4.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	82.948.716	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah layanan jasa administrasi keuangan yang tertangani	12 bulan	553.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah layanan jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 bulan	75.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 bulan	21.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah layanan penyediaan ATK yang tertangani	12 bulan	12.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	12.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah layanan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 bulan	6.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga			Jumlah LayananPenyediaan Peralatan Rumah Tangga Yang Tertangani	12 bulan	2.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan					2.400.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	19.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	12 bulan	150.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				luar daerah yang tertangani					
4.01.02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur**	**12 bulan**	**161.000.000**	**0**		
4.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.02.10	Pengadaan Meubelair					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 paket	60.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	3 unit	66.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.02.82	Pemeliharaan website			Jumlah website yang dipelihara	12 bulan	35.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.02.166	Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik, air					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**			**Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**12 bulan**	**69.000.000**	**0**		
4.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang	45.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.05.85	Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya					24.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.05.110	Fasilitasi Penyuluhan Bahaya Narkoba					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1 dokumen**	**20.000.000**	**0**		
4.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan			Jumlah laporan RENJA	4 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
	DPA)			(RKT,RKA,DPA) yang disusun					
4.01.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 dokumen	4.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86	**Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**			**Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik**		**6.376.223.284**	**443.014.974**		
4.01.86.01	Penyusunan Buku Profil Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.02	Lomba Kelurahan			Keikutsertaan kelurahan dan lomba administrasi	6 kelurahan	5.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.03	Pembinaan Kelurahan Terbaik			Terbinanya kelurahan terbaik	1 kelurahan	7.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.04	Rapat Koordinasi lembaga kemasyarakatan					10.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.06	Penyelenggaraan administrasi pelayanan terpadu (PATEN)			Terlaksananya Pelayanan administrasi terpadu	12 bulan	13.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.07	Penyusunan dan Implementasi SOP Pelayanan			tersusunnya dan terlaksananya SOP pelayanan	4 jenis	0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.08	Pembinaan PKK			umlah kelompok PKK kelurahan yang di bina	6 kelurahan	110.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.09	Pembinaan UKS			jumlah UKS yang dibina	1 kegiatan	5.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.10	Pelaksanaan KSI			terlaksananya KSI	1 kegiatan	7.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.11	Pemberdayaan Kapasitas kelembagaan			jumlah waktu pemberdayaan kapasitas kelembagaan	12 bulan	13.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.12	Pembentukan Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.13	Sosialisasi Forum Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak					10.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.14	Pelaksanaan Musrenbang			jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam musrenbang	100 orang	17.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.15	Pelaksanaan Gotong Royong			Jumlah masyarakat yang ikut gotong royong	24 kali	8.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.16	Peningkatan Pelayanan Hubungan Kemasyarakatan			Terlaksananya pelayanan hubungan masyarakat	1 kegiatan	60.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.17	Hari Jadi Kota Pangkalpinang			Pelaksanaan hari jadi kota Pangkalpinang	1 kegiatan	15.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.18	Pelaksanaan STQ/MTQ			Jumlah peserta STQ/MTQ	120 peserta	120.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.20	Penyuluhan Keamanan dan ketertiban umum			jumlah peserta penyuluhan keamanan dan ketertiban umum	60 orang	8.500.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.21	Pembentukan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.23	Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan					6.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.171	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Satu					145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.172	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Gabek Dua					145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.173	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Selindung Baru					145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.174	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Salemba			Jumlah Layanan Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Air Selemba Yang Tertangani	12 Bulan	145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.175	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Selindung					145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.176	Peningkatan Pelayanan Administrasi Kelurahan Jerambah Gantung			Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	100 %	145.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.177	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gabek Satu					482.287.214	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.178	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gabek Dua					482.287.214	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.179	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selindung Baru					482.287.214	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.180	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Salemba			Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Selemba Yang Tertangani	12 Bulan	482.287.214	443.014.974	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.181	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Selindung					482.287.214	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.182	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jerambah Gantung			Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dengan Baik	100 %	482.287.214	0	APBD	Kecamatan Gabek

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
4.01.86.183	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Gabek Satu					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.184	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Gabek Dua					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.185	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Selindung Baru					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.186	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Air Salemba					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.187	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Selindung					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.188	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam rangka pemeliharaan lingkungan Kelurahan Jerambah Gantung					0	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.189	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabek Satu					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.190	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gabek Dua					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.191	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selindung Baru					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.192	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Salemba			Jumlah Layanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Selemba yang Tertangani	1 Tahun	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.193	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selindung					366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
4.01.86.194	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jerambah Gantung			Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana	100 %	366.000.000	0	APBD	Kecamatan Gabek
JUMLAH						7.564.072.000	443.014.974		

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**					**13.148.467.666**	**18.092.851.938**		
1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat**					**13.148.467.666**	**18.092.851.938**		
1.05.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100%**	**100 %**	**324.995.865**	**407.836.287**		
1.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik			Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tertangani	12 bulan	34.960.000	42.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah layanan jasa administrasikeuangan yang tertangani	12 bulan	34.400.000	34.400.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah layanan jasa kebersihankantor yang tertangani	12 bulan	49.657.000	55.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Jumlah layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani	12 bulan	22.750.000	25.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah layanan ATK yang tertangani	12 bulan	12.950.865	16.456.287	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah layanan penyediaan barangcetakan dan penggandaan yang tertangani	12 bulan	7.550.000	15.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah layanan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani	12 bulan	2.378.000	4.980.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani	12 bulan	15.350.000	20.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luardaerah			Jumlah layanan rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah yang tertangani	12 bulan	100.000.000	150.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.01.19	Penyediaan Jasa Perkantoran			Jumlah layanan jasa perkantoranyang tertangani	12 bulan	45.000.000	45.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	**Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur**			**Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100%**	**100 %**	**504.074.738**	**477.734.738**		
1.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.10	Pengadaan meubelair					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	8 Unit	190.930.000	190.930.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.144	Pengadaan perlengkapan pasukan Dalmas					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.145	Pengadaan Perlengkapan Korps Musik			Tersedianya kelengkapan korps musik	1 set	230.324.738	231.804.738	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.146	Pengadaan perlengkapan Satpol PP			Jumlah rompi senjata tajam	22 stel	34.320.000	35.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.147	Pembangunan dan pengembangan Website/Aplikasi			Jumlah website/aplikasi perkantoran yang tertangani/terpelihara	1 paket	48.500.000	20.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur**			**Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas 100%**	**100 %**	**151.650.000**	**1.360.833.000**		
1.05.05.74	Pelatihan korps musik (korsik)			Jumlah waktu pelatihan korsik	12 bulan	25.200.000	61.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.05.83	Pelatihan dan pengendalian keamanan dankenyamanan lingkungan (DALMAS)					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.85	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Terpenuhinya Pakaian Dinas Harian	100 %	0	470.752.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.87	Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja			Tersedianya Satpol-PP yang mendapatkan Pelatihan dan Pendidikan	100 %	0	476.081.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.89	Monitoring, evaluasi dan pelaporan					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.90	Pendidikan dan Pelatihan Formal			Tersedianya ASN yang mendapatkanpendidikan formal	100 %	0	22.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.91	Pembinaan Kepada PPNS daerah			Tersedianya jumlah Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang Profesional dan Terampil	100 %	0	120.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.92	Pelatihan Dasar SatLinmas			Tersedianya jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih .	100 %	0	84.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.05.94	Pengadaan Pakaian Seragam Linmas Beserta Perlengkapannya			Terwujudnya Kerapihan Dan Keseragaman Dalam Berpakaian	84 Stel	126.450.000	127.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**Persentase jumlah laporan yangterpenuhi 100%**	**100 %**	**17.736.500**	**23.396.500**		
1.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2 Dokumen	2.185.000	2.185.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			Jumlah laporan keuangan semesteran SKPD yang disusun	2 Dokumen	2.189.000	2.189.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD			Jumlah laporan keuangan akhir	1 Dokumen	2.245.000	2.245.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				tahun SKPD yang disusun					
1.05.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)			Jumlah laporan perencanaan jangka pendek yang tersusun	1 Dokumen	2.440.000	2.440.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.09	Penyusunan RENSTRA			Jumlah Laporan RENSTRA Yang Tersusun	1 Dokumen	2.337.500	2.337.500	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.19	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal(SPM)					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.22	Penyusunan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan OPD			Jumlah laporan penyelenggaraanSPIP dilingkungan OPD	1 Dokumen	6.340.000	12.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.27	Forum Perangkat Daerah					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.06.39	Pengelolaan data sektoral perangkat daerah					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34	**Program peningkatan Kesiagaan danPencegahan Bahaya Kebakaran**			**1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota 12 bulan**	**100 %**	**6.718.537.063**	**8.194.696.413**		
				2. persentase kelurahan memiliki kelompok kader siaga kebakaran					
				3. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)					
				4. Jumlah upaya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran					

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)	**13**				
1.05.34.01	Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran			Jumlah kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran pada masyarakat	12 kali	50.000.000	50.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.08	Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran			Jumlah waktu pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	12 bulan	5.729.259.563	5.780.832.413	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.09	Pelaksanaan HUT Pemadam Kebakaran			1. KEGIATAN HUT PEMADAM KEBAKARAN	100 %	41.490.000	58.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
				2. KEGIATAN	100 %				
1.05.34.11	Penyediaan jasa angkut kendaraan hibah pemadamkebakaran			Jumlah kendaraan angkut yangtersedia	1 unit	372.090.000	503.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran			Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang dibeli	15 jenis	195.598.000	200.101.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.13	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (APK)			TIM pemeriksa APK (Alat PemadamKebakaran)	100 %	0	53.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.14	Pelatihan Pemadam Kebakaran Tingkat I			TINGKAT KEMAHIRAN PERSONIL PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	100 %	0	250.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.15	Pengadaan Tondon Air			Jumlah Sumur bor dan menara airyang dibuat	1 unit	101.840.000	103.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.18	Pengadaan Alat pelindung Diri			Jumlah alat pelindung diri kebakaranyang dibeli	5 set	180.755.000	403.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.19	Diklat Penyelamatan (Rescue)			SDM PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN	100 %	0	153.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.34.20	Pembentukan Dan Operasional Sistim KetahananKebakaran			ADANYA SATUAN PELAKSANA KEBAKARAN DARI ANGGOTA MASYARAKAT	100 %	0	288.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.21	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana PencegahanBahaya Kebakaran			Jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang direhab	4 pos jaga	27.302.000	28.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.22	Penilaian Dan Perlombaan Kelaikan Sarana DanPrasarana Kebakaran			PERLOMBAAN	100 %	0	53.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.23	Inspeksi Kebakaran			MEMERIKSA SECARA RUTIN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN	100 %	0	78.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.24	Pendataan Objek Kebakaran			DUNIA USAHA, PERKANTORAN, PABRIK DAN INSTANSI PEMERINTAH	100 %	0	53.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.25	Pameran Kebakaran			KEGIATAN PAMERAN	100 %	0	78.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.34.26	Pelatihan Simulasi Dan Penyuluhan KepadaMasyarakat Dan Relawan Kebakaran			DUNIA USAHA DAN INSTANSI PEMERINTAH	100 %	20.202.500	53.751.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35	**Program Penegakan Perda, Perkada danPemeliharaan Trantibum**			**1. Persentase penegakan perdadan perkada**	**97 %**	**5.431.473.500**	**7.628.355.000**		
				2. meningkatnya penangananpenyidikan terhadap kasus pelanggar perda					
				3. rasio jumlah polisi pamongpraja per 10.000 penduduk					
				4. rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk					
				5. Angka gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani					

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
				6. persentase anggota linmas yang terlatih dalam penanganan gangguan kemanan dan ketertiba					
1.05.35.01	Pemantauan dan pengawasan pelanggaran atasperaturan daerah dan Peraturan kepala daerah			Terlaksananya Pemantauan, Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	100 %	33.542.000	86.682.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.03	Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Tersedianya Jasa Keamanan dan Ketertiban	100 %	3.534.318.500	4.159.423.500	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.04	Pengamanan Aset Kota Pangkalpinang			Tersedianya jasa pengamanan asetkota pangkalpinang	100 %	1.178.002.500	1.623.327.500	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.05	Operasi penyakit masyarakat (pekat)			Terciptanya jasa operasi pekat	100 %	73.922.500	117.622.500	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.06	Kerjasama dengan Aparat keamanan dalam tekhnik pencegahan kejahatan			Terlaksananya kerjasama denganaparatur keamanan	100 %	89.261.000	98.711.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.07	Patroli Kawasan Wilayah Kota Pangkalpinang			Terlaksananya patrol rutin	100 %	112.192.000	158.292.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.08	Operasi Penertiban Pelanggaran PERDA dan Pedagang Kaki Lima (PKL)			Tersedianya jasa Penertiban dan Pelanggaran	100 %	225.626.000	523.092.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.09	Pengamanan / Pengawalan Pemimpin Daerah SertaOrang-orang Penting			Tersedianya Jasa Pengamanan dan Pengawalan	100 %	73.368.000	161.948.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.10	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Keagamaan			terlaksananya Pengamanan hari besar nasional dan ke agamaan	100 %	0	117.169.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.11	Pengamanan dan pengawasan pasar di Pangkalpinang			Terlaksananya pengamanan dan pengawasan pasar secara terpadu	100 %	0	82.979.500	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.12	Inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawanbencana					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI		INDIKATOR KINERJA		RENCANA TAHUN 2021(N)	RENCANA TAHUN 2022 (N + 1)	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH
		LOKASI DETAIL		Hasil Program (Outcome) & Keluaran Kegiatan (Output)					
		Kelurahan	Kecamatan	Indikator	Target				
1.05.35.13	Pembinaan Kepada Kelompok MasyarakatPenyelenggara Keamanan Lingkungan			terwujudnya kelompok masyarakat dalam mengupayakan situasi yangaman dan nyaman	100 %	0	52.500.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.14	Pelaksanaan peringatan HUT Pol PP			Untuk memberi semangat, motivasi, Inspirasi dan Integritas kelembagaan	100 %	91.861.000	91.861.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.15	Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.16	Operasi Yustisi Penegakan Perda dan PeraturanKepala Daerah			Terwujudnya upaya penyelidikan dan penyidikan kepada pelanggarPerda dan Peratuan Kepala Daerah	100 %	0	75.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.17	Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda danPeraturan Kepala Daerah			Terwujudnya upaya penyelidikan dan penyidikan kepada pelanggarPerda dan Peratuan Kepala Daerah	100 %	0	50.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.18	Pembuatan Peraturan Daerah					0	0	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.19	Pengamanan Unjuk Rasa			terlaksananya kerjasama denganaparatur keamanan dalam pencegahan tindak kriminal	100 %	0	58.647.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.20	Operasi Non yustisi Penegakkan Perda dan Perkada					0	75.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.21	Forum Koordinasi Penegakkan Peraturan Daerah			Terlaksananya Koordinasi PenegakanPeraturan Daerah	100 %	0	55.000.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.35.22	Penegakkan Disiplin Aparatur Pol PP dan AparaturPemerintah Kota Pangkalpinang			Menekan Jumlah Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan ASN Dan PHLDi Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	100 %	19.380.000	41.100.000	APBD	Satuan Polisi Pamong Praja
JUMLAH						**13.148.467.666**	**18.092.851.938**		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

6.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau kepemerintahan yang baik

merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan kepemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD PENANGGUNGJAWAB
1.	Persentase pertumbuhan PDRB Sektor:			
	Pariwisata	%	3,7	Dinas Pariwisata
	Perdagangan	%	5,2	Diskopdag dan UKM
	Jasa	%	6,2	Diskopdag dan UKM
2.	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	40	DPMPTSP&Naker
3.	Angka Inflasi	%	5,35	Bappelitbangda/ Diskominfo
4.	Indeks gini	%	0,245	Bappelitbangda/ Diskominfo
5.	TPT	%	4,95	DPMPTSP & Naker

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD PENANGGUNGJAWAB
6.	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	%	41,5	Dinas Sosial
7.	Indeks risiko bencana	Skor	109	BPBD
8.	Persentase Penegakan Perda	%	98	Satpol PP
9.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	Predikat	BB	Bappelitbangda /Setda/Inspektorat
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Bakeuda
11.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	Setda
12.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Nilai	3,3	Diskominfo
13.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	77,6	BKPSDMD
14.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,94	Dindikbud
15.	Harapan lama sekolah	Tahun	12,96	Dindikbud
16.	Usia harapan hidup	Tahun	72,74	Dinas Kesehatan
17.	Rasio Anggaran Responsif *Gender* (ARG)	%	10	Dinas PPPA dan KB
18.	Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA)	%	0,9	Dinas PPPA dan KB
19.	Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	Orang	38.000	Dinas PPPA dan KB
20.	Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator & Pengawas) di lingkup Pemda.	%	40,5	Dinas PPPA dan KB
21.	TFR	Per 1000 perempuan	2,1	Dinas Kesehatan
22.	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	93	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	100	Dindikbud
24.	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	90	Dinas PUPR
25.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	93	Dinas Perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	OPD PENANGGUNGJAWAB
26.	Luasan Areal Kawasan Kumuh	Ha	5	Disperkim
27.	Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	%	97,5	Disperkim
28.	Rasio rumah layak huni	%	91,5	Disperkim
29.	Timbulan sampah yang ditangani / Persentase sampah yang tertangani	%	84	Dinas LH
30.	Indeks kualitas air	%	71,7	Dinas LH
31.	Indeks kualitas udara	%	96,5	Dinas LH

6.1.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pangkalpinang. Penetapan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sebagaimana disajikan Tabel 6.2.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
I.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
A.	***Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi***				
1.	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	Indikator Tujuan	Bappeda/Diskominfo
2.	Pertumbuhan PDRB sektor:				
	- Pariwisata	%	3,7	Indikator Sasaran	Dispar
	- Perdagangan	%	5,2	Indikator Sasaran	Diskopdag
	- Jasa	%	6,2	Indikator Sasaran	Diskopdag
3.	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	40	Indikator Sasaran	DPMPTSP & Naker
4.	Angka Inflasi	%	5,35	Indikator Sasaran	Kota
5.	PDRB Per Kapita	Juta	60,39	Indikator Sasaran	Kota
6.	Indeks Gini	%	0,245	Indikator Sasaran	Kota
7.	IPM	%	77,35	Indikator Tujuan	Kota
B	***Fokus Kesejahteraan Masyarakat***				
1.	Angka kemiskinan	%	4,60	Indikator Tujuan	Dinas Sosial

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,94	Indikator Sasaran	Dinas Dikbud
2.	Harapan lama sekolah	tahun	12,96	Indikator Sasaran	Dinas Dikbud
3.	Usia harapan hidup	tahun	72,74	Indikator Sasaran	Dinas Kesehatan
4.	Rasio Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	8,30	Indikator Sasaran	Dinas PPPA dan KB
5.	Rasio Anggaran Responsif Hak Anak (ARA)	%	0,9	Indikator Sasaran	Dinas PPPA dan KB
6.	Jumlah perempuan sebagai professional, teknisi dan manajerial (Non Pemerintah)	orang	38.000	Indikator Sasaran	Dinas PPPA dan KB
7.	Rasio Perempuan yang duduk dalam jabatan struktural (JPT, Administrator & Pengawas) di lingkup Pemda.	%	40,5	Indikator Sasaran	Dinas PPPA dan KB
8.	TFR	%	1,95	Indikator Sasaran	Dinas Kesehatan
9.	TPT	%	4,95	Indikator Sasaran	Dinas PMPTSP dan Naker
10.	Persentase penduduk miskin yang mendapatkan perlindungan sosial	%	41,5	Indikator Sasaran	Dinas Sosial
11.	Indeks risiko bencana	skor	109	Indikator Sasaran	BPBD
12.	Persentase Penegakan Perda	%	98	Indikator Sasaran	Satpol PP
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai-AKIP)	Predikat	BB	Indikator Sasaran	Bappelitbangda /Setda/Inspektorat
14.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	Indikator Sasaran	Bakeuda
15.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	Indikator Sasaran	Setda
16.	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Nilai	3,30	Indikator Sasaran	Dinas Kominfo

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
17	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	77,60	Indikator Sasaran	BPSDMD
C.	***Fokus Seni Budaya dan Olahraga***				
1.	Kebudayaan				
1.1	Persentase Pelestarian Budaya Tangible dan Intangible	%	100	Indikator Tujuan	Dinas Dikbud
1.2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	%	100	Indikator Sasaran	Dinas Dikbud
2.	Pemuda dan Olah raga				
2.1	Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	%	4,50	Indikator Tujuan	Dinas Pemuda dan Olahraga
2.2	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	93	Indikator Sasaran	Dinas Pemuda dan Olahraga
II	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
D.	***Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar***				
1.	**Pendidikan**				
1.1	APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	60,18	Indikator Program	Dindikbud
1.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	%	100	Indikator Program	Dindikbud
1.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan	%	1,9	Indikator Program	Dindikbud

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.4	Persentase Sarana prasarana PAUD dalam kondisi baik	%	80	Indikator Program	Dindikbud
1.5	Persentase Sarana Prasarana SD dalam kondisi baik	%	89	Indikator Program	Dindikbud
1.6	Persentase Sarana Prasarana SMP dalam kondisi baik	%	74	Indikator Program	Dindikbud
1.7	Persentase satuan PAUD dan PNF yang terakreditasi A	%	14,91	Indikator Program	Dindikbud
1.8	Persentase satuan DIKDAS yang terakreditasi A	%	60	Indikator Program	Dindikbud
1.9	Persentase sekolah hijau minimal tingkat provinsi	%	10	Indikator Program	Dindikbud
1.10	Angka Putus Sekolah (APS) SD	%	0,02	Indikator Program	Dindikbud
1.11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP	%	0,17	Indikator Program	Dindikbud
1.12	Angka Kelulusan SD	%	100	Indikator Program	Dindikbud
1.13	Angka Kelulusan SMP	%	100	Indikator Program	Dindikbud
1.14	Angka melanjutkan Siswa SD	%	100	Indikator Program	Dindikbud
1.15	Angka melanjutkan Siswa SMP	%	100	Indikator Program	Dindikbud
1.16	Persentase Capaian SPM Pendidikan	%	100	Indikator Program	Dindikbud
1.17	Persentase guru PAUD,PNF yang berkualifikasi S1/DIV	%	40,85	Indikator Program	Dindikbud
1.18	Persentase guru PAUD,PNF yang bersertifikat pendidik	%	26,3	Indikator Program	Dindikbud
1.19	Persentase guru DIKDAS yang berkualifikasi S1/DIV	%	94,88	Indikator Program	Dindikbud
1.20	Persentase guru DIKDAS yang bersertifikat pendidik	%	49,48	Indikator Program	Dindikbud

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.21	Persentase hasil uji kompetensi guru PAUD nilai di atas 70	%	25,95	Indikator Program	Dindikbud
1.22	Persentase hasil uji guru kompetensi guru DIKDAS di atas 70	%	16,32	Indikator Program	Dindikbud
1.23	Persentase cagar budaya yang teregistrasi secara nasional	%	14	Indikator Program	Dindikbud
1.24	Persentase seni budaya yang dilestarikan	%	10	Indikator Program	Dindikbud
1.25	Persentase pengelolaan dan pelaporan dana BOS/BOP	%	100	Indikator Program	Dindikbud
2.	**Kesehatan**				
2.1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	40	Indikator Program	Dinkes
2.2	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 Kelahiran Hidup	4	Indikator Program	Dinkes
2.3	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	6	Indikator Program	Dinkes
2.4	Prevalensi gizi buruk	%	<15	Indikator Program	Dinkes
2.5	Prevalensi TB per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	115	Indikator Program	Dinkes
2.6	Prevalensi stunting pada balita	%	<20	Indikator Program	Dinkes

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
2.7	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada balita	%	<13	Indikator Program	Dinkes
2.8	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.9	Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.10	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.11	Persentase pelayanan kesehatan balita	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.12	Cakupan Kunjungan bayi	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.13	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.14	Cakupan kelurahan siaga aktif	%	80	Indikator Program	Dinkes
2.15	Persentase TPM yang memenuhi persyaratan	%	92	Indikator Program	Dinkes
2.16	Persentase TTU yang memenuhi persyaratan	%	82	Indikator Program	Dinkes
2.17	Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	%	62	Indikator Program	Dinkes
2.18	Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.19	Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	Per 100.000 penduduk	48	Indikator Program	Dinkes
2.20	Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	<1	Indikator Program	Dinkes
2.21	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	100	Indikator Program	Dinkes

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
2.22	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.23	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.24	Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	%	23	Indikator Program	Dinkes
2.25	Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	%	42,7	Indikator Program	Dinkes
2.26	Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan *skring* kesehatan sesuai standar	%	23.5	Indikator Program	Dinkes
2.27	Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi <24 jam	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.28	Persentas kelurahan *universal child immunization* (UCI)	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.29	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	%	95	Indikator Program	Dinkes
2.30	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas	%	32	Indikator Program	Dinkes
2.31	Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.32	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	100	Indikator Program	Dinkes
2.33	Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	%	80	Indikator Program	Dinkes
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
3.1	Persentase Jalan Kota Kondisi Baik	%	57,5	Indikator Program	DPUPR
3.2	Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	%	85	Indikator Program	DPUPR
3.3	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	%	90	Indikator Program	DPUPR

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
3.4	Luas wilayah tergenang >2 kali setahun	%	20	Indikator Program	DPUPR
3.5	Persentase luas RTH Publik	%	14	Indikator Program	DPUPR
3.6	Persentase kesesuaian pemanfataan ruang dengan rencana tata ruang	%	84	Indikator Program	DPUPR
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
4.1	Luas Areal Kawasan Kumuh	Ha	5	Indikator Program	Disperkim
4.2	Persentase Rumah tinggal berakses sanitasi	%	97,5	Indikator Program	Disperkim
4.3	Rasio Rumah Layak Huni	%	91,5	Indikator Program	Disperkim
5	**Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
5.1	Persentase Penegakan PERDA	%	98	Indikator Program	Satpol PP
5.2	Tingkat waktu tanggap *(response time rate)* daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	13	Indikator Program	Satpol PP
5.3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	%	100	Indikator Program	Satpol PP
5.4	Cakupan penanganan bencana	%	100	Indikator Program	BPBD
5.5	Indeks Kapasitas		sedang	Indikator Program	BPBD

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
6	**Sosial**				
6.1	Jumlah PKMS yang terdata dalam BDT	Orang	13.000	Indikator Program	Dinsos
6.2	Persentase Penyandang disabilitas terlantar,Anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.	%	55	Indikator Program	Dinsos
6.3	Persentase keluarga fakir miskin yang mendapat bantuan KUBE	%	15,02	Indikator Program	Dinsos
6.4	Persentase korban bencana mendapatkan bantuan tanggap darurat	%	100	Indikator Program	Dinsos
E.	***Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar***				
1.	**Urusan Tenaga Kerja**				
1.1	TPAK	%	70	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
1.2	TPAK Perempuan	%	40,5	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
1.3	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	70	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
1.4	Angka Sengketa Pengusaha dan Pekerja	Kasus	52	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
1.5	Rasio penduduk yang bekerja	%	70	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
1.6	Upah rata-rata per jam pekerja.	Ribu	18.000	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
1.7	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	76	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**				

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
2.1	Persentase perempuan di legislatif	%	16,67	Indikator Program	Dinsos PPA
2.2	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	%	92,86	Indikator Program	Dinsos PPA
2.3	Status KLA yang dicapai	Status	Ninda	Indikator Program	Dinsos PPA
3.	**Urusan Pangan**				
3.1	Skor PPH	%	90	Indikator Program	Dispaper
3.2	Ketersediaan pangan utama	Ton	97.000	Indikator Program	Dispaper
3.3	Ketersediaan protein per kapita	gr/kapita/ hari	63	Indikator Program	Dispaper
3.4	Jumlah cadangan pangan	Ton	15	Indikator Program	Dispaper
4.	**Urusan Pertanahan**				
4.1	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	Indikator Program	DPUPR
4.2	Persentase tanah milik Pemkot yang bersertifikat	%	80	Indikator Program	DPUPR
5.	**Urusan Lingkungan Hidup**			Indikator Program	
5.1	Persentase sampah yang tertangani	%	84	Indikator Program	DLH
5.2	Persentase sampah terangkut ke TPA	%	70	Indikator Program	DLH

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
5.3	Indeks Kualitas LH	Indeks	78	Indikator Program	DLH
5.4	Indeks Kualitas Air	Indeks	71,7	Indikator Program	DLH
5.5	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,5	Indikator Program	DLH
5.6	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	0,4	Indikator Program	DLH
5.7	Persentase sampah terkelola dengan metoda 3R	%	17	Indikator Program	DLH
5.8	Persentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan	%	31	Indikator Program	DLH
6.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				
6.1	Cakupan kepemilikan KTP	%	99,3	Indikator Program	Disdukcapil
6.2	Cakupan Kepemilikan KK	%	100	Indikator Program	Disdukcapil
6.3	Rasion Bayi Berakte kelahiran per 1000 penduduk	Rasio	870	Indikator Program	Disdukcapil
6.4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	%	84	Indikator Program	Disdukcapil
6.5	Rasio Penduduk ber KTP persatuan penduduk	Rasio	1.047	Indikator Program	Disdukcapil
6.6	Rasio Perkawinan yang tercatat di Capil per 1000 penduduk	Rasio	750	Indikator Program	Disdukcapil
7.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	Indikator Program	Setda/kecamatan

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
7.2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	%	80	Indikator Program	Setda/kecamatan
7.3	Persentase sarana prasarana publik yang terbangun	%	95	Indikator Program	Setda/kecamatan
8.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	3,15	Indikator Program	Dinas PPPA dan KB
8.2	*Contraceptive Prevalence Rate Modern*	%	64,27	Indikator Program	Dinas PPPA dan KB
9.	**Urusan Perhubungan**				
9.1	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	93	Indikator Program	Dishub
9.2	Persentase Layanan angkutan darat	%	90	Indikator Program	Dishub
10.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
10.1	Indeks Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	%	8,7	Indikator Program	Diskominfo
10.2	Persentase OPD yang aktif dan *update* websitenya	%	100	Indikator Program	Diskominfo
10.3	Persentase PPID Aktif	%	100	Indikator Program	Diskominfo
11.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
11.1	Persentase Koperasi Aktif	%	40	Indikator Program	Diskopdag
11.2	Persentase Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	4	Indikator Program	Diskopdag
11.3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	36	Indikator Program	Diskopdag
12.	**Urusan Penanaman Modal**				
12.1	Persentase realisasi investasi	Investor	70	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
12.2	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perijinan	Skor	94	Indikator Program	DPMPTSP & Naker
13.	**Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**				
13.1	Rasio Prestasi Pemuda di tingkat Provinsi dan Nasional terhadap ajang yang diikuti	%	96	Indikator Program	Dinas Pemuda dan Olahraga
13.2	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	94	Indikator Program	Dinas Pemuda dan Olahraga
14.	**Urusan Statistik**				
14.1	Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistic sektoral	%	100	Indikator Program	Diskominfo
14.2	Buku Kota pangkalpinang dalam Angka	Ada/tidak	Ada	Indikator Program	Diskominfo
14.3	Buku PDRB Kota Pangkalpinang	Ada/tidak	Ada	Indikator Program	Diskominfo

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
15.	**Urusan Persandian**				
15.1	Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar-OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	%	85	Indikator Program	Diskominfo
16.	**Urusan Kebudayaan**				
16.1	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	100	Indikator Program	Dindikbud
16.2	Cakupan Fasilitasi Seni	%	100	Indikator Program	Dindikbud
17.	**Urusan Perpustakaan**				
17.1	Tingkat pertumbuhan pengunjung perpustakaan	%	0,64	Indikator Program	DPK
17.2	Rasio judul buku terhadap koleksi buku yang tersedia di perpustakaan	Rasio	1:02	Indikator Program	DPK
17.3	Persentase pustakawan dan tenaga pengelola perpustakaan yang memiliki kompetensi	%	14	Indikator Program	DPK
18.	**Urusan Kearsipan**				
18.1	Persentase arsip statis dan dinamis yang dikelola	%	5,2	Indikator Program	DPK
F	***Urusan Pilihan***				
1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	937.285	Indikator Program	Dispaper
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.276	Indikator Program	Dispaper
1.3	Angka Konsumsi Ikan Masyarakat	kg/kapita/ tahun	53,24	Indikator Program	Dispaper
2.	**Urusan Pariwisata**				
2.1	Tingkat Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	3	Indikator Program	Dispar
2.2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	%	2	Indikator Program	Dispar
3.	**Urusan Pertanian dan Peternakan**				
3.1	Jumlah produksi Jagung	Ton	61	Indikator Program	Dispaper
3.2	Jumlah produksi Nanas	Ton	2.300	Indikator Program	Dispaper
3.3	Jumlah Produksi Daging	Ton	5.331	Indikator Program	Dispaper
3.4	Jumlah Produksi Telur	Ton	140,28	Indikator Program	Dispaper
3.5	Jumlah produksi ternak	Ekor	77.708	Indikator Program	Dispaper
4.	**Urusan Perdagangan**				
4.1	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB	%	38,6	Indikator Program	Diskopdag UKM

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
4.2	Perkembangan nilai Ekspor	%	3,5	Indikator Program	Diskopdag UKM
4.3	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah	Ada	Ada	Indikator Program	Diskopdag UKM
4.4	Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%	94	Indikator Program	Diskopdag UKM
5.	**Urusan Perindustrian**				
5.1	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	10	Indikator Program	Diskopdag UKM
5.2	Kontribusi sektor Perindustrian dalam PDRB	%	12	Indikator Program	Diskopdag UKM
G	**Urusan Penunjang**				
1.	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**				
1.1	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	80	Indikator Program	Bappelitbangda
1.2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%	30	Indikator Program	Bappelitbangda
2.	**Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**				
2.1	Persentase program RKPD yang sesuai dengan Program RPJMD	%	98,5	Indikator Program	Bappelitbangda
2.2	Presentase kesesuaian kegiatan RKPD dengan APBD	%	98	Indikator Program	Bappelitbangda

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
2.3	Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	%	46	Indikator Program	Bappelitbangda
3.	**Urusan Keuangan Daerah**				
3.1	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	%	26	Indikator Program	Bakeuda
3.2	Pertumbuhan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	%	2	Indikator Program	Bakeuda
3.3	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	%	87	Indikator Program	Bakeuda
4.	**Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**				
4.1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	67,62	Indikator Program	BKPSDMD
4.2	Indeks Reformasi Birokrasi sub komponen penataan sistem manajemen SDM	Nilai	63,5	Indikator Program	BKPSDMD
4.3	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	90	Indikator Program	BKPSDMD
4.4	Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	%	80	Indikator Program	BKPSDMD
5.	**Sekretariat Daerah**				
5.1	Persentase OPD yang mendapatkan nilai Baik dalam *Survey* Kepuasan Masyarakat	%	86	Indikator Program	Setda

	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
6.	**Sekretariat DPRD**				
6.1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Nilai	81	Indikator Program	Setwan
6.2	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Indikator Program	Setwan
6.3	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ya/tidak	Ya	Indikator Program	Setwan
6.4	Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ya/tidak	Ya	Indikator Program	Setwan
7.	**Pengawasan**				
7.1	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Pangkalpinang dengan Nilai BB	Nilai	BB	Indikator Program	Inspektorat
7.2	Tingkat Maturitas SPIP pada Level III	Level	III	Indikator Program	Inspektorat
7.3	Tingkat Kapabilitas APIP pada Level III	Level	III	Indikator Program	Inspektorat

BAB VII
PENUTUP

Setelah adanya Covid 19, maka tema pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 pun berubah yang semula **Mewujudkan Pangkalpinang sebagai kota yang NYAMAN melalui efektifitas pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Daerah"** menjadi **"Mempercepat pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur berbasis ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar"** dengan prioritas pada Peningkatan pembangunan infrastruktur publik serta optimalisasi penataan ruang daerah, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Sumber Daya Daerah, Peningkatan Iklim Investasi, Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Perlindungan Sosial Kemasyarakatan, serta Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pengarusutamaan Gender.

Rencana Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan pedoman bagi perangkat daerah Kota Pangkalpinang dalam menyusun rencana program dan kegiatan serta bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pangkalpinang dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan di Kota Pangkalpinang dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dalam menjawab tantangan dan permasalahan khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial akibat dampak Covid 19 tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintah, namun sangat membutuhkan dukungan masyarakat untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, oleh karena itu upaya mendorong partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

.

WALIKOTA PANGKALPINANG



H. MAULAN AKLIL



bappelitbangda.pangkalpinangkota.go.id